



Belajar dari Kompleksitas

PANDEMI COVID-19



Belajar dari Kompleksitas

PANDEMI COVID-19

Penulis:

Rilus A. Kinseng | Yulia Sugandi | Suria Tarigan
Damayanti Buchori | Eka Satya Putra | David Ardhan
Keppi Sukes | Mofit Jamroni | Tyas Retno Wulan | Syarif Hidayat
Harianto | Djuara P. Lubis | Laksmi A. Savitri
Teuku Fajar Shadiq | Ruth Indiah Rahayu | Akbar A Digdo



Penerbit IPB Press

Jalan Taman Kencana No. 3,
Kota Bogor - Indonesia

C.01/09.2022

Judul Buku:

Belajar dari Kompleksitas Pandemi COVID-19

Penulis:

Rilus A. Kinseng | Yulia Sugandi | Suria Tarigan
Damayanti Buchori | Eka Satya Putra | David Ardhian
Keppi Sukesi | Mofit Jamroni | Tyas Retno Wulan | Syarif Hidayat
Harianto | Djuara P. Lubis | Laksmi A. Savitri
Teuku Fajar Shadiq | Ruth Indiah Rahayu | Akbar A Digdo

Editor:

Soeryo Adiwibowo
Damayanti Buchori
Rilus A. Kinseng
Atika Mayang Sari

Desain Sampul & Penata Isi:

Lieviane Anastasya
Makhhub Khoirul Fahmi

Jumlah Halaman:

278 + 20 hal romawi

Edisi/Cetakan:

Cetakan 1, September 2022

PT Penerbit IPB Press

Anggota IKAPI
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com
www.ipbpress.com

ISBN: 978-623-467-322-7

Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia
Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2022, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan dampak yang serius pada sendi-sendi kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 telah memaksa manusia untuk mengatur ulang aktivitas hariannya tanpa peduli usia, gender, kelas, etnis, dari tingkat lokal, nasional, hingga global. Penerapan *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar pada satu sisi mendorong ramainya aktivitas secara virtual, namun pada sisi lain meredupkan aktivitas perekonomian khususnya pada kelompok sosial lemah. Oleh karena itu, dampak serius dari COVID-19 beberapa di antaranya adalah maraknya pemutusan hubungan kerja terhadap buruh, meningkatnya angka kemiskinan, kerentanan/krisis pangan, hingga potensi krisis ekonomi.

Sejumlah intervensi kebijakan, preventif dan preemptif, telah dibuat untuk merespons dan mengurangi dampak jangka pendek/menengah yang ditimbulkan COVID-19. Bantuan uang tunai dan peningkatan kapasitas dijalankan oleh pemerintah. Gerakan akar rumput pun muncul untuk merespons kehidupan yang berubah. Komunitas bermunculan secara sukarela dan sporadis, terutama untuk penyediaan pangan menghadapi kerentanan pangan yang banyak dialami oleh kelompok-kelompok sosial lemah dan marginal. Kompleksitas antara pembuatan kebijakan, reaksi dan inisiasi masyarakat, dampak-dampak pandemi yang tidak langsung terasa atau terlihat menjadi salah satu pijakan dari Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (PKSKT)/*Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences* (CTSS)–IPB University dalam menyusun buku bunga rampai tentang COVID-19. Buku bunga rampai ini merupakan karya tulis yang diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemikiran yang dapat memberikan pencerahan bagi semua pihak.

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufik, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul Belajar dari Kompleksitas Pandemi

COVID-19. Penulisan Buku Bunga Rampai tentang COVID-19 ini bertujuan untuk: melahirkan pandangan dan pemikiran dari pelbagai perspektif dan aliran pemikiran untuk menemukenali kompleksitas masalah seputar kemunculan, penyebaran dan dampak COVID-19 dan berkontribusi dalam pemetaan pandangan dan pemikiran sebagai dasar dan pertimbangan untuk digunakan dalam pencarian solusi masalah.

Buku Bunga Rampai ini diberi judul berjudul “Belajar dari Kompleksitas Pandemi COVID-19”. Isi buku ini diangkat dari kegiatan seri diskusi CTSS yaitu “*Graduate Student Sustainability Seminar*” (GSSS). Narasumber dari seri diskusi ini diminta secara sukarela memberikan gagasan, pandangan dan pemikiran dalam bentuk karya tulis. Selain itu, ada beberapa tulisan yang tidak didiskusikan pada GSSS tersebut, yang sengaja diminta kepada para penulisnya untuk dimuat dalam buku bunga rampai ini.

Secara garis besar buku ini membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 dilihat dari prespektif transdisipin, resiliensi masyarakat di pedesaan dalam menghadapi Pandemi COVID-19, perjuangan para pekerja migran pada masa pandemi COVID-19, unsur politik yang mewarnai pandemi COVID-19, bagaimana paradoks sistem pangan pada masa COVID-19, sebuah catatan perjalanan kala Pandemi COVID-19 dari Kepulauan Sunda Kecil, Kawasan Wallacea, serta ajakan untuk me-redesain sistem ekonomi neoliberal dengan sistem ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusatnya, bukan profit.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan pengalamannya yang diberikan melalui buku ini. Buku ini tentu mempunyai kekurangan dan kelemahan; karena itu saran dan masukan akan kami terima dengan senang hati.

Bogor, Oktober 2021

Prof. Damayanti Buchori, M.Sc
Head of CTSS

PENGANTAR EDITOR

Soeryo Adiwibowo, Damayanti Buchori, Rilus A Kinseng

Buku ini mengungkapkan fakta-fakta dampak pandemi COVID-19 yang dialami Indonesia. Spektrum yang diungkap amat luas. Membentang dari sektor pertanian, pedesaan, sistem pangan, ekonomi politik pertanian, pekerja migran Indonesia; hingga persoalan mewabahnya infodemi, terungkapnya kerapuhan masyarakat modern, dan pentingnya kehadiran pendekatan transdisiplin. Ada beberapa hal signifikan yang bisa kita angkat dari buku ini.

Pertama, berbagai artikel yang dimuat dalam buku ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tak ada satu pun di dunia ini yang independen, alias semua saling terkait dan saling tergantung dengan semua. Konsep keterkaitan dan ketergantungan ini sudah banyak diketahui di dunia kampus dan lembaga-lembaga penelitian. Fisika kuantum dan ekologi –sebagai contoh– telah lama mengungkap adanya sifat interrelasi dan interdependensi. Namun bagi orang awam tidak terbayangkan sebelumnya virus yang ukurannya sekitar 400–500 mikron bisa mengguncang dan membuat kolaps tatanan kehidupan manusia modern.

Baru-baru ini biolog terkemuka Rob Dunn menerbitkan bukunya yang berjudul *A Natural History of the Future: What the Laws of Biology Tell Us About the Destiny of the Human Species* (2021). Menurut Dunn, untuk memenuhi kebutuhan pangan, manusia paling mahir menyulap lanskap alam menjadi ladang gandum, padi, jagung, kentang, tebu, dan lain sebagainya. Lebih dari separuh produksi primer bersih (*net primary production*) yang dihasilkan dari proses fotosintesis di bumi, dikonsumsi oleh manusia. Namun, sebagai korbannya, manusia mengubah dan merusak habitat yang selama ribuan tahun telah menjadi rumah bagi aneka jenis burung, tanaman asli lokal, mamalia, kupu-kupu, lebah, dan berbagai wujud kehidupan lainnya. Yang

menarik, selain beberapa jenis lokal dieksklusi, di ladang-ladang pertanian ternyata juga berlangsung proses inklusi. Ratusan, mungkin ribuan, spesies hama dan parasit yang tidak hidup di tempat lain dijumpai di areal pertanian. Bahkan -estimasi Dunn- lebih banyak spesies baru yang berevolusi di ladang-ladang pertanian ketimbang di Pulau Galapagos!

Dua dekade silam, Stephen Luby -epidemiolog dari Universitas Stanford- menemukan virus di India Selatan. Virus ini tak banyak diketahui dan diberi identitas sebagai virus *nipah*. Dalam website *Stanford University*, Lubby memprediksi virus ini berpotensi besar menjadi penyebab pandemi global mendatang.¹ Inang atau *host* virus *nipah* ini adalah kelelawar Pteropus. Habitat kelelawar ini adalah hutan tropis dengan *nipah* sebagai relung ekologi (niche). Virus dari kelelawar pindah ke manusia melalui air nira yang terkandung dalam *nipah*. Air nira segar dari *nipah* ini dikonsumsi oleh kelelawar dengan cara dijilat dan diisap. Nira yang telah diisap/dijilat kelelawar beberapa di antaranya terkontaminasi virus. Namun nira juga disadap dan dikonsumsi oleh warga. Virus kemudian menyebar cepat dari individu ke individu yang lain. Menurut Lubby, penyakit zoonosis ini membunuh hampir tiga perempat dari mereka yang terinfeksi. Sejauh ini di India Selatan tercatat 11 orang meninggal dan 14 orang lainnya positif terinfeksi. Sampai saat ini belum ada vaksin dan upaya pengobatan. Kini Luby tengah meneliti pengaruh perubahan temperatur dengan penyebaran virus dari kelelawar ke manusia. Perubahan temperatur ini erat berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan tropis yang menjadi habitat kelelawar Pteropus.

Dua fakta ilmiah yang telah diutarakan menunjukkan bahwa tak ada unsur-unsur material di dunia ini baik yang bersifat hidup maupun tak hidup yang independen. Pandemi COVID-19 merupakan contoh konkret tentang kompleksitas dan saling terkaitnya satu aspek dengan aspek yang lain. COVID-19 tidak hanya menyangkut isu kesehatan, melainkan berbagai isu lain seperti sosial, ekonomi, lingkungan, politik, agama, budaya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, cara pandang sistem dan pendekatan transdisiplin menjadi esensial digunakan untuk mengupas dan merespons fenomena pandemi

¹ <https://earth.stanford.edu/news/nipah-little-known-virus-could-become-next-global-pandemic#gs.jv8g9f>

COVID-19. Artikel Yulia Sugandi, Eka Satya Putra, dan Suria Tarigan dalam buku ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya pendekatan transdisiplin dalam penanganan pandemi COVID-19 ini.

Hal kedua yang bisa kita tarik dari buku ini: pandemi COVID-19 sejatinya merupakan puncak krisis etika lingkungan. Peradaban modern telah membawa kita bias pada etika antroposentrik ketimbang ekosentrik. Walau krisis lingkungan global telah disadari sejak dekade 1980-an, namun jiwa antroposentrik yang berkelindan erat dengan gaya hidup konsumtif telah menjadi pendorong degradasi hutan dan keanekaragaman hayati, perubahan bentang alam, perubahan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim global.

Kaum antroposentrik meyakini betul bahwa perubahan lingkungan yang merupakan penyebab munculnya penyakit zoonosis SARS, MERS, dan COVID-19, bisa diatasi dengan sains dan teknologi dengan catatan, sistem ekonomi kapitalistik dan etika antroposentrik *ceteris paribus* alias tetap.

Saat ini ekonomi sirkuler, energi bersih, nilai ekonomi karbon, teknologi ramah lingkungan, dan pembangunan rendah emisi tengah naik daun. Pertanyaannya kemudian: apakah ini berarti etika antroposentrik mulai bergeser ke ekosentrik? Apakah konsumsi global menunjukkan tanda-tanda penurunan? Bila tidak, lantas apa hal-hal fundamental yang dapat mengendalikan konsumsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi? Kalau hal ini tidak mampu dilakukan, maka besar kemungkinan penyakit zoonosis global akan berulang kembali dalam interval waktu yang lebih singkat, sebagaimana yang ditengarai oleh Stephen Luby.

Tesis saya, pandemi COVID-19 timbul sebagai akumulasi dari berbagai perubahan lingkungan global dan lokal. Sehingga menghapus COVID-19 dari bumi mustahil dilakukan tanpa menurunkan atau mengendalikan degradasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, perubahan lanskap alam, pencemaran, dan degradasi sumber daya air. Atau dengan kata lain, mengatasi pandemi COVID-19 dengan vaksin hanya menyelesaikan masalah pada taraf *symptom*, bukan pada akar persoalan.

Hal ketiga, pandemi COVID-19 ternyata tak hanya cerita sedih. Di masa pandemi kita mempunyai momen yang amat bernilai: menguji relevansi dan keandalan konsep ketahanan pangan yang diusung dan disebarluaskan oleh berbagai lembaga internasional (antara lain FAO, IFPRI); dan diadopsi oleh korporasi internasional yang bergerak di bidang pangan. Di masa pandemi, empat pilar konsep ketahanan pangan, yang meliputi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas ternyata tak berdaya. Krisis pangan tahun 2008 dan 2011 yang mendorong negara-negara eksportir pangan menutup keran ekspor (pangan hanya untuk kebutuhan domestik); kembali berulang di masa pandemi COVID-19. Artikel Hariyanto dalam buku ini mengungkapkan bahwa di masa pandemi atau krisis, masing-masing negara pada dasarnya mementingkan dirinya sendiri, baik untuk memenuhi kebutuhan vaksin maupun kebutuhan pangan. Menyandarkan ketahanan pangan pada sumber pasokan dari impor membawa risiko besar. Negara-negara sumber produksi pangan akan menjual pangannya ke pasar internasional setelah memastikan kebutuhan domestiknya aman terlindungi. Kritik serupa dialamatkan pula oleh Laksmi Savitri yang secara khusus menyorot kelemahan model ketahanan pangan yang dimotori oleh korporasi agribisnis pangan nasional dan transnasional, tanpa memeriksa dengan kritis implikasinya terhadap kelompok rentan.

Pandemi COVID-19 menyadarkan kita pula bahwa desa tak bisa lagi dianggap sebagai komunitas pinggiran. Dua artikel tentang resiliensi desa yang masing-masing ditulis oleh David Ardhian, dan Keppi Suksesih beserta Mofit Jamroni mengungkapkan betapa desa telah menjadi penyelamat di saat krisis. Di saat pandemi kemampuan desa untuk memasok kebutuhan pangan tak surut sehingga hampir tidak ada kasus kekurangan pangan. Bahkan sektor pertanian pedesaan mampu menampung perpindahan tenaga kerja yang terlempar dari sektor non-pertanian kota. Desa justru menyokong kebutuhan pangan warga kota ketika impor pangan mandek di masa pandemi. Di sini kita melihat konsepsi kedaulatan pangan yang ditopang oleh kearifan lokal dapat menjadikan desa lebih tangguh, lebih liat, dan lebih resilien ketimbang konsepsi ketahanan pangan yang diusung oleh lembaga-lembaga internasional dan korporasi pangan internasional.

Saat pandemi COVID-19 menyapu ke seluruh dunia, dapat dikatakan tak ada negara di dunia yang siap menghadapi wabah ini. Tesis bahwa negara dengan akses kesehatan yang baik, mutu pendidikan dan disiplin penduduk yang tinggi, fasilitas kesehatan dan tenaga medik yang lebih baik, serta vaksin COVID-19 yang lebih tersedia akan lebih mampu dan siap mengendalikan transmisi COVID-19 ternyata tidak berlaku dan tak siap menghadapi pandemi COVID-19. Amerika Serikat, Italia, dan Belanda merupakan contoh tentang hal ini. Gelombang pertama pandemi COVID-19 di Indonesia memberi pelajaran penting bahwa penanganan COVID-19 tidak bisa bersifat “*one policy fits for all regions*”. Gubernur, Bupati dan Walikota hingga batas-batas tertentu perlu memiliki kewenangan untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah (artikel Syarif Hidayat).

Hal keempat, bentang pengaruh COVID-19 menjadi semakin kompleks manakala pandemi berada dalam ruang kehidupan yang riuh dengan masalah ketimpangan ekonomi, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketidaksetaraan relasi kuasa. Maka menarik untuk melihat proses-proses sosial yang terjadi ketika ujung dari COVID-19 adalah pertarungan hidup atau mati. Masih terpendam dalam ingatan kita betapa perawat yang bertaruh nyawa dengan pasien COVID-19 diusir keluar dari pondokannya oleh pemilik rumah, atau Ketua RT. Berbagai perubahan sosial yang mendasar sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dibahas secara singkat dalam artikel Rilus Kinseng dalam buku ini. Dalam skala global, alih-alih bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19 negara-negara kaya malah enggan berbagi vaksin COVID-19 kepada negara-negara miskin. Seperti kata Kinseng, COVID-19 membuka tabir “*the dark side of the human beings*”.

Saat puncak pandemi, individu dan keluarga diisolasi dari lingkungannya. Satu-satunya yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi aktif dengan dunia luar adalah melalui telepon genggam di tangan. Dalam telepon genggam ini mengalir dua arus informasi yang saling bersaing, yakni (i) arus informasi untuk melindungi kesehatan warga dari COVID-19; dan (ii) arus infodemi (*infodemic*) yang memuat dis-informasi dan mal-informasi tentang pandemi COVID-19. Infodemi ini merupakan informasi salah yang berlimpah, baik

online maupun *offline* tentang COVID-19, yang sengaja disebarkan untuk melemahkan respons kesehatan masyarakat. Begitu kuatnya arus infodemi ini sehingga beberapa negara membuat pernyataan bersama yang antara lain menyatakan “*as COVID-19 spreads, a tsunami of misinformation, hate, scapegoating and scare-mongering has been unleashed*”. Beberapa lembaga internasional juga mengeluarkan pernyataan bernada serupa (artikel Djura P. Lubis).

Di samping proses-proses sosial yang saling sengkabut, sengketa, atau bahkan konflik, pandemi COVID-19 ternyata juga memunculkan sisi humanis. Empati, tolong-menolong dan gotong royong warga merebak. Saat pemerintah kewalahan menangani pandemi COVID-19, gerakan masyarakat bermunculan untuk membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, atau secara swadaya melindungi komunitasnya sendiri dari bahaya penularan COVID-19. Ada yang bergiliran memasok kebutuhan pangan keluarga yang terinfeksi COVID-19. Atau secara terbuka menyiapkan bahan pangan untuk siapa saja yang membutuhkan. Ada pula RW atau desa yang menyiapkan rumah isolasi bagi pendatang. Bahkan para pekerja migran Indonesia yang notabene merupakan kelompok rentan, dalam artikel Tyas Retno Wulan di buku ini terungkap bahwa baik secara individu maupun secara kelompok, mereka melakukan berbagai aktivitas berbagi seperti pembagian masker, Alat Proteksi Diri (APD), sembako dan kebutuhan pokok lainnya, serta membangkitkan literasi masyarakat akan pandemik.

Di Yogyakarta seorang dokter anak (dr Rio Pungky Irwan) memutuskan membuka layanan konsultasi kesehatan gratis kepada warga terkait seluk-beluk COVID-19, dengan mencantumkan nomor WhatsApp pribadinya di Twitter. Dalam waktu 24 jam setelah dibuka (tanggal 7 sampai 8 Juli 2021) layanan *telemedicine* ini telah memberikan layanan konsultasi lebih dari 800 orang. Begitu banyaknya yang harus dilayani, sehingga ia mengajak rekan-rekannya sesama dokter untuk membantu. Saat ini sebanyak 30 dokter turut bergabung bersamanya memberi layanan konsultasi medis secara gratis. Puluhan dokter ini dari berbagai rumah sakit di Yogyakarta, Jakarta, Bangka, Batam dan Medan.²

² <https://regional.kompas.com/read/2021/07/15/193249578/bantu-pasien-isoman-dokter-di-yogyakarta-ini-beri-layanan-konsultasi-gratis?page=all>

Berbagai fenomena tersebut memperkuat yang disinyalir oleh Preuss (2020), The World Giving Indeks (2018); Bornstein (2007); dan Geertz (1963) bahwa "Indonesia memang lemah, tetapi masyarakatnya kuat". Implikasi dari hal ini adalah: (i) solidaritas emosional yang bersifat spontan dari bangsa ini sesungguhnya sangat kuat akan tetapi solidaritas fungsionalnya yang terstruktur melalui tata kelola negara justru lemah; (ii) gerakan redistribusi kesejahteraan muncul secara spontan, melampaui kekuatan jaringan institusi negara (Tonny, 2021). Dari COVID-19 kita diingatkan untuk meneguhkan kembali komitmen kemanusiaan kita.

Hal kelima, COVID-19 merupakan sebuah "*wake up call*" bagi umat manusia untuk berubah dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal etika lingkungan misalnya, pandemi COVID-19 menyadarkan umat manusia untuk berubah dari etika antroposentrik menuju ke ekosentrik. Sejalan dengan pemikiran berbagai pihak, Kinseng dalam tulisan di buku ini mendorong perubahan sistem sosial ekonomi. Dalam hal ini sistem sosial ekonomi perlu diubah dari neoliberal atau *free market capitalism* ke sistem sosial ekonomi "jalan tengah" yang memberi peran penting baik bagi pasar, negara, maupun masyarakat. Sebuah sistem tata kemasyarakatan yang "menempatkan manusia sebagai pusat dalam sistem ekonomi dan sosial".

Hal keenam, COVID-19 mengajarkan kita bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Evolusi membawa perubahan, seperti munculnya varian-varian baru dalam COVID-19. Memang, perubahan adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan. Seperti kata Heraclitus, seorang filsuf Yunani "*the only constant in life is change*". Perubahan tidak bisa dihindari, dan adaptasi adalah kunci keberhasilan hidup. COVID-19 sudah hadir dalam kehidupan kita, dan sudah menjadi bagian dari hidup. Manusia harus beradaptasi dengan situasi baru ini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
1. PENDEKATAN TRANSDISIPLINER DALAM MEMAKNAI KRISIS SOSIAL EKOLOGIS DI ERA ANTROPOSEN <i>Yulia Sugandi</i>	1
2. PENDEKATAN TRANSDISIPLIN PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA <i>Suria Tarigan</i>	23
3. VIRUS COVID-19: SEBUAH PERJALANAN MEMAHAMI EVOLUSI DAN INTERAKSI DALAM KEHIDUPAN <i>Damayanti Buchori</i>	37
4. PANDEMI COVID-19 DAN PERUBAHAN PARADIGMA <i>Eka Satya Putra</i>	47
5. RESILIENSI DI ERA PANDEMI : BELAJAR DARI DESA DAN KEARIFAN LOKAL <i>David Ardhian</i>	55
6. RESILIENSI MASYARAKAT DESA TERHADAP PANDEMI COVID-19 (Studi di Kampung Cempluk Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang) <i>Keppi Sukesi dan Mofit Jamroni</i>	67

7.	PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PADA MASA PANDEMI COVID-19: Kelompok Rentan namun Pejuang Kesetiakawanan Sosial <i>Tyas Retno Wulan</i>	93
8.	COVID-19 DAN URGENSI AKTUALISASI OTONOMI DAERAH BERBASIS KEBHINEKAAN <i>Syarif Hidayat</i>	115
9.	EKONOMI POLITIK PERTANIAN–MITIGASI DAMPAK JANGKA PANJANG PANDEMI COVID-19 <i>Harianto</i>	141
10.	PANDEMI COVID-19 DAN PARADOKS SISTEM PANGAN INDONESIA <i>Laksmi A. Savitri</i>	157
11.	KOMUNIKASI KRISIS: MEMBANGUN GERAKAN SOSIAL UNTUK MEMERANGI INFODEMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 <i>Djuara P. Lubis</i>	177
12.	EKONOMI TEKS BOOK MENINGGALKAN AKAL, HATI DAN RASA SERTA LAHIRNYA PROBLEM STRUKTURAL & KULTURAL <i>Teuku Fajar Shadiq</i>	193
13.	KERAPUHAN: REFLEKSI FILOSOFIS PANDEMI COVID-19 <i>Ruth Indah Rahayu</i>	207
14.	DINAMIKA DI KEPULAUAN SUNDA KECIL, KAWASAN WALLACEA: Sebuah Catatan Perjalanan Kala Pandemi COVID-19 <i>Akbar A Digdo</i>	229
15.	PANDEMI COVID-19: DARI ABNORMAL KE NEW NORMAL <i>Rilus A. Kinseng</i>	253
	PROFIL PENULIS DAN DEWAN PENYUNTING	271

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Contoh ketidaksetaraan horizontal (<i>horizontal inequalities</i>) dan ketidaksetaraan antar generasi (<i>intergenerational inequalities</i>) terkait dengan ketimpangan relasi kuasa (<i>Human Development Office 2020</i>)	5
Tabel 2.	Permasalahan yang dihadapi pertanian di masa pandemi COVID-19	146
Tabel 3.	Margin pemasaran beras di Indonesia di bulan April 2019 dan April 2020 (BPS 2019, 2020)	147
Tabel 4.	Konstruksi Tubuh Cantik.....	224
Tabel 5.	Konstruksi Kulit Cantik.....	225
Tabel 6.	Perubahan karakteristik sektor wisata, perikanan dan budidaya pesisir serta konektivitas yang terjadi karena COVID-19 di Labuan Bajo-Sape dan Rote. Beberapa respons yang ditampilkan adalah asumsi yang dibangun berdasarkan pengetahuan yang ada mengenai lokasi (*). Skala kualitatif yang dicantumkan bersifat relatif.	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dinamika ketidaksetaraan antara menangkap manfaat dengan mengeksplor biaya (Human Development Report 2020)	7
Gambar 2. Persentase dari total populasi yang telah menerima paling tidak satu dosis vaksin Covid19 (<i>Our World in Data</i> 2021)	11
Gambar 3. Komponen <i>Ecological Reflexivity</i> Dryzek dan Pickering (2019)	19
Gambar 4. Tiga fase kolaboratif di antara aktor saintifik dan non-saintifik pada riset transdisiplin (Sumber: adaptasi dari Lang <i>et al.</i> 2012).....	28
Gambar 5. Tiga prasyarat terjadinya evolusi, yaitu adanya keragaman dalam sifat –(<i>variation in traits</i>), keragaman dapat diturunkan (<i>heredity</i>)–, sifat yang diturunkan memengaruhi perbedaan <i>fitness</i>	39
Gambar 6. Kontinum dari Interaksi Antara Dua Organisme	41
Gambar 7. Keyakinan Informan terhadap COVID-19	73
Gambar 8. Kerangka Konseptual Kampung Tangguh (KpT)	74
Gambar 9. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan.....	80
Gambar 10. Keperluan Kader Psikolog	83
Gambar 11. Resiliensi dan Pola Adaptasi Masyarakat dalam Menganggulangi Bencana	89
Gambar 12. Perbedaan Prinsip Desentralisasi pada Negara Federal dan Kesatuan	130
Gambar 13. Skema Model <i>Decentralization within the State and Society</i> ...	134
Gambar 14. Indonesia dalam Rezim Pangan Internasional.....	165
Gambar 15. Sistem Komunikasi untuk Komunikasi Risiko (Zhang, 2020).....	189
Gambar 16. Update perkembangan kasus harian COVID-19 Per 1 Juli 2021 (Sumber: Satgas Covid Nasional)	210
Gambar 17. Box menunjukkan lokasi-lokasi tujuan perjalanan dalam artikel ini. Kiri: Labuan Bajo – Sape; Kanan: Pulau Rote	232

- Gambar 18. Skenario konektivitas dan prioritas pembangunan. Labuan Bajo sebagai KSPN-Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Rote sebagai SKPT-Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Sumber: Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.....233
- Gambar 19. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Komodo yang mencakup Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (Suraji *et al.* 2020).....234
- Gambar 20. Ikan layang (*Decapterus spp.*) hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Sape dibeli oleh pedagang untuk kemudian dibawa ke pasar lokal.236
- Gambar 21. Deretan kapal berbagai jenis (termasuk phinisi LoB) dan ukuran di Labuan Bajo. Kapal-kapal ini dalam kondisi tidak beroperasi, menunggu kegiatan wisata dibuka kembali.237
- Gambar 22. Kapal-kapal phinisi LoB (*Live on Board*) dari Labuan Bajo yang kini berlabuh di Sape untuk menekan biaya-biaya operasional.237
- Gambar 23. Pengeringan rumput laut oleh masyarakat di Kampung Bajau Pulo, Sape238
- Gambar 24. Tali dengan botol sebagai pelampung sebagai media budidaya rumput laut. Budidaya ini dilakukan di dataran pasang surut yang tertutup oleh lamun.240
- Gambar 25. Rumput laut yang dipanen sedang dikeringkan di para-para, di bawah sinar matahari langsung.....241
- Gambar 26. Makan meting, dilakukan di dataran pasang surut. Permukaan air yang rendah saat surut memudahkan mereka untuk memungut hewan-hewan laut dan ikan sebagai sumber makanan241
- Gambar 27. Kepala Dusun Nusa Manuk, Rote menunjukkan kakap putih hasil tangkapan warganya. Ikan ini digarami kemudian dijemur untuk memudahkan penyimpanan.242
- Gambar 28. Lawar, makanan sehari-hari di Rote yang dibuat dari berbagai jenis rumput laut.....242

1. PENDEKATAN TRANSDISIPLINER DALAM MEMAKNAI KRISIS SOSIAL EKOLOGIS DI ERA ANTROPOSEN

Yulia Sugandi

CTSS Fellow

Ambassador of Homeland Earth Campaign

“The dignity of the human being is of both planetary and cosmic dimensions. The appearance of human beings on Earth is one of the stages in the history of the Universe. The recognition of the Earth as our home is one of the imperatives of transdisciplinarity. Every human being is entitled to a nationality, but as an inhabitant of the Earth is also a transnational being. The acknowledgement by international law of this twofold belonging, to a nation and to the Earth, is one of the goals of transdisciplinary research.”

(The Charter of Transdisciplinarity, Article 8)¹

Abstrak

Trans- sebagai prefix yang berakar dari bahasa Latin, diartikan dalam kata sifat sebagai lintas (*across*) dan melampaui (*beyond*), serta dalam kata kerja sebagai perubahan menjadi tempat atau keadaan lainnya (*into another place or state*). Istilah ini terdapat dalam pelbagai konteks, misalnya transmigrasi, transnasional, transeksual, transkontinental, transdiplin, transplantasi, transformasi, transkultural, dan lain sebagainya. Trans menyiratkan kemajemukan karena menyebrang dari satu titik ke titik lainnya. Banyaknya titik penyebrangan menggambarkan tingkat kompleksitas suatu konteks. Zaman manusia atau Antroposen, memperlihatkan saling keterkaitan dan kompleksitas yang tinggi. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh

¹ <https://inters.org/Freitas-Morin-Nicolescu-Transdisciplinarity>

kasus kompleks di zaman Antroposen ini. Virus Corona menyebrang dari binatang kepada manusia (zoonosis) merupakan pertanda ketidakseimbangan relasi sosial ekologis dalam sistem. Pendekatan Transdisipliner (TD) memberikan masukan tentang tata pola pikir yang diperlukan dalam upaya memahami tantangan kompleksitas dunia modern dan menyeimbangkan relasi sosial ekologis. TD mengundang kita berpikir metaparadigma untuk keluar, melintas, melampaui zona nyaman keilmuan kita menuju demokratisasi pengetahuan yang meleburkan pengetahuan berbasis pengalaman dengan pelbagai pengetahuan formal. TD juga mengajak kita untuk berpikir sistemik secara kritis dan refleksif tentang saling keterkaitan antara pengalaman pribadi individu (*part*) dengan kondisi sistem secara keseluruhan (*whole*). Tata pola pikir ala TD ini menegaskan argumen Einstein bahwa kita tidak dapat memecahkan masalah kita dengan pemikiran yang sama seperti yang kita gunakan ketika kita menciptakannya (*we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them*).

1.1 Kontekstualisasi Antroposen: Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Perubahan Sistem Bumi

Telah diterima secara luas bahwa kita sebagai spesies *Homo sapiens*, membawa dampak yang begitu signifikan terhadap Bumi dan segenap penghuninya. Dampak tersebut berpengaruh langgeng dan berpotensi tidak dapat diubah pada sistem, lingkungan, proses, dan keanekaragaman hayatinya. Bumi berusia 4,5 miliar tahun, sedangkan kehadiran manusia hanya selama sekitar 200.000 tahun saja. Namun pada saat singkat ini kita telah secara mendasar mengubah sistem fisik, kimia, dan biologi planet tempat kita dan semua organisme lain yang bergantung padanya. Emisi karbon dioksida, pemanasan global, pengasaman laut, perusakan habitat, kepunahan, dan ekstraksi sumber daya alam skala luas adalah pelbagai tanda bahwa kita telah mengubah planet kita secara signifikan².

² <https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-the-anthropocene.html>

Kondisi kesejahteraan bumi saat ini seperti yang ditampilkan dalam laporan multilembaga (WMO 2020)³ menyoroti adanya peningkatan tanda dan dampak perubahan iklim di atmosfer, daratan, dan lautan. Laporan tersebut menegaskan perbedaan mencolok dari kesejahteraan bumi antara periode praindustri dan masa sekarang. Tahun 2019 berakhir dengan suhu rata-rata global 1,1°C di atas perkiraan tingkat praindustri. Tahun 2019 kemungkinan merupakan tahun terpanas kedua dalam catatan instrumental. Lima tahun terakhir adalah lima rekor terpanas, dan dekade terakhir, 2010–2019, juga merupakan rekor terpanas. Sejak 1980-an, setiap dekade berturut-turut lebih hangat daripada dekade sebelumnya sejak 1850. Dampak tersebut antara lain, pengasaman laut dan kenaikan permukaan air laut yang mendorong ambang batas planet (*planetary boundaries*)⁴. Status objektif tentang kesejahteraan bumi yang berisiko seperti itu sejalan dengan persepsi publik. Pada akhir 2019, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan perubahan iklim yang berada pada “titik tidak bisa kembali” (*point of no-return*). Responden Survei Persepsi Risiko Global Forum juga menyerukan sinyal genting (WEF 2020)⁵. Untuk pertama kalinya dalam sejarah survei, isu-isu terkait iklim mendominasi semua dari lima risiko jangka panjang teratas. Krisis iklim menempatkan 99 dari 100 kota paling rentan berada di Asia⁶ serta menjadikan Jakarta sebagai kota yang lingkungannya paling rentan sedunia (*the most environmentally vulnerable city*)⁷.

Antroposen adalah sebuah konsep untuk memahami hubungan antara kondisi kesejahteraan bumi dan aktivitas manusia. Zaman Antroposen adalah satuan waktu geologis tidak resmi, yang digunakan untuk menggambarkan periode

³ <https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate>

⁴ Konsep *planetary boundary* (PB), diperkenalkan oleh Rockstorm *et al.* (2009) dan diperbarui oleh Steffen *et al.* (2015) bertujuan untuk menentukan batas lingkungan di mana umat manusia dapat beroperasi dengan aman. Batas-batas planet ini terdiri dari integritas biosfer, perubahan iklim, entitas baru, penipisan zona stratosfer, perubahan sistem lahan, penggunaan air tawar, aliran biokimia, pengasaman laut, dan pemuatan aerosol atmosfer. Menurut konsep PB, beberapa ambang batas planet berada di luar zona ketidakpastian (risiko tinggi) seperti keragaman genetik dan aliran biokimia.

⁵ <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020>

⁶ <https://www.theguardian.com/cities/2021/may/13/asia-is-home-to-99-of-worlds-100-most-vulnerable-cities>

⁷ <https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/16/jakarta-ranked-worlds-most-environmentally-vulnerable-city.html>

terbaru dalam sejarah Bumi ketika aktivitas manusia mulai berdampak signifikan pada iklim dan ekosistem planet. Kata Antroposen (*Anthropocene*) yang berasal dari kata Yunani *Anthropo* berarti “manusia,” dan *cene* berarti “baru”, diciptakan dan dipopulerkan oleh ahli biologi Eugene Storer dan ahli kimia Paul Crutzen pada tahun 2000. Antroposen menggambarkan era geologi saat ini sebagai periode yang dipengaruhi oleh manusia (antropogenik), berdasarkan bukti global bahwa lapisan udara, geologi, air, udara, dan proses sistem bumi lainnya secara keseluruhan berubah karena aktivitas manusia.

Manusia mulai menimbulkan tekanan terhadap lingkungan 10.000 tahun yang lalu ketika mulai menetap lama di suatu lokasi tertentu (sedentarisasi) dan membentuk sistem pengelolaan pertanian. Para ilmuwan memiliki argumen berbeda tentang awal Antroposen berdasarkan perubahan kondisi bumi oleh manusia. Argumen pertama mengacu pada penemuan mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18 sebagai awal Antroposen yang ditandai dengan revolusi industri dan penggunaan fosil. Sedangkan argumen kedua memandang bahwa awal Antroposen bertepatan dengan peluncuran bom atom tahun 1945 (UNESCO 2018)⁸. Pada tahun 2016⁹, Kelompok Kerja Antroposen (*the Anthropocene Working Group*) menyepakati argumen ketiga yang mengacu pada tahun 1950 yang disebut periode ‘percepatan skala besar’ (*great acceleration*) sebagai awal Antroposen, di mana populasi manusia, penggunaan sumber daya, revolusi industri dan teknologi, dan perdagangan global mulai lepas landas. Antroposen telah muncul secara tidak sengaja sebagai efek samping dari industrialisasi masyarakat manusia (Crutzen, 2006). Para ilmuwan memiliki bukti yang relevan bahwa manusia meninggalkan jejak yang berpengaruh pada sistem bumi secara keseluruhan sejalan dengan peningkatan populasi manusia, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dianggap sebagai faktor paling dominan yang mempengaruhi sistem bumi.

Istilah ‘*Econocene*’ atau lebih khusus ‘*Capitalocene*’ (ekonomi kapitalis) lebih disukai daripada *Anthropocene* karena populasi manusia yang telah tiga kali lipat sejak 1950 tidak seberapa dibanding peningkatan ekonomi global sebanyak 15 kali atau lebih (Dryzek dan Pickering 2019). Antroposen membuat kita

⁸ <https://en.unesco.org/courier/2018-2/anthropocene-vital-challenges-scientific-debate>

⁹ <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/anthropocene/>

mempertimbangkan kembali gagasan tentang ‘modern’ dan ‘modernitas’. Antroposen adalah manifestasi dari sisi gelap ‘modernitas’ seperti perusakan lingkungan, implikasi mendalamnya terhadap imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme, serta dalam mode hierarki dan diskriminasi yang membuat miliaran orang jatuh miskin. Salah satu alasan mengapa beberapa orang mungkin lebih suka istilah Moore ‘*Capitalocene*’ adalah bahwa ‘*Anthropocene*’ sebagai nama untuk pergeseran geologis yang disebabkan oleh manusia, dapat memberikan kesan menyedihkan dengan mengacu pada kemanusiaan secara keseluruhan namun mengabaikan kesenjangan besar dalam tingkat kekayaan, dampak dan tanggung jawab lingkungan antara orang-orang di seluruh dunia (Clark 2019). Ketimpangan global dalam konteks status modal manusia (*human capital*) dan modal alam (*natural capital*) saat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonial.

Tabel 1. Contoh ketidaksetaraan horizontal (*horizontal inequalities*) dan ketidaksetaraan antar generasi (*intergenerational inequalities*) terkait dengan ketimpangan relasi kuasa (*Human Development Office 2020*)

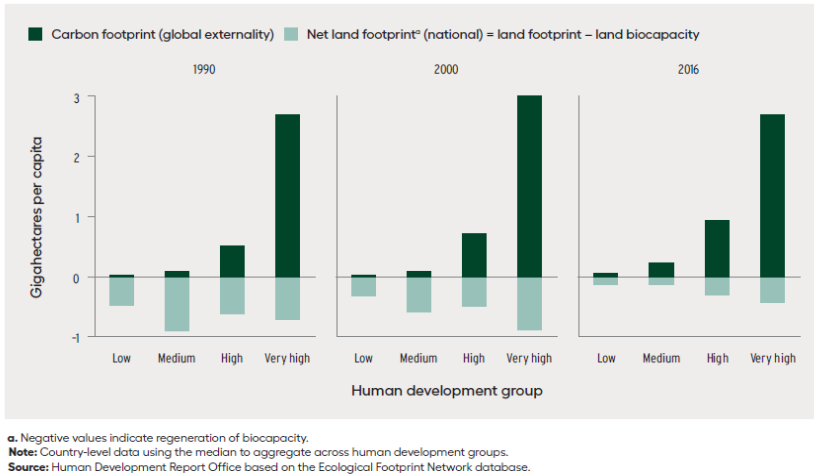
	Kelompok yang terkonsentrasi dan mengambil manfaat dari kekuasaan	Kelompok yang dirugikan
	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan kolonial - Elit - Perusahaan besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Koloni (masyarakat jajahan) - Minoritas ras/etnis - Masyarakat lokal
Generasi kini	<ul style="list-style-type: none"> - Menarik manfaat - Biaya sering terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat terbatas - Biaya eksternal
Warisan untuk generasi mendatang	<ul style="list-style-type: none"> - Modal produksi tinggi - Modal manusia tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal produksi rendah - Modal manusia rendah - Habisnya modal alam

Konsep Antroposen dikritik karena menjadi kerangka dominan belahan bumi utara yang mengabaikan ketidaksetaraan global, perbedaan sejarah, serta perspektif sosial dan budaya. Relasi kuasa yang mengakibatkan ketimpangan merupakan elemen penting untuk melihat relasi antara aktivitas manusia dengan kesejahteraan bumi. Hal ini sesuai dengan narasi besar *Eco-Marxist Anthropocene* yang berfokus pada kontradiksi kapitalisme dalam mendorong

pertumbuhan, ketimpangan dan kemajuan teknologi, sementara pada saat yang sama menyebabkan bencana lingkungan. Pengerukan sumber daya dan sirkulasi modal diletakkan dalam hubungan sosial global yang tidak setara¹⁰. Antroposen memperlihatkan kompleksitas interaksi antara sejarah dan ekonomi politik. Ketidaksetaraan dalam kekuasaan, kontrol politik dan sumber daya terhubung lintas batas, dari lokal hingga global. Bagaimana mengonsepsi dan menganalisis interaksi antara ketidaksetaraan yang berakar secara historis (di dalam dan di antara masyarakat) dengan jaringan ekonomi global kontemporer yang memengaruhi perubahan lingkungan regional dan global (Brondizio *et al.* 2016).

Antroposen dapat menjadi kerangka konseptual yang berguna hanya jika dilihat dari perspektif lintas ruang lingkup yang memperhitungkan berikut: (a) perkembangan di tingkat lokal, regional, dan global, (b) hubungan varian di antara tingkat ini dan ruang lingkup masalah, serta (c) ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Menggunakan lensa Antroposen tidak boleh menutupi keragaman konteks dan situasi lokal dan regional, atau keragaman dan perbedaan dalam kondisi, konteks, dan distribusi kekayaan, konsumsi, dan dampak lingkungan di seluruh masyarakat manusia. Tidak boleh diabaikan bahwa hanya 20% dari populasi dunia (sebagian besar yang tinggal di negara-negara industri), mengkonsumsi sekitar 77% dari semua barang dan jasa di Planet Bumi (Biermann 2016). Dinamika yang timpang juga tampak dari figur berikut; semakin tinggi indeks pembangunan manusia yang menjadi salah satu ciri negara berpendapatan tinggi, maka semakin tinggi pula jejak karbon yang dihasilkan. Dampak global jejak karbon yang dihasilkan negara berpendapatan tinggi ini jauh lebih besar dibanding jejak bersih tanah dalam skala nasional.

¹⁰ Tiga narasi besar lainnya dari antroposen adalah paham naturalis yang menekankan apa, bagaimana, dan kapan manusia telah mengubah sistem Bumi dengan perhatian khusus pada potensi integrasi interdisipliner; *post-nature* yang mengusung antroposen sebagai simbol *post-modernitas*, di mana dikotomi antara budaya dan alam dilenyapkan; serta paham *eco-catastrophist* yang berfokus pada kerentanan masyarakat dan bahaya titik kritis sosial dan lingkungan yang tidak diketahui, menyoroti studi sejarah keruntuhan peradaban (Bonneuil 2015).



Gambar 1. Dinamika ketidaksetaraan antara menangkap manfaat dengan mengeksplor biaya (Human Development Report 2020)

Human Development Report (2020) menegaskan bahwa sejauh ini, fitur kunci dari pembangunan manusia adalah ketidaksetaraan. Orang terkaya di dunia (10% dari total populasi dunia) adalah pihak yang paling banyak merusak lingkungan tempat kita semua hidup seperti udara bersih, air, makanan, dan sumber daya lainnya. Namun, konsekuensi dan bahaya kerusakan lingkungan yang mereka tanggung amat ringan. Padahal kelompok terkaya ini (10% dari populasi dunia) bertanggung jawab atas separuh dari emisi karbon dunia. Sementara kontribusi karbon dari kelompok termiskin (50% dari populasi dunia) hanya 10% dari emisi karbon dunia. Pada saat yang sama, kontribusi sosial orang-orang terkaya tergolong rendah. Diperkirakan sekitar USD 9–36 triliun disimpan di surga pajak (*tax havens*) seluruh dunia. Dengan demikian, mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan terkait erat: pengentasan kemiskinan akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan Antroposen.

Kontekstualisasi konsep Antroposen memaparkan ketimpangan relasi kuasa yang mempengaruhi status kesejahteraan manusia dan bumi. Konsep Antroposen yang kontekstual dan membumi ini dapat dipahami dengan kompleksitas dan pemikiran sistem (*complexity and systems thinking*). Dinamika sosial dan ekologi yang saling terkait pada Antroposen berarti

bahwa konteks lokal dan tempat dipengaruhi oleh banyak penggerak pada skala yang lebih besar, dan memiliki hubungan yang kompleks dengan tempat lain. Di dunia yang terglobalisasi, unsur pendorong (misalnya perdagangan, harga komoditas internasional, peningkatan teknologi, akuisisi lahan skala besar, perikanan dan pertanian) dibentuk oleh serangkaian kekuatan yang kompleks (Norström *et al.* 2020).

1.2 Pandemi COVID-19 dalam Lensa Antroposen: Saling Keterkaitan Antara Sosial-Ekologis dan Lokal-Global

Biermann *et al.* (2016) melihat fitur utama dari sistem lingkungan manusia yang kompleks sebagai ciri Antroposen. Jumlah dan keterkaitan dari perubahan lokal (baik lingkungan dan sosial) telah menjadi begitu besar sehingga menimbulkan risiko dan konsekuensi global. Konsep Antroposen berguna dalam meningkatkan pemahaman kita tentang kompleksitas sosial-ekologis yang memiliki konsekuensi penting bagi tata kelola sistem sosial-ekologis. Lensa Antroposen yang dikontekstualisasikan mendukung pandangan planet ini sebagai sistem sosial-ekologis yang saling berhubungan dan saling bergantung, serta mempertimbangkan variasi lokal dan ketidaksetaraan sosial. Tidak semua orang dan komunitas mampu mengatasi dan terdampak hal yang sama dari Antroposen.

Saling keterhubungan dan ketergantungan merupakan atribut dari masalah yang dihadapi masyarakat era Antroposen. Beberapa contoh khas dari masalah Antroposen yang sangat terkait adalah: (a) pengasaman laut sebagai masalah jangka panjang yang berdampak lokal yang terkait dengan mekanisme tata kelola global; (b) urbanisasi sebagai proses transformasi yang didorong secara sosial dan ekonomi yang berdampak besar pada sebagian besar sistem sosial-ekologis planet ini; serta (c) emisi karbon yang timbul sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang utamanya ditopang oleh energi fosil; serta (d) kebakaran hutan dan lahan sebagai aktivitas yang pada dasarnya bersifat lokal namun berdampak pada tatanan sistem global. Keempat domain isu menunjukkan manifestasi kunci dari perubahan peran manusia di era Antroposen sistem planet bumi. Keempat domain ini juga menunjukkan adanya keterkaitan dan ketergantungan antara lokal-global.

Contoh lain dari Antroposen adalah pandemi COVID-19, yang per 12 Juli 2021, menyebar di 188 negara, dengan total 186.926.792 kasus terkonfirmasi, 4.034.092 total kematian, dan 3.451.852.979 tervaksinasi. Coronavirus adalah penyakit zoonosis – artinya ditularkan dari hewan ke manusia. Sekitar 60 persen dari semua penyakit menular pada manusia bersifat zoonosis seperti halnya 75 persen dari semua penyakit menular yang baru muncul. Contoh lain termasuk Sindrom Pernafasan Akut Parah (*SARS*) yang ditularkan dari musang (*civet cats*), Sindrom Pernafasan Timur Tengah (*MERS*) yang ditularkan dari unta, serta Ebola dan flu burung.

Bank Dunia (2012)¹¹ menekankan sisi ekonomi dari kesehatan tunggal (*one health*) yang dihasilkan oleh interaksi antara manusia, patogen, dan planet kita. Saat penyakit tidak dikendalikan secara tepat waktu, patogen zoonosis dapat menyebabkan pandemi, dengan potensi dampak bencana yang berskala global. Konsep kesehatan tunggal (*one health*) adalah sebuah pendekatan untuk memastikan bahwa terjadinya kolaborasi interdisipliner yang sangat penting ini. *One health* mengacu pada “upaya kolaboratif dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja secara lokal, nasional, dan global untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan, dan lingkungan kita.” Pendekatan *One health* terhadap penyakit zoonosis tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih efisien karena terdapat distribusi beban biaya dikalangan para pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.

Salah satu langkah yang direkomendasikan untuk menerapkan pendekatan ini adalah kerja sama antara sektor kesehatan hewan dan manusia untuk kegiatan pengawasan terpadu. Di luar ekonomi dan teknis, efek terpenting dari peningkatan sistem *one health* akan sering terlihat pada identifikasi risiko kesehatan yang lebih cepat dan akurat. Di antara efek tidak langsung yang paling signifikan adalah akses pasar, ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, pengurangan hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan pendapatan dari pariwisata. Laporan UNEP (2016)¹² menggambarkan bagaimana

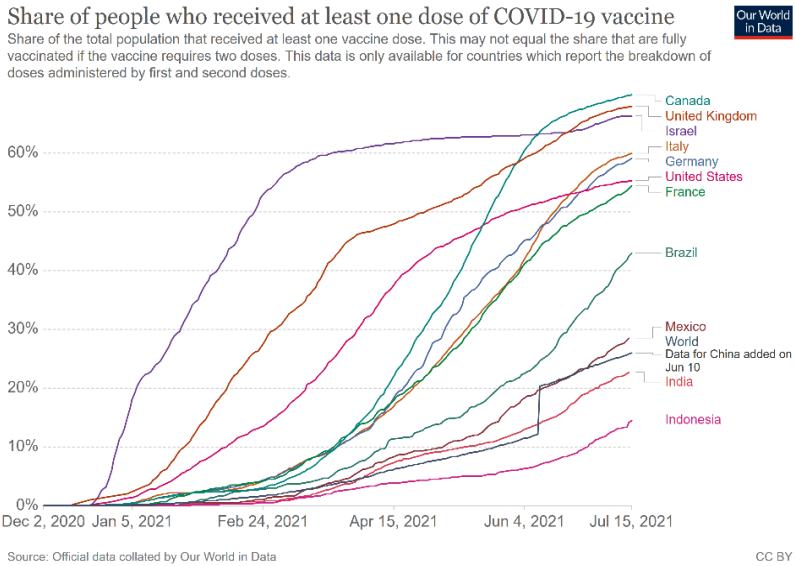
¹¹ <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11892>. Lebih lanjut: <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/safeguarding-animal-human-and-ecosystem-health-one-health-at-the-world-bank>

¹² <https://www.unep.org/resources/emerging-zoonotic-diseases-and-links-ecosystem-health-unesp-frontiers-2016-chapter>

kemunculan kembali penyakit zoonosis sangat terkait erat dengan kesehatan ekosistem. Meningkatnya aktivitas manusia yang bahkan merambah hingga ke habitat alami, membawa risiko patogen yang terkandung dalam satwa liar menyebar ke ternak dan manusia dengan akselerasi yang tinggi. Perubahan perilaku inang manusia seperti perjalanan, konflik, migrasi, perdagangan satwa liar, globalisasi, urbanisasi, dan perubahan preferensi pola makan; juga menjadi pendorong munculnya penyakit zoonosis.

Kompleksitas pandemi COVID-19 tidak semata-mata melekat pada penyebab atau akar masalah karena pandemi mempengaruhi berbagai kelompok secara berbeda. Pandemi COVID-19 mengungkap pelbagai kerentanan sebagai kondisi yang sudah ada sebelumnya dari individu (misalnya kesehatan yang sudah ada sebelumnya, status sosial dan ekonomi, dan lainnya) hingga tingkat sistem (misalnya sistem kesehatan, perlindungan sosial, dan lain-lain). Studi yang diterbitkan oleh sosiolog dalam *Journal of Health and Social Behavior* menunjukkan bahwa ketika masyarakat mengembangkan kemampuan untuk mencegah atau mengobati penyakit, kesenjangan kesehatan di seluruh tingkat sosial ekonomi dan di sepanjang garis ras juga meningkat.

Seperti halnya kasus Antroposen lainnya, ketidaksetaraan (*inequality*) juga menjadi salah unsur utama yang mempengaruhi skala dampak pandemi. Status sosial ekonomi turut menjadi penentu dampak Covid19. Sebagai misal, organisasi kesehatan mengungkapkan bahwa manusia lansia yang berusia di atas 70 tahun berisiko lebih besar meninggal akibat virus corona. Namun penelitian tentang kondisi kesehatan kronis menunjukkan bahwa ambang batas kemungkinan besar pada usia 55 tahun untuk orang-orang dengan status sosial ekonomi rendah. Angka-angka itu hanya menangkap sebagian dari bagaimana ketidaksetaraan dapat membuat virus corona lebih mematikan (New York Times, 15 Maret 2020). Dalam keadaan darurat, norma gender dan ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya akan berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak. Gender, bersama dengan faktor lain termasuk usia, orientasi seksual dan identitas gender, etnis, disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan lokasi geografis dapat bersinggungan untuk menambah pengalaman individu dalam keadaan darurat (IASC 2020).



Gambar 2. Persentase dari total populasi yang telah menerima paling tidak satu dosis vaksin Covid19 (*Our World in Data* 2021)

Meskipun sejauh ini data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk COVID-19 menunjukkan jumlah kasus yang sama antara pria dan wanita, terdapat perbedaan jenis kelamin dalam kematian dan kerentanan terhadap penyakit tersebut. Penutupan sekolah untuk mengendalikan penularan COVID-19 di China, Hong Kong, Italia, Korea Selatan, dan sekitarnya boleh jadi memiliki efek berbeda pada perempuan, yang memberikan sebagian besar perawatan informal dalam keluarga, dengan konsekuensi membatasi pekerjaan dan peluang ekonomi mereka (Wenham *et al.* 2020). Rasisme struktural menghasilkan disparitas dalam akses ke perawatan kesehatan yang menempatkan *blackness* sebagai kondisi yang sudah ada sebelumnya.

Demikian pula, WHO telah memperingatkan bahwa masyarakat adat yang terdiri dari setengah juta orang di seluruh dunia sangat rentan terhadap pandemi virus corona baru, sering kali karena kondisi kehidupan yang buruk. Kerentanan masyarakat adat yang disebabkan oleh keterpinggiran mereka adalah salah satu dari banyak pendorong pandemi COVID-19. Ini merupakan salah satu contoh ketidaksetaraan lainnya dalam kasus Antroposen. Merujuk

pada uraian di atas, masyarakat adat yang masih memiliki ikatan kuat dengan alam merupakan penghasil emisi karbon yang paling rendah. Para peneliti telah menyoroti pentingnya tanah adat untuk konservasi global, peran konservasi hutan, degradasi dan gangguan di wilayah adat dan pendekatan berbasis hak untuk konservasi dan aksi iklim (*National Observer* 2020). Pentingnya keanekaragaman budaya melalui perlindungan hak masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari perlindungan keanekaragaman hayati (IPBES 2019)¹³. Akan tetapi, pandemi global menunjukkan runtuhnya ekosistem akibat pelbagai keterkaitan termasuk yang mendorong timbulnya kerentanan (misalnya pengucilan sosial, ketidaksetaraan dan deforestasi). Pandemi COVID-19 juga memperlihatkan pelbagai ketidaksetaraan dalam proses penanganannya. Dalam skala nasional, pengucilan sosial (*social exclusion*) menimpa kelompok masyarakat tertentu yang tidak memiliki tanda pengenal kependudukan untuk mengakses vaksin¹⁴. Dalam skala global, penguasaan vaksin oleh negara-negara utara (*vaccine apartheid*) juga menghalangi negara-negara selatan untuk mengakses vaksin¹⁵. Inklusivitas dalam menunjang tercapainya kesehatan tunggal (*one health*) dalam mengatasi pandemi COVID-19 menyiratkan bahwa pemikiran sistem (*systems thinking*) menjadi suatu keharusan ketimbang pilihan¹⁶. Pemikiran sistem melampaui tindakan individu untuk koneksi, penyebab dan konsekuensi. Oleh karena sistem tidak eksternal, maka kita merupakan bagian darinya. Pendekatan sistem menawarkan kerangka pemikiran dan alat untuk membantu kita untuk bertindak dengan cara yang mencerminkan karakteristik dunia kita yang kompleks dan saling berhubungan.

¹³ <https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview>

¹⁴ <https://restofworld.org/2021/indonesias-invisible-people-face-discrimination-and-sometimes-death-by-database/>

¹⁵ https://www.democracynow.org/2021/6/21/covid_19_vaccine_apartheid

¹⁶ https://www.thinknpc.org/blog/COVID-19-means-systems-thinking-is-no-longer-optional/?utm_source=EGPCP+Echo+newsletter&utm_campaign=8128d4efc8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_11_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2463e9caa2-8128d4efc8-292115465

1.3 Pendekatan Transdisipliner dalam Memaknai Kompleksitas Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 dari lensa Antroposen yang dikontekstualisasikan dengan gamblang menjelaskan pelbagai realitas yang saling berhubungan (misalnya masalah, agensi, ruang lingkup, dan lain-lain). Konsep Antroposen menawarkan kesempatan untuk menjembatani lintas disiplin dan pendekatan dalam sistem produksi pengetahuan yang semakin terbuka (Gibbons, 1999). Konsep Antroposen membutuhkan inklusi penuh dari analisis aspek ekonomi, demografi, ekologi, politik, simbolik, dan budaya masyarakat yang saling berhubungan secara global. Sifat dari analisis masalah ini menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan yang lebih besar adalah merupakan kebutuhan ketimbang pilihan. Hal ini menurut Brondizio *et al.* (2016), perlu mendorong perusahaan produksi pengetahuan di luar sains untuk memasukkan pertimbangan dan kegunaan oleh pengambil keputusan dan berbagai sektor masyarakat (Dilling dan Lemos 2011), serta sinergi dengan sistem pengetahuan lainnya misalnya adat, tradisi, dan pengetahuan lokal (Kirchhoff *et al.* 2013; Tengö *et al.* 2014; Díaz *et al.* 2015). Analisis sektoral tidak lagi cukup untuk memahami kompleksitas keruntuhan ekosistem. Dalam dunia yang semakin berjejaring, ketika kompleksitas dan kekuatan interaksi tumbuh, ada risiko yang berkembang bahwa sistem buatan manusia menjadi tidak stabil dan tidak terkendali. Beberapa kondisi saat ini mungkin pada kenyataannya menjadi titik kritis perubahan sistem. Antroposen telah memperluas gagasan tentang batas-batas signifikan tersebut terkait dengan proses sosial, ekonomi atau budaya (Cote dan Nightingale, 2012).

Teori sistem adaptif kompleks atau *Complex Adaptive System* (CAS) sangat sesuai untuk Antroposen (Clark 2019). Kompleksitas paling tepat dianggap sebagai properti dari suatu sistem. Antroposen adalah periode di mana risiko perubahan iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerusakan ekonomi dan lingkungan lainnya menimbulkan risiko eksistensial bagi populasi manusia—singkatnya, kita menghadapi keadaan darurat. Kesadaran kompleksitas yang lebih luas, dengan penekanannya pada umpan balik berulang dan adaptasi sistemik, dapat meningkatkan lahirnya peluang baik bagi kita dari ancaman eksistensial ini. Pengetahuan harus dilihat

sebagai unsur yang tertanam dalam diri orang dan sekaligus dalam sistem kehidupan. Agar kita dapat terus mendapatkan manfaat dari pelbagai jasa ekosistem, kita perlu memahami interaksi dan dinamika kompleks yang ada antara aktor dan ekosistem dalam sistem sosial-ekologis. Para peneliti di berbagai disiplin ilmu sekarang memperdebatkan, merangkul, dan menganjurkan pemikiran kompleksitas sebagai keharusan untuk memahami dan menghadapi tantangan sosial-ekologis yang mendesak saat ini. Namun demikian, mendorong perubahan dalam kerangka acuan masyarakat lebih dari sekadar menambah basis pengetahuan; itu berarti mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Dalam hal ini, *Complex Adaptive Systems* (CAS) berarti menjauh dari pemikiran reduksionis dan menerima bahwa dalam sistem sosial-ekologis terdapat pelbagai koneksi terjadi pada saat yang bersamaan serta pada tingkat yang berbeda. Lebih jauh, pemikiran kompleksitas berarti menerima ketidakterdugaan (*unpredictability*), ketidakpastian (*uncertainty*), dan mengakui pelbagai perspektif.

Kajian kolaboratif dan integratif tentang suatu masalah dapat membuat perbedaan bagi sebagian besar populasi di banyak wilayah yang menghadapi tekanan dan risiko lingkungan pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdebatan seputar konsep Antroposen telah terbukti ampuh dalam membuka percakapan seputar isu-isu mendasar yang mendasari perubahan global dan jalur menuju keberlanjutan. Alih-alih membuat kembali percabangan di dalam maupun antara ilmu sosial, biofisika dan humaniora, lebih produktif untuk berkonsentrasi pada gagasan dan pendekatan yang dapat membuat kolaborasi berhasil dan bermakna bagi masyarakat luas. Ketegangan kreatif dan konstruktif di sekitar konsep dapat membantu komunitas riset untuk bergerak menuju sintesis konseptual baru dan metodologi integratif yang diperlukan untuk memahami kompleksitas sistem bumi, dan yang sepadan dengan tantangan sosial dan lingkungan di depan kita. Kelman (2020) berpendapat bahwa dengan “mengganggu” ekosistem, kita membuat pandemi di luar COVID-19 lebih mungkin terjadi sehingga mereka yang memiliki pengetahuan, kebijakan, dan sumber daya harus memilih untuk memutuskan untuk menghindari bencana. Metodologi integratif yang holistik memberikan pilihan untuk mencegah bencana berubah menjadi malapetaka.

Bentuk Antroposen yang dikontekstualisasikan dan bernuansa di atas memungkinkan cara-cara baru untuk analisis terpadu masalah berbasis masalah dalam konteks pemahaman global, baik dalam istilah akademis dan politik.

Norström *et al.* (2020) menegaskan bahwa bagi para peneliti keberlanjutan (*sustainability*) yang berkomitmen untuk mendorong perubahan, hal ini diperlukan pertimbangan dinamika lintas-skala, bagaimana terlibat dalam produksi bersama, dan dengan siapa. Produksi bersama pengetahuan (*knowledge co-production*) ini dapat mengakomodasi komunitas akademik dan non-akademik. Peran baru dan signifikan dari produksi bersama pengetahuan di Antroposen untuk mengarahkan transformasi menuju keberlanjutan. Transformasi yang menempatkan kita pada lintasan yang berkelanjutan perlu terjadi dengan cepat, dan akan membutuhkan perubahan sosial besar-besaran (pergeseran dalam nilai-nilai yang mendasari, asumsi, budaya dan pandangan dunia) ditambah dengan kemajuan teknologi dan pengelolaan biosfer. Tak pelak hal ini berarti bahwa produksi bersama pengetahuan dalam kajian keberlanjutan akan membutuhkan lebih banyak perhatian pada mekanisme perubahan sosial termasuk nilai, politik, dan kekuasaan. Aksi tersebut membutuhkan sikap terbuka, deliberatif, dan reflektif dari para pengkaji keberlanjutan yang menangani nilai-nilai dan politik dalam produksi bersama pengetahuan. Schneider *et al.* (2019) memaparkan bahwa para ilmuwan keberlanjutan semakin setuju bahwa perubahan yang diperlukan harus mendasar, cepat, dan mencakup refleksi pada pandangan dunia, kepercayaan, dan struktur kekuasaan yang mendukung pembangunan yang tidak berkelanjutan. Hal ini pada gilirannya membutuhkan strategi kajian baru yang memikirkan kembali bagaimana relasi antara sains dan masyarakat satu sama lain dan bagaimana pengetahuan yang relevan dihasilkan.

Dalam konteks ini, produksi bersama pengetahuan secara transdisipliner (TD) dianggap sebagai pendekatan yang menjanjikan, karena berfokus pada tantangan dunia nyata, memungkinkan kolaborasi di antara berbagai disiplin ilmu dan aktor masyarakat, dan menyerukan refleksi diri. TD sebagai proses

sosial secara keseluruhan di mana para ilmuwan dan aktor masyarakat terlibat dalam pembelajaran dan tindakan bersama. McGregor (2004) dan Nicolescu (2014) memaparkan beberapa atribut dalam pendekatan TD: multiperspektif (*multiple perspectives*), terbuka (*open ended*), metodologi yang non dogmatik (*non dogmatic methodology*), holisme (*holism*), kesetaraan (*equality*), partisipatif (*participatory approach*). Pohl dalam Guimaraes *et al.* (2019) mendefinisikan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produksi pengetahuan transdisipliner yang membingkai, menganalisis, dan memproses suatu masalah sehingga menghasilkan beberapa hal berikut: (1) pemahaman kompleksitas masalah, (2) beragam perspektif tentang masalah tersebut, (3) keterkaitan antara pengetahuan abstrak dan kasus spesifik, dan (4) pengembangan jenis pengetahuan deskriptif, normatif, dan praktis yang berorientasi pada kebaikan bersama untuk mengatasi masalah tersebut. *Output* ini tidak terlepas dari proses pembentukan tata pola berpikir (pendekatan TD) sebagai landasan analisis.

Tantangan dalam Antroposen seperti krisis iklim dan pandemi COVID-19 merupakan krisis sosial budaya dan politik, bukan sains dan teknologi. Apabila kita percaya diri sepenuhnya bahwa kita bisa merencanakan diri kita sendiri untuk keluar dari krisis, maka kita melewatkan pelajaran utama dari Antroposen – bahwa berurusan dengan skala planet membutuhkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Membangun kembali hubungan kita dengan planet kita tidak berarti meninggalkan banyak pencapaian dari peradaban kita. Beberapa inovasi teknologi dapat membantu guna mengatasi gejala multikrisis lingkungan. Tetapi, hal tersebut tidak menohok akar penyebab krisis yang dapat dibongkar melalui asumsi dasar masyarakat kita saat ini: pertumbuhan tanpa batas, instrumentalisasi lingkungan alam, serta ketidaksetaraan atau relasi dominasi antara sesama manusia dan terhadap makhluk lainnya. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa rapuhnya peradaban kita. Sementara teknologi telah memainkan peran besar dalam menemukan jalan keluar dari pandemi melalui pengembangan vaksin, itu juga menyoroti keterbatasan umat manusia ketika masyarakat kita menjadi lumpuh dalam menghadapi kekuatan alam yang lebih kuat dari diri kita sendiri. Dibutuhkan imajinasi ulang (*reimagination*) tentang siapa kita untuk

benar-benar menyelesaikan krisis ini¹⁷. Pendekatan TD menelusuri secara mendalam tentang landasan nilai-nilai (termasuk nilai-nilai kita sendiri juga) yang melandasi relasi sosial ekologis serta keterkaitannya dengan krisis seperti pandemi COVID-19¹⁸.

Salah satu atribut yang melekat dalam pendekatan TD adalah peleburan pengetahuan berbasis pengalaman (*experiential knowledge*) dengan pengetahuan formal (*formal knowledge*) sehingga menghasilkan perspektif yang kaya akan olah rasa dan pikir. Dalam tataran topik kajian TD, integrasi pengetahuan terjadi antara pengetahuan formal dari pelbagai disiplin ilmu dengan pengetahuan berbasis pengalaman yang dimiliki masyarakat (misalnya kearifan lokal, praktik atau inovasi setempat, adat, budaya, dan kebiasaan). Namun demikian, oleh karena sistem tidak bersifat eksternal maka atribut tersebut bukan hanya dilekatkan pada topik kajian, namun juga pada pelaku kajian itu sendiri. Ini menunjukkan posisi pelaku kajian TD sebagai bagian dari sistem yang dia kaji.

Salah satu contoh model pendekatan TD adalah karya Sosiolog dan Filsuf Edgar Morin yang dikenal sebagai salah satu pelopor TD dan *complexity theory* yang terkemuka. Perjalanan intelektual Morin (Montuori 2013) memperlihatkan bahwa buah karya dia bukan berasal dari pelarian diri dari kehidupan dengan bercokol di menara gading, maupun pengendalian hidup melalui kerangka teoritis dan pemetaan yang rumit. Sebaliknya, ia terlahir dari upaya meleburkan diri (*immersion*) ke dalam kehidupan secara mendalam guna menyediakan alat pengetahuan yang memadai dalam memaknai kompleksitas kehidupan serta membantu pembaca dalam proses peleburan diri (*immersion*) tersebut. Dalam proses peleburan diri tersebut senantiasa tampak sifat saling keterkaitan antara bagian (*part*) dengan keseluruhan (*whole*); bagian dapat ditemukan dalam keseluruhan serta keseluruhan dapat pula ditemukan dalam bagian.

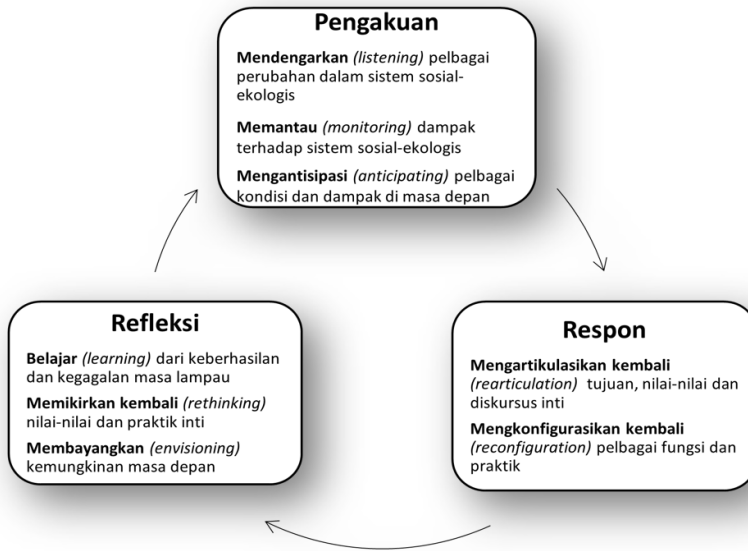
Kompleksitas serta saling keterkaitan merupakan dasar kecerdasan TD seperti yang diungkapkan Morin, "*Incapable of seeing the planetary context in all its complexity, blind intelligence fosters unconsciousness and irresponsibility.*"

¹⁷ <https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/commentisfree/2021/may/24/climate-change-crisis-culture-politics-technology>

¹⁸ <https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/PgsuVWivxecBy9Sjq00oJBfsl94LIB4q7UiE6Vkk.pdf>

TD tidak terpatok pada pemecahan masalah dalam konteks agenda disiplin tertentu serta tidak didasarkan pada upaya untuk menciptakan kerangka teoritis abstrak total atau memajukan agenda suatu disiplin. Sebaliknya, ia dimotivasi oleh pengalaman pribadi serta kebutuhan untuk menemukan pengetahuan yang relevan guna memahami dan memaknai pengalaman hidup yang tidak dapat direduksi menjadi perspektif suatu disiplin tertentu. Kompleksitas serta saling keterkaitan juga tampak antara pengalaman hidup Morin selaku pelaku kajian TD dengan eksplorasi intelektual dia terkait pelbagai topik kajian. Dengan demikian, pendekatan TD Morin senantiasa meliputi ruang lingkup planet dan pribadi sekaligus.

Morin menegaskan bahwa reformasi dalam tata pola berpikir merupakan kunci dari permasalahan antropologis dan historis sehingga kita membutuhkan pemikiran radikal yang menohok akar permasalahan, suatu pemikiran multidimensional, serta penataan atau pemikiran sistemik (*systemic thinking*). TD bersifat radikal karena ia menelusuri sampai ke akar pengetahuan, mempertanyakan cara berpikir kita serta penataan pengetahuan kita, sehingga membutuhkan disiplin dalam penelusuran diri (*self inquiry*) yang meleburkan pelaku kajian TD ke dalam proses pencarian pengetahuan. Pendekatan pemikiran sistem (*systems thinking*) membutuhkan komitmen yang sangat dalam dan gigih untuk ‘pembelajaran nyata’. Langkah-langkah yang dianjurkan melalui proses ini adalah dengan keterbukaan, menyamakan diri dengan ketidakpastian, kerendahatian dan empati untuk “melepaskan” pengetahuan sebelumnya (*unlearning*) dan menerima ide-ide baru ketika mereka datang (*emergence*). Kita perlu bersiap untuk melakukan kesalahan dan mengakui bahwa cara kerja kita mungkin berkontribusi terhadap masalah tersebut. Kita harus mampu menantang landasan pemikiran (*mental model*) kita sendiri dalam bereksplorasi guna mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Hal tersebut memfasilitasi kita untuk keluar dari perspektif linear (*tunnel vision*) yang kerap membutakan kita terhadap pelbagai kemungkinan alternatif (Grant 2021).



Gambar 3. Komponen *Ecological Reflexivity* Dryzek dan Pickering (2019)

Pendekatan TD memberikan landasan perspektif yang selalu reflektif dan kritis terhadap diri sendiri, terbuka dan kreatif, bersemangat untuk menantang asumsi mendasar yang mendasari sistem pemikiran. Dimensi kunci transdisipliner adalah memahami cara pengetahuan dibangun dalam berbagai disiplin dan pendekatan, menelusuri akar pengetahuan, menggali lebih dalam untuk menemukan asumsi mendasar yang membentuk pondasi bagi perspektif yang berbeda. Transdisipliner menuntut posisi yang lebih filosofis atau metaparadigma yang mengamati bagaimana paradigma yang berbeda membentuk konstruksi pengetahuan, menjelajahi akarnya dari disiplin ilmu. Intinya adalah untuk menyadari asumsi sendiri dalam proses eksplorasi, serta mengungkap asumsi dari pelbagai perspektif. Refleksivitas merupakan salah satu elemen kunci dalam pendekatan TD guna memahami kompleksitas. Hal ini seperti tergambar dalam *prefix re-* seperti *reorganization*, *rethinking*, dan sejenisnya. Refleksivitas ini menurut Dryzek and Pickering (2019) dan Knickel *et al.* (2019) merupakan kapasitas untuk; (a) mempertimbangkan kembali nilai-nilai inti kita, (b) menjadi (*be*) sesuatu yang berbeda apabila diperlukan, ketimbang hanya melakukan (*do*) sesuatu yang berbeda,

(c) menyadari dan mempertanyakan perilaku kita sendiri beserta proses berpikir, nilai-nilai, asumsi, prasangka dan pola perilaku kebiasaan. Pendekatan TD yang membentuk *resilience thinking*¹⁹ bisa dilakukan melalui *ecological reflexivity*. Pendekatan TD yang radikal membongkar tata pola pikir ini merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus (bukan hanya saat ada krisis sosial ekologis) karena sistem itu sendiri dinamis, seperti ungkapan Morin, “*History has not reached a stagnant end, nor is it triumphantly marching towards the radiant future. It is being catapulted into an unknown adventure.*”

Daftar Pustaka

- Biermann F *et al.* 2016. Down to Earth: Contextualizing the Anthropocene. *Global Environmental Change. Elsevier.* 39: 341–350. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.11.004>
- Brondizio ES *et al.* 2016. Re-conceptualizing the Anthropocene: A call for collaboration. *Global Environmental Change. Elsevier.* 39: 318–327. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.02.006>
- Clark T. 2019. The Value of Ecocriticism. 1 - The ‘Anthropocene’? Nature and Complexity. University of Durham. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316155073.002>
- Cote, Nightingale. 2012. Resilience thinking meets social theory: situating social change in socio-ecological systems. *SES. Prog Hum Geogr.* 36: 475-489.
- Crutzen PJ. 2006. The “Anthropocene”. In *Earth System Science in the Anthropocene*. Springer. 13-18. https://doi.org/10.1007/3-540-26590-2_3
- Díaz *et al.* 2015. The IPBES Conceptual framework-connecting nature and people. *Curr Opin Environ Sustain.* 14: 1-16. [10.1016/j.cosust.2014.11.002](http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002)
- Dilling, Lemos. 2011. Creating usable science: opportunities and constraints for climate knowledge use and their implications for science policy. *Glob. Environ. Change.* 21: 680-689.

¹⁹ <https://www.stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6928/1459560241272/SRC%20Applying%20Resilience%20final.pdf>

- Dryzek, Pickering. 2019. *The politics of the anthropocene*. Oxford University Press
- Gibbons M. 1999. Science's new social contract with society. *Nature*. 402 C81-C84
- Grant A. 2021. *Think again- the power of knowing what you don't know*. Penguin Random House
- Guimaraes *et al.* 2019. Who is doing inter- and transdisciplinary research, and why? An empirical study of motivations, attitudes, skills, and behaviours. *Elsevier*. 112:102441 <https://www.journals.elsevier.com/futures>.
- Kelman I. 2020. *Disaster by choice- how our actions turn natural hazards into catastrophes*. Oxford University Press
- Kirchhoff *et al.* 2013. Actionable knowledge for environmental decision making: broadening the usability of climate science. *Annu Rev Environ Resour*. 38:393–414.
- McGregor SLT. 2004. The nature of transdisciplinary research and practice. <https://kon.org/hswp/archive/transdiscipl.pdf>
- Montuori A. 2013. Complex thought- An overview of Edgar Morin's intellectual journey. *MetaIntegral Foundation*. Resource paper
- Nicolescu B. 2014. Methodology of transdisciplinarity. *World Futures*. 70:186–199. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-020-04440-5>
- Norström A *et al.* 2020. Principles for knowledge co-production in sustainability research, *Nature Sustainability*. Springer Nature Limited. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0448-2>.
- Schneider F *et al.* 2019. Transdisciplinary co-production of knowledge and sustainability transformations: Three generic mechanisms of impact generation. *Environmental Science and Policy*. 102: pp.26–35. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.08.017>
- Tengö *et al.* 2014. A Multiple Evidence Base approach to connecting diverse knowledge systems for ecosystem governance. *AMBIO*. 10.1007/s13280-014-0501-3



2. PENDEKATAN TRANSDISIPLIN PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Suria Tarigan

Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS),
IPB University

Abstrak

Mengingat bahwa penanganan masalah bencana dan pandemi bersifat multidimensi dan multipihak maka beberapa tahun terakhir ini mengemuka pentingnya pendekatan transdisiplin. Selain masalah bencana dan pandemi (misalnya COVID-19), terdapat banyak permasalahan di Indonesia yang mempunyai kompleksitas tinggi dan multi-*stakeholder*, contohnya adalah masalah rekonsiliasi kepentingan ekologi dan ekonomi sebuah lanskap gambut, masalah deforestasi dan lain-lainnya. Semua masalah tersebut mempunyai karakter yang sama dalam pemecahannya yaitu perlu memerlukan pendekatan transdisiplin. Pendekatan transdisiplin melibatkan cakupan *stakeholder* yang luas baik dari akademisi maupun non-akademisi (petani, pemerintah dan sektor swasta) dalam untuk mengkaji masalah yang riil dan kompleks, khususnya dalam bidang keberlanjutan (*sustainability*). Di samping itu, beragam sistem sosial dan kelembagaan termasuk norma dan nilai umum ikut diintegrasikan dalam pendekatan transdisiplin. Pendekatan transdisiplin fokus dalam pengembangan aspek konkret mulai dari prinsip-prinsip sains & teknologi sampai ke aspek filosofis & etika moral dan norma yang *intangibile*. Transdisiplin berusaha mencari konvergensi sudut pandang yang berbeda yang kemungkinan dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sudah memenuhi kaidah pendekatan transdisiplin berdasarkan kerangka yang dibuat oleh Lang *et al.* (2012).

Kata kunci: keberlanjutan, kompleksitas, multi-*stakeholder*, pandemi, transdisiplin.

2.1 Pendahuluan

Salah satu cara yang ditempuh sebuah negara untuk menghambat penyebaran pandemi COVID-19 adalah dengan membatasi interaksi sosial. Pembatasan interaksi sosial tersebut berdampak luas terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai sebuah bangsa yang mempunyai ikatan sosial yang kuat. Pembatasan interaksi sosial secara langsung tersebut berhasil menekan penyebaran pandemi COVID, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan ekonomi baik pada tingkat rumah tangga, regional maupun nasional. Pembatasan interaksi sosial menyebabkan banyak pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi terhenti, seperti menurunnya kegiatan wisata lokal, berkurangnya pengunjung pasar rakyat dan pusat-pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Berdasarkan keadaan ini terlihat bahwa dalam masalah pandemi COVID-19 diperlukan keterkaitan di antara berbagai disiplin ilmu, baik ilmu epidemiologi/ilmu kesehatan masyarakat yang mengatur protokol kesehatan, ilmu sosial yang terkait dengan interaksi sosial dan ilmu ekonomi mikro dan makro yang terkait dengan aktivitas perekonomian. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam penanganan COVID-19 adalah ilmu komunikasi masyarakat dalam memberikan informasi yang seimbang, tidak bias dan mencapai semua kelas sosial secara adil dan terpercaya. Penanganan masalah pandemi COVID-19 tidak hanya melibatkan para pihak dari kalangan pemerintah namun juga melibatkan kelompok masyarakat, sukarelawan, bahkan sampai tingkat RT dan rumah tangga. Memang tidak mudah untuk mencari solusi pemecahan pandemi COVID-19 yang melibatkan multidisiplin dan multipihak. Hal ini terlihat pada awal-awal pandemi di mana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah memberikan penekanan pada satu aspek, misalnya saja mengutamakan perputaran roda ekonomi sehingga menimbulkan kluster-kluster baru di pasar-pasar rakyat. Walaupun pada akhirnya pemerintah menyadari bahwa penanganan pandemi ini harus mencari keseimbangan di antara ilmu epidemiologi/ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan ilmu komunikasi masyarakat. Namun demikian dengan masih munculnya pro-kontra dalam masyarakat, misalnya terkait isu penting tidaknya vaksinasi yang berdampak pada pemberhentian beberapa pegawai negeri ataupun swasta yang menolak

untuk divaksin, menunjukkan bahwa belum semua dimensi dapat dipecahkan dalam penanganan masalah pandemi COVID-19 yang multidimensi. Mengingat bahwa penanganan masalah pandemi bersifat multidimensi dan multipihak maka beberapa publikasi di jurnal internasional mengemukakan pentingnya pendekatan transdisiplin dalam penanganan COVID-19 (Ortenzi *et al.* 2020; Aslan 2021). Selain masalah pandemi COVID-19, terdapat banyak permasalahan di Indonesia yang sama kompleksnya dengan penanganan pandemi, contohnya adalah masalah rekonsiliasi kepentingan ekologi dan ekonomi sebuah lanskap gambut, masalah deforestasi dan lain-lainnya. Semua masalah tersebut mempunyai karakter yang sama dalam pemecahannya yaitu perlu memerlukan pendekatan transdisiplin. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sudah memenuhi kaidah pendekatan transdisiplin berdasarkan kerangka yang dibuat oleh Lang *et al.* (2012).

2.2 Pendekatan Transdisiplin

Terminologi transdisiplin diperkenalkan di Eropa tahun 1990 sebagai sebuah metode riset yang bersifat lintas batas disiplin dan bertujuan memecahkan problem dunia nyata (*problem solving*). Pendekatan transdisiplin bertujuan untuk mengatasi kelemahan metode ilmiah tradisional yang didasarkan atas metode reduksionis dan menekankan pada persepektif disiplin tunggal (Max-Neef, 2005; Popa *et al.* 2015). Pendekatan transdisiplin melibatkan cakupan *stakeholder* yang luas, baik dari akademisi maupun non-akademisi (petani, pemerintah dan sektor swasta) dalam untuk mengkaji masalah yang riil dan kompleks, khususnya dalam bidang keberlanjutan (*sustainability*) (Hadorn *et al.* 2006; Kurian, 2017). Pendekatan transdisiplin tidak hanya sekadar melibatkan ilmuwan multidisiplin (misalnya disiplin matematika, kimia, ekonomi, dan lain-lain) tapi juga melibatkan para professional, sektor industri, dan kelompok sosial secara luas. Di samping itu, beragam sistem sosial dan kelembagaan termasuk norma dan nilai umum ikut diintegrasikan dalam pendekatan transdisiplin.

Pendekatan transdisiplin fokus dalam pengembangan aspek konkret mulai dari prinsip-prinsip sains & teknologi sampai ke aspek filosofis & etika moral dan norma yang *intangible*. Transdisiplin berusaha mencari konvergensi sudut pandang yang berbeda yang kemungkinan dapat memperbaiki pengambilan keputusan (Klein, 2008).

Umumnya terdapat kritik terhadap pelaksanaan pendekatan transdisiplin yang didasarkan pada pandangan bahwa transdisiplin memberikan peluang kepada *stakeholder* tertentu terkait suatu subjek di mana mereka mempunyai pengertian dan pengetahuan yang minim terhadap subjek tersebut yang akhirnya dapat menghambat pencapaian solusi teknis dan sosial yang efektif.

Tim manajemen dalam pelaksanaan suatu transdisiplin perlu menyadari bahwa *stakeholder* yang mempunyai pengetahuan terbatas dapat berdampak pada pencapaian tujuan dan keputusan yang dihasilkan. Kajian-kajian terhadap pendekatan transdisiplin menekankan bahwa terdapat keterkaitan faktor sosial dan kognitif terhadap hasil yang akan diperoleh sehingga prosedur transdisiplin harus didesain dengan hati-hati (Klein, 2008).

2.3 Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin

Pendekatan multidisiplin masih menyisakan adanya perbedaan disiplin berdasarkan ontologinya yang menyebabkan ilmu sosial dan ilmu alam masih terpisah, sehingga tidak mampu memahami isu-isu yang kompleks seperti pengelolaan sebuah lanskap (Hospes *et al.* 2017). Pada pendekatan multidisiplin *stakeholders* sering kali dilihat sebagai responden dan/atau sebagai pengguna akhir dari produk pengetahuan akademis dan bukannya sebagai *co-producers* dari produk pengetahuan serta agen perubahan. Sebagai akibatnya, pendekatan saintifik multidisiplin dengan mudah melewati pandangan penting (berdasarkan *tacit*, praktikal, teknikal, budaya atau pengetahuan kontekstual) dan dapat menjadi tidak relistis dan tidak efektif dalam membuat perubahan.

Pendekatan interdisiplin dapat mengatasi sebagian kelemahan dari pendekatan multidisiplin tersebut di atas. Sebuah pendekatan interdisiplin menawarkan prospek yang lebih baik dalam mengkaji interaksi dan kombinasi sistem, rantai dan ketentuan yang berbeda. Sementara itu, pendekatan transdisiplin

menantang peneliti untuk menemukan konsep dan kerangka teoritis yang dapat mengakomodasi pandangan berbeda terhadap karakter objek dari sebuah kajian dan kemudian mengembangkan pandangan terintegrasi yang baru.

2.4 Riset Transdisiplin

Dari sekian banyak literatur yang mengulas riset transdisiplin, maka langkah riset transdisiplin yang ditulis oleh Lang *et al.* (2012) merupakan konsep yang paling sistematis. Berikut ini dilakukan *review* terhadap riset transdisiplin yang diambil terutama dari (Lang *et al.* 2012). Konsep ini dipakai oleh peneliti transdisiplin di Swiss untuk diaplikasikan pada permasalahan sumber daya air di Swiss (Hoffmann *et al.* 2017).

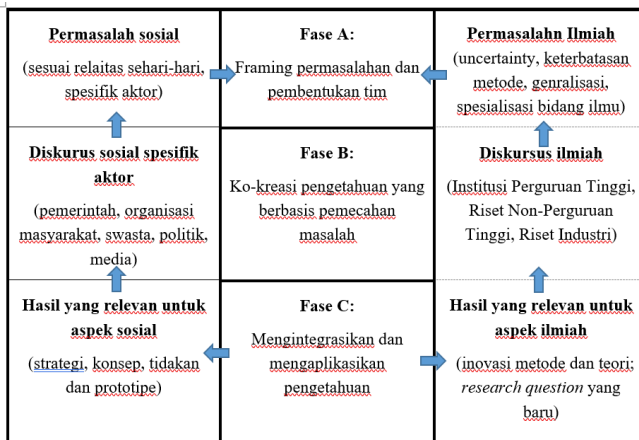
Pendekatan transdisiplin bersifat refleksif, integratif, berprinsip saintifik yang didasari metode yang bertujuan pada solusi atau transisi permasalahan sosial dan mengintegrasikan pengetahuan dari beragam sumber baik pengetahuan saintifik maupun sosial. Definisi tersebut menekankan bahwa riset transdisiplin perlu mengikuti persyaratan berikut: (a) fokus pada permasalahan yang bersifat sosial; (b) mendorong proses belajar bersama di antara peneliti dari berbagai disiplin yang berbeda (dari akademisi dan dari lembaga penelitian lainnya) beserta aktor di luar akademisi; dan (c) bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan untuk berorientasi pemecahan masalah (*solution-oriented*), dan tangguh secara sosial (*socially robust*) (Gibbons 1999), dan dapat ditransfer baik ke ranah ilmiah maupun sosial. Berkaitan dengan hal yang terakhir, penting mempertimbangkan bahwa transdisiplin dapat menyediakan berbagai fungsi termasuk *capacity building* dan legitimasi (Scholz 2011).

2.5 Proses Riset Transdisiplin

Sebuah konsep pendekatan riset transdisiplin yang diterima dengan luas dibuat oleh Lang *et al.* (2012). Konsep ini melibatkan tiga fase kolaboratif di antara aktor saintifik dan non-saintifik dalam:

1. Menyusun kerangka permasalahan riset secara kolaboratif dan membangun tim riset kolaboratif (Fase A);
2. Secara bersama menghasilkan pengetahuan (*knowledge co-production*) yang berorientasi pemecahan masalah (*solution-oriented*) dan bisa ditransfer (*transferable*) melalui riset kolaboratif (Fase B); dan
3. Melakukan re-integrasi (*re-integrate*) dan mengaplikasikan produk pengetahuan dalam praktik saintifik dan sosial (Fase C).

Berdasarkan konsep tersebut (Gambar 4), riset transdisiplin secara umum, khususnya dalam *sustainability science* merupakan sebuah “*interface practice*”: pertama, bermula dari permasalahan bersifat sosial yang memicu *scientific research questions*; kedua, bergantung pada proses kerja sama di antara aktor saintifik dan sosial (Siebenhuener 2004). Melalui proses tersebut, riset transdisiplin menggabungkan dua jalur (*pathways*) untuk mengkaji permasalahan riil dunia (*real world problems*): satu jalur berkomitmen untuk mengeksplorasi pilihan baru dalam memecahkan permasalahan sosial (jalur solusi permasalahan pada lengan kiri Gambar 4); jalur dua diperuntukan bagi pengembangan pendekatan interdisiplin, metode, dan pengertian umum terkait bidang permasalahan yang sedang dikaji (jalur *scientific innovation* pada lengan kanan Gambar 4) (Bergmann *et al.* 2010).



Gambar 4. Tiga fase kolaboratif di antara aktor saintifik dan non-saintifik pada riset transdisiplin (Sumber: adaptasi dari Lang *et al.* 2012)

Dalam konsep bertipe ideal seperti yang disajikan pada Gambar 4, sebuah proses riset transdisiplin dikonseptualisasikan sebagai sebuah sekuens dari 3 fase yang meliputi: secara kolaboratif melakukan *framing* permasalahan dan membangun tim riset kolaborasi (Fase A); secara kolaboratif menghasilkan (*co-produce*) pengetahuan yang berorientasi pemecahan masalah (*solution-oriented*) dan bisa ditransfer (*transferable*) melalui riset kolaboratif (Fase B); dan melakukan re-integrasi (*re-integrate*) dan mengaplikasikan produk pengetahuan dalam praktik saintifik dan sosial (Fase C). Dengan demikian, tujuan utama dari Fase A adalah mengintegrasikan jalur pemecahan solusi (*problem solution*) dan Fase B merupakan inovasi saintifik untuk memungkinkan riset kolaboratif (*integrative research pathway*), dan Fase C menghasilkan *transferable knowledge* yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik sosial dan pengetahuan saintifik. Walaupun seakan konsep tersebut mengindikasikan proses yang agak linier, masing-masing fase dan urutan keseluruhan sering kali harus dilakukan dalam suatu siklus iteratif dan rekursif yang juga menandakan perlunya refleksif pada transdisiplin (Spangenberg, 2011).

Fase A: Menyusun kerangka permasalahan riset secara kolaboratif dan membangun tim riset kolaboratif

Fase ini terdiri dari beberapa aktivitas: identifikasi dan deskripsi permasalahan riil, menetapkan objek riset dan secara kolaboratif memformulasikan tujuan riset dan aspek sosial yang relevan, membuat desain konseptual dan kerangka metodologi untuk integrasi pengetahuan, dan menyusun tim riset. Hal yang penting pada fase ini adalah menerjemahkan permasalahan riil ke dalam batasan objek riset yang dapat dilaksanakan dan memungkinkan untuk mengintegrasikan hasilnya pada implementasi sosial serta juga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan (Clark *et al.* 2011).

Fase B: Menghasilkan pengetahuan (*knowledge co-production*) secara kolaboratif yang berorientasi pemecahan masalah (*solution-oriented*) dan dapat ditransfer (*transferable*) melalui riset kolaboratif

Fase ini merupakan fase pelaksanaan riset sesungguhnya. Pada fase ini dilakukan adopsi terhadap metode saintifik integratif, kemudian dikembangkan, dan diterapkan untuk memfasilitasi perbedaan dan integrasi berbagai pengetahuan yang datang bersama dalam proses. Desain riset yang

dibuat harus mampu membuat kolaborasi di antara disiplin yang berbeda dan juga di antara peneliti dan aktor di luar akademisi secara fungsional dan dinamis. Pada setiap langkah dari proses riset perlu ditetapkan siapa berkontribusi apa serta caranya (Kruetli *et al.* 2010a, b). Dengan demikian penting untuk mempertimbangkan berbagai tingkat keterlibatan *stakeholder* dalam proses riset (Wiek 2007; Stauffacher *et al.* 2008).

Fase C: Melakukan re-integrasi (*re-integrate*) dan mengaplikasikan produk pengetahuan dalam praktik saintifik dan sosial

Fase ini adalah proses untuk pemanfaatan dan implemenatasi hasil riset yang dihasilkan pada Fase B. Fase ini bukan bentuk klasik transfer pengetahuan dari sains ke praktik, karena berbagai perspektif, *world views*, nilai-nilai, dan jenis-jenis pengetahuan diintegrasikan dalam keseluruhan proses dari riset transdisiplin (van Kerkhoff *and* Lebel 2006; Talwar *et al.* 2011). Transfer pengetahuan yang dimaksud pada riset transdisiplin adalah integrasi pengetahuan yang dihasilkan pada Fase B ke dalam (a) praktik sosial (misalnya, *evidence-based strategies* dan program aksi yang dibuat selama riset) and (b) praktik saintifik (misalnya, perbandingan, generalisasi, dan penyatuan produk pengetahuan kepada literatur saintifik). Selain produk-produk *tangible* seperti strategi, proses transdisiplin, jika didesain dengan baik akan menghasilkan manfaat *intangibel* seperti meningkatnya kapasitas pengambilan keputusan dari aktor-aktor yang terlibat (Wiek *et al.* 2006; Walter *et al.* 2007). Selain itu, pendekatan transdisiplin dapat memicu proses pembelajaran yang intensif. Hal ini dapat memberikan motivasi dan menguatkan *stakeholders* untuk berkontribusi lebih aktif dalam implementasi atau dalam proses pengambilan keputusan.

2.6 Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia dari Persepektif Transdisiplin

Berdasarkan kerangka yang dibuat oleh Lang *et al.* (2012) di mana pendekatan transdisiplin mempunyai 3 karakter yaitu: 1) Terdapat permasalahan sosial (pandemi) yang kompleks dan membutuhkan solusi kolaboratif lintas *stakeholder* baik pemerintah, ilmuwan, swasta, masyarakat semua lapisan, dan media, 2) Menghasilkan pengetahuan (*knowledge co-production*) secara

kolaboratif yang berorientasi pemecahan masalah (*solution-oriented*) dan dapat ditransfer (*transferable*) melalui riset kolaboratif, 3) Melakukan re-integrasi (*re-integrate*) dan mengaplikasikan produk pengetahuan dalam praktik saintifik dan sosial.

Pada awal pandemi terlihat penanganan yang dilakukan masih bersifat parsial, lebih menekankan pada pertimbangan menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5% sehingga hasilnya tidak efektif. Setelah melewati beberapa gelombang serangan pandemi, pemerintah mulai membuat keseimbangan aspek ekonomi, sosial & budaya dengan melibatkan multipihak dalam penanganannya seperti misalnya mendistribusikan kegiatan *lab tracing* dan fasilitas isoman ke berbagai universitas seperti IPB, dan meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya *social distancing*. Karakter pendekatan transdisiplin No. 1 berdasarkan kerangka pendekatan transdisiplin dari Lang *et al.* (2012) sudah terpenuhi.

Pandemi COVID-19 juga sarat dengan elemen teknologi dalam penanganannya, baik *medical engineering*, *social & economic engineering*, dan *nutrition engineering*. Ketiga aspek ini sama pentingnya. Namun kalau kita lihat negara-negara barat dengan *medical dan nutrition engineering* yang lebih bagus dari Indonesia, namun tidak menjamin terlepas dari krisis pandemi saat ini. Saat ini negara-negara *superpower* teknologi malah sedang masuk ke gelombang 3 atau 4, sementara Indonesia sudah keluar dari krisis pandemi. Salah satu keberhasilan Indonesia dalam menangani krisis pandemi adalah kemampuan dalam berkolaborasi lintas sektoral dan organisasi masyarakat dalam menghasilkan dan mentransfer *knowledge* penanganan pandemi melalui saluran-saluran yang multidimensi, baik melalui organisasi kemasyarakatan, media, dan organisasi pemerintah dan semua lapisan masyarakat (*knowledge co-production*). Dalam kaitan ini, karakter ke-2 kerangka pendekatan transdisiplin dari Lang *et al.* (2012), yaitu *knowledge co-production* secara kolaboratif yang berorientasi pemecahan masalah (*solution-oriented*) sudah teridentifikasi pada penanganan COVID-19 di Indonesia.

Karakter selanjutnya (karakter ke-3 dari Lang *et al.* 2019) yaitu melanjutkan karakter 2 tersebut di atas menjadi sebuah produk saintifik dan diskursus ilmiah yang dapat digeneralisasi. Karakter ke-3 dari pendekatan transdisiplin ini masih perlu ditindaklanjuti dalam kasus penanganan COVID-19 di Indonesia sehingga *knowledge* yang sudah diperoleh pada karakter ke-2 dapat di-*scaling up* di seluruh Indonesia, regional, bahkan internasional. Kriteria ini memerlukan peran intensif dari perguruan tinggi untuk dapat melakukan sistesis dari *knowledge* (pengetahuan) yang sudah berhasil melepaskan Indonesia dari krisis pandemi.

2.7 Tantangan Riset Transdisiplin Masa Pandemi COVID-19.

Berdasarkan langkah-langkah dan proses riset transdisiplin, maka riset transdisiplin membutuhkan interaksi yang sangat intensif di antara peneliti akademis dan *stakeholder* non-akademis (Gambar 4). Salah satu metode yang digunakan pada tahapan awal riset transdisiplin adalah *immersion*. Pada tahapan *immersion* peneliti 'meleburkan' diri dengan kehidupan sehari-hari *stakeholder*, khususnya *stakeholder* yang tergolong *grass root*. Tujuan tahapan *immersion* ini adalah untuk mendapatkan pandangan sesungguhnya dari *stakeholder* terkait objek yang sedang diteliti (misalnya terkait pandemi COVID-19). Berbeda dengan visitasi di mana interaksi dengan *stakeholder* hanya dilakukan dengan wawancara dan observasi tanpa partisipasi, maka pada *immersion* terjadi pendalaman konteks dengan aktivasi indra dan rasa dan umumnya tanpa disertai pemandu.

Sebelum terjadi pandemi maka interaksi dengan *stakeholder* dalam bentuk *immersion* tersebut bukan menjadi suatu masalah. Pada saat pandemi di mana keharusan mematuhi aturan *social distancing* maka implementasi *immersion* pada riset transdisiplin mengalami hambatan.

Mengingat belum diketahuinya kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir maka peneliti yang menggunakan pendekatan transdisiplin mencari cara untuk tetap dapat memperoleh persepsi semua *stakeholder* secara memadai tanpa harus bertemu muka dengan muka. Dengan berkembangnya teknologi *artificial intelligence* dan *bigdata* maka keterbatasan akibat adanya *social*

distancing selama pandemi ini sebagian diatasi. Salah satu perangkat yang dapat dipakai untuk *harvest* persepsi *stakeholder* dari media sosial adalah NVivo. NVivo adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian kualitatif dan metode campuran. Secara khusus, digunakan untuk analisis data teks, audio, video, dan gambar yang tidak terstruktur, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) wawancara, kelompok fokus, survei, media sosial, dan artikel jurnal (lihat <https://www.qsrinternational.com>). Perangkat Nvivo dapat 'memanen' berbagai aspek penanganan pandemi COVID-19 yang dikemukakan berbagai media sosial di tanah air, baik oleh *grass root* dan dapat menggantikan sedikit banyaknya tahapan *immersion*.

2.8 Kesimpulan

Pemecahan masalah yang bersifat kompleks seperti pandemi COVID-19 yang melibatkan berbagai *stakeholder* memerlukan pendekatan baru. Sekadar pendekatan multidisiplin tidak mencukupi untuk pemecahan masalah kompleks tersebut. Pendekatan transdisiplin bersifat refleksif, integratif, dimotori oleh prinsip metode saintifik yang bertujuan untuk memperoleh solusi atau transisi permasalahan sosial dan sekaligus permasalahan ilmiah dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan ilmiah dan sosial. Berdasarkan karakter pendekatan yang dibuat oleh Lang *et al.* (2012) penanganan COVID-19 di Indonesia sudah memenuhi 2 dari 3 karakter pendekatan transdisiplin. Karakter ke 3 dari pendekatan transdisiplin ini masih perlu ditindaklanjuti dalam kasus penanganan COVID-19 di Indonesia sehingga *knowledge* yang sudah diperoleh pada karakter ke-2 dapat di-*scaling-up* di seluruh Indonesia, regional, bahkan internasional.

Daftar Pustaka

- Aslan D. 2021. Can transdisciplinary approaches contribute to the COVID-19 fight?. *Glob Health Promot.* 28(2):72-77. doi: 10.1177/17579759211002376.
- Bergmann M, Jahn T, Knobloch T, Krohn W, Pohl C, Schramm E. 2010. Methoden transdisziplinärer Forschung: Ein Ueberblick mit Anwendungsbeispielen. Campus Verlag, Frankfurt/Main, Germany

- Clark WC, Tomich TP, van Noordwijk M, Guston D, Catacutan D, Dickson NM *et al.* 2011 Boundary work for sustainable development: natural resource management at the Consultative Group on International Agricultural Research .CGIAR. *Proc Natl Acad Sci USA* [Epub ahead of print]. doi:10.1073/pnas.0900231108
- Clark WC, Dickson M. 2003. Sustainability science: the emerging research program. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 100.14.: 8059-8061. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1231333100>
- Gibbons M. 1999. Science's new social contract with society. *Nature*. 402.6761 Suppl.: C81-C84
- Hadorn GH, Bradley D, Pohl C, Rist S, Wiesmann U. 2006. Implications of transdisciplinarity for sustainability research. *Ecol. Econ.* 60 .1.: 119–128.
- Hoffmann S, Pohl C, Hering JG. 2017. Methods and procedures of transdisciplinary knowledge integration: empirical insights from four thematic synthesis processes. *Ecology and Society* 22(1):27. <https://doi.org/10.5751/ES-08955-220127>
- Hospes O, Kroeze C, Oosterveer P, Schouten G, Slingerland M. 2017. New generation of knowledge: Towards an inter- and transdisciplinary framework forsustainable pathways of palm oil production. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*. 80: 75–84
- King D, Durbin J, Godoy F. 2018. Landscape Assessment Framework: Concept and guidelines. Conservation International
- Klein JT. 2008. Evaluation of interdisciplinary and transdisciplinary research: a literaturereview. *Am. J. Prev. Med.* 35(2): S116–S123.
- Kru¨tli P, Flu¨eler T, Stauffacher M, Wiek A, Scholz RW. 2010a. Technical safety vs. public involvement? A case study on the unrealized project for the disposal of nuclear waste at Wellenberg. Switzerland. *J Integr Environ Sci.* 7(3):229–244.
- Kru¨tli P, Stauffacher M, Flu¨eler T, Scholz RW. 2010b. Functional– dynamic public participation in technological decision-making: site selection processes of nuclear waste repositories. *J Risk Res.* 13(7): 861–875.

- Kurian M. 2017. The water-energy-food nexus: trade-offs, thresholds and transdisciplinary approaches to sustainable development. *Environ. Sci. Policy*. 68: 97–106.
- Lang *et al.* 2012. Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and challenges. *Sustain Sci*. DOI 10.1007/s11625-011-0149-x.
- Laws D, Scholz RW, Shiroyama H, Susskind L, Suzuki T, Weber O. 2004. Expert views on sustainability and technology implementation. *Int J Sustain Dev World Ecol*. 11.3.: 247–261.
- Mausser W, Klepper G, Rice M, Schmalzbauer BS, Hackmann H, Leemans R, Moore H. 2013. Transdisciplinary global change research: the co-creation of knowledge for sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 5(3-4): 420–431. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2013.07.001>
- Max-Neef MA. 2005. Foundations of transdisciplinarity. *Ecol. Econ*. 53 (1): 5–16.
- Moser SC. 2016. Can science on transformation transform science? Lessons from co-design. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 20: 106–115.
- Ortenzi F, Albanese E, Fadda M. 2020. 2A Transdisciplinary Analysis of COVID-19 in Italy: The Most Affected Country in Europe. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 17: 9488. doi:10.3390/ijerph17249488
- Popa F, Guillermin M, Dedeurwaerdere T. 2015. A pragmatist approach to transdisciplinarity in sustainability research: from complex systems theory to reflexive science. *Futures*. 65: 45–56.
- Siebenhuener B. 2004. Social learning and sustainability science: which role can stakeholder participation play? *Int J Sustain Dev*. 7:146–163.
- Scholz RW. 2011. Environmental literacy in science and society. From knowledge to decisions. Cambridge University Press. Cambridge: UK.
- Spangenberg JH. 2011. Sustainability science: a review, an analysis and some empirical lessons. *Environ Conserv*. 38: 275–287.

- Stauffacher M, Flüeler T, Kru"tli P, Scholz RW. 2008. Analytic and dynamic approach to collaboration: a transdisciplinary case study on sustainable landscape development in a Swiss prealpine region. *System Pract Action Res.* 21: 409–422.
- Wiek A. 2007. Challenges of transdisciplinary research as interactive knowledge generation—experiences from transdisciplinary case study research. *GALA Ecol Perspect Sci Soc.* 16: 52–57.
- van Kerkhoff L, Lebel L. 2006. Linking knowledge and action for sustainable development. *Annu Rev Environ Resour.* 31: 445–477.
- Talwar S, Wiek A, Robinson J. 2011. User engagement in sustainability research. *Sci Public Policy.* 38: 379–390.
- Walter AI, Helgenberger S, Wiek A, Scholz RW. 2007. Measuring societal effects of transdisciplinary research projects: design and application of an evaluation method. *Eval Program Plann.* 30: 325–338.

3. VIRUS COVID-19: SEBUAH PERJALANAN MEMAHAMI EVOLUSI DAN INTERAKSI DALAM KEHIDUPAN

Damayanti Buchori

Abstrak

Interaksi antara manusia dan virus telah terjadi ratusan juta tahun lalu, seiring dengan evolusi pada manusia dan virus. Interaksi yang terjadi dapat mengambil berbagai bentuk asosiasi dari parasitisme sampai mutualisme. Tulisan ini mencoba membahas interaksi manusia dengan virus SARS-CoV-2 penyebab pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia. Interaksi evolusi dibahas sebagai sebuah proses dan peluang-peluang yang akan memiliki lintasan (*trajectory*) ke depan yang beragam, yang dapat mengubah pandemi menjadi endemi.

3.1 Pendahuluan

SARS-CoV-2 coronavirus adalah virus yang menjadi penyebab Pandemi COVID-19. Virus ini pertama kali masuk dalam radar perhatian dunia pada bulan Desember 2019¹. Kehadirannya membuat gagap dunia dan mengubah semua tatanan kehidupan. Virus penyebab pandemi COVID-19 ini termasuk dalam famili Coronavirus, yaitu kelompok family yang umum menjadi virus pada mamalia dan burung. Keberadaan coronavirus sebenarnya sudah cukup lama di dunia ini. Menurut Wertheim *et al.* (2013), leluhur bersama terbaru (*most recent common ancestor*) dari coronavirus diduga telah hadir sekitar 10.000 tahun yang lalu (walapun ada yang menduga leluhur bersama terbaru ini telah ada 55 juta tahun lalu).

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic diakses pada 18-12-2021

Semenjak SARS-CoV-2 terdeteksi di akhir tahun 2019, telah ada berbagai varian yang muncul, beberapa di antaranya adalah Alpha, Beta, Delta, Mu, dan Omicron varian. Keberadaan varian-varian baru ini sebenarnya merupakan hal yang umum terjadi. Seorang ahli dari Johh Hopkins, Stuart Ray MD, menyatakan bahwa varian baru sebenarnya bisa muncul setiap minggu². Pada umumnya varian tersebut muncul, lalu menghilang. Ada yang bertahan tetapi tidak menyebar, ada yang muncul, menyebar tetapi kemudian menghilang. Apakah sebenarnya yang terjadi? Mengapa selalu muncul varian baru? Apakah kita perlu khawatir? Bagaimana kita perlu menyikapinya? Pertanyaan ini sering kali muncul di masyarakat. Munculnya varian-varian baru ini sering diikuti oleh kegelisahan masyarakat dan kekhawatiran akan munculnya varian yang lebih mematikan dari yang sebelumnya. Sebenarnya kemunculan varian baru ini merupakan proses evolusi yang umum terjadi dalam kehidupan. Virus dan mikroba pada umumnya dapat beradaptasi dengan cepat pada lingkungan baru. Hal ini disebabkan virus dan mikroba memiliki siklus hidup yang cepat (*short generation time*), ukuran populasinya yang besar dan tingginya laju mutasi serta fleksibilitas pada genom yang memfasilitasi percepatan evolusi (Callaway, 2021). Akibatnya, kemunculan varian baru dalam populasi virus merupakan hal yang sangat alamiah.

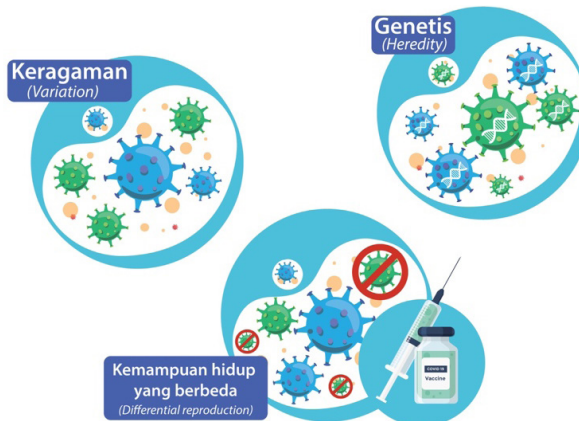
3.2 Evolusi: Apakah itu?

Evolusi adalah perubahan karakter dari suatu populasi yang muncul pada suatu generasi, dan dapat diturunkan pada generasi berikutnya (Hall and Hallgrimsson, 2008). Mekanisme dari evolusi adalah seleksi alam. Menurut Ridley (1993), ada 3 syarat agar seleksi alam dapat bekerja:

1. Adanya variasi (**keragaman**) dalam karakter individu dari suatu populasi
2. Variasi tersebut dapat diturunkan pada anak-cucu (pada keturunannya) (**heredity**)
3. Karakter yang dimaksud dapat memengaruhi kebugaran (**fitness**) dari individu tersebut.

² <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/a-new-strain-of-coronavirus-what-you-should-know> diakses pada 18-12-2021

Keragaman karakter menjadi kunci dari perubahan populasi. Hal ini dapat terjadi apabila keragaman karakter tersebut berpengaruh terhadap reproduksi, sintasan (*survival*), lama hidup dan berbagai karakter lain yang berhubungan dengan *fitness* individu. Jika karakter yang dimaksud dapat diturunkan, maka karakter tersebut akan memegang kunci bagi keberhasilan hidup populasi dan keturunannya di masa mendatang (Gambar 5).



Dimodifikasi dari Buku: "Evolution" Penulis: Andrea Berema

Gambar 5. Tiga prasyarat terjadinya evolusi, yaitu adanya keragaman dalam sifat –(*variation in traits*), keragaman dapat diturunkan (*heredity*)–, sifat yang diturunkan memengaruhi perbedaan *fitness*

Note untuk gambar: keragaman digambarkan sebagai virus dengan ukuran dan warna berbeda; *hereditary* digambarkan dengan kemampuan replikasi dari virus (misal hijau menghasilkan hijau, biru menghasilkan biru); varian yang berbeda (hijau dan biru) memiliki ketahanan yang berbeda terhadap tekanan seleksi. Tekanan seleksi dalam gambar ini digambarkan dengan vaksin.

Tiga prinsip dasar di atas merupakan prasyarat terjadinya evolusi. Keragaman merupakan prasyarat utama dalam evolusi. Tanpa adanya keragaman dalam sebuah populasi, maka seleksi alam tidak dapat bekerja (tidak dapat menyeleksi individu yang memiliki karakter yang lebih unggul), dan tidak akan terjadi proses evolusi. Gambar 5 di atas menjelaskan situasi ini dengan memberikan gambaran tentang adanya keragaman yang berbeda (misal keragaman pada virus digambarkan dengan dua varian virus, yaitu biru dan hijau dengan berbagai ukuran). Keragaman dalam warna dan ukuran ini ternyata terkait

dengan kemampuan hidup/survival dari virus itu. Misalnya varian hijau ukuran besar dan kecil ternyata lebih rentan terhadap vaksin dibandingkan varian biru. Jadi vaksin yang digunakan ternyata mematikan virus varian hijau berukuran besar dan kecil dengan lebih efektif daripada virus varian biru, sehingga lambat laun varian hijau akan berkurang, sampai populasi akhirnya didominasi oleh varian biru. Perubahan inilah yang disebut evolusi.

3.3 Sumber Keragaman dan Kemunculan Varian Baru

Mutasi adalah sumber dari keragaman gen dan tiap-tiap spesies mempunyai laju mutasi yang berbeda. Apakah yang dimaksud dengan mutasi dan apa pengaruh mutasi pada virus? Secara sederhana, mutasi adalah perubahan yang terjadi pada sekuens nukleotida (materi genetik) di dalam sel. Perubahan ini dapat terjadi pada gen, ataupun lebih luas pada kromosom. Mutasi dapat terjadi secara random karena ada kesalahan (eror) dalam proses replikasi DNA/RNA, maupun karena ada faktor luar seperti adanya mutagen (radiasi, sinar UV, bahan kimia tertentu) yang menyebabkan perubahan itu terjadi³. Adapun dampak dari perubahan sekuens genetik terhadap virus dapat berupa: 1) tidak ada pengaruhnya pada virus (*silent mutation*); 2) merugikan virus; 3) menguntungkan virus. Dari ketiga kemungkinan yang ada tersebut, yang sangat mengkhawatirkan manusia adalah yang terakhir, karena dapat meningkatkan virulensi, patogenisitas, maupun tingkat kematian pada populasi manusia (Alizon and Sofonea, 2021). Bagaimanakah lintasan (*trajectory*) bagi virus COVID-19? Apakah arah evolusi dari virus COVID-19 akan mengarah pada meningkatnya virulensi dan patogenitas atau sebaliknya justru berevolusi menuju avirulen sehingga di masa depan penyakit virus COVID-19 berubah menjadi endemi?

3.4 Evolusi dan Kontinum dari Parasitisme-Mutualisme: Sebuah Renungan

Adanya hubungan erat antara dua organisme seperti mikroba dan virus dengan inangnya (manusia, hewan, tanaman) secara umum bisa disebut sebagai simbiosis. Simbiosis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

³ <https://www.nature.com/scitable/definition/mutation-8/> diakses pada 18-12-2021

semua jenis interaksi yang erat antara dua organisme, mulai dari parasitisme (di mana salah satu pihak dirugikan sementara pihak lainnya diuntungkan), komensalisme (di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan), sampai pada mutualisme (di mana kedua pihak sama-sama diuntungkan (Sapp, 2004).



Gambar 6. Kontinum dari Interaksi Antara Dua Organisme

Perubahan dari parasitisme menjadi mutualisme dapat terjadi melalui proses evolusi seperti telah diterangkan di atas. Berberapa contoh dari perubahan parasitisme menjadi mutualisme telah dilaporkan terjadi pada virus myxoma yang menyerang kelinci di Australia (Kerr *et al.* 2012). Virus myxoma pertama kali diintroduksi ke Australia tahun 1950 untuk mengatasi populasi kelinci yang dianggap hama. Introduksi awal dari virus ini menyebabkan kematian hingga 99% pada populasi kelinci (Read & Kerr, 2017). Dalam beberapa tahun ternyata virulensi virus myxoma ini secara alami menurun menjadi 95% bahkan 50%. Di samping itu, ternyata kelinci juga lambat laun menjadi semakin resisten terhadap virus myxoma ini. Untuk kasus virus dengan kelinci, ada faktor tambahan yang dapat turut memengaruhi penurunan virulensi virus myxoma. Faktor tersebut adalah vektor nyamuk. Penularan virus *myxoma* dari satu kelinci ke kelinci lain ternyata harus melalui nyamuk sebagai vektor. Ternyata untuk kasus-kasus di mana virus sangat mematikan, kelinci yang terinfeksi varian yang ganas lebih cepat mati dibandingkan kelinci yang terinfeksi varian yang kurang ganas. Kematian yang cepat ini ternyata menurunkan peluang ditularkannya virus ganas ini ke kelinci lain, karena nyamuk belum mendapatkan kesempatan untuk menghisap darah dan menularkan pada kelinci lain. Akibatnya, virus-virus virulen akan hilang karena tidak sempat ditularkan dan yang bertahan adalah virus yang tidak begitu virulen. Contoh kelinci-*myxoma* virus adalah contoh klasik yang sangat dikenal sebagai bukti terjadinya penurunan virulensi. Dalam interaksi yang lain telah juga dikenal contoh-contoh perubahan interaksi dari parasitisme

menjadi mutualisme, seperti pada beberapa serangga penyerbuk dengan tanaman yang diserbukinya. Contohnya adalah tanaman kelapa sawit dengan penyerbuknya yaitu kumbang *Elaidobius kamerunicus* (Syed, 1979) dan tanaman *Ficus* dengan serangga penyerbuk dari tawon Agaonidae (Machado *et al.* 2005). Dalam kedua kasus ini, penyerbuk adalah herbivor yang justru datang dan memakan polen serta meletakkan telur pada bunga. Jadi penyerbuk-penyerbuk ini sebenarnya adalah herbivor. Tetapi, dalam proses mereka memakan polen, serangga-serangga ini sekaligus menjadi penyerbuk. Dua kejadian ini adalah contoh bagaimana evolusi mengubah hubungan awal yang merugikan (parasitisme) antara “hama” herbivor ini dengan tumbuhannya, dan lambat laun berubah menjadi saling menguntungkan (mutualisme).

3.5 Evolusi Virus COVID-19: Kemanakah?

Pertanyaan yang menarik yang bisa diajukan adalah apakah yang akan terjadi dengan virus COVID-19? Apakah Virus COVID-19 bisa berevolusi menuju virus yang virulensinya menurun, bahkan menuju avirulen? Bagaimana prediksi ke depan? Jawabannya bisa “ya” dan “tidak”, tergantung pada kondisi dan situasi yang ada. Tetapi pada kesempatan ini, penulis ingin mengeksplorasi kemungkinan jawaban yang lebih mengarah pada “ya”, yaitu terjadi penurunan virulensi. Hal ini didasarkan pada pemahaman dan bukti empiris yang ada, bahwa ketika ada virus dan patogen yang “meloncat” ke spesies inang baru dan memiliki daya bunuh yang tinggi, akan terjadi seleksi alam yang kuat agar patogen tersebut menurun virulensinya (Read, 1994). Hal ini disebabkan pada virus yang mematikan inang dengan cepat, kesempatan untuk transmisi (ditularkan) justru akan menurun, terutama jika tidak ada transmisi horisontal (Kerr, 2012). Dengan kematian inang yang cepat, maka penularan pada individu lain justru berkurang peluangnya, karena kesempatan untuk bisa ditransmisikan juga berkurang. Transmisi justru akan lebih tinggi bila inang/penderita tidak cepat mati karena peluang untuk dapat ditransmisikan ke inang/penderita lain akan meningkat. Jadi, secara teori, pada kondisi normal, suatu patogen/virus yang mempunyai daya bunuh tinggi secara alami akan berevolusi menuju tingkat virulensi yang lebih rendah. Namun, pada saat yang sama, spesies inang juga melakukan pertahanan diri

dengan berevolusi ke arah resistensi (lebih resisten terhadap serangan virus). Akibatnya hubungan inang-virus ini akan memasuki kondisi ekuilibrium baru, yaitu virus yang menurun virulensinya dan inang yang lebih resisten. Inilah yang bisa mengubah situasi pandemik menjadi endemik. Tetapi patut dicatat, bahwa evolusi akan tetap terjadi. Kondisi inang yang lebih resisten ini bahkan dapat menjadi faktor baru yang dapat memengaruhi virus/patogen untuk berevolusi ke arah patogenisitas yang lebih tinggi. Hubungan timbal balik ini adalah sebuah interaksi yang kompleks. Kompleksitas interaksi inilah yang akhirnya akan menentukan ke arah mana hubungan COVID-19 dengan manusia ini akan menuju ke depannya. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa hubungan parasitisme-mutualisme adalah sebuah kontinum yang bisa bergerak, tergantung seleksi alam. Evolusi bisa menuju pada *increase virulence* atau *decrease virulence*.

3.6 Penutup

Evolusi dapat membantu kita dalam memahami interaksi di alam. Kejadian pandemi dan pengaruhnya yang luar biasa pada kehidupan di abad 21 ini patut dilihat dari kacamata *survival* virus, yaitu bahwa virus “hanya” berusaha bertahan untuk hidup dengan cara yang memang sudah dijalannya selama berjuta-juta tahun. Dalam memahami interaksi antara manusia dengan virus COVID-19 dan arah ke depan dari pandemi, kita perlu arif dalam memaknai proses-proses evolusi dalam kehidupan. Evolusi dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan, akan selalu terjadi karena merupakan bagian dari proses-proses dan perjalanan yang membentuk dinamika dalam kehidupan. Evolusi virus ke arah posisi yang lebih ganas (*more virulent*) atau justru berkurang keanasannya (*less virulent*) akan sangat tergantung pada berbagai faktor seperti jenis transmisi (horizontal, vertikal), laju transmisi, masa inkubasi, laju kematian, keberadaan vektor, tekanan seleksi, tingkat keragaman genetik, resistensi, dan lain sebagainya. Kemunculan omicron terjadi pada November 2021 di Afrika Selatan yang awalnya menggetarkan dunia, justru tampaknya sekarang merupakan awal dari menurunnya keanasan COVID-19. Walaupun transmisi COVID-19 varian Omicron ini tampaknya cepat sekali tetapi faktor kematian yang diakibatkannya jauh lebih kecil dibandingkan varian lain seperti Delta. Sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal *New Scientist* di

18 Juli 2020 bahkan telah menyebutkan bahwa tampaknya keganasan virus COVID-19 di USA dan UK telah berkurang (*the virus appears to be getting less lethal⁴*). Pernyataan ini menarik untuk dicermati. Apakah benar virulensi bisa menurun? Berdasarkan hipotesis Avirulence (Alizon *et al.* 2009), maka patogen/virus yang memiliki virulensi tinggi akan berubah menuju varian yang tidak begitu virulen (*less virulent*) seiring dengan berlalunya waktu. Tetapi pada saat yang bersamaan, inang juga dapat berevolusi. Kondisi ini membentuk interaksi yang kompleks dalam sebuah interaksi virus (patogen) dengan inangnya, dan biasa disebut dengan *evolutionary arms race between host-pathogen*, sebuah perlombaan evolusi antara patogen dengan inangnya yang selalu terjadi dalam kehidupan di bumi.

Daftar Pustaka:

- Alizon S, Hurford A, Mideo N, Van Baalen M. 2009. Virulence evolution and the trade-off hypothesis: history, current state of affairs and the future. *J. Evol. Biol.* 2.2.: 245–259. doi:10.1111/j.1420-9101.2008.01658.x
- Alizon S, Sofonea MT. 2021. SARS-CoV-2 virulence evolution: Avirulence theory, immunity and tradeoffs. *Journal of Evolutionary Biology*. DOI: 10.1111/jeb.13896.
- Callaway E. 2021. Beyond Omicron: what's next for COVID's viral evolution. *Nature*. 600: 204-207. <https://doi.org/10.1038/d41586-021-03619-8>.
- Hall, BK, Hallgrímsson, B. 2008. *Strickberger's Evolution*. 4th ed. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.
- Kerr PJ, Ghedin E, DePasse JV, Fitch A, Cattadori IS, Hudson PJ, Tschärke DC, Read AF, Holmes EC. 2012. Evolutionary History and Attenuation of Myxoma Virus on Two Continents. *PLOSPathogens*. 8. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002950>.
- Machado CA, Robbins N, Gilbert MTP, Herre EA. 2005. Critical review of host specificity and its coevolutionary implications in the fig-fig-wasp mutualism. *PNAS 102 Suppl.* 1:6558-6565. https://www.pnas.org/content/pnas/102/suppl_1/6558.full.pdf

⁴ New Scientist, 18 Juli 2020). [https://doi.org/10.1016/S0262-4079\(20\)31227-6](https://doi.org/10.1016/S0262-4079(20)31227-6)

- Read A, Kerr PJ. 2017. Infographic: Evolving Virulence. *The Scientist*. <https://www.the-scientist.com/multimedia/infographic-evolvingvirulence-30813>.
- Read A. 1994. The evolution of virulence. *Trends Microbiol.* 2: 73–76. doi: DOI: 10.1016/0966-842X.94.90537-1.
- Ridley M. 1993. *Evolution*. Blackwell Scientific Publications. Mass. USA
- Sapp J. 2004. The dynamics of symbiosis: an historical overview. *Can. J. Bot.* 82: 1046–1056. doi: 10.1139/b04-055.
- Syed RA. 1979. Studies of oil palm pollination by insects. *Bull Ent Res.* 69: 213- 224
- Tipton L, Darcy JL, Hynson NA. 2019. A Developing Symbiosis: Enabling Cross-Talk Between Ecologists and Microbiome Scientists. *Frontiers in Microbiology*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00292>.
- Wertheim JO, Chu DK, Peiris JS, Kosakovsky Pond SL, Poon LL. 2013. A case for the ancient origin of coronaviruses. *Journal of Virology*. 87 (12): 7039 - 7045. doi:10.1128/JVI.03273-12.



4. PANDEMI COVID-19 DAN PERUBAHAN PARADIGMA

Eka Satya Putra

CTSS Fellow, Center for Transdisciplinary and Sustainability Science,
IPB University

Abstrak

COVID-19 telah dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Pandemi adalah sebuah kondisi di mana sebagian besar populasi di semua negara (atau di mayoritas negara-negara) terkena wabah/penyakit dan tidak mempunyai imunitas. Menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini manusia dihadapi pada pilihan apakah berkompetisi atau berkolaborasi dalam skala yang belum pernah dilakukan, yaitu dalam skala dunia. Tulisan ini mengajak untuk merenungkan manusia dan sejarah kemanusiaan dalam rangka kolaborasi skala dunia yang inklusif.

4.1 Pendahuluan: COVID-19, Awal Bencana atau Awal Pembaharuan?

COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 ketika mencapai 118.000 kasus di lebih dari 110 negara (Ducharme, 2020). Pada tanggal 2 November 2021, COVID-19 masih menyebar ke seluruh dunia dengan lebih dari 246.7 juta kasus terkonfirmasi dengan 2,5 juta kematian di lebih dari 200 negara (The Visual and Data Journalism Team, 2021). Morens dalam tulisannya menyebutkan beberapa karakter yang membuat penyakit dapat dikategorikan menjadi pandemi (Morens, Folkers, & Fauci, 2009) yaitu: a) mencakup daerah geografis yang luas, b) pergerakan penyakit, c) tingginya laju penyerangan penyakit yang menyebabkan peledakan penyakit di berbagai tempat, d) imunitas populasi yang sangat minim, e) adanya keterbaruan (*novelty*), f) daya infeksi (*infectiousness*),

g) daya penularan (*contagiousness*), h) tingkat keparahan penyakit (*severity*). COVID-19 memenuhi kriteria yang disebutkan di atas dan karena itu WHO menyatakan COVID-19 adalah pandemik. COVID-19 adalah masalah bersama yang seharusnya dihadapi bersama-sama dengan semangat kolaborasi.

Dalam laman PBB mengenai COVID-19 (PBB, 2020), disebutkan bahwa tanggap terhadap COVID-19 harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menjawab tantangan global dan memberikan perhatian yang utuh menyeluruh dan tidak melupakan siapa pun
2. Mengurangi kerentanan terhadap pandemi di masa mendatang
3. Membangun daya lenting sehingga dapat menghadapi guncangan-guncangan di masa depan, terutama perubahan iklim
4. Mengatasi ketimpangan yang parah dan sistemik akibat pandemi.

Kita telah melihat bagaimana pandemi menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin (Yonzan *et al.* 2021). Di berbagai negara tingkat kemiskinan semakin meningkat (World Bank, 2020)¹. Untuk mengatasi ketimpangan yang parah dan sistemik, PBB kemudian meluncurkan sebuah panduan berjudul *UN Comprehensive Response to COVID-19* yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa, melindungi masyarakat, dan menjalankan pemulihan dengan baik. Ketimpangan yang diakibatkan oleh pandemi telah disampaikan juga oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional. Berbagai studi juga telah menunjukkan bahwa jika ketimpangan ini tidak segera diatasi akan semakin memperbesar kesenjangan sosial yang ada, dan pada akhirnya dapat melahirkan amarah masyarakat dan menggoyahkan stabilitas nasional. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa pandemi COVID-19 disebut sebagai sebuah bencana.

Dalam kesempatan ini, saya tergelitik untuk mempertanyakan pandangan umum tersebut. Apakah mungkin ada pandangan lain terhadap COVID-19? Bahwa COVID-19 bukanlah bencana? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat kembali kepada "*Tragedy of the Common*" (Kim, 2016). Secara

¹ World Bank. 2020. *COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021*. Retrieved from The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>

singkat “*Tragedy of the Common*” menjelaskan sebuah gejala di dalam sistem, di mana ada bagian dari sistem yang mendapatkan keuntungan (misal manusia), namun secara keseluruhan sistem akan mengalami kemunduran, karena adanya penggunaan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan adanya keterbatasan daya dukung. Penggunaan yang berlebihan inilah yang pada akhirnya menghancurkan sumber daya bersama. Menurut hemat saya hal inilah yang terjadi ketika pandemi COVID-19 menyerang, yaitu bangkitnya kesadaran bersama untuk memaknai fenomena global yang dahsyat ini. Diperlukan kolaborasi untuk mengelola sumber daya bersama agar semua pihak mendapatkan manfaat secara berkeadilan. Untuk dapat melakukan hal ini diperlukan peninjauan ulang akan makna bersama (*common*) yang membawa kita kepada hakikat pencarian makna. Melalui pemahaman mengenai pencarian makna ini maka diharapkan konflik yang muncul akibat COVID-19 bukanlah sebuah bencana namun sebuah awal pembaruan.

Kondisi pandemi ini memberikan kesempatan banyak untuk merenung, untuk kontemplasi tentang kehidupan dan perjalanan manusia. Menarik untuk disimak sejarah peradaban menunjukkan bahwa pembaharuan justru bisa muncul setelah adanya kehancuran. Tulisan berikut ini adalah sekelumit usaha penulis untuk melakukan kontemplasi tersebut.

4.2 Pencarian makna: Sebuah Perjalanan Menuju Bencana atau Memperbaharui?

“We are meaning-seeking creatures. Dogs, as far as we know, do not agonise about the canine condition, worry about the plight of dogs in other parts of the world, or try to see their lives from a different perspective. But human beings fall easily into despair, and from the very beginning we invented stories that enabled us to place our lives in a larger setting, that revealed an underlying pattern, and gave us a sense that, against all the depressing and chaotic evidence to the contrary, life had meaning and value (Karen Armstrong). Kutipan dari Karen Armstrong ini membawa saya kepada dua hal yang menarik, yaitu *meaning-seeking creatures* dan *human beings fall easily into despair* yang menurut saya merupakan sebuah paradoks.

Dalam melakukan pencarian makna, manusia melakukan pembatasan dengan membedah dan mereduksi alam yang diamati menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Melalui pembedahan dan cara berpikir yang reduktif, manusia berharap dapat memahami alam dengan lebih mudah dengan asumsi besar bahwa bagian alam yang didapatkan dari proses ini mempunyai sifat yang sama dan serupa dengan alam itu sendiri. Proses pembedahan dan pemikiran yang telah tereduksi ini melahirkan berbagai disiplin dengan tujuan yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang dieksplorasi sepenuhnya dan dijadikan sebagai sebuah hal yang sakral dalam upaya disiplin tersebut memahami alam. Kesakralan sudut pandang ini makin kuat ketika disiplin tersebut dianggap menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan kepada manusia, sukses memajukan dan menyejahterakan manusia. Kesakralan sudut pandang, yang sebenarnya adalah salah satu di antara sekian banyak kemungkinan sudut pandang, seolah-oleh berjalan beriringan dengan kesuksesan. Kesuksesan lebih besar akan didapatkan bila sudut pandang semakin sakral yang mendorong munculnya berbagai disiplin baru. Semakin sebuah disiplin berkembang, maka keragaman disiplin semakin banyak, dan semakin terspesialisasi. Ironisnya, melalui berbagai disiplin ini, manusia mendapatkan manfaat, namun kemanusiaan terancam karena kemampuan alam untuk mendukung eksistensi manusia mengalami penurunan (Heinberg 2018). Ini seperti yang telah dijelaskan di atas melalui “*Tragedy of the Commons*” (Kim, 2016).

4.3 Paradigma sebagai landasan disiplin: melakukan transendensi untuk melampaui pembatasan

Berbagai macam disiplin yang muncul mempunyai satu kesamaan yaitu paradigma sebagai sebuah landasan. “*A paradigm constitutes an accepted way of interrogating the world and synthesizing knowledge common to a substantial proportion of researchers in a discipline at any one moment in time*” (Kuhn, 1962). Berawal dari sudut pandang kemudian berubah menjadi paradigma karena kesuksesan sudut pandang tersebut membawa disiplin kepada kemajuan dan kesejahteraan manusia. Paradigma mengandung beberapa kata kunci dan salah satu yang menarik yang ingin saya angkat di sini adalah “*an accepted*

way of interrogating the world and synthesizing knowledge....”. Dalam kalimat ini tersirat bahwa menginterogasi alam dan menyintesis pengetahuan yang sekilas memang terlihat wajar namun ketika pernyataan ini disandingkan dengan kewajiban membuahkkan kemajuan dan kesejahteraan manusia maka kalimat ini menurut hemat saya harus diartikan lebih bijak. Lebih bijak karena dapat dipertanyakan cara siapa yang dapat diterima? Mengapa cara mereka yang diterima? Apakah tidak ada cara lain? Semua pertanyaan ini bila dikontekstualisasikan dalam kemajuan dan kesejahteraan manusia yang sangat kompetitif justru akan meningkatkan semangat kompetisi di antara disiplin tersebut dan menurunkan kemampuan alam untuk mendukung eksistensi manusia.

Di sisi lain, realitas dari alam adalah bahwa semua realitas adalah sirkular, mengutip *“Reality is made up of circles but we see straight lines. Herein lies the beginnings of our limitations as systems thinkers”* (Annie, 2014). Ketika masing-masing disiplin saling berpacu untuk menjadi yang paling kompetitif, realitas bahwa alam sebenarnya adalah kompleks dan sirkular secara perlahan dan tidak terasa ditinggalkan. Tiap disiplin terfokus untuk menjadi kontributor terbesar terhadap kemajuan dan kesejahteraan manusia sehingga alam yang sirkular terabaikan." Dalam ringkasan buku *The Fifth Discipline* karangan Peter Senge disebutkan mengenai konsep *“The Indivisible Whole: Peter Senge ends his book with the beautiful notion of wholeism. The universe is not made up of parts to create a whole, but made up of many smaller whole systems that creates a large whole. The world--people, nature, objects are animate, balanced, and whole so must our organizations.”* (Annie, 2014). Dengan pemahaman ini, yaitu bahwa realitas alam adalah sirkular dan *“indivisible whole”* maka perlu ada paradigma baru untuk menggeser paradigma lama yang mengacu pada kompetisi antara sesama disiplin menjadi kolaboratif antara sesama disiplin. Jadi tidak harus menghilangkan paradigma monodisiplin yang membuat setiap disiplin itu unik melainkan mencari apa makna bersama *“common”* seperti yang telah dipaparkan di atas. Ini adalah sebuah *insight* untuk menggeser paradigma.

Kekhawatiran tentang monodisiplin dan paradigma yang terlalu spesialis ini, sebelum zaman internet, sudah digaungkan pertama kali di Seminar Interdisiplin di Universitas Nice pada tahun 1970 yang disponsori oleh

OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development) dan Kementerian Pendidikan Perancis (Bernstein, 2015). Di seminar ini seorang psikolog dari Swiss, Jean Piaget, memperkenalkan istilah *transdisciplinarity* dengan pengertian “*higher stage succeeding interdisciplinary relationships . . . which would not only cover interactions or reciprocities between specialised research projects, but would place these relationships within a total system without any firm boundaries between disciplines*” (Bernstein, 2015). Pendekatan transdisiplin adalah pendekatan yang diturunkan dari *transdisciplinarity* ini dengan tujuan menghilangkan sekat atau batasan atau setidaknya membangun hubungan untuk menjembatani berbagai disiplin dan paradigma. Bernstein mengatakan *transdisciplinarity* ini kemudian muncul dan tenggelam seiring dengan munculnya krisis dan tenggelamnya krisis karena intervensi atau usaha manusia untuk menanggulangi krisis dan intervensi atau usaha itu dianggap berhasil di kala itu. Usaha penanggulangan secara umum, dalam bentuk nyata adalah pembangunan struktur dan sistem.

Krisis dilalui dan dianggap dapat diselesaikan dengan pembangunan struktur dan sistem, sehingga tampak seolah sebagai tantangan yang dapat ditaklukkan. Ini memunculkan sebuah paradigma baru, bahwa manusia akan selalu *prevail* menghadapi tantangan melalui pendekatan kolaborasi ataupun transdisiplin melalui pembangunan struktur dan sistem.

Namun tantangan tetap datang dan pergi dengan bentuk dan ragam yang berbeda dan semakin kompleks hingga muncul pandemi COVID-19. Pandemi ini, merujuk kepada PBB, menyodorkan realitas baru yaitu bahwa struktur dan sistem yang selama ini dibangun ternyata sangat rentan terhadap ketimpangan yang parah dan sistemik di manapun di dunia ini. Apakah ini karena berkolaborasi atau transdisiplin ternyata bukan jawaban segalanya? Atau karena menjalankan kolaborasi atau transdisiplin belum optimal? Kadang kala dilakukan kadang kala tidak karena keterikatan kita kepada pembatasan, pencarian makna dan keputusan? Ternyata walaupun kita sudah mengatakan berkolaborasi ataupun bertransdisiplin namun kita belum mengubah paradigma kita atas tiga hal tersebut?

Artikel ini ditulis bukan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut hanyalah sebuah perwakilan kecil atas masalah yang sedang dialami oleh kemanusiaan dan tidak mungkin dijawab hanya oleh satu orang. Jawaban mungkin dapat ditemukan bila secara kolektif melakukan pendekatan transdisiplin, dan itupun dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu.

Semoga artikel ini dapat menjadi pintu pembuka atau sebuah awal dari perjalanan bersama menuju kemanusiaan tanpa ketimpangan yang parah dan sistemik.

Daftar Pustaka

- Annie. 2014. Fifth Discipline.Senge.EBS.pdf - The Fifth Discipline. Retrieved from Course Hero: <https://www.coursehero.com/file/34690080/Fifth-DisciplineSengeEBSpdf/>.
- Berstein JH. 2015. Transdisciplinarity: A Review of Its Origins, Development, and Current Issues. *Journal of Research Practice*: <http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/510/412#:~:text=The%20word%20transdisciplinarity%20appears%20to,the%20French%20Ministry%20of%20Education.>
- Ducharme J. 2020. World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That Means. <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>.
- Heinberg R. 2018. Ted Nordhaus Is Wrong: We Are Exceeding Earth's Carrying Capacity. Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere Stanford. <https://mahb.stanford.edu/blog/ted-nordhaus-wrong-exceeding-earths-carrying-capacity/>.
- Kim D. 2016. Tragedy of the commons: all for one and none for all. The Systems Thinker: <https://thesystemsthinker.com/tragedy-of-the-commons-all-for-one-and-none-for-all/>
- Kuhn TS. 1962. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press.

- Morens DM, Folkers GK, Fauci AS. 2009. What Is a Pandemic?. *Journal of Infectious Disease*. <https://academic.oup.com/jid/article/200/7/1018/903237> .
- The Visual and Data Journalism Team. 2021. Covid map: Coronavirus cases, deaths, vaccinations by country. BBC News. Tersedia pada: <https://www.bbc.com/news/world-51235105>.
- Yonzan N, Lakner C, Mahler DG. 2021. Is COVID-19 increasing global inequality?. World Bank Blogs: <https://blogs.worldbank.org/opendata/COVID-19-increasing-global-inequality>.

5. RESILIENSI DI ERA PANDEMI : BELAJAR DARI DESA DAN KEARIFAN LOKAL

David Ardhian

CTSS Fellow

Abstrak

Konsep resiliensi berkaitan dengan ketahanan sebuah sistem sosial dalam menghadapi tekanan dan guncangan dari perubahan sosial yang dinamis, dalam dunia yang saling terkait satu sama lain. Resiliensi diperlukan untuk menghadapi tekanan krisis seperti Pandemi COVID-19. Tulisan ini memaparkan bagaimana resiliensi pada era pandemi, dengan belajar dari pengalaman desa-desa di Indonesia. Desa memanfaatkan kearifan lokal dan kapital sosial yang ada untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Kekuatan desa dalam menghadapi pandemi bisa dikembangkan lebih lanjut dengan mengadopsi kerangka konsep resiliensi yang terdiri dari kemampuan untuk menyerap (*absorb*), mengadaptasi (*adapt*) dan mentransformasi (*transform*) perubahan.

5.1 Desa dalam Masa Pandemi COVID-19

Bulan Maret 2020, ketika fase awal pandemi COVID-19, saya menuliskan artikel berjudul “Virus Masuk Desa” yang dimuat di laman CTSS dan KRKP. Dalam tulisan itu saya mengingatkan kewaspadaan jika virus Corona merebak ke desa-desa. Saya berpendapat jika virus sudah terlanjur menyebar ke desa-desa akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Setidaknya ada empat akibat dari merebaknya virus ke desa, yaitu kesulitan penanganan korban karena minim fasilitas kesehatan, ancaman ketahanan pangan, kekacauan informasi dan potensi konflik sosial. Saya mengusulkan penanganan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik keragaman desa-desa di Indonesia,

memperkuat tata kelola penanganan virus pada tingkat lokal, memberikan insentif dan dukungan untuk pelaku produksi pertanian khususnya pangan, dan menggerakkan kader-kader dan organisasi sosial lokal sebagai ujung tombak penanganan pandemi COVID-19. Hal tersebut juga saya kembali sampaikan ketika menjadi narasumber pada acara *Transdisciplinary Tea Talk* ke 6, yang diselenggarakan CTSS dengan tema “Masyarakat Desa dan Pandemi COVID-19”.

Setelah setahun lebih pandemi COVID-19, timbul peristiwa yang lebih dari apa yang saya khawatirkan. Kita mengalami dua gelombang ledakan virus, lonjakan kasus meledak melampaui kapasitas layanan kesehatan yang ada. Jumlah angka kematian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Hampir seluruh kabupaten dan kota Indonesia terdampak pandemi, termasuk desa-desa di Indonesia. Sampai saat ini, kita masih belum terbebas dari pandemi dengan penerapan pembatasan sosial, dalam berbagai formula kebijakan mulai dari PSBB, PPKM, PPKM Mikro dan saat ini PPKM dengan berbagai level indikator.

Yang menjadi menarik perhatian adalah sejak awal pandemi sampai saat ini, kebijakan pemerintah untuk penanganan virus cenderung lebih banyak dialokasikan untuk sektor-sektor perkotaan, berbagai skema insentif untuk dunia usaha, industri dan BUMN, jaminan sosial untuk pekerja yang kehilangan pendapatan di perkotaan, dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin. Secara matematis, kita bisa menghitung proporsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan pemerintah. Saya tidak melihat adanya skema khusus untuk mendukung petani dan pertanian, alokasi secara masif untuk memperkuat tata kelola desa serta insentif khusus untuk kalangan pekerja di perdesaan seperti buruh tani dan masyarakat miskin perdesaan.

Dalam masa pandemi, nampak bahwa sentralisasi kekuasaan dalam satu komando dalam penanganan krisis dianggap sebagai cara terbaik. Kebijakan dikelola secara terpusat, dengan seluruh energi dan sumberdaya dikerahkan untuk mengelola dampak pandemi. Kebijakan penanganan pandemi berlaku sama dan seragam untuk semua tempat, kekuasaan diterapkan untuk menimbulkan kepatuhan atas aturan-aturan, bahkan pengetahuan dikontrol

demokratik stabilitas hegemonik selama masa pandemi. Keberagaman pengetahuan, cara dan konteks sosio kultural dari Indonesia, sebagai negara kepulauan tidak banyak mendapatkan tempat dalam upaya penanganan pandemi.

Dari sisi capaian, kita melihat hal-hal yang tidak terlalu mendapat perhatian justru menjadi penyelamat pada masa pandemi sampai saat ini. Berdasarkan data BPS (2021) ketika perekonomian nasional berkontraksi 2,07 persen pada tahun lalu, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,75 persen. Sektor pertanian menampung 87 persen dari penghidupan masyarakat desa. Sekali lagi, desa menjadi penyelamat pada saat krisis. Hal tersebut bisa dilihat dari peran desa dalam beberapa hal, antara lain kemampuan desa dalam menyerap sementara atau permanen dalam menampung perpindahan tenaga kerja yang terlempar dari sektor lain. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, desa menyerap gelombang paparan virus akibat migrasi penduduk, terutama pada hari raya keagamaan dan hari libur. Peran paling vital adalah menyokong ketahanan pangan, di mana hampir tidak ada kasus kekurangan pangan selama pandemi saat ini. Saat ini desa-desa sedang beradaptasi dengan tuntutan sosial sebagai akibat dari dampak COVID-19, dengan reformulasi penggunaan sumber daya desa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kemampuan desa dalam bertahan, di tengah minimnya dukungan program pemulihan ekonomi nasional menarik untuk dipelajari. Bagaimana desa bisa bertahan terkait dengan kapasitas resiliensi, atau daya lenting dari desa-desa di Indonesia untuk menghadapi, beradaptasi dan ke depan diharapkan untuk bertransformasi dalam masa pandemi dan setelahnya. Resiliensi desa adalah kunci bagaimana desa mampu berperan sebagai penyangga dan penyelamat krisis pandemi sampai saat ini.

5.2 Belajar dari Kearifan Lokal

Emtal Sekeai adalah ritual adat Dayak Wehea untuk menangkal wabah atau musibah yang menimpa masyarakat. Ritual ini tidak sembarang bisa dilakukan, hanya pada situasi kondisi tertentu yang dinilai tepat oleh para tetua adat. Pandemi COVID-19 dinilai sebagai pertanda bahwa komunitas adat ini perlu melakukan ritual ini. Seperti dilaporkan oleh *Villager Post*

(2020), Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kalimantan Timur pada tanggal 27 Maret 2020 menutup akses keluar masuk daerahnya (*lock down*) untuk menerapkan *Emtal Sekeai*.

Siapapun tidak boleh keluar masuk kampung pada waktu yang ditentukan, kecuali para tetua adat yang menjalankan upacara khusus. Tujuannya adalah agar wabah hanya lewat dan tidak mampir ke daerah tersebut. Ritual dilakukan selama tiga hari tiga malam. Selepas *lockdown*, selama waktu tertentu warga berpantang tidak boleh mengambil rebung bambu, pucuk pakis dan memotong jantung pisang. Jika ada yang melanggar, akan dikenai denda adat dan bisa mendapatkan tulah atau kesialan. Pada masa tenang tersebut, warga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kehidupan berjalan baik dan dihindarkan dari bencana wabah tersebut. Dayak Wehea memiliki pranata sosial untuk melindungi warganya dari bencana, termasuk wabah virus COVID-19. Mereka segera menerapkan ritual dan pengorganisasian sosial untuk melakukan *lockdown*, jauh sebelum PSBB atau PPKM diterapkan oleh pemerintah.

Kearifan tradisional semacam ini banyak dimiliki oleh komunitas adat dan berbagai desa di Indonesia. Tradisi tolak bala dan penerapan aturan sosial dalam kondisi krisis adalah bentuk umum dari berbagai kekayaan tradisi di Nusantara. Ritual *Liko Lapa Lewo* atau menjaga kampung halaman diterapkan oleh komunitas adat di Flores Timur. Suku Osing di Banyuwangi menerapkan tradisi *jurung*, tradisi untuk mencegah wabah dan mempersiapkan cadangan pangan sebagai antisipasi dampak dari pandemi.

Orang Rimba di Jambi segera melakukan *Besсандingon*, atau berdiam dan tidak keluar hutan untuk menghadapi pandemi virus. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga jarak dari kelompok yang sakit (*cenenggo*) dan komunikasi jarak jauh tanpa melihat satu sama lain, pada jarak aman 10-15 meter atau disebut besesulangun. Tetua adat Baduy di Lebak, Jawa Barat menerapkan ritual *Kawalu* selama 3 bulan lebih. Warga dilarang berpergian keluar terutama di daerah sumber wabah, menjaga agar masyarakat tidak tertular.

Masyarakat Jawa mengenal tradisi tolak bala untuk menolak bencana atau *pageblug*. Masyarakat mengadakan selamatan dengan jenang/bubur sengokolo sebagai bentuk doa dan penyerahan diri kepada Tuhan agar terhindar dari

malapetaka. Hal tersebut diikuti dengan pengorganisasian sosial untuk saling gotong royong membantu satu sama lain. Tidak banyak pemerintah daerah yang menyerap kearifan tradisional untuk menjadi bagian dari kebijakan dan program dalam mengatasi pandemi. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu yang mengadopsi kearifan tradisional, dengan menggerakkan program *Jogo Tonggo*, semacam tata kelola (*governance*) pada tingkat lokal yang operasionalnya dilakukan oleh Satgas penanggulangan COVID-19 pada tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Indonesia adalah negara kepulauan yang beragam, terdiri dari lebih 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 80.000 desa yang beraneka ragam. Berbagai pengalaman sejarah menghadapi terpaan krisis ekonomi, seperti tahun 1998, 2005 dan terakhir krisis pandemi 2021, kekuatan lokal, modal sosial dan kearifan lokal yang mampu memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis. Ada ragam cara berbasis kearifan lokal yang kurang mendapatkan perhatian dalam upaya penanganan krisis. Pengalaman-pengalaman masyarakat adat dan kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, menggambarkan keberagaman cara dalam penanganan COVID-19 yang tidak bisa terakomodasi dalam perspektif kebijakan yang cenderung terpusat berbasis penyeragaman.

5.3 Kekuatan Desa Menghadapi Krisis

Indonesia adalah kekuatan sosial ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki sejarah panjang terkait dengan peran desa dalam pembangunan. Indonesia menerapkan pendekatan pembangunan berbasis komunitas selama lebih dari 20 tahun, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dikenal beberapa program seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang kemudian dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) secara masif di seluruh desa di Indonesia, yang memberikan pondasi bagi penguatan masyarakat desa di Indonesia. Pada tahun 2014, berbagai pengalaman program tersebut dilembagakan di bawah UU Desa dengan memberikan otonomi, kewenangan dan transfer dana langsung ke desa-desa untuk memperkuat tata kelola, infrastruktur, layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan yang direncanakan oleh desa sendiri.

Berbagai kritikan muncul dari penerapan UU Desa yang bersifat teknokratis, terlalu berfokus pada dana desa dan kurang mengakomodasi keberagaman desa di Indonesia. Hal tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan penyeragaman dan mengingkari kebhinekaan. Bahkan beberapa ahli mulai mengungkap bahwa implementasi UU Desa yang seragam justru menimbulkan kerentanan bagi perkembangan desa sendiri. Pandemi COVID-19 saat ini merupakan penegasan bahwa bagaimana kerentanan justru terjadi ketika terjadi guncangan dan kejutan terhadap situasi sosial ekonomi desa.

Keberagaman, modal sosial dan kearifan lokal, didukung dengan pengalaman penerapan pembangunan berbasis masyarakat dalam berbagai skema program memberikan pondasi kekuatan desa dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19 saat ini. Tumbuhnya berbagai inisiatif lokal dalam penanganan pandemi adalah bentuk-bentuk respons dari kebijakan pemerintah yang cenderung terpusat dan seragam. Dengan kata lain, desa-desa mengembangkan kreativitas dalam berbagai cara untuk menginterpretasi dan mengadaptasi kebijakan pusat sesuai dengan konteks dan karakteristik lokal. Ini sesuai dengan pepatah leluhur masyarakat Jawa, “*negara mawa tata, desa mawa cara*” yang artinya negara punya aturan, namun desa memiliki cara-cara untuk menerapkan sesuai dengan konteksnya.

Pada dasarnya kekuatan Indonesia adalah keberagaman, mengingkari keberagaman akan membuat berbagai upaya berlangsung tidak efektif dan salah sasaran. Keberagaman cara-cara desa dalam menghadapi pandemi COVID-19 penting untuk ditelaah lebih lanjut. Dari situ kita akan memetik pelajaran berharga dalam memperkuat ketahanan sosial budaya dalam menghadapi pandemi, dan bahkan menjadi pondasi bagi transformasi sosial untuk kemajuan desa dan masyarakat Indonesia ke depan.

5.4 Konsep Resiliensi Desa

Resiliensi adalah sebuah konsep yang saat ini mendapatkan banyak perhatian dari para ahli dan diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan. Konsep ini dianggap sebagai manifestasi praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Secara khusus, konsep resiliensi dikaitkan

dengan ketahanan sebuah sistem sosial dalam menghadapi tekanan dan guncangan dari perubahan sosial yang dinamis, dalam dunia yang saling terkait satu sama lain.

Mengutip penjelasan dari laman *Stockholm Resilience Centre*, konsep resiliensi berangkat dari pandangan bahwa manusia dan alam adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan dalam satu sistem sosial-ekologi. Tatanan masyarakat tidak bisa dilihat hanya semata hubungan sebab-akibat antar manusia, namun juga terkait dengan bagaimana ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Konsep resiliensi menolak keterpisahan antara dimensi sosial dan ekologi, bahwa interaksi antara sosial dan ekologi bersifat timbal balik yang menentukan perubahan dinamis dalam tatanan kehidupan di muka bumi.

Konsep resiliensi justru ingin mengembalikan keselarasan hubungan antara manusia dan alam, antara sosial dan ekologi. Konsep kemanunggalan antara manusia dan alam sesuai dengan pandangan dan praktik spiritual dari masyarakat adat dan kearifan lokal di Indonesia. Di Jawa ada konsep *Memayu Hayuning Bawana*, memperindah kehidupan yang hakikatnya adalah sebuah keindahan. Itu adalah dasar dari tugas mendasar dari manusia Jawa dalam menjalankan kehidupan. Di Bali, kita mengenal *Tri Hitta Karana*, manunggalnya hubungan antara Tuhan, Manusia dan Alam sebagai satu kesatuan dalam kehidupan. Mempelajari resiliensi pada dasarnya adalah menuntun kita untuk menggali falsafah leluhur sebagai pegangan dalam menghadapi perubahan tatanan dunia, termasuk guncangan krisis dari waktu ke waktu.

Dengan demikian maka pemikiran resiliensi memerlukan perubahan cara pandang dari perspektif linier menuju ke perspektif sistem. Pendekatan sistem adalah syarat perlu dalam mengembangkan konsep resiliensi, terutama dikaitkan dengan permasalahan yang kompleks. Di sini kerangka transdisiplin menjadi penting untuk memecah kebuntuan dan kebekuan pendekatan sektoral, disiplin dan organisasi yang selama ini tersegmentasi satu sama lain. Reduksi dari pendekatan sistem inilah yang menjadi sumber dari pengingkaran terhadap keberagaman. Permasalahan kompleks, seperti pandemi COVID-19 saat ini direduksi menjadi persoalan yang teknis, atau teknikalisisasi masalah

yang hanya menyelesaikan sebagian masalah dalam jangka pendek. Tentu saja solusi teknis sangat penting, namun harus ditempatkan sebagai salah satu elemen dalam sistem secara utuh, dan bukan satu-satunya instrumen untuk mendukung ketahanan sistem dalam jangka panjang.

Dalam hal praktis, menarik untuk belajar dari pendapat Oxfam International mengenai konsep resiliensi dalam praktik. Oxfam (2016) menjelaskan bahwa resiliensi adalah kapasitas dari sistem untuk menyerap (*absorb*), mengadaptasi (*adapt*) dan mentransformasi (*transform*) perubahan. Dengan kata lain kerangka analisis resiliensi berkaitan dengan kapasitas sebuah sistem, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk menyerap (*ability to absorb*). Kapasitas ini berkaitan dengan upaya untuk melakukan tindakan proteksi untuk menghadapi tekanan dan guncangan dari perubahan. Berkaitan dengan bagaimana sebuah sistem mampu menyerap tekanan perubahan pada tingkat tertentu, dalam sebuah tekanan dan guncangan situasi yang telah sedang terjadi seperti bencana alam, konflik atau pandemi seperti saat ini.
2. Kemampuan untuk beradaptasi (*ability to adapt*). Kapasitas ini terkait dengan upaya untuk melakukan penyesuaian yang dibutuhkan dalam merespons perubahan, yang dilakukan secara fleksibel agar mampu bertahan dari tekanan dan guncangan. Hal ini dilakukan mengingat perubahan sedang terjadi dan tidak pasti, sehingga kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah faktor penting dalam sebuah sistem.
3. Kemampuan untuk bertransformasi (*ability to transform*). Kapasitas ini berkaitan dengan upaya mengurangi faktor-faktor fundamental yang menjadi pendorong (*drivers*) perubahan seperti risiko, kerentanan dan ketimpangan, dan mendorong perubahan tatanan sosial lebih baik dalam jangka panjang.

Dengan demikian maka dalam menghadapi sebuah krisis, sebuah sistem sosial ekologi perlu untuk mengembangkan tiga kapasitas di atas untuk bisa menjadi resilien, yakni kemampuan menyerap yang berhubungan dengan stabilitas, kemampuan beradaptasi yang berhubungan dengan fleksibilitas, dan kemampuan bertransformasi yang berhubungan dengan perubahan struktural.

Panduan di atas bisa menjadi petikan pembelajaran untuk memperkuat desa-desa di Indonesia dalam menghadapi pandemi dan setelahnya. Momentum krisis sesungguhnya adalah saat yang tepat untuk menguji ketangguhan sistem sosial ekonomi desa untuk menghadapi krisis, dan bertransformasi dalam proses yang dinamis dalam jangka panjang.

Belajar dari pengalaman desa-desa pada masa pandemi, maka kemampuan desa dalam menghadapi guncangan krisis berlangsung dalam berbagai cara. Modal sosial dan kearifan lokal dalam menghadapi krisis, seperti diurai dalam praktik-praktik masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya adalah upaya dalam desa-desa dalam melindungi tekanan dalam menghadapi dampak pandemi. Desa-desa memiliki kemampuan agar krisis tidak berdampak lebih mendalam, sebagai contoh adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat desa secara kreatif menerapkan konsolidasi sosial untuk membatasi pergerakan masyarakat, menyediakan rumah isolasi bagi warga yang datang dari kota, dan menerapkan aturan-aturan berbasis kearifan lokal untuk mencegah penularan virus.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah desa-desa memasuki fase untuk beradaptasi dengan realitas pandemi yang belum berakhir. Pemerintah desa saat ini berusaha menyesuaikan sumber daya desa, termasuk alokasi anggaran desa untuk digunakan dalam rangka memperbaiki tata kelola dalam menghadapi virus. Kader-kader lokal dan organisasi sosial turut berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanganan virus. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung upaya pengendalian pandemi. Beberapa penemuan-penemuan baru dalam aturan lokal yang terbukti efektif dikembangkan menjadi aturan desa untuk menyesuaikan diri dengan situasi pandemi saat ini.

Yang dibutuhkan ke depan adalah memperkuat kapasitas desa untuk bertransformasi. Dengan modalitas kemampuan menyerap dan beradaptasi, maka diperlukan strategi-strategi untuk perubahan struktural dalam jangka panjang. Perubahan transformatif berbeda dengan perubahan *chaotic* atau *trial and error* seperti dalam proses sebelumnya. Perubahan transformatif adalah perubahan terencana berdasarkan konsensus sosial dalam perspektif jangka panjang. Hal ini yang kurang mendapatkan perhatian dalam upaya penanganan pandemi pada saat ini.

Dengan demikian maka desa sebagai penyangga krisis pandemi, sekaligus penyelamat ekonomi nasional tidak bisa terus-menerus dibiarkan tanpa dukungan untuk menata kehidupan perdesaan dalam jangka panjang. Hal ini tidak mudah, jika formula kebijakan pemerintah terpusat dan seragam, membangun tata kelola yang diatur secara komando dan tidak memberikan tempat bagi tumbuhnya inisiatif lokal. Tata kelola terpusat (*centralized governance*) hanya akan efektif jika konteks masyarakat cenderung seragam dan karakteristik ekologi adalah teresterial atau daratan. Tidak cocok untuk Indonesia yang beragam dalam sosio-kultural, dengan karakteristik ekologi *archipelago* atau kepulauan. Untuk itu transformasi haruslah mengarah pada terbangunnya tata kelola yang beragam (*polycentric governance*) sesuai dengan konteks sosio-kultural daerah masing-masing, yang mampu mengakomodasi kearifan lokal setempat.

Konsep resiliensi desa bisa menjadi rujukan untuk penataan kehidupan pada masa pandemi dan masa depan dari desa-desa Indonesia yang beragam. Jika diterapkan, akan beragam cara kreatif dari desa-desa untuk menyerap, beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi krisis pandemi, sesuai dengan karakteristik desa-desa yang beragam. Desa dengan karakteristik persawahan, desa sekitar hutan, desa-desa di pesisir pantai, desa adat, desa wisata, desa urban yang berada di peri-peri perkotaan, akan memiliki keragaman dalam mengembangkan konsep-konsep resiliensinya. Momentum penting ini tidak boleh dilewatkan, desa-desa sementara ini cenderung “dibiarkan” untuk *acrobatic social survival* dalam menghadapi krisis tanpa dukungan yang memadai dalam konteks kebijakan dan dukungan program lainnya. Desa-desa cenderung ditempatkan sebagai agen pelaksanaan kebijakan dari pusat kekuasaan, jangkar untuk penerapan kepatuhan masyarakat akan aturan-aturan, bahkan sekadar aparatus teknis dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial. Pola ini tidak akan memberikan tempat bagi tumbuhnya resiliensi yang berbasis pada kekuatan modal sosial dan kearifan lokal desa. Sebaliknya, justru menimbulkan ketergantungan, dan kerentanan baru pada masa yang akan datang. Pengalaman berharga dalam pandemi ini, seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi pentingnya menumbuhkan resiliensi desa ke depan.

5.5 Daftar Pustaka

- Oxfam Internasional. 2016. *The Future is A Choice : Oxfam Framework and Guidance for Resilient Development*. Oxfam International, Oxford, UK.
- VSO. 2019. *Resilience Building Handbook*. UK Aid and EU Aid Volunteer, London, UK.
- OECD. 2014. *Guideline for Resilience System Analysis : How to analysis risk and build roadmap to resilience*. OECD Publishing.
- <https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-02-19-what-is-resilience.html>
- <https://kedaulatanpangan.org/virus-masuk-desa/https://ctss.ipb.ac.id/2020/05/07/the-6th-transdisciplinary-tea-talkmasyarakat-desa-dan-pandemi-COVID-19/>
- <https://villagerspost.com/todays-feature/emtal-sekeai-lockdown-modelkearifan-lokal-dayak-wehea-desa-nehas-liah-bing/>
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210122103508-269-597035/5-fakta-menarik-suku-baduy-yang-desanya-nol-kasus-corona>



6. RESILIENSI MASYARAKAT DESA TERHADAP PANDEMI COVID-19

(Studi di Kampung Cempluk Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Keppi Sukei dan Mofit Jamroni

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Abstrak

World Health Organization (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020, setelah melewati fase wabah di Wuhan dan fase epidemi yang melanda seluruh wilayah Tiongkok. Penetapan pandemi didasarkan pada persebaran COVID-19 secara geografis yang telah mencapai 114 negara. Pada 13 April 2020, Indonesia menetapkan COVID-19 menjadi Bencana Nasional dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020. Penyebaran COVID-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Setiap manusia atau kelompok masyarakat mempunyai pengetahuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Pengetahuan dan pemaknaan atas suatu kejadian bencana antara masyarakat lokal dengan pihak luar seperti pemerintah, akademisi, swasta maupun LSM. Seperti halnya dengan bencana nasional non-alam pandemi COVID-19, adaptasi masyarakat desa terhadap pandemi terbentuk dan lahir dari pengalaman, pengetahuan, pemahaman dan pemaknaan terhadap setiap kejadian, fenomena, harapan dan masalah yang terjadi di sekitarnya. Berkaitan dengan itu, masyarakat desa secara sadar merespons keadaan dengan upaya lebih berdaya terhadap kejadian-kejadian dan inovasi yang diterima.

Konsep Kampung Tangguh dibuat sebagai pedoman atau rujukan yang terdiri dari 7 ketangguhan (Tangguh Sumber Daya Manusia, Pangan, Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban, Informasi, Psikologi dan Tangguh Budaya) diharapkan sebagai inovasi dari kampung yang diterapkan secara terpadu di kampung Cempluk Desa Kalisongo dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tulisan ini merupakan hasil kajian singkat (*rapid assesment*) menggunakan pendekatan kualitatif yang ditunjang dengan data kuantitatif, diawali dengan survei terhadap 50 rumah tangga, dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan informan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa di kampung Cempluk yang bertipe *sub-urban* ini, pada awalnya masyarakat tidak menyadari adanya wabah COVID-19, dengan adanya kesadaran secara cepat dari satgas (satuan tugas Kampung Tangguh, masyarakat segera terorganisasi menjadi gerakan yang merespons positif perlunya sembilan ketangguhan, berbasis modal sosial berbagi, bekerja sama, bergotong royong dalam mengatasi masalah, kampung Cempluk menjadi wilayah dusun yang tanggap terhadap penanganan COVID-19.

6.1 Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai ‘pandemi’ global pada 11 Maret 2020, setelah melewati fase ‘wabah’ di Wuhan dan fase ‘epidemi’ yang melanda seluruh wilayah Tiongkok. Penetapan pandemi didasarkan pada persebaran COVID-19 secara geografis yang telah mencapai 114 negara. Data penyebaran kasus COVID-19 telah menjangkau enam wilayah global, yaitu Afrika, Amerika, Mediterania Timur, Eropa, Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2020, peningkatan kasus COVID-19 dan pasien yang meninggal terus bertambah. Pada bulan Juli 2020 menurut data WHO (2020) terdapat 216 negara dan wilayah yang terkonfirmasi kasus COVID-19 dengan jumlah 13.876.441 orang dan 593.087 orang yang terkonfirmasi tersebut meninggal dunia. Prediksi dengan pemodelan dan simulasi terkait waktu berakhirnya pandemi COVID-19 telah dilakukan oleh sejumlah ahli. Namun, sebagian dari hasilnya prediksi tersebut telah terbukti tidak sesuai dengan kondisi kekinian.

Melalui laman situsnya, WHO menginformasikan telah mengadakan komunikasi jaringan pakar internasional, yang mencakup beberapa topik seperti manajemen klinis, laboratorium dan virologi, pencegahan dan pengendalian infeksi, pemodelan matematika, seroepidemiologi, penelitian dan pengembangan untuk diagnostik, terapi dan vaksin, sebagaimana yang sering ditampilkan dalam telekonferensi, mulai awal Januari. Kandidat vaksin COVID-19 yang direncanakan WHO mencakup 17 kandidat vaksin dalam evaluasi klinis dan 132 dalam evaluasi praklinis. WHO menyarankan untuk melihat langkah Negara China dan beberapa negara lain yang telah berhasil memperlambat penyebaran pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penanganan pandemi COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi telah membahayakan bagi perekonomian nasional. Pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 terkait Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui Perpres tersebut, pemerintah membubarkan 18 badan/komite/satgas/tim, serta membentuk komite kebijakan, satuan tugas penanganan COVID-19 dan satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Salah satu upaya yang dilaksanakan saat ini adalah meningkatkan ketangguhan (*resilience*) dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyebaran dan penanganan terdampak pandemi COVID-19.

Ketangguhan masyarakat terhadap bencana menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dan selanjutnya mampu pulih kembali setelah bencana berlalu. Upaya untuk meningkatkan ketangguhan

masyarakat dalam menghadapi bencana ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Tulisan ini bermaksud menganalisis kondisi dan perkembangan COVID-19 di Kampung Cempluk Desa Kalisongo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Gerakan intervensi Kampung Tangguh sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi COVID-19, berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian lapangan di Kampung Cempluk Desa Kalisongo.

Rapid Assessment (kajian cepat) dilakukan di Desa Kalisongo dengan tipe *sub-urban* dan merupakan daerah berpotensi terdampak COVID-19. Sebelum tahun 2000 desa ini masih terisolasi dengan suasana desa yang kental. Belum ada akses jalan beraspal dan jalan penghubung anatar desa. Dengan dibukanya jembatan UNMER di desa ini menjadi terhubung dengan wilayah kota dan daerah sekitarnya. Sehingga mengalami perubahan cepat menjadi desa pinggiran kota (*sub-urban*), terlebih setelah Universitas Brawijaya membangun kampus II di desa ini, Desa Kalisongo menjadi bagian dari daerah lingkaran kampus yang semakin ramai. Diawali dengan survei terhadap 50 rumah tangga di kampung Cempluk tentang bagaimana persepsi dan bagaimana implementasi Kampung Tangguh, dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat, para aktivis Kampung Tangguh dan rumah tangga biasa.

6.2 Hasil dan Pembahasan Bencana dan Pandemi COVID-19

Penggunaan istilah bencana non-alam belum *familiar* bagi masyarakat pada umumnya, hal tersebut dikarenakan frekuensi terjadinya bencana alam lebih tinggi dari bencana non-alam. Berdasarkan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (2020), BNPB mencatat 1.453 bencana alam terjadi di berbagai wilayah Indonesia mulai bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2020. Bencana alam yang terjadi pada rentang waktu tersebut sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir 620 kejadian, puting beliung 425, tanah longsor 330, kebakaran hutan dan lahan

139, gelombang pasang atau abrasi 21, gempa bumi 10, erupsi gunung api 3 dan kekeringan 1 kejadian. Pandemi COVID-19 merupakan satu-satunya jenis bencana non-alam yang melanda Indonesia dan seluruh negara di dunia mulai awal tahun 2020.

Bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2019 hingga sekarang menambah daftar kejadian pandemi di dunia. Tercatat, bencana banjir yang terjadi abad 14 sekitar tahun 1362, dan bencana pandemi di Eropa yang dikenal sebagai Kematian Hitam (Black Death, 1347–1351) (New York Times, 1925). Kemudian, pandemi influenza pada tahun 1918 di Eropa dan Amerika Serikat yang telah menelan jutaan jiwa manusia (Mauch and Pfister, 2009). Keterlibatan institusi negara dan berbagai penelitian terkait kejadian pandemi di Eropa antara tahun 1348 hingga akhir abad 18; merupakan topik studi kebencanaan yang paling berkembang saat ini (Silverman, 2003).

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non-alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariaksan. COVID-19 yang statusnya ditetapkan sebagai pandemi global dan bencana nasional non-alam menjadi kajian dan diskusi dalam forum ilmiah terkait resiliensi masyarakat, upaya penanggulangan, dan mitigasi bencana non-alam.

Pandemi sebagian besar merupakan wabah penyakit yang menyebar luas sebagai akibat dari penyebaran infeksi dari manusia ke manusia. Beberapa wabah penyakit dan pandemi yang tercatat dalam sejarah, yaitu Flu Spanyol, Flu Hong Kong, SARS, H₇N₉, Ebola, Zika (WHO, 2011b; Rewar *et al.* 2015; Maurice, 2016). Krisis yang diakibatkan oleh pandemi berdampak negatif pada sektor kesehatan, ekonomi, keamanan, politik dan sosial di tingkat nasional maupun global (Qiu *et al.* 2017). Seluruh negara di dunia tidak memiliki kesiap-siagaan penuh untuk mencegah COVID-19 yang begitu cepat menyebar dari Wuhan, China. Negara besar seperti China, Amerika, Rusia, Australia, Inggris, dan negara Uni-Eropa telah terpapar COVID-19 dan

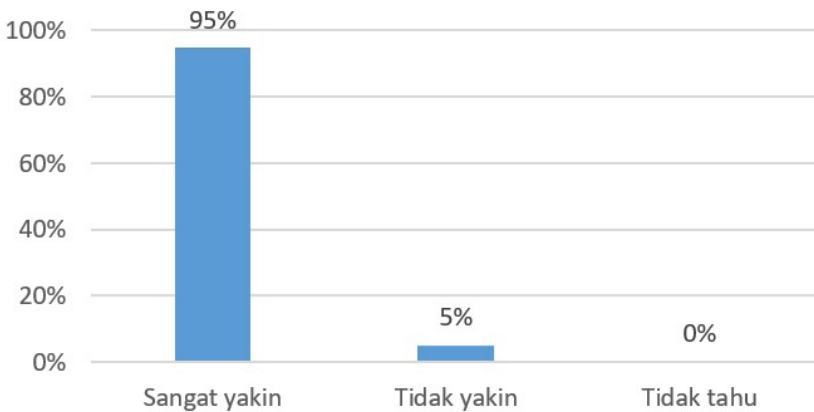
melakukan segala upaya untuk melepaskan diri dari belenggu keterpurukan yang melanda semua aspek kehidupan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan UU No 7 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penyebaran virus yang masif antar-negara dan antar-benua itu semakin meluas dengan terjalannya interkoneksi (seperti transportasi jalur darat, udara dan laut) dalam perekonomian, masalah kesiapan pencegahan dan masalah layanan publik kesehatan yang belum maksimal. Risiko dan bahaya COVID-19 sangat luar biasa, di Indonesia, dalam kurun waktu 1 tahun tercatat 1.894.025 orang terpapar COVID-19, sejumlah 11.639 orang meninggal dunia (9%) dan 144.045 orang (91 %) dapat disembuhkan (BNPB, Juni 2021). Tahap pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau *lockdown*, gencar melaksanakan sosialisasi PROKES dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan tidak berkerumun/bergerombol. Kemudian dilakukan vaksinasi bagi seluruh penduduk usia 18 tahun ke atas secara gratis, bagi yang terpapar disediakan bantuan perawatan dan yang meninggal disediakan bantuan pemakaman.

“...Tanggapan masyarakat kampung Cempluk terhadap pandemi COVID pada awal terjadinya wabah berbeda-beda, beberapa ada yang percaya dan ada yang tidak percaya karena belum melihat korban di desanya dan hanya melihat dari pemberitaan TV. Pada masa pandemi di Desa Kalisongo Dau Kabupaten Malang diintroduksi dan disimulasikan Gerakan Kampung Tangguh sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap COVID-19” (SPD, Mei 2021).

“...Pada awal terjadinya bencana masyarakat Kalisongo tidak paham dengan wabah COVID-19, hanya orang-orang berpendidikan yang sering mendengarkan berita dari TV dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui tentang wabah tersebut. Masyarakat baru sadar ketika di Kabupaten Malang terjadi korban pertama meninggal dunia akibat COVID-19, yang kebetulan merupakan warga kecamatan Dau dan para pamong desa dan tokoh masyarakat kaget bahwa Covid itu ada” (SRW, Juni 2021).

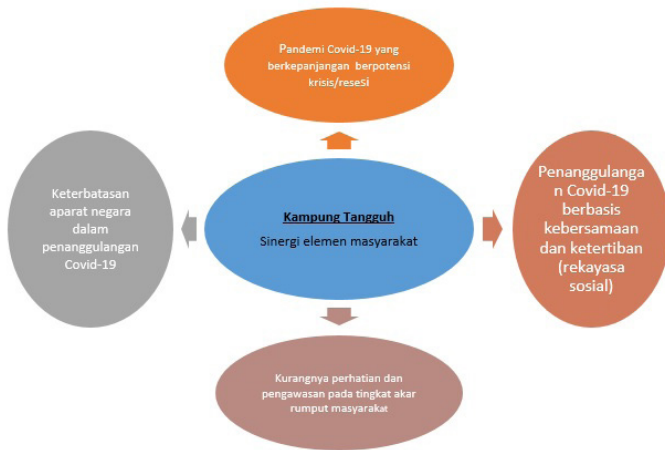
Sekarang hampir semua informan (masyarakat) yakin terhadap terjadinya bencana nasional COVID-19. Sebanyak 50 informan dari Desa Kalisongo menyatakan sangat yakin terjadinya bencana COVID-19 dengan persentase sejumlah 95% (lihat Gambar 7). Pada awal pandemi COVID-19, masyarakat desa tidak mengetahui bencana dan jenis virus yang sedang menjadi wabah, seiring waktu, pemberitaan dan kecepatan informasi yang tersebar hingga pelosok desa, menimbulkan keyakinan bahwa bencana COVID-19 sedang terjadi di Kampung Cempluk Desa Kalisongo.



Gambar 7. Keyakinan Informan terhadap COVID-19

6.3 Persepsi Masyarakat terhadap Inovasi Kampung Tangguh

Gerakan sosial Kampung Tangguh merupakan inisiatif dari Universitas Brawijaya yang bersinergi dengan masyarakat Kampung Cempluk, dalam waktu singkat mendapat sambutan dari pemerintah daerah Malang Raya, berkembang menjadi gerakan sosial lintas disiplin, mulai dari ahli rekayasa sosial, ekonomi, ketahanan pangan, bisnis serta budayawan, seniman, dokter spesialis emergensi, dokter *forensic*, dokter *public health*, TNI dan Polri serta jurnalis. Kelembagaan satuan tugas COVID-19 Kampung Tangguh adalah pada tingkat komunitas khususnya kampung atau setingkat RW. Hal ini sesuai dengan pemikiran Tjondronegoro tentang *sodality* sebagai satuan unit pembangunan yang efektif karena masyarakat saling mengenal secara langsung, ada kedekatan di antara masyarakat dan satuan kepemimpinan desa dapat diterapkan. Konsep Kampung Tangguh yang disusun oleh Universitas Brawijaya dibuat sebagai pedoman atau rujukan dalam penanggulangan COVID-19 pada tingkat komunitas/kampung/RW, secara konseptual keberadaan Kampung Tangguh dijelaskan pada Gambar 8 berikut.



Gambar 8. Kerangka Konseptual Kampung Tangguh (KpT)

Gerakan sosial Kampung Tangguh sebagaimana yang disebutkan dalam Buku Pedoman, gerakan ini adalah merupakan gerakan integrasi dengan yang melibatkan berbagai relawan antara lain Ketua RW, Babinsinkamtibmas Babinkamtibmas (Badan Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), dan pegawai pemerintah. Hal ini dilakukan karena penyebaran COVID-19 sangat cepat, sehingga sistem penanggulangan juga harus secara cepat dilaksanakan. Kampung Tangguh (KpT) memiliki tiga elemen pendukung, yaitu alat atau prasarana, personel, dan manual prosedur. Tiga elemen tersebut dikendalikan oleh sistem komando, mulai dari ketua RW ke atas, dengan demikian, Kampung Tangguh dapat diposisikan sebagai tempat mendarat paling bawah dari program/kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Rekayasa sosial diperlukan untuk memanfaatkan dan mengarahkan komunitas/kampung/RW dalam suatu sistem KpT yang terdiri dari tiga elemen tersebut. KpT terdiri dari 7 (tujuh) unsur ketangguhan, yaitu:

1. Tangguh Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Tangguh Pangan
3. Tangguh Kesehatan
4. Tangguh Keamanan dan Ketertiban (Kamtib)
5. Tangguh Informasi
6. Tangguh Psikologi, dan
7. Tangguh Budaya

6.4 Ketangguhan SDM

Ketangguhan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan inti gerakan karena SDM sebagai aktor dari seluruh unsur ketangguhan dalam KpT. Ketangguhan SDM di Desa Kalisongo juga ditunjukkan oleh kesediaan tokoh masyarakat sebagai relawan, KpT diketuai oleh Ketua RW, pendataan SDM sebagai kader KpT dilakukan oleh Ketua RW, Babinkamtibmas, Babinsa (Badan Pembina Desa), aktivitas pendataan merupakan kelengkapan KpT adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya yang dimiliki oleh RW berupa sarana dan prasarana
2. Pendataan sosial atau warga terdampak, dan
3. Pemetaan kawasan

Peta situasi kawasan RW yang akan melakukan PSBB harus dibuat detail seperti cek *point*, posko (pos komando) keamanan, posko logistik, sentra informasi, rumah karantina dan detail patroli ketertiban warga. Cek *point* ditentukan untuk memastikan tidak ada jalan tikus yang bisa dilalui oleh warga untuk bebas keluar dan masuk kawasan KpT. Hal ini dilakukan untuk menghindari arus barang dan orang yang berpotensi menjadi *carier* COVID-19. Setelah pemetaan situasi dilakukan, selanjutnya dilakukan pendataan kebutuhan pokok oleh kader KpT.

6.5 Ketangguhan Pangan

Ketangguhan pangan menjadi sektor penting dalam penanggulangan bencana, karena kelangkaan bahan pangan dapat berpotensi *chaos*. Ketahanan pangan di tingkat kampung/RW dapat terbentuk dengan ketersediaan dan akses warga terhadap pangan. Dukungan dari Kader ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan dasa wisma kampung ditambah dengan keterampilan mereka dalam pengelolaan lumbung pangan sehingga menyokong dan mendorong tumbuhnya instalasi Lumbung Pangan Kampung (LPK).

“Penginstalan LPK dalam KpT diperlukan untuk menambah ketangguhan pangan warga dan tidak selalu tergantung pada bantuan pemerintah. Kader KpT bisa membagikan/menginisiasi sumbangan kebutuhan pokok bagi warga kurang mampu. Aktivitas LPK dicatat secara rapi pada lembar isian (formulir) penyumbang dan isian (formulir) penerima kebutuhan pokok” (HRU, Mei 2021).

Selama penerapan kebijakan PSBB maupun sesudahnya, masyarakat boleh dikatakan kemampuan warga kurang mampu belum diupayakan untuk tetap mendapatkan kebutuhan pangan pokok melalui bantuan pemerintah, desa

dan persiapan cadangan pangan warga. Menurut salah seorang informan kampung Cempluk mengatakan adanya “peningkatan kebutuhan pangan keluarga selama COVID-19 yang sangat besar”. Kebutuhan pangan adalah hal mendasar yang paling asasi dan masyarakat berusaha meningkatkan persediaan pangan untuk berjaga-jaga jika terjadi *lockdown* di desa. Masyarakat kampung khawatir jika pangan tidak tersedia dapat berakibat terjadinya tindakan kriminal, konflik sosial dan kondisi yang meresahkan masyarakat. Dengan adanya KpT, segala bentuk bantuan akan terorganisasi dalam LPK, sehingga dapat saling memonitor data penyumbang, jumlah sumbangan, dan penerima bantuan bahan pangan pokok.

“Administrasi yang sistematis dan transparan menjadikan LPK sangat penting. Harapannya dengan pengelolaan yang baik dapat menghilangkan kecemburuan sosial pada saat pembagian bantuan dan menghindari oknum yang ingin berbuat kurang baik atau sengaja mengacaukan keadaan krisis saat pandemi COVID-19 terjadi. Ketika pandemi masih berjalan 2 bulan, masyarakat masih bisa bertahan. Akan tetapi saat memasuki bulan ke-3 masyarakat sudah mulai panik” (HRU, Jubir Kampung Tangguh, Mei 2021).

Pemenuhan kebutuhan pangan adalah sesuatu yang sangat pokok saat terjadi bencana, terutama bencana nasional COVID-19 yang sangat menakutkan ini.

“Aksi utama yang segera dilakukan saat bencana adalah pemenuhan kebutuhan pangan, supaya masyarakat tidak kekurangan pangan terlebih sampai kelaparan. Ketika di desa ada penduduk yang positif, segera dilakukan isolasi mandiri, kebutuhan pangan dicukupi oleh relawan KpT atau lumbung pangan yang dikelola oleh ibu-ibu” (ADL, Juni 2021).

6.6 Ketangguhan Kesehatan

Membangun ketangguhan kesehatan diawali dengan meninjau potensi tenaga kesehatan seperti bidan desa, kader KB, dan kader posyandu. Keterampilan mereka dalam menangani COVID-19 dapat ditingkatkan, 9 atau merekrut kader baru jika belum ada. Termasuk aktivitas petugas pemulangan jenazah dan petugas pemakaman, mengingat jenazah pasien COVID-19 memerlukan perlakuan khusus. Indikator Tangguh Kesehatan dalam Kampung Tangguh terdiri dari upayakeluargahidupbersihdandesiaobatatau vitamin, kadertangguh kesehatan dan keperluan tangguh kesehatan di RW. Menurut informan upaya keluarga Tangguh Kesehatan selama pandemik COVID-19 sangat penting, aktivitas yang dilakukan adalah himbauan mematuhi protokol kesehatan, pembagian masker, penyemprotan desinfektan, PSBB, dan pembagian *hand sanitizer* serta konsumsi pangan yang mampu meningkatkan imunitas.

Informan menyatakan sangat memerlukan kader tangguh kesehatan untuk penanganan warga terdampak COVID-19 di wilayah desa Kalisongo khususnya kampung Cempluk. Terdapat tiga macam *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk memiliki ketangguhan kesehatan, yakni:

1. SOP penanganan warga sakit
2. SOP pemudik terkait karantina
3. SOP pemakaman

“...Tangguh Kesehatan sangat diperlukan dalam upaya penerapan protokol kesehatan sebagai penanggulangan COVID-19. Lingkungan yang terjaga kebersihan dan rutin dilakukan desinfektan diharapkan mampu menjadi benteng kesehatan keluarga” (Satgas COVID-19 UB, 2020).

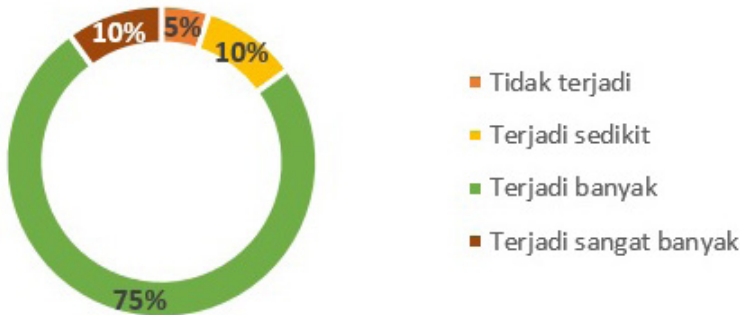
6.7 Ketangguhan Ketertiban dan Keamanan

Satpam, polisi RW atau unit-unit keamanan kampung seperti *pecalang* atau ronda dan unsur bela negara lainnya dapat ikut serta untuk membangun unit pengamanan yang mendukung tangguh ketertiban. Untuk menumbuhkan

ketangguhan ketertiban dan keamanan diperlukan SDM yang memadai, sehingga aparat kepolisian dapat dengan cepat membentuk Unit Pengamanan Kampung (UPK) sebagai bagian dari pembangunan ketangguhan keamanan. UPK fokus menitikberatkan pada upaya menekan laju penyebaran COVID-19 melalui “pengendalian manusia” dengan melakukan *screening*, periksa barang, dan pembatasan pergerakan warga pada suatu kawasan. UPK bekerja pada tahap implementasi dan berfungsi sebagai motor pemecahan masalah untuk membantu tugas Ketua RW/Kampung. Relawan UPK adalah warga yang memiliki karakter dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki jiwa sosial yang tinggi.
2. Cukup aktif pada sejumlah kegiatan kampung yang mudah menyesuaikan dengan dinamika Kampung Tangguh.
3. Komunikasi sosial yang tinggi, sehingga mampu berhadapan dengan publik dan mampu mengendalikan warga.
4. Pengenalan kondisi kampung yang cepat, sehingga mampu mengidentifikasi potensi gangguan dan mengantisipasinya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
5. Memiliki prinsip kerja sebagai pemecah persoalan (*problem solver*) yang mampu mengatasi masalah secara mandiri.
6. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), sehat fisik dan mental sehingga dapat merespons dengan cepat apabila terjadi kondisi darurat, maupun warga yang sakit atau stres.

Persepsi responden tentang peningkatan kesadaran terhadap keamanan dan ketertiban di tingkat keluarga selama COVID-19 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:



Gambar 9. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan

Pada Gambar 9 di atas, tampak bahwa sejumlah 75% responden menyatakan banyak terjadi peningkatan kesadaran terhadap ketertiban dan keamanan di tingkat keluarga selama masa pandemi COVID-19.

“...Terkait keberadaan tangguh keamanan sangat memerlukan keberadaan Babinkamtibmas, Babinsa dan petugas keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya selama pandemi COVID-19 terjadi” (BST, Mei 2021).

Unsur ketangguhan keamanan dan ketertiban terdiri dari lima SOP yang perlu diinstal dalam Kampung Tangguh, yakni:

1. SOP Penanganan Tindakan Kriminalitas

SOP penanganan tindakan kriminalitas perlu diperhatikan, karena dapat meresahkan dan mengganggu stabilitas kondisi masyarakat, selama bencana nasional non-alam COVID-19, tindakan kejahatan rentan terjadi, karena pelaku mencari kelengahan warga.

2. SOP Patroli

SOP patroli telah disusun oleh masyarakat di lingkungan Kampung Tangguh yang selanjutnya mendapat masukan dari pihak Babinkamtibmas dan Bapak Letkol (purn) BST.

3. SOP Tamu dari Luar

SOP penanganan tamu dari luar pada dasarnya tidak menerima tamu dari luar wilayahnya, kecuali ada keperluan yang sangat penting melalui *screening* ketat. Dalam SOP ini penolakan secara halus dilakukan pada tamu yang datang. Apabila pihak tamu dan tuan rumah sulit dimediasi, warga diminta menemui tamunya di tempat publik yang aman sehingga terjamin interaksinya.

4. SOP Warga yang ke Luar

Sebagaimana tamu yang akan masuk ke wilayah Kampung Tangguh, warga dari dalam yang ingin ke luar wilayah juga memiliki SOP tersendiri, keberadaan SOP warga yang ke luar wilayah Kampung Tangguh ini bertujuan untuk meminimalisasi kekacauan dan konflik yang dimungkinkan dapat terjadi.

5. SOP Penanganan Barang Masuk

SOP penanganan kiriman barang masuk ke dalam wilayah KpT diperlakukan sama sebagaimana ketika ada tamu yang ingin masuk, yakni meminimumkan kemungkinan terjadinya kontak fisik langsung. Barang dilakukan ditapis (*screening*) terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada warga tujuan.

Tahap pendataan dimulai dengan memberikan masukan terkait pemetaan wilayah RW/kampung yang dapat memenuhi kriteria/syarat sebagai Kampung Tangguh. Pada tahap pengorganisasian, Babinsa dan Babinkamtibmas bersama pilar desa/kelurahan melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap ketua RW dan warga untuk berpartisipasi. Kader yang tergabung dalam KpT mengutamakan pelibatan komunitas dan relawan perorangan dari aktivis kampung dan mempunyai jiwa sosial tinggi.

6.8 Ketangguhan Informasi

Arus informasi yang cepat beredar di tengah masyarakat dapat menjadi penyebab kekacauan apabila kebenaran dan kelayakan informasi tersebut tidak ditapis. Dalam Kampung Tangguh, ketangguhan informasi menjadi salah satu unsur penting. Selain melawan hoaks, informasi yang tangguh dan akurat akan memberi rasa percaya masyarakat kepada pemerintah.

“Informan menyatakan banyak terjadi peningkatan kebutuhan informasi terkait pencegahan dan penanganan dampak COVID-19. Salah satu contoh pengelolaan informasi untuk membangun ketangguhan informasi adalah dengan memberi media pengumuman pada warga. Dengan memasang pengumuman seperti ini maka memudahkan RT atau RW mensosialisasikan bentuk-bentuk bantuan untuk menghindari protes warga” (RDY, Mei 2020).

Metode penyampaian informasi dibuat sangat efektif terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Terdapat empat level metode penyampaian informasi dalam Kampung Tangguh sebagai berikut:

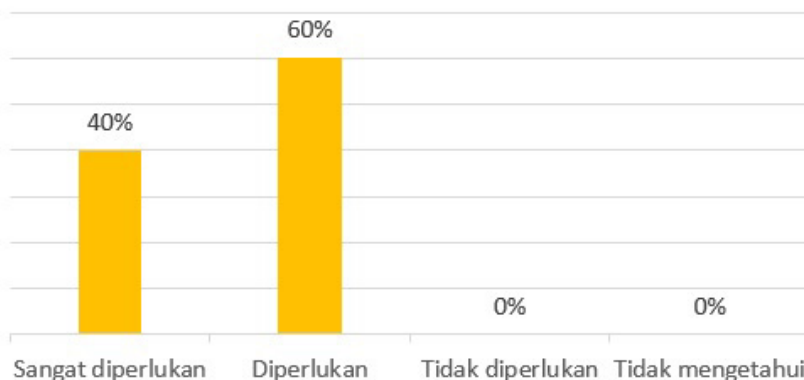
6. Teknologi media massa dengan jangkauan luas seperti TV dan media *mainstream*
7. Media regional seputar kawasan daerah hingga provinsi
8. CCTV kampung, Radio komunitas, dan TV kampung
9. Media komunikasi konvensional seperti Handy Talkie (HT), kentongan, dan pelantang suara dari masjid atau gereja dan tempat ibadah lainnya, yang dapat digunakan dalam keadaan normal dan darurat.

6.9 Ketangguhan Psikologi

Mengingat adanya ketidakpastian waktu berakhirnya pandemi COVID-19, ketangguhan psikologi psikis bagi masyarakat sangat penting, karena ketidakmenentuan akan waktu berakhirnya pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan. Kemampuan tangguh terhadap tekanan mental diperlukan,

selain akibat kemampuan bertahan secara fisik seperti kekurangan pangan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), direspons melalui berbagai cara, seperti adanya kepastian ketersediaan pangan di LPK desa, bantuan tetangga sekitar, jika mengalami kekurangan dan hiburan oleh kader tangguh informasi. Indikator Ketangguhan Psikologi dikaji berdasarkan peningkatan perhatian pada terhadap kondisi psikologi kejiwaan keluarga, dan urgensitas kader psikologi sebagai upaya penanggulangan bencana.

Informan menyatakan banyak terjadi peningkatan perhatian terhadap psikologi kondisi psikis anggota keluarga selama pandemi COVID-19. Menurut informan RD, di Desa Kalisongo telah menerapkan upaya tangguh psikologi dengan adanya membuat ‘pojok curhat’ kampung melalui media zoom, WA *video call* dan *google meet*. Kesehatan jiwa dan mental menjadi aspek poin penting sebagai upaya bersama penanggulangan pandemi COVID-19. Ketika kondisi bencana dan genting melanda kelompok masyarakat, kondisi psikis masyarakat sering terpinggirkan, sehingga dapat berakibat pada terjadinya tindakan kriminal, perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang tidak diinginkan. Persepsi informan terhadap keperluan kehadiran kader psikologi diperlukan untuk menjaga kondisi psikologi kejiwaan masyarakat di tingkat Kampung Cempluk, dapat dilihat pada Gambar 10 berikut sebagai data pendukung.



Gambar 10. Keperluan Kader Psikolog

Upaya ketangguhan psikologi yang dilakukan dengan membuat acara hiburan sesuai potensi lokal Kampung Cempluk Desa Kalisongo; di antaranya seperti radio komunitas kampung yang secara aktif diisi dengan musik, karaoke, puisi, drama radio; TV Kampung dengan sajian video klip musik, *talkshow*, Film, Singo budoyo, dan Badut astronot; hingga acara pembagian *door price* kaos Arema FC. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkuat ketangguhan jiwa masyarakat di antaranya:

1. Kegiatan hiburan
2. Ruang konsultasi/klinik curhat
3. Kegiatan olahraga (jalan kaki sekitar rumah)
4. Bantuan makanan yang bergizi, dan
5. Memperluas semangat berbagi yang ditularkan antar anggota masyarakat.

6.10 Ketangguhan Budaya

Pada prinsipnya, budaya adalah cara untuk mengenal dan memahami karakter, budaya merupakan kearifan yang tumbuh dan berada pada suatu wilayah secara turun-temurun. Terdapat empat budaya yang tumbuh dan berkembang sebagai upaya tangguh di Kampung Cempluk, yaitu:

1. Budaya 'berbagi'
2. Budaya 'mengingatnkan sesama'
3. Budaya 'menolong', dan
4. Budaya 'toleransi'.

Berpijak pada budaya yang tumbuh di masyarakat, pendekatan penanganan COVID-19 akan dapat dipermudah. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai tata nilai yang dianut masyarakat. Ketika nilai-nilai tersebut mewujudkan menjadi pola bertindak gotong royong, maka unsur ini menjadi kearifan lokal masyarakat Kampung Cempluk dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“...sangat terasa kebersamaan di antara warga kampung ini ketika ada warga yang dinyatakan positif COVID-19. *Guyub, rukun* dan kompak menangani. Saling membagi apa yang dimiliki dan apa yang diperlukan warga terpapar. Selama isolasi, ibu-ibu mengirim makanan, jamu atau minuman herbal. Bapak-bapak membelikan obat-obatan. Saling mengingatkan untuk tidak keluar rumah selama isolasi. Tolong-menolong dan memaklumi stres yang dialami warga terpapar. Di kampung ini hampers semua warga masih satu kerabat, perkawinan pun masih berlangsung internal sehingga mudah digerakkan sebagai satu keluarga besar. Apalagi dengan dorongan pak Mangku (inisiator dari Universitas Brawijaya) maka gerakan ini dapat dijalankan” (SRW dan SF, Juni 2021).

6.11 Resiliensi: Ketangguhan Masyarakat Kampung Cempluk

Ketangguhan masyarakat terhadap bencana (*community resilience*) adalah kemampuan untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi risiko akibat bencana, serta tetap tumbuh berkembang menuju masyarakat yang berfungsi optimal dan terhindar dari kondisi yang negatif. Menurut Sulistyaningsih dan Widiyanta (2018), ada tiga indikator yang menggambarkan masyarakat Kampung Cempluk yang tangguh terhadap bencana yakni:

1. Mampu mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi baru akibat bencana,
2. Tetap tumbuh berkembang, baik secara personal/individu maupun sosial, dan
3. Terhindar dari kondisi yang negatif, patologi mental dan sosial.

Dikemukakan oleh Satgas Kampung Tangguh, bahwa:

“ Kehidupan masyarakat desa di Kabupaten Malang merasakan dampak luar biasa pada sektor Pertanian, Ketenagakerjaan dan Sosial. Seluruh elemen masyarakat yang terdampak COVID-19 perlu memiliki strategi adaptasi dan ketangguhan tinggi di tengah ketidakpastian masa berakhirnya pandemi, ketangguhan kelompok masyarakat terhadap COVID-19 juga diperlukan hingga unit yang paling kecil, seperti rumah tangga, hingga RT, RW, dusun/kampung, dan desa. Masyarakat desa di Kabupaten Malang bersinergi dalam gerakan sosial Kampung Tangguh, bertumpu sepenuhnya pada kekuatan gotong-royong masyarakat desa. Pengurus satgas yang dibentuk hingga level terendah di wilayah desa memiliki pedoman yang terarah, efisien, efektif, dan spesifik untuk diimplementasikan di tingkat kampung/RW/komunitas. Implementasi konsep Kampung Tangguh dari perencanaan hingga pelaksanaan bukan berarti membangun struktur organisasi yang baru di masyarakat, tetapi proses restrukturasi sistem yang telah ada di desa/kampung”.

Perspektif sosiologi lingkungan memandang bahwa bencana sering kali dipahami berdasarkan persepsi manusia atau masyarakat, dan atas apa yang mereka rasakan terkait pengalaman emosional pada kejadian-kejadian yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Bencana merupakan salah satu bagian definisi yang disusun dalam suatu konteks sosial budaya hidup masyarakat yang mengalami bencana (Pramono, 2016). Sjoberg (1962) menekankan pentingnya pengumpulan dan analisis data secara utuh pada pola kehidupan masyarakat saat bencana, karena studi tentang bencana difokuskan pada perilaku individu dan kelompok dalam kondisi tekanan (*stress*). Menurut Stallings (1991), dampak bencana yang dialami berbeda-beda menurut kelas-kelas sosial. Sering kali masyarakat gagal melihat isu-isu timbul sebelum peristiwa terjadi. Masyarakat harus secara kritis mengenali sifat bencana, kemudian bertindak sesuai dengan sistem sosial mereka. Risiko dan kerentanan individu, rumah tangga, komunitas atau masyarakat, perlu ditempatkan dalam konteks relasi satu dengan yang lain, termasuk dengan lingkungan hidup di sekitar mereka.

Adiyoso (2018) menyebut perspektif sosiologi terhadap bencana dapat dijadikan suatu proses saling memahami antarpihak terkait penyusunan kegiatan dan program. Jika strategi manajemen bencana menjadi acuan dalam perilaku manusia atau kelompok sosial untuk merespons bencana secara efektif, maka strategi tersebut perlu dikembangkan dan diterapkan menjadi bagian kehidupan sehari-hari.

”Kesehatan merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat desa di tengah pandemi, namun kebutuhan ekonomi tidak bisa dihentikan untuk menjaga kelangsungan hidup. Bencana pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan, masyarakat desa perlu keluar dari lingkungannya untuk memutar roda perekonomian mereka. Ketangguhan masyarakat terus diperlukan untuk menghambat dan menangani dampak COVID-19 yang suatu saat masih dapat menimpa salah satu masyarakat di sekitarnya” (ADL, Mei 2021).

Selanjutnya dikemukakan bahwa kekompakan masyarakat, perempuan-laki-laki, tua-muda adalah kekuatan dan resiliensi yang sangat penting.

“ Peran perempuan dalam penanggulangan bencana non-alam COVID-19 sangat penting dalam persepektif sosial. Selama *lock down* kaum perempuan di sini cepat tanggap, selama *lockdown* kaum perempuan dengan aktivitas ekonominya juga telah menyelamatkan pangan rumah tangga. Contohnya, kader PKK dan dasa wisma dapat ditambah ditingkatkan keterampilannya dalam pengelolaan lumbung pangan, sehingga menyokong instalasi lumbung pangan kampung (LPK). Bidan desa, kader posyandu atau kader KB atau kesehatan yang siap ditambah keterampilannya dalam menangani masalah COVID-19”. (ADL, Juni 2021).

Aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kampung Cempluk tidak bisa lepas dari dampak COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Masyarakat setempat secara sadar merespons keadaan dengan upaya lebih berdaya, yaitu mengikuti Gerakan Kampung Tangguh.

Konsep resiliensi (ketangguhan) dapat diartikan sebagai konsep agar suatu sistem lebih tahan terhadap bencana, bukan hanya kebal terhadap perubahan, tetapi juga bagaimana sistem bisa bangkit kembali, memitigasi, dan pulih dari bencana (Douglas dan Wildavsky, 1999) diterapkan di Kampung Cempluk. Resiliensi dilakukan dengan sinergi antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan. Ketahanan masyarakat dipengaruhi oleh elemen-elemen integral dan kekuatan ekstra-komunitas yang terdiri dari tata kelola risiko bencana yang didukung dengan peraturan perundangan, kebijakan dan tanggung jawab pihak terkait, dan kalangan masyarakat umum. Setiap manusia atau kelompok masyarakat mempunyai pengetahuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Berbagai pihak memiliki pengetahuan dan pemaknaan yang berbeda terhadap suatu kejadian atau fenomena yang dihadapi. Sebab, pengetahuan dan pemaknaan atas suatu kejadian bencana sering berbeda antara masyarakat lokal dengan pihak luar seperti pemerintah, akademisi, swasta maupun LSM.

COVID-19 menimbulkan keterpurukan sosial dan ekonomi secara langsung bagi masyarakat desa di Kampung Cempluk. Sehingga resiliensi masyarakat desa yang tinggi dalam penanggulangan bencana merupakan elemen penting bagi keberadaan Kampung Tangguh. Kerentanan (*vulnerability*) dan dampak bencana terhadap pola perilaku manusia, serta pengaruhnya terhadap fungsi struktur dan kelembagaan masyarakat amat penting menjadi pertimbangan. Dalam mewujudkan Kampung Tangguh, aspek gender tidak bisa dilepaskan. Upaya penanggulangan dampak bencana di antaranya ditempuh dengan pendekatan kearifan lokal, penanggulangan berbasis kearifan lokal merupakan salah satu strategi yang efektif mendorong semangat masyarakat untuk mencegah dan menangani dampak bencana. Pendekatan berdasarkan kearifan lokal mencakup kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas yang diharapkan dapat mendisiplinkan dan memandirikan masyarakat dalam menghadapi bencana.

6.12 Penutup

Salah satu strategi yang penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19 adalah edukasi penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal, sebagai modal sosial yaitu resiliensi masyarakat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya. Secara skematis ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 11. Resiliensi dan Pola Adaptasi Masyarakat dalam Menganggulangi Bencana

Ketangguhan masyarakat berbasis kearifan lokal berpengaruh terhadap proses mitigasi dalam menghadapi bencana. Kemampuan adaptasi baru masyarakat dalam kurun waktu tertentu akan menjadi kebiasaan baru. Sikap kesiapsiagaan dalam menyikapi bencana dapat terbentuk dari perilaku yang dijaga secara turun-temurun. Kebijakan-kebijakan publik seyogianya didasarkan pada kearifan lokal yang telah ada sejak lama dan keanekaragaman pengetahuan lokal ini menjadi sumber kekuatan atau energi positif.

Masyarakat desa memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menghadapi situasi yang terjadi di daerahnya, dalam istilah bahasa Jawa, *deso mowo coro* yang artinya adalah setiap desa memiliki cara masing-masing. Mengingat kondisi suatu desa dapat berbeda dengan desa lainnya, maka tata cara penanggulangan bencana suatu desa/kampung dapat berbeda dengan desa lainnya. Kekayaan kearifan lokal di setiap desa ini dapat menjadi inspirasi dan ide untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat perkotaan, apalagi di era *new normal* seperti saat ini. Di Kampung Cempluk kearifan lokal dapat dijumpai dalam wujud aktivitas gotong royong, sambatan dan saling berbagi masih menjadi tradisi. Kekuatan ini dapat diintegrasikan dengan inovasi dari luar desa oleh komunitas.

6.13 Daftar Pustaka

- Adiyoso W. 2018. *Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Altman LK. 2009. *Is this a pandemic: Define "pandemic"*. The New York Times.
- Anonymous. 2007. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]. 2016. Risiko bencana Indonesia. Jakarta: BNPB.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2020. Hasil survei sosial demografi dampak Covid-19. Jakarta: BPS RI.

- Creswell JW. 2010. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Douglas M, Wildavsky A. 1982. *Risk and Culture*. Berkelay, CA: University of California.
- ILO. 2020. Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Keselamatan dan Manajemen Konflik dan Bencana: Kesehatan di Tempat Kerja.
- Mauch C, Pfister C. 2009. *Natural disasters, cultural responses: case studies toward a global environmental history*. Lexington Books.
- Pramono R. 2016. Perspektif sosiologis dalam penanggulangan bencana sociological perspectives in disaster management. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 18(1): 81-96.
- Qiu W, Rutherford S, Mao A, Chu C. 2017. The pandemic and its impacts. *Health, Culture and Society*. 9: 1-11.
- Ride A, Bretherton D. 2005. *Community Resilience in Natural Disaster*. New York: Plagrave Macmillan, hal.19-49.
- Sjoberg G. 1962. *Disasters and sosial change*. In G. Baker, D Chapman .Eds... Man and society in disaster. New York: Basic Books.
- Stallings RA. 1991. Disasters as sosial problems: A dissenting view. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*. 9.1.: 69-74.
- Silverman EG. 2003. "Excelsior," RE:AL—The Journal of Liberal Arts. 28.2..
- Sulistiyanto R. 2020. Siaran pers rilis survey regional Jatim penanganan Covid-19 di Jatim: evaluasi kinerja, implikasi ekonomi dan politik. Indopol: Jakarta. .Temuan Survei; 23-28 Juli 2020..
- World Health Organization. 2011. Comparative analysis of national pandemic influenza preparedness plans.
- World Health Organization. 2020. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease .Covid-19.



7. PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PADA MASA PANDEMI COVID-19:

Kelompok Rentan namun Pejuang Kesetiakawanan Sosial

Tyas Retno Wulan

Dosen Sosiologi Fisip Universitas Jendral Soedirman

7.1 Abstrak

Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok rentan pada masa pandemi COVID-19 baik di negara tempat mereka bekerja yang merupakan pusat episentrum pandemi sehingga rentan pemutusan hubungan kerja, rentan stress karena harus bekerja ekstra dan tidak bisa ke luar rumah juga rentan distigma sebagai pembawa virus pada saat pulang ke Indonesia. Namun tulisan ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok rentan, namun para pekerja migran Indonesia baik yang masih bekerja di luar negeri maupun yang sudah pulang ke tanah air (baik secara individu maupun bersama komunitas) telah melakukan serangkaian aktivitas kesetiakawanan sosial dengan berbagi, baik masker, APD, meliterasi masyarakat terkait pandemi juga melakukan aktivitas berbagi sembako dan kebutuhan pokok masyarakat yang lain. Ternyata meskipun kelompok rentan, para pekerja migran justru tampil di depan menjadi aktivis gerakan sosial.

7.2 Latar Belakang Permasalahan

Dampak pandemi virus COVID-19, tidak saja berimplikasi pada persoalan kesehatan, namun juga berimplikasi pada masalah ketenagakerjaan. Pada tanggal 18 Maret 2020, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No.

151 Tahun 2020, yang menyatakan Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kepmenaker ini diterbitkan menyusul protes berbagai kalangan, terutama dari kalangan aktivis pekerja migran, ketika sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang hanya memberi perhatian pada pekerja formal namun tidak peduli pada kerentanan PMI (Susilo *et al.* 2020). Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), saat ini ada sekitar 6,5 juta PMI yang bekerja di 142 negara seluruh dunia. Pada tahun 2019, diberangkatkan 276.553 PMI ke berbagai negara, 69 persennya (191.237 orang) adalah pekerja migran perempuan dan paling banyak bekerja pada sektor informal. Data dari *World Migration Report 2020*, Remitansi PMI sebesar US 10,97 Miliar (setara dengan 6,9 persen pendapatan APBN) dan menempatkan Indonesia menjadi 10 besar negara di Asia berdasarkan penerimaan remitansi (Jurnal Perempuan, 2020). Tingginya jumlah remitansi menunjukkan potensi yang besar dari PMI, apalagi berdasarkan kajian (Wulan, 2019) PMI juga menghasilkan remitansi sosial berupa pengetahuan, gagasan dan perubahan *mind set* serta *social capital* yang menempatkan mereka pada jabatan bergengsi seperti menjadi kepala desa, pengacara dan lain-lain.

Pada masa awal pandemi COVID-19, PMI adalah salah satu kelompok yang paling rentan tertular virus karena berada di wilayah seputar episentrum COVID-19. Jutaan PMI tidak berdokumen di daratan Tiongkok yang khawatir akan rencana isolasi oleh Pemerintah China, disikapi pemerintah hanya dengan memulangkan mahasiswa dan pelajar dari Wuhan yang berdokumen. Kondisi tersebut dianggap diskriminatif dan mengesampingkan PMI dengan alasan mereka bukan pekerja resmi (Lumbanrau, 2020). PMI di Hongkong, wilayah yang paling dekat dengan Tiongkok merasakan berbagai dampak COVID-19 antara lain beban kerja ganda karena pemerintah menerapkan *working from home* (WFH) bagi majikan mereka. Akibatnya mereka rentan stres karena tidak bisa berlibur dan berkumpul teman-teman pada hari minggu, rentan distigma sebagai pembawa virus sehingga mengalami pembatasan mobilitas dan diskriminasi pelayanan (Susilo *et al.* 2020); (Prasetyo *et al.* n.d.) (Dewi, 2020). Hasil prasarvei dengan Eni aktivis IMA (*International Migrant*

Alliance) pada tanggal 3 Oktober 2020 menegaskan kondisi kerentanan PMI pada masa pandemi semakin diperparah oleh rasisme dan *xenophobia*. Selain Hong kong, saat ini Malaysia merupakan negara tujuan favorit kedua yang diminati para PMI. Pada saat pandemi, Malaysia menerapkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) membuat pekerja migran tidak dapat bergerak dengan leluasa. PKPB membuat berbagai sektor ditutup untuk sementara dan pekerja migran tidak dapat bekerja (Muthahari, 2020). Gelombang PHK besar-besaran PMI yang bekerja di Malaysia juga menjadi *problem* bagi pemerintah Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan PMI pada masa pandemi dan upaya-upaya apa yang dilakukan PMI untuk berjuang mengembangkan kesetiakawanan sosial pada masa pandemi untuk menyelamatkan mereka atau pihak-pihak lain yang terdampak pandemi.

7.3 Metode

Sesuai dengan tujuan tulisan ini yang mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan pekerja migran Indonesia pada masa pandemi dan upaya-upaya apa yang dilakukan mereka untuk berjuang membangun kesetiakawanan sosial pada masa pandemi untuk menyelamatkan mereka atau pihak-pihak lain yang terdampak pandemi. Maka tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan berupaya melakukan kajian reflektif dengan pendekatan studi pustaka baik berupa jurnal, pemberitaan di media massa dan media sosial dan wawancara mendalam pada beberapa subjek penelitian. Dengan demikian data yang digunakan adalah data primer yang merupakan hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari sumber-sumber kredibel yang ditelusuri oleh peneliti baik dari jurnal, pemberitaan terkait isu pekerja migran pada masa pandemi, maupun media sosial para pekerja migran.

Tahapan selanjutnya adalah data primer dan data sekunder tersebut dianalisis dengan menginteraksikan proposisi-proposisi, realitas-realitas tekstual, dan pernyataan-pernyataan lain yang dianggap penting oleh peneliti. Mengutip Hajar (2021) hubungan interaktif data-data tersebut akan menjadi sebuah deskripsi analitik-refektif.

7.4 Bentuk-Bentuk Kerentanan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19

PMI yang mayoritas pekerja rumah tangga telah bersandingan dengan pusaran COVID-19 sejak titik awal persebaran virus di daratan Tiongkok dan sekitarnya. Sektor ini juga yang mengalami dampak atas *panic buying* serta kekhawatiran tinggi atas kondisi kesehatan. Hasil pemetaan yang dilakukan *Human Right Working Group* (HRWG) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Jaringan Buruh Migran mengungkapkan sebanyak 95% PMI di Singapura dan Hong Kong mendapatkan beban kerja ganda dan tekanan psikologis (Susilo *et al.* 2020). Temuan ini juga memperkuat studi yang dilakukan oleh Liem *et al.* (2020), Fasani & Mazza (2020); Reid *et al.* (2021), Syahrial (2020), Fan (2021) yang menunjukkan bahwa pekerja migran rentan mengalami gangguan kesehatan (mental dan fisik) karena akses mereka yang terbatas terhadap informasi dan fasilitas kesehatan. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya karantina mandiri menyebabkan mereka harus tinggal bersama dengan majikan sehingga menjadi penyebab ketiadaan akses mereka terhadap masker serta obat-obatan. Situasi ini menimbulkan tekanan (depresi). Kondisi ini semakin buruk karena mereka hanya mengandalkan informasi melalui pesan berantai (*WeChat*) di mana info yang terdapat di dalamnya belum tentu benar. Hasil diskusi dengan Eni Lestari ketua *International Migrants Alliance* (IMA), pada masa pandemi ini para pekerja migran mengalami kerentanan yang berlapis mulai dari stigma sebagai pembawa virus, bekerja ekstra lebih keras dari pada hari-hari biasa karena para majikan mereka bekerja di rumah, harus menyediakan pengeluaran ekstra untuk membeli masker, *hand sanitizer* dan lain-lain. Mereka menjadi rentan stres karena hak libur pada hari Minggu yang biasanya menjadi sarana untuk *refreshing* dengan bertemu teman, melakukan aktivitas berorganisasi dan lain-lain harus ditiadakan karena adanya larangan untuk berkumpul. Secara lebih lengkap berikut gambaran kerentanan pekerja migran Indonesia yang digambarkan dalam Pernyataan Sikap Aliansi Migran Internasional pada peringatan Hari Migran Internasional 18 Desember 2020 :

“Karena status hukum dan pekerjaan kami, kami (pekerja migran) berisiko lebih tinggi tertular dan menularkan virus corona. Hal ini dapat dilihat pada penyebaran COVID-19 di banyak penampungan di Singapura, Maladewa dan negara-negara teluk, di rumah-rumah jagal dan pabrik pengepakan daging di Amerika Serikat dan Jerman, perkebunan di Kanada, pusat penahanan di Malaysia, dan kamp pengungsi di Yunani dan Bangladesh. Meskipun demikian, kami sering kali berada pada urutan yang terakhir untuk mendapatkan perawatan medis atau layanan kesehatan, itupun jika kami memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Di saat HAM kami atas kesehatan tidak diperhatikan, aksi-aksi rasis dan *xenophobia* terhadap kami meningkat, karena migran dijadikan kambing hitam sebagai pembawa virus atau sebagai pengguna gratis layanan publik” (IMA, 2020).

Bentuk lain kerentanan pekerja migran Indonesia pada masa pandemi ini adalah terkait informasi. Di masa pandemi, informasi menjadi sesuatu yang penting di saat pandemi ini. Pencegahan dan penanganan yang benar akan menghindarkan risiko tertular dan menularkan virus COVID-19. Bahkan, apabila terkena virus COVID-19, penderita akan tahu apa yang harus dilakukan agar lebih cepat sembuh. Namun, keterbatasan akses informasi pada beberapa kelompok orang membuat mereka rentan terhadap virus COVID-19. Shadmi, Chen, & Dourado (2020) mengelompokkan orang-orang yang sangat rentan terkena dampak pandemi COVID-19 yaitu orang-orang yang tinggal di perumahan padat penduduk, orang-orang yang memiliki status ekonomi yang rendah (miskin), kelompok migran dan minoritas. Kemampuan berbahasa kelompok migran yang terbatas dan budaya yang berbeda dengan budaya asal migran menjadi hambatan bagi mereka untuk mengakses informasi tentang pencegahan dan mitigasi COVID-19. Sebagai akibatnya, mereka mengandalkan pesan berantai di sosial media yang belum tentu benar. Permasalahan serupa juga dialami kelompok migran di Hongkong dan Makau. Di level negara, kebijakan yang dibuat oleh negara-negara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 antara lain kebijakan karantina wilayah (*lockdown*). Kajian (C, 2020) membahas akibat yang muncul akibat diberlakukannya *lockdown* di

India, antara lain masalah sosial dan masalah ekonomi. *Lockdown* membuat toko bahan kebutuhan sehari-hari diserbu banyak pembeli karena *panic buying*. Mereka berebut dengan pembeli lain dan memborong barang-barang kebutuhan sehari-hari. Akibat lain adalah terganggunya pasokan makanan. Hal ini dikarenakan mobil-mobil yang membawa makanan dari kota yang lain terhenti sementara. Masalah lain adalah krisis fasilitas kesehatan di mana jumlah rumah sakit terbatas dan tempat-tempat karantina yang tidak banyak jumlahnya. Selain itu, munculnya *humanitarian crisis* yaitu hilangnya upah pekerja harian membuat orang-orang yang berada dalam sistem ini kehilangan pendapatannya sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan karena tidak memiliki uang. *Humanitarian crisis* akibat hilangnya pekerjaan akan menjadi permasalahan di seluruh dunia. Negara-negara yang selama ini menggantungkan pekerja sementara (*seasonal migrant*) berpikir untuk menggantikan para pekerja manusia dengan robot. Kajian (Mitaritonna & Ragot, 2020), membahas tentang wacana negara-negara di Eropa pada masa datang berpikir untuk mengganti tenaga manusia dengan tenaga robot. Bidang agrikultur yang memiliki permintaan yang tinggi terhadap jumlah pekerja sementara (*seasonal migrant*) paling merasakan dampak *lockdown*. Di satu sisi, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown* di mana terjadi pembatasan mobilitas manusia antar negara yang membuat tenaga kerja berkurang. Di sisi yang lain, jika wacana untuk menggantikan tenaga manusia dengan robot tersebut diwujudkan, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran. Kondisi-kondisi tersebut memberikan gambaran betapa rentannya kondisi PMI pada masa pandemi atau pada masa setelah pandemi.

Dampak lain yang juga dirasakan oleh Pekerja Migran Indonesia khususnya mereka yang sedang menjalani masa prapenempatan (persiapan keberangkatan) adalah tertundanya keberangkatan mereka tersebut ke beberapa negara penempatan, sebagai akibat kebijakan pengetatan lalu lintas keimigrasian di banyak negara. Begitupula Pekerja Migran Indonesia yang telah selesai kontrak dan ingin kembali ke tanah air dalam masa Pandemi COVID-19 ini turut pula merasakan dampaknya. (Qawiyurrijal *et al.* 2021); Selain rentan tertular, para Pekerja Migran Indonesia tersebut juga rentan terstigmatisasi sebagai penular, pembawa, dan penyebar penyakit

tersebut (ILO, 2020). Pada awal merebaknya isu virus corona, muncul stigma bahwa PMI merupakan pembawa virusnya, sehingga di beberapa negara tujuan, seperti Hong Kong dan Taiwan, sempat mencuat isu larangan PMI untuk keluar rumah. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi para majikan yang mempekerjakan PMI tersebut. Stigmatisasi sebagai pembawa virus juga pernah dialamatkan kepada Pekerja Migran Indonesia saat mencuatnya wabah SARS, MERS, dan juga HIV-AIDS. Hal ini selain karena tingkat mobilitas mereka yang tinggi, juga sekaligus berkaitan dengan pandangan diskriminatif yang memang sering kali diarahkan kepada para Pekerja Migran Indonesia. Ancaman bahaya COVID-19 menambah deretan panjang kerentanan PMI saat ini, setelah sebelumnya *transnational crime* dan radikalisme juga menjadi masalah yang rentan dialami oleh para PMI (Qawiyurrijal *et al.* 2021). Temuan Hajar menunjukkan pentingnya inovasi teknologi komputer dan internet untuk membantu memberikan kemudahan di dalam perlindungan hukum terhadap buruh migran; serta mempermudah komunikasi dan mempercepat informasi, sehingga agenda perlindungan hukum terhadap buruh migran pada masa pandemi terus dapat dilakukan. Dengan demikian keterbatasan dan kendala yang terkait dengan kontak langsung dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat diatasi (Hajar, 2021).

Kerentanan Pekerja Migran Indonesia pada masa pandemi ini, juga masih berlanjut pada saat mereka harus pulang ke Indonesia, Wulan, dalam (Wuryanti Puspitasari, 2020) menyatakan bahwa pemerintah desa harus memastikan para pekerja migran yang pulang ke daerah asal di Indonesia harus mendapatkan kepastian terkait tempat karantina yang aman pada saat pulang dan jangan sampai ada stigma bahwa mereka adalah pembawa virus. Hal ini terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang fokusnya pada enam hal yang menjadi perhatian bersama untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Pertama terkait program stimulus ekonomi dan kedua terkait skema program yang meringankan beban mereka. Hal yang ketiga, untuk pekerja di sektor informal presiden meminta agar mereka dimasukkan dalam program jaring pengaman sosial. Keempat, bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, Presiden meminta agar mereka diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja.

Kelima terkait program padat karya tunai, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang banyak. Keenam, perlindungan terkait perlindungan kepada para pekerja migran baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri. Beberapa organisasi pekerja migran Indonesia di luar negeri menyatakan bahwa dampak langsung yang dialami pekerja migran Indonesia terkait virus korona ialah mobilitas yang terhambat, dihalangi untuk mendapatkan hak libur, dipaksa bekerja di hari libur, dan beban kerja bertambah dengan risiko bekerja dengan bahan kimia berbahaya. Situasi ini bisa menghadapkan pekerja migran dan majikan berkonflik dan rentan di PHK (Susilo, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian-kajian di atas, tampak bahwa pada saat pandemi, para pekerja migran mengalami kerentanan berlapis sebagai berikut:

1. Untuk mereka yang akan bekerja ke luar negeri terjadi penundaan keberangkatan ke luar negeri dan tertahan di penampungan sampai waktu yang belum bisa ditentukan
2. Untuk pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri berupa pemutusan hubungan kerja dan kepulangan secara massal ke tanah air, stigma sebagai pembawa virus, rentan stress karena harus bekerja ekstra dan tidak bisa ke luar rumah majikan pada hari libur, harus mengalokasikan pengeluaran ekstra untuk kebutuhan pribadi pada masa pandemi seperti masker, *hand sanitizer* dan lain-lain
3. Untuk pekerja migran yang kembali ke tanah air, mereka rentan dengan stigma sebagai pembawa virus dan juga rentan dengan berbagai macam bentuk pemungutan liar pada saat harus karantina mandiri.

7.5 Pekerja Migran Indonesia dan Kesetiakawanan Sosial pada Masa Pandemi

Pada sub bab terdahulu telah digambarkan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan salah satu kelompok yang paling rentan pada masa pandemi. Kerentanan yang dialami bahkan terjadi berlapis pada mereka yang belum berangkat ke luar negeri (di penampungan), mereka yang sedang bekerja di luar negeri, dan bahkan mereka yang sudah kembali ke Indonesia. Namun

apakah kondisi kerentanan yang mereka alami membuat mereka menyerah dan berdiam diri saja? Ternyata tidak. Meski pekerja migran Indonesia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap wabah virus korona, namun mereka bagian dari masyarakat Indonesia yang terdepan dan secara aktif bersama-sama menghadapi virus korona dengan semangat solidaritas. Pada subbab ini akan digambarkan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan para pekerja migran Indonesia untuk melawan pandemi.

Bentuk solidaritas pertama yang dilakukan para pekerja migran pada masa pandemi adalah memberikan literasi pada pekerja migran terkait virus COVID-19 dan melakukan pembagian masker. Upaya ini bahkan dilakukan pada masa-masa awal pandemi. Berikut adalah dua contoh yang dilakukan para pekerja migran di Taiwan dan di Hong Kong:

Solidaritas Pembagian Masker di Taiwan

Puluhan warga Indonesia di Taiwan yang tergabung dalam sejumlah komunitas, antara lain, Solidaritas Merah Putih (Somet), PDIP, PCI NU dan *Nines Lovers* membagikan 2 ribu masker untuk pekerja migran dan warga Taiwan. Aksi dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 itu dilakukan di Taipei Main Station Minggu, 23 Februari 2020. “Pembagian masker ini sebagai rasa kepedulian kita, warga Indonesia di Taiwan. Bukan hanya kepada para pekerja migran Indonesia tapi juga kepada Masyarakat Taiwan secara keseluruhan,” ujar Nano dari Solidaritas Merah Putih (*Liputan 6*, 2020)

Solidaritas Pembagian Masker Gratis Pekerja Migran Hong Kong

Bara JP Hong Kong membagikan 6 ribu masker secara gratis untuk Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong. Salah satu cara mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan-China, Minggu, 23 Februari 2020. Pembagian dilakukan tiga tempat, yaitu Tin Shui Wai, Long PIN, dan Yuen Luen (R Antares, 2020).

Selain di negara tujuan, inisiatif memberikan bantuan warga mulai dari masker hingga kebutuhan pokok, juga dilakukan oleh Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) di Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. KOPI bukan hanya memberikan bantuan, sebelumnya juga berinisiasi mendorong para penjahit membuat masker kain untuk dibagikan secara gratis kepada warga terdampak COVID-19 (Alimah, 2020).

Gambaran yang tersaji di atas menunjukkan kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan para pekerja migran Indonesia, bahkan di saat Indonesia belum terlalu ramai dengan kasus COVID. Hal ini sesuai pendapat pimpinan WHO, dr Tedros Adhanom Gebheryesus yang menyatakan bahwa aset terbesar untuk menghadapi wabah virus korona ialah solidaritas dan mengedepankan fakta. Para pekerja migran Indonesia, baik sendiri maupun bersama organisasi, menjadi saluran informasi yang menyaring berita bohong. Selain membagi masker, mereka juga berani mempertanyakan sikap pasif perwakilan Indonesia di luar negeri yang seharusnya proaktif. Mereka bahkan mampu meyakinkan beberapa BUMN, kementerian, dan kepala daerah basis pekerja migran untuk mengirimkan puluhan ribu masker ke Hong Kong dan Singapura. Dua wilayah yang sempat mengalami *panic buying* dan kelangkaan masker pada masa awal-awal virus korona terdeteksi di kawasan ini. Dari kiriman inilah mereka mendistribusikan ke ribuan pekerja migran Indonesia bahkan juga ke warga lokal. Secara rutin, organisasi pekerja migran di Hong Kong dan Singapura menyelenggarakan pertemuan di hari libur melakukan sosialisasi cara pencegahan virus korona sekaligus melawan hoaks yang berkembang di seputarnya. Pertemuan ini juga menjadi wadah penampung keluh kesah yang dialami pekerja migran Indonesia yang harus menanggung beban kerja lebih berat terkait penyebaran virus korona (Susilo *et al.* 2020).

Meski berada dalam posisi rentan dan subordinat pekerja migran Indonesia yang didominasi perempuan tetap memiliki agensi untuk bertahan di masa pandemi. Bahkan untuk memberikan dukungan bagi komunitasnya. Perempuan Sumba, misalnya, mengembangkan inisiatif edukasi, pemberian informasi, dan komunikasi mengenai COVID-19, bagi komunitasnya. Agensi perempuan lainnya juga melakukan hal serupa yang dilakukan oleh Solidaritas Pangan Jogja (SPJ). SPJ berhasil mentransformasi pandangan yang

bias terhadap kerja perawatan, seperti memasak di dapur, menjadi gerakan solidaritas dapur umum (Sigiro *et al.* 2020). Apa yang telah dilakukan para pekerja migran perempuan, baik yang masih berada di Hong Kong, Taiwan maupun yang telah pulang ke tanah air, solidaritas yang mereka lakukan menunjukkan sikap agensi mereka untuk bertahan pada masa pandemi ini.

Bentuk kesetiakawanan sosial yang ditunjukkan para mantan pekerja migran yang sudah pulang dan berkarya di Indonesia pada masa pandemi juga beragam. Meskipun termasuk kelompok yang rentan, para mantan pekerja migran ini justru tampil di garda depan untuk melakukan gerakan sosial untuk kelompok masyarakat yang terdampak pandemi. Mereka bahkan memanfaatkan jejaring sosial tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Kolega-kolega mereka di media sosial termasuk para pekerja migran yang masih bekerja di luar negeri ikut berpartisipasi dalam gerakan sosial tersebut. Berikut penuturan dua mantan PMI Hong Kong, Mega Vristian Sambodo (MVS) dan Maisidah Salas (MS) yang melakukan gerakan sosial membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di lingkungan tempat mereka tinggal.

MVS adalah nama pena dari Megah Everistiana Wati, alumni Pekerja Migran Indonesia yang sudah puluhan tahun bekerja di Hong Kong. Mega yang pernah kuliah di IKIP Negeri Malang, jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS 83) selama bekerja di Hong Kong aktif dalam berbagai organisasi pekerja migran, karya tulisannya sering dimuat di berbagai media di Indonesia, juga media berbahasa Indonesia yang terbit di Hong Kong. Kegiatannya ini mengantarkan Mega memenangkan berbagai lomba karya tulis puisi dan cerpen. Sepulang dari Hong kong, Mega dan suaminya tinggal di Tangerang. Pada saat pandemi, Mega menginisiasi sedekah cantol bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut ini hasil wawancara jarak jauh dengan MVS sebagai berikut:

Awal sedekah Cantol itu dari kebiasaan setiap Ramadhan berbagi takjil, setelah Ramadhan lalu lanjut berbagi di hari Jumat (Jumat berkah), Nah ketika Corona masuk Indonesia, menimbulkan berbagai kesedihan, saya ingin berbagi perhatian dan kasih sayang, kepada para tetangga dan usahawan kecil sebab mereka mau berusaha bekerja: pemulung, pengamen, tukang penjual air yang didorong gerobak itu, pembeli barang bekas/rongsokan, tukang sampah, jasa tukang bersih taman, tukang kurir jasa paket dll). Karena saya hanya tinggal berdua dengan suami, saya sibuk dengan urusan pekerjaan buka warung, sedang suami bekerja sebagai dosen, yang khusus saya antar bagikan ke para tetangga saja, selebihnya sedekah itu saya letakkan di meja depan rumah, posisi persis di pinggir jalan. Karena meja tidak cukup untuk meletakkan sedekah, akhirnya saya cantol-cantolkan di pagar besi rumah.

Beruntung rumah saya di pertigaan jalan utama pintu masuk perumahan, jadi banyak yang tau. Saya kan facebooker sejati, apa yang saya lakukan saya simpan di Facebook, foto dan caption tentang kegiatan yang saya lakukan. Ternyata disambut baik oleh para sahabat di Hong kong. Oh ya, juga para tetangga yang tergerak ikut berbagi dari kegiatan yang saya lakukan. Tujuan mereka sama, ingin berbagi perhatian dan kasih sayang, bahwa wabah pandemi ini, ujian dari-Nya, yang kalau bisa ditanggung bersama.

Waktu itu berbagi sedekahnya juga membagikan masker dan mengingatkan para ibu dan siapa pun yang datang mengantri untuk mengambil sedekah, selalu bermasker dan memberi anjuran agar di keluarga mereka pun patuh menerapkan menjalankan proses, demi terwujudnya kesehatan bersama.

Semakin hari semakin banyak dermawan dari para sahabat di Hong Kong (sahabat-sahabat saya pekerja migran, majikan saya dulu) dan sahabat FB, termasuk njenengan juga ya, akhirnya saya minta tolong beberapa tetangga dekat dan minta izin ke bapak RT. Sehingga kegiatan yang awalnya sederhana, diperhatikan RT, dijadikan kegiatan di RT tempat tinggal saya, dibuatkan banWner oleh RT. Terakhir berkegiatan bisa berbagi kurang lebih ke seratus orang (yang datang mengantri). Karena Corona makin parah, kegiatan kami stop supaya tidak menimbulkan antrian, dialihkan untuk isoman. Saat ini di RT saya tetap kompak rukun. Keluarga yang menjalani isoman. Selama 15 hari, untuk makan sehari-hari mereka, ditanggung gotong royong, dijadwalkan. Contoh: Senen sarapan: Bu Mega, makan siang, Bu Rita, makan malam ibu lainnya. Begitu selama 15 hari. Keperluan gas yg isoman ditanggung RT.

(Mega Vristian Sambodo, Juli 2021)

Berikut ilustrasi sedekah cantol yang dilakukan MVS dan di-*upload* pada laman *facebook* pribadinya.

Sedekah Cantol ala Mega Vristian Sambodo

Assalamualaikum wrwb terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam program “Sedekah Cantol” di masa pandemi COVID-19.

Alhamdulillah, hari ini bisa berbagi kepada kurang lebih 80 orang. Memberi bahan pokok sayuran dan lauk. Juga membagikan nasi bungkus ke: Pemulung, tukang air, gojek pangkal dan para lansia yang layak dibantu.

Semoga Allah, memberi keberkahan kepada pemberi dan penerima. Juga niatan hajat/permohonan doa, dari yang beredekah di Jumat ini, dikabulkan Allah. Aamiin.



Sumber: FaceBook Mega Vristian Sambodo, tanggal 22 Juni 2020

Maizidah Salas (MS) mantan pekerja migran dari Hong Kong melakukan gerakan sosial pada masa pandemi dari kampung halamannya di Wonosobo. Salas, demikian nama panggilannya berbagi untuk kelompok masyarakat yang tidak beruntung dan terdampak COVID. Maizidah Salas merupakan salah satu dari 10 orang pejuang anti *Human Trafficking* yang mendapatkan penghargaan berupa *Trafficking In Person (TIP) Report Heroes 2018*, yang diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael R. Pompeo dengan didampingi oleh Dewan Penasihat Presiden tentang perdagangan orang yang juga Putri Presiden AS Donald Trump, yaitu Ivanka Trump, di Washington DC, pada tahun 2018. Bersama teman-temannya yang tergabung dalam SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), Maizidah membangun Kampung Migran di Wonosobo dengan tujuan agar para korban perdagangan manusia, bangkit, bahkan bisa sukses di masa depan. Selain itu dia juga melakukan pendampingan hukum dan melakukan upaya pemulihan trauma bagi para korban (Ghita Intan,

2020). Melalui akun *facebook*-nya, Maizidah Salas secara aktif mengajak teman-temannya untuk berbagi dan menggalang donasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Jaringannya tidak hanya di Indonesia, tapi juga teman-temannya di luar negeri. Berdasarkan wawancara pada bulan Juli 2021, dijelaskan Salas motivasi dan alasannya untuk terus berbagi pada sesama sebagai berikut:

Pandemi ini berdampak sangat besar khususnya dalam bidang ekonomi. Banyak sekali orang-orang di sekeliling kita yang perlu uluran tangan untuk diringankan. Saya hanya ingin sedikit berkontribusi baik pada keadaan pandemi seperti ini. Saya memang tidak punya uang banyak, tapi saya memiliki banyak kawan yang baik. Bisa saling membantu adalah sebuah kehidupan yang indah dan membahagiakan banyak orang. Karena Tuhan akan memudahkan urusan kita jika kita juga memudahkan urusan orang lain. Dalam kondisi sulit tak perlu saling menghujat tapi mari kita berbuat (Maizidah Salas, Juli 2021).

Berikut salah satu postingan Salas yang menceritakan keterlibatan para pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di Taiwan dalam kegiatan-kegiatan sosialnya

Gerakan 100 NT PMI Taiwan Peduli

Pahlawan sejati di bulan suci
Bekerja di negara orang itu berat.
Meninggalkan keluarga maupun orang 2 terdekat,
Bahkan dengan rela hati jauh dari ibu Pertiwi.
Berjibaku dengan waktu sembari menahan pilu
Pekerjaan yang selalu menumpuk
Terkadang harus menahan emosi dalam lubuk.
Namun apa daya,tak ada pilihan bagi mereka
Tetapi beban itu mereka simpan dan mereka pendam.

Mereka tak ingin keluarga tau tentang penderitaan,tentang kepiluan.

Mereka selalu mengabarkan tentang kebaikan.

Jiwa sosial mereka tetap melekat,hati mereka tetap dekat.

Untuk Indonesia

Gerakan 100 NT PMI Taiwan Peduli namanya.

Sebuah gerakan yang di bentuk hanya melalui media sosial FB, namun penuh makna.

Uniknya di antara pengurus maupun anggota belum tentu saling mengenal, bahkan ada yang belum pernah bertemu.

Tapi itulah mereka yang luar biasa.

Gerakan ini khusus diinisiasi oleh pekerja migran di Taiwan yang memiliki jiwa sosial tinggi. Dana yang terkumpul benar-benar disalurkan kepada orang-orang Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, membantu biaya kesehatan dll.

Seperti kali ini, bulan suci Ramadhan gerakan ini selalu menebar kebaikan. Mereka dengan sukarela bergotong royong untuk bersedekah ke beberapa daerah kantong-kantong pekerja migran yang ada warganya kurang mampu.

Dan Alhamdulillah di daerah kamipun selalu mendapat taburan rezeki dari teman-teman pekerja migran di negeri Formosa ini.

Terima kasih teman-teman... semoga gerakan ini semakin besar dan semakin berkah...

SIE SIE NI MEN...

WO AI NI MEN



Sumber: Facebook Maizidah Salas, tanggal 22 Mei 2020

Berdasarkan aktivitas kesetiakawanan sosial yang dilakukan Mega Vristian Sambodo dan Maizidah Salas, ada kesamaan dari aktivitas mereka berdua, yaitu menggunakan media sosial sebagai cara untuk mengajak masyarakat berdonasi dan kedua aktivitas mereka selalu melibatkan teman-teman para pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri atau mereka yang sudah pulang ke Indonesia. Hal ini menunjukkan kekuatan jejaring sosial yang mereka miliki. Hal ini sejalan dengan kajian (Wulan, 2019) yang menunjukkan bahwa para pekerja migran menghasilkan tidak hanya remiten ekonomi tapi juga remiten sosial berupa pengetahuan, keterampilan, jejaring sosial dan *mindset* baru saat mereka bekerja ke luar negeri. Remiten sosial itu menjadikan mereka sebagai sosok yang percaya diri, tangguh dan punya posisi tawar dalam masyarakat sekaligus memposisikan mereka menjadi agen perubahan sosial dalam masyarakat.

Selain dalam bentuk individu, bentuk kesetiakawanan sosial juga dilakukan dalam komunitas Desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Desbumi yang diinisiasi oleh *Migrant Care* adalah upaya memberikan perlindungan pada PMI sejak dari desa, sekaligus memberdayakan para mantan PMI (Wulan *et al.* 2017). Jumiatur, dari Desbumi Dukuh Dempok mengambil langkah di masa pandemi COVID-19 dengan memproduksi dan membagikan Alat Pelindung Diri (APD). Kebutuhan APD bagi para tenaga Kesehatan yang berakibat kelangkaan dan mahalnya APD menginisiasi Jumiatur bersama 12 orang mantan

pekerja migran Desa Dukuh Dempok membuat APD berupa masker dan juga baju hazmat. Untuk bahan baku APD, Jumiatur mengaku mendapat sumbangan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selama masa produksi, pihaknya juga tidak mengalami kendala berarti, karena sebelumnya sudah mendapat pelatihan menjahit dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia. Mesin jahit yang mereka gunakan untuk memproduksi APD juga sumbangan dari Kemnaker. APD yang mereka produksi disumbangkan secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan. Total telah ada 600 baju hazmat yang berhasil diproduksi dan didistribusikan ke beberapa Puskesmas, BPBD dan kantor-kantor Kecamatan hingga Desa dan Kelurahan di Kabupaten Jember. Ia juga menyumbangkan baju hazmat ke Palang Merah Indonesia Jember untuk membantu petugas pengantar jenazah yang kehabisan baju hazmat. Jumiatur melakukan aksi ini sebagai bentuk kontribusi membantu pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Bambang Teguh Karyanto *Project Officer Migrant Care* Jember menggambarkan sosok Jumiatur sebagai pekerja migran yang punya semangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan mampu menyelesaikan pendidikan sarjana sepulang dari bekerja di Hong Kong. Dedikasinya terhadap persoalan PMI juga luar biasa. Sejak bergabung dengan *Migrant Care* pada tahun 2016, Jumiatur aktif melakukan advokasi kepada warga yang ingin bekerja di luar negeri. Bahkan, berkat dedikasi Jumiatur saat ini banyak warga yang lebih senang bekerja di desanya dan tidak lagi menjadi pekerja migran. Menurut Bambang, Jumiatur bisa membuktikan bahwa ada banyak pekerjaan menghasilkan yang bisa dilakukan di negeri sendiri. Bekerja sebagai pekerja migran ke luar negeri bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi. Jika terpaksa harus menjadi pekerja migran harus dilakukan dengan cara yang aman (Jember, 2020). Selain Desbumi Dukuh Dempok, Desbumi di Desa Rogo Jati Wonosobo yang dipimpin oleh Kepala Desanya Etty Subiyarti menjadi penggerak pembuatan masker. Dengan pinjaman modal dari pemerintah daerah, desa ini menjadi salah satu penghasil masker yang dipasok ke berbagai rumah sakit di Pulau Jawa. Para pekerja migran di desa ini membentuk tiga kelompok masing-masing 20 orang, total ada 60-an orang mendapat modal dari dinas sosial Pemkab Wonosobo untuk memproduksi masker (Satriawan, 2020).

Berdasarkan deskripsi di atas, tampak bahwa pada masa pandemi para pekerja migran baik yang masih bekerja di luar negeri maupun yang sudah pulang ke tanah air (baik secara individu maupun bersama komunitas) telah melakukan serangkaian aktivitas kesetiakawanan sosial dengan berbagi, baik masker, APD, meliterasi masyarakat terkait pandemi juga melakukan aktivitas berbagi sembako dan kebutuhan pokok masyarakat yang lain. Ternyata meskipun kelompok rentan, para pekerja migran justru tampil di depan menjadi aktivis gerakan sosial.

7.6 Penutup

Pekerja migran Indonesia adalah kelompok yang paling rentan pada masa pandemi, selain karena mereka bekerja pada pusat episentrum pandemik, saat pulang ke tanah airpun juga rentan dengan permasalahan. Bentuk-bentuk kerentanan yang dialami pekerja migran adalah sebagai berikut: bagi mereka yang akan bekerja ke luar negeri berupa penundaan keberangkatan ke luar negeri dan tertahan di penampungan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Untuk pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri berupa pemutusan hubungan kerja dan kepulangan secara masal ke tanah air, stigma sebagai pembawa virus, rentan stres karena harus bekerja ekstra dan tidak bisa keluar rumah majikan pada hari libur, harus mengalokasikan pengeluaran ekstra untuk kebutuhan pribadi pada masa pandemi seperti masker, *hand sanitizer* dan lain-lain. Untuk pekerja migran yang kembali ke tanah air rentan dengan stigma sebagai pembawa virus dan juga rentan dengan berbagai macam bentuk pemungutan liar pada saat harus karantina mandiri. Namun posisi rentan yang mereka hadapi ternyata tidak menyurutkan daya juang mereka untuk melakukan serangkaian gerakan sosial menggalang kesetiakawanan sosial bagi masyarakat. Baik secara individu maupun komunitas mereka memproduksi dan membagikan masker serta APD, meliterasi masyarakat terkait pencegahan COVID-19, membagikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja migran adalah kelompok yang menghadapi pandemi dengan daya juang dan kesetiakawanan sosial.

7.7 Daftar Pustaka

- Alimah. 2020. Cegah Covid-19_ KOPI Pondok Gerakkan Tukang Jahit dan Bagikan Masker Gratis - Pusat Sumber Daya Buruh Migran. <https://www.tagar.id/barajp-hong-kong-bagikan-masker-gratis-untuk-pmi>.
- C A. 2020. Covid-19 and lockdown: Delayed effects on health. *Indian Journal of Psychiatry*, 62(3): 247–249. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32773866/>
- Dewi MK. 2020. Penanggulangan Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi Covid- Bantuan Fisik Dan Non-Fisik. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers. 427–433.
- Fan BE. 2021. Migrant workers with COVID-19: Recognizing the crucial role non-governmental organizations perform. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*. 9: 100145. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100145>
- Fasani F, Mazza J. 2020. A Vulnerable Workforce : Migrant Workers in the COVID-19 Pandemi. 1, Issue January. <https://doi.org/10.2760/316665>
- Intan G. 2020. Mantan TKI Maizidah Salas Terima Penghargaan dari Pemerintah AS. <https://www.voaindonesia.com/a/mantan-tki-maizidah-salas-terima-penghargaan-dari-pemerintah-as/4558317.html>
- Hajar S. 2021. Intelektiva. *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*. 2(06): 134–145.
- ILO. 2020. Risalah Kebijakan ILO Pertimbangan utama untuk memastikan. April, 1–8. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_745598.pdf
- IMA. 2020. Kertas Posisi Aliansi Migran Internasional (IMA) Terkait Pandemi Covid-19 dan Tuntutan Perlindungan uang dan mengupayakan jalan pembangunan yang mandiri, mengabdikan pada rakyat. 1–10.
- Jember KKR. 2020. Secerach harapan dari mantan pekerja migran. <https://www.k-radiojember.com/berita/read/secerach-harapan-dari-mantan-pekerja-migran>

- Liputan 6. 2020. Cegah Corona, WNI di Taiwan Bagikan Masker untuk Pekerja Migran. News Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/4155157/cegah-corona-wni-di-taiwan-bagikan-masker-untuk-pekerja-migran>.
- Lumbanrau RE. 2020. Cerita pekerja migran Indonesia di tengah wabah virus corona: Dari tidak digaji, di-PHK, susah beli alat sikat gigi hingga tidur di atas lemari. BBC News Indonesia. pp. 1–1. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52607651>
- Mitaritonna C, Ragot L. 2020. Policy Brief: After Covid-19, will seasonal migrant agricultural workers in Europe be replaced by robots?. *Policy Brief*. 33(33): 14.
- Muthahari N. 2020. Kondisi Rentan Pekerja Migran di Masa Pandemi. In Pusat Sumber Daya Buruh Migran. <https://buruhmigran.or.id/2020/07/20/kondisi-rentan-pekerja-migran-di-masa-pandemi/>
- Prasetyo DA, Juanito J, Hapsari AM, Natalis A. Construction of COVID-19 pandemi management policy based on the welfare of women and children. 4(1): 378–392.
- Qawiyurrijal N, Zainul M, Kurniawati MF. 2021. Pekerja Migran Indonesia Di Tengah Pandemi COVID-19 Dalam Bingkai Media Daring. Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Portal Berita Bbc News Indonesia Periode Januari – Mei 2020. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4574/>
- Antares R. 2020. Bara JP Hong Kong Bagikan Masker Gratis untuk PMI _ Tagar.
- Reid A, Rhonda-Perez E, Schenker, MB. 2021. Migrant workers, essential work, and COVID-19. *American Journal of Industrial Medicine*. 64(2): 73–77. <https://doi.org/10.1002/ajim.23209>.
- Wulan RT, Shodiq D, Ramadhanti W, Wijayanti S. 2017. Protection of Migrant Workers from Upstream to Downstream through “Peduli Buruh Migran” Villages. Desbumi: Study at Kuripan Village, Central Java and Nyerot Village, West Nusa Tenggara. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 5(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17975>

- Shadmi E, Chen Y, Dourado I, et al. 2020. Health equity and COVID-19: global perspectives. *International Journal for Equity in Health*. <https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-020-01218-z>.
- Sigiro AN, Gina A, Komalasari D. 2020. Potret Dampak Penerapan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interaksional. *Jurnal Perempuan*. 25(4): 295–308.
- Susilo W. 2020. Bersama Melawan Corona. Vol. 7: pp. 2–3. https://mediaindonesia.com/amp/amp_detail/294632-bersama-melawan-corona-bukan-menstigma?fbclid=IwAR1Ba6OA9RbpM3fXgIQS_jh6uoq5AFatjwk-OtImQ_A81wZAddY-jAWOaFo.
- Susilo W, Arista N, Evi Z. 2020. Kerentanan Pekerja Migran Indonesia Menghadapi Wabah Covid-19. *CSIS Commentaries DMRU-024-ID*, 151, 1–6.
- Syahrial. 2020. Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. *Ners*. 4(23): 21–29.
- Wulan TR. 2019. Pengetahuan dan Kekuasaan: Penguatan Remiten Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan. Rajawali Press.
- Puspitasari W. 2020. Sosiolog mengingatkan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran - ANTARA Jateng. <https://jateng.antaranews.com/berita/307605/sosiolog-mengingatkan-pentingnya-perlindungan-bagi-pekerja-migran..>
- Satriawan Y. 2020. Desbumi, Pemberdayaan Desa Pekerja Migran. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/desbumi-pemberdayaan-desa-pekerja-migran-/5470406.html>

8. COVID-19 DAN URGENSI AKTUALISASI OTONOMI DAERAH BERBASIS KEBHINEKAAN

Syarif Hidayat

Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional,
CTSS Fellow

Abstrak

Silang kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi pandemik COVID-19 secara banal mengonfirmasi bahwa reformasi relasi pusat-daerah yang telah berlangsung dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir belum memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, langkah fundamental yang harus diambil oleh Indonesia dalam upaya membenahi relasi kekuasaan antara Pusat dan Daerah di era “Indonesia Baru” ini adalah melakukan “revitalisasi” konsep desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri, yang tidak saja bertumpu pada semangat ke-*Tunggal Ika*-an, tetapi juga harus mengakomodasi ke-*Bhineka*-an. Dengan memetik pelajaran dari realitas silang sengkabut relasi pusat-daerah dalam penanganan pandemi COVID-19, maka dapat diajukan, sedikitnya ada dua rekomendasi perbaikan konsep dan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke depan. *Pertama*, aktualisasi prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan. *Kedua*, rekonstruksi praktik *decentralization within the state* menjadi *decentralization within the state and society*.

8.1 Pengantar

Satu di antara peristiwa penting yang menarik untuk dicatat dalam sejarah perjalanan sistem politik di Indonesia adalah, tentang adanya komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan secara masif (*big bang reform*) terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah pada awal periode reformasi melalui UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 (Hidayat and Antlov, 2004). Merenungkan kembali ide yang mendasari dan harapan yang direkatkan terhadap *big bang reform* tersebut pada konteks kekinian menjadi penting untuk dilakukan. Ini karena, bila ditilik dari hitung-hitungan waktu, sampai dengan tahun 2021, implementasi reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di tanah air telah memasuki usia lebih dari dua dekade. Namun demikian, capaian yang diperoleh belum menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya saja bila ditilik dari capaian atas tujuan esensial desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri, antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, demokratisasi di tingkat lokal, dan peningkatan pelayanan publik (Smith, 1985; Mawhood, 1987; Cheema and Rondenelli, 1983).

Kehadiran pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang lalu, telah menyodorkan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia, karena secara nyata telah menguji apakah prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), utamanya terkait dengan tata kelola relasi pusat-daerah, memang betul teraktualisasi dan dipatuhi dalam implementasi kebijakan penanggulangan wabah virus corona tersebut, atau hanya imajinasi. Realitas mengindikasikan justru telah banyak terjadi perbedaan sikap, atau bahkan silang kebijakan, antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan mengatasi pandemik COVID-19 (*CNN Indonesia*, 28 Maret 2020; *Kompas.com*, 31 Maret 2020). Hal ini, lagi-lagi, secara banal mengonfirmasi bahwa reformasi relasi pusat-daerah yang telah berlangsung dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir belum memiliki impact yang signifikan.

Pertanyaannya kemudian adalah apa yang keliru dengan implementasi reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, sehingga dalam usianya yang telah melampaui dua dekade belum menunjukkan hasil yang menggembirakan? Mengidentifikasi dan membedah persoalan yang membelit

implementasi kebijakan reformasi desentralisasi di Indonesia, tentunya sangat kompleks, karena melibatkan sejumlah faktor yang saling terkait satu dengan lainnya.

Tulisan ini hanya difokuskan pada mengurai salah satu dari sejumlah persoalan yang ada, yaitu tentang cenderung diabaikannya aspek “ke-Bhinekaan” (pluraritas daerah) yang sejatinya merupakan unsur penting niscaya diakomodasi menurut konsep dasar desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan.

Dalam upaya membedah isu sentral yang diangkat sebagai topik tulisan ini, maka pada pembahasan selanjutnya, diskusi akan dimulai dengan ulasan tentang dinamika relasi pusat-daerah dalam penanganan pandemi COVID-19, dilanjutkan dengan tinjauan literatur tentang prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan, serta keterkaitannya dengan pluralitas daerah. Dengan merujuk pada prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan tersebut, serta memetik pelajaran dari realitas silang sengkabut relasi pusat-daerah dalam penanganan pandemi COVID-19, maka pada bagian akhir tulisan ini akan disajikan rekomendasi terkait aktualisasi konsep dan kebijakan desentralisasi berbasis ke-Bhineka-an.

8.2 Pandemi COVID-19 dan Silang Kebijakan Pusat-Daerah

Pada awal tahun 2020 segenap komponen bangsa mulai resah, selanjutnya tercekam rasa takut, lantaran mulai merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Keresahan tersebut, tentunya sangat manusiawi, karena jika pandemik COVID-19 tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berdampak fatal terhadap kematian manusia, dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri oleh diskursus tentang dua isu tersebut.

Satu di antara langkah penting yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 adalah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial (*Social Distancing*). Kebijakan ini diambil segera setelah adanya pengumuman resmi oleh pemerintah

pada tanggal 3 Maret 2020 tentang kasus dua pasien positif virus corona di Indonesia. Menyikapi hal ini, sejumlah pimpinan di daerah pun telah mengambil langkah-langkah cepat untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di mana terkesan bersilang kebijakan dengan pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat, misalnya menyatakan wilayahnya kini dalam posisi siaga satu virus corona. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan akan membentuk tim tanggap lintas SKPD guna memonitor potensi penularan virus corona. Sedangkan Walikota Depok, di mana wilayahnya merupakan tempat tinggal dari dua pasien positif corona, mengatakan akan dibentuk tim khusus pemantau, pengawasan, dan penanganan virus corona (*Tribunnews.com*: 03/03/2020).

Pada tempat lain, sedikitnya ada lima pemerintah kota telah mengambil langkah lebih maju, yaitu memberlakukan *lockdown* atau karantina wilayah, yang semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lima pemerintah kota tersebut adalah, Tegal, Bali, Papua, Maluku, dan Solo. Pemerintah Kota Tegal, misalnya, mengoperasionalkan kebijakan *lockdown* dalam bentuk menutup akses jalan protokol dalam kota dan jalan penghubung antar kampung dengan beton jenis *moveable concrete barrier* (*CNN Indonesia*: 28/03/2020).

Menyikapi kenyataan ini, presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 Maret 2020 mengeluarkan Keppres No. 9 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Hanya sela tiga hari berikutnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta pemerintah daerah membentuk gugus tugas sebelum membuat kebijakan. Lebih jauh, Munardo menegaskan, bahwa semua kebijakan daerah yang terkait dengan penanganan wabah virus Corona harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (*Kompas.com*: 16/03/2020).

Himbauan yang lebih eksplisit lagi disampaikan oleh presiden Jokowi pada konfrensi pers 31 Maret 2020, di mana dikatakan: “Semuanya jelas, kepala daerah saya minta tak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai Peraturan, berada dalam koridor Undang-Undang dan PP, serta Keppres” (*Kompas*:

31/03/2020). Lebih jauh dari itu, pada kesempatan konferensi pers ini, presiden Jokowi juga secara resmi menjelaskan kepada publik bahwa penyebaran COVID-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian Indonesia. Kondisi ini, tegas presiden Jokowi, sudah dikategorikan sebagai situasi genting, dan oleh karenanya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, lanjut presiden Jokowi, Perppu akan segera ditandatangani dan disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan menjadi undang-undang. Sehingga dengan demikian payung hukum, khususnya terkait dengan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 telah tersedia, dan langkah-langkah penting pun segera dilaksanakan (*Kompas*: 31/03/2020).

Poin penting lainnya yang menarik untuk dicatat dari konferensi pers Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut adalah terkait dengan keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai opsi dalam menangani wabah COVID-19. Menurut Presiden Jokowi, dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sehubungan dengan hal ini, maka pemerintah pun akan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan (*Kompas*: 31/03/2020).

Sesuai dengan janji yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, maka pada tanggal 31 Maret 2020, sedikitnya ada dua regulasi penting telah ditandatangani dan dinyatakan efektif berlaku terhitung mulai tanggal tersebut. *Pertama*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. *Kedua*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Selanjutnya, pada tanggal 3 April 2020, Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pengaturan Teknis Pelaksanaan Kebijakan PSBB.

Secara konseptual, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan PSBB sangat bergantung pada pertimbangan tiap-tiap kepala daerah. Namun demikian, pada tingkat realitas, Pemerintah Daerah menghadapi banyak kendala dalam pengambilan keputusan. Hal ini, utamanya karena keputusan tentang penerapan PSBB ternyata tidak semata didasari pertimbangan epidemiologi, tetapi juga pertimbangan kemampuan keuangan daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pelaksanaan jaring pengaman sosial. Ketentuan ini sangat eksplisit dituangkan pada Pasal 4, Permenkes No. 9 Tahun 2020, yang antara lain, menyebutkan bahwa selain pertimbangan epidemiologi, kepala daerah yang mengusulkan PSBB harus juga menyampaikan pertimbangan tingkat kesiapan daerahnya dalam hal ketersediaan kebutuhan dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan keamanan. Sementara itu, pertimbangan epidemiologi yang dimaksud dalam Permenkes tersebut meliputi data tentang (a) peningkatan jumlah kasus menurut waktu, (b) penyebaran kasus menurut waktu, dan (c) kejadian transmisi lokal.

Diskrepansi antara harapan dan kenyataan kemudian terjadi pada tingkat praksis, yaitu ketika implementasi kebijakan PSBB. Pada konteks inilah, indikasi akan adanya “silang kebijakan” antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan nuansa yang cukup kentara. Liputan media massa nasional, baik media cetak maupun elektronik, pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan Juli 2020, cukup banyak menggambarkan silang-sengkarut kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan PSBB. Di antara kompleksitas permasalahan yang terjadi, satu di antara kasus yang cukup menarik untuk dikulik adalah tentang adanya silang kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengaturan moda transportasi umum.

Dalam upaya pengendalian arus mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1441 H (24 Mei 2020), maka Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020, tentang

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah. Pada Pasal 1, antara lain, disebutkan: Pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi, mencakup: transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut dan udara. Larangan sementara tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka pemerintah daerah pun mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan/larangan keluar-masuk sarana transportasi pada wilayah administrasi masing-masing.

Namun demikian, pada tahap implementasi, terkesan telah terjadi inkonsistensi, utamanya dari pihak Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya telah melahirkan citra silang kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah (*OkeNews*: 09/05/2020), mensinyalir bahwa terjadinya pelonggoran penggunaan sarana transportasi umum pada mudik Idul Fitri tersebut disebabkan adanya tekanan politik [dari pihak pengusaha transportasi], yang selanjutnya telah memposisikan Kementerian Perhubungan berada pada pilihan sulit, dan terkesan inkonsisten atas kebijakan yang telah ia keluarkan sendiri. Kondisi ini, sulit dipungkiri, akan berdampak cukup signifikan terhadap kegagalan upaya memutus rantai penyebaran COVID-19.

Adanya inkonsistensi dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tersebut, juga telah menuai reaksi keras dari sejumlah Kepala Daerah. Misalnya saja, Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah, mengatakan, beberapa kebijakan yang diambil pemerintah pusat telah mengacaukan skenario pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Padahal, daerah tengah berusaha memutus rantai penularan virus corona. Penerbangan telah ditutup [oleh Pemerintah Daerah], kemudian dibuka kembali [oleh Pemerintah Pusat]. Selain dari itu, inkonsistensi juga terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun warga negara Indonesia dari luar negeri. Sesuai aturan, seharusnya mereka dikarantina di suatu tempat

terlebih dahulu, tegas Nurdin, bukan disuruh pulang ke daerah masing-masing yang justru berpotensi menularkan COVID-19 ke warga lainnya (*Republika.co.id*: 20 Mei 2020).

Polemik tentang silang kebijakn antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi PSBB di kawaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), juga tidak kalah menariknya untuk disimak. Salah satu topik yang berkali-kali mencuat dalam pemberitaan di media adalah usul penghentian operasional KRL di wilayah Jabodetabek. Tercatat tiga kali hal tersebut diangkat oleh kepala daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam pemberitaan di media: pertama, pada pertengahan April 2020 ketika fase awal penerapan PSBB di Jabodetabek; kedua, pada akhir April 2020 ketika pelaksanaan PSBB dinilai tidak efektif dengan masih tingginya temuan kasus positif; dan ketiga, pada awal Mei 2020 ketika tiga orang penumpang KRL ditemukan positif terinfeksi COVID-19 (Kurniawan, 2020).

Pada umumnya, penumpang KRL yang beroperasi di kawasan Jabodetabek adalah para pekerja (karyawan) pada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak termasuk dalam daftar sektor yang dikecualikan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020. Perusahaan tersebut terus beroperasi karena mengantongi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) beralasan bahwa izin operasional tersebut perlu diberikan untuk mencegah kerugian usaha yang besar (Kurniawan, 2020).

Pada kasus KRL tersebut, terlihat cukup jelas bahwa telah terjadi silang kebijakan, utamanya antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Kementerian Perindustrian. Pada 22 April 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta Kemenperin untuk meninjau ulang IOMKI yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang bukan merupakan bagian dari sektor yang dikecualikan. Pemda DKI dan Kemenperin pun dikabarkan berembuk. Namun, di tengah pembahasan bersama, Kemenperin masih terus menambah

IOMKI. Hingga 29 April 2020 ketika polemik KRL memuncak, Kemenprin telah mengeluarkan IOMKI kepada lebih kurang 14.533 perusahaan (Kurniawan, 2020).

Kasus lain yang tidak kalah menariknya untuk dicatat adalah perihal silang sengkabut relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bantuan sosial (bansos) pandemi COVID-19. Anggaran negara yang dialokasikan untuk bansos tunai dan sembako masyarakat terdampak COVID-19 mencapai Rp 64,67 triliun (*Kompas*, 12/06/2020). Namun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan pembagian, belum sepenuhnya valid. Selain dari itu, distribusi bansos pun terindikasi tidak merata bahkan salah sasaran. Implikasinya, kendati bansos COVID-19 telah didistribusikan sejak bulan April 2020, namun banyak menyisakan permasalahan, terutama terkait dengan validitas data dan teknis pendistribusiannya.

Belum adanya keterpaduan basis data penerima bansos COVID-19, misalnya, secara jujur diakui oleh Ketua Tim Tanggap COVID-19 DKI Jakarta. Pada tahap pertama pihaknya menyalurkan bansos kepada 1.194.633 keluarga, tetapi ditemukan kesalahan penyaluran bantuan sebesar 1,6 persen. Salah sasaran bansos kepada orang kaya tak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Misalnya saja, di Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, ditemukan setidaknya lima keluarga mampu yang menjadi penerima bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial sebesar Rp 600.000 per bulan (*Kompas*, 12/06/2020).

Terkait dengan adanya silang sengkabut relasi pusat-daerah dalam teknis penyaluran bansos COVID-19, adalah menarik untuk menyimak pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berikut: *Sejauh ini warga mengira bansos disalurkan lewat satu pintu. Padahal, ada banyak pintu, baik itu bansos dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pemerintah Provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/Kota. bansos dari pemerintah pusat, contohnya, baru datang belakangan setelah bansos dari Pemerintah Daerah. Akibatnya, kelompok penerima bansos yang bantuannya belum turun itu pun protes. Saya sudah menyampaikan sesuai hierarki (birokrasi), tolong ini (bansos) dijadikan satu pintu, tapi sampai hari ini belum terjadi* (*Kompas*, 12/06/2020).

Selain berhadapan dengan dua persoalan mendasar di atas—rendahnya validitas data dan lemahnya koordinasi dalam penyaluran bantuan—persoalan ketiga yang juga telah berkontribusi terhadap terjadinya silang sengkaret relasi pusat-daerah dalam implementasi kebijakan bansos COVID-19 adalah, adanya diskrepansi, atau bahkan konflik, antar regulasi. Ketentuan pada Pasal 3, Perppu No. 1 Tahun 2020, sangat tegas menyebutkan, bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, disebutkan, ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan merujuk pada ketentuan ini, maka pada Pasal 4, Permenkes No. 9 Tahun 2020, menegaskan bahwa selain pertimbangan epidemiologi, Kepala Daerah yang mengusulkan PSBB harus juga menyampaikan pertimbangan tingkat kesiapan daerahnya dalam hal ketersediaan kebutuhan dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan keamanan. Ini artinya, secara implisit mengisyaratkan bahwa antara usulan status PSBB oleh pemerintah daerah dengan *refocusing* alokasi anggaran belanja daerah (termasuk di dalamnya untuk bansos) harus paralel atau satu paket.

Namun demikian, realitas yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan yang anomali, lantaran hampir sebahagian besar pemerintah daerah mengajukan status PSBB, tetapi tidak disertai oleh *refocusing* alokasi anggaran belanja daerah (*Kompas*, 22/08/2020). Kondisi ini selanjutnya telah melahirkan kesan terjadi silang kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Di antara justifikasi yang dikemukakan oleh pemerintah daerah terkait dengan belum dilakukannya *refocusing* anggaran tersebut, karena belum adanya petunjuk pelaksana, dan/atau aturan teknis dari Kementerian Keuangan sebagai operasionalisasi dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Alasan yang dikemukakan oleh pihak pemerintah daerah ini, tentunya sangat logis, sebagai antisipasi menghindari jerat pelanggaran hukum, khususnya terkait dengan klausul penyalahgunaan anggaran negara.

Fakta tentang belum adanya keselarasan antara regulasi pada tataran makro (UU, Perppu, PP, dan Perpres) dengan regulasi turunannya pada level meso (Kepmen/Permen) dan mikro (Perda, Pergub, Perwakot, dll) tersebut, disadari betul oleh Presiden Jokowi. Pada rapat terbatas di Istana Merdeka, 3 Agustus 2020, Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya atas realisasi anggaran yang masih sangat minim. Presiden menyebut jajarannya masih terjebak cara kerja rutin dan tak tahu prioritas yang harus dikerjakan, dan regulasi juga membelit (*Kompas*, 22/08/2020). Pernyataan presiden Jokowi ini secara implisit mengisyaratkan bahwa semangat Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai upaya untuk menjawab kondisi darurat (*extraordinary*) akibat pandemi COVID-19, belum dioperasionalkan secara optimal oleh jajaran Kementerian karena mereka masih terjebak dalam cara kerja rutin (*ordinary*). Sehubungan dengan hal ini, salah seorang anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, menilai bahwa penyebab utama dari lambatnya penyerapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 adalah karena Kementerian Keuangan terlalu kaku dengan persyaratan terkait dokumen dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Akibatnya [*refocusing* anggaran] sulit terlaksana, karena dalam situasi tidak normal, diberlakukan aturan kegiatan normal, tegas Misbakhun (*Kompas*, 22/08/2020).

Persoalan seputar pengelolaan bansos COVID-19 kemudian semakin kompleks dan rumit tatkala beberapa kalangan mensinyalir adanya indikasi politisasi bansos untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Sebenarnya, kecenderungan ini tidak mengejutkan, karena Hidayat (*Media Indonesia*, 21/04/2020) telah mengingatkan akan bahaya politisasi program bantuan sosial COVID-19 untuk mobilisasi dukungan jelang kontestasi Pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada sudah bukan merupakan rahasia umum. Lebih jauh dari itu, bila disimak sejumlah kasus korupsi kepala daerah, utamanya yang ditangani oleh KPK, juga mengindikasikan adanya keterkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara, khususnya dana bantuan sosial, untuk kepentingan Pilkada. Oleh karena itu, bila tidak dikelola secara ketat dan tepat, maka kecenderungan yang sama pun akan berlaku dalam pelaksanaan program bantuan sosial COVID-19.

Penyalahgunaan bansos COVID-19 untuk kepentingan Pilkada 2020 mulai mencuat ke permukaan dipicu oleh kasus penempelan stiker Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani, di kemasan *hand sanitizer* bantuan Kementerian Sosial (JPNN, 08/05/2020). Politikus PDIP itu digadang-gadang akan kembali maju dalam Pilkada 2020. Kemudian liputan Media Indonesia (11/05/2020), memampikan tiga kasus politisasi bansos COVID-19 lainnya oleh kepala daerah (calon *incumbents*) untuk kepentingan Pilkada 2020. *Pertama*, kasus, Bupati Brebes Idza Priyanti, yang memasang foto dirinya pada bantuan beras. Wajah Bupati Idza juga muncul di baliho-baliho yang terkait dengan COVID-19 di Brebes. *Kedua*, kasus Bupati Jember, Faida, yang juga menempel foto dirinya dan Wabup A Muqit Arief pada sedikitnya 3.900 karung beras bansos COVID-19. Bupati Jember Faida diketahui akan kembali maju dalam Pilkada 2020. *Ketiga*, kasus Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, memasang foto wajahnya terpampang pada kemasan karung Sembako bantuan sosial COVID-19 untuk warga.

Bola salju kemudian terus bergulir, hingga pada bulan Juli 2020, salah seorang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengungkapkan temuan penyelewengan bansos COVID-19 untuk kampanye Pilkada Serentak 2020 di 3 provinsi dan 20 kabupaten/kota. Afif menjelaskan, sedikitnya ada empat modus politisasi bansos COVID-19 untuk kepentingan Pilkada 2020, yaitu: pencantuman foto kepala daerah, pencantuman simbol partai politik, pemberian bansos dari APBD atas nama kepala daerah, dan korupsi dana penanganan corona (*CNN-Indonesia*, 20/07/2020).

Memaknai dinamika relasi pusat-daerah dalam implementasi kebijakan penanganan COVID-19 sebagaimana dikemukakan di atas, saya sendiri lebih mengartikulasinya sebagai realitas *kegamangan relasi pusat-daerah*, daripada menyebutnya sebagai silang kebijakan pusat-daerah. Dikatakan demikian karena, kehadiran pandemik COVID-19 secara nyata telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI, utamanya terkait dengan relasi pusat-daerah, memang betul teraktualisasi dan dipatuhi dalam implementasi kebijakan penanggulangan wabah virus corona. Namun demikian, dalam menghadapi ujian tersebut, terkesan sangat kuat, baik pemerintah pusat maupun daerah berada dalam kegamangan.

Kebijakan penerapan PSBB yang bersengkabut tersebut terjadi karena adanya kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang bertumpang-tindih dan tarik-menarik kepentingan di antara keduanya. Walaupun PP No. 21 Tahun 2020 memberi peran besar kepada Pemerintah Daerah, beberapa sektor tidak bisa mereka kendalikan karena bersinggungan dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat (Kurniawan, 2020).

Apa poin penting yang menarik untuk digarisbawahi dari ulasan tentang dinamika relasi pusat-daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 di atas? Sejatinya, perbedaan sikap, yang selanjutnya telah memunculkan kesan tarik-tegang antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 tersebut tidak perlu harus terjadi, jika prinsip-prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan, yang merupakan bagian penting dari komitmen “NKRI Harga Mati”, teraktualisasikan dalam kenyataan. Dikatakan demikian karena dalam negara kesatuan, prinsip relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah berbagi kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah pun bukanlah otonomi penuh seperti pada negara federal. Namun demikian, untuk tetap menegakkan “marwah demokrasi”, maka model desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan dalam negara kesatuan tidak bersifat seragam (simetris), karena harus tetap mengakomodasi pluralitas lokal (ke-bhinekaan).

Bila dikaitkan dengan program penanganan pandemi COVID-19, secara umum dapat dikatakan, prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan tersebut mengisyaratkan bahwa idealnya implementasi kebijakan dalam penanganan COVID-19 harus tidak bersifat “*one policy fits for all regions*”. Dengan kata lain, implementasi kebijakan seharusnya disesuaikan dengan pluralitas karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dimiliki daerah, serta kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

8.3 Desentralisasi dalam Negara Kesatuan dan Pluralitas Daerah

Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep dasar desentralisasi yang selama ini diterapkan di Indonesia sangat didominasi oleh perspektif desentralisasi administrasi (*Administrative Decentralisation Perspective*) (Hidayat, 2010a). Perspektif ini, tulis Diana Conyer (1984) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang (bukan kekuasaan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, *the transfer of authority from central to local government*. Sedangkan tujuan utama dari kebijaksanaan desentralisasi itu sendiri lebih dititikberatkan pada upaya menciptakan *efisiensi dan efektivitas* penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Cheema and Rondenelli, 1983). Dengan konsep dasar seperti dikemukakan di atas, kiranya dapat dimengerti bila aplikasi kebijaksanaan desentralisasi di Indonesia selama ini cenderung terpisah dari agenda demokratisasi, karena tekanan utamanya lebih pada upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Di atas pondasi desentralisasi administrasi tersebut, rezim yang berkuasa telah membangun konstruksi konsep dan kebijakan relasi Pusat-Daerah yang sangat kental bernuansa sentralisasi (Hidayat, 2007; 2010a). Dalam rangka melegitimasi praktik yang dilakukan, maka para pengambil kebijakan telah memanipulasi konsep Negara Kesatuan dan prinsip *ke-Tunggal Ika-an* sebagai alat pembenaran. Akibatnya, tidak sulit dipahami bila kemudian, dominasi pemerintah pusat atas daerah cenderung diartikulasi sebagai “kemutlakan” bagi sebuah negara kesatuan, dan sebagai wujud dari komitmen terhadap semboyan *Tuggal Ika*. Sementara, pada sisi lain, pluralisme yang ada harus “dikendalikan” demi menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implikasinya, konsep maupun implementasi kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia cenderung tidak memberi tempat bagi tumbuh dan berkembangnya semangat *ke-Bhinekaan* (pluralitas daerah), karena lebih mengutamakan semangat *ke-Tuggal Ikaan* melalui sentralisasi kekuasaan dan penyeragaman di sana sini (Hikam dan Hidayat, 2000). Ironisnya, semua itu sekan-akan telah dilihat

sebagai suatu keniscayaan dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan demi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Maraknya tuntutan daerah mendapatkan otonomi luas pada awal tahun 2000-an, yang kemudian telah dinilai oleh pemerintah pusat sebagai bentuk dari “otonomi kebablasan”, harus dipahami sebagai salah satu indikasi dari resistensi daerah terhadap dominasi pusat selama ini. Bila tuntutan daerah tersebut dicermati dalam konteks demokratisasi kehidupan bangsa, maka akan diketahui bahwa akar permasalahan yang sesungguhnya bukan terletak pada masalah “hitung-hitungan” persentase bagi hasil pendapatan antara pusat dan daerah, atau “tawar-menawar” jumlah dan ruanglingkup wewenang yang harus diserahkan kepada daerah. Akar permasalahan yang sesungguhnya adalah terletak pada tuntutan daerah untuk mendapatkan “keadilan” politik dan ekonomi yang selama ini dilupakan oleh Pemerintah Pusat (Hidayat, 2010b).

Secara teoritis, seyogianya antara semangat *Bhineka* dan *Tunggal Ika* harus dapat saling memberi makna satu dengan yang lain (bukan sebaliknya) dalam implementasi kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Demikian juga halnya dengan bentuk negara NKRI, tidak harus selalu “disama dan sebangunan” dengan semangat ke-*Tunggal Ika*-an, untuk kemudian dijadikan sebagai alat legitimasi bagi pengekaln sentralisasi kekuasaan dan “pembunuhan” semangat ke-*Bhineka*-an. Secara konseptual, tidak ada suatu justifikasi yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa bentuk negara kesatuan harus mematkan ke-*Bhineka*-an. Tetapi, seperti ditegaskan oleh Hikam dan Hidayat (2000: 51-52), itulah realitas yang ada, bahwa negara RI yang sifatnya sangat heterogen, baik dari segi geografis, demografis, religi, etnisitas, bahasa, maupun ras, ternyata tidak ditopang oleh kemampuan manajemen politik yang peka terhadap pluralisme. Bahkan, sejak rezim Demokrasi Terpimpin yang kemudian dilanjutkan oleh Orde Baru, kecenderungan sentralisasi kekuasaan semakin mendapatkan justifikasinya. Kalau pun kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah tetap hadir, namun keberadaannya lebih didudukkan sebagai kewajiban daripada sebagai hak daerah.

Untuk mendapatkan pemahaman lebih elaboratif perihal relasi antara bentuk negara (Kesatuan), Desentralisasi, dan Pluralitas daerah, berikut disajikan ulasan singkat tentang hal tersebut. Secara konseptual, sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat (2010b), di antara perbedaan mendasar antara praktik desentralisasi pada negara federal dan negara kesatuan, terletak pada prinsip pengaturan relasi kewenangan pusat-daerah. Pada negara federal, pengaturan relasi kewenangan pusat-daerah didasarkan pada prinsip *separation of power* (pemisahan kekuasaan). Sedangkan pada negara kesatuan, bertumpu pada prinsip *sharing of power* (berbagi kekuasaan).

BENTUK NEGARA	PRINSIP DESENTRALISASI	MODEL OTONOMI DAERAH	KARAKTERISTIK ASIMETRIS
Negara Federal	Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power)	Otonomi Penuh	Model/ Sistem Pemerintahan Daerah/ State
Negara Kesatuan	Berbagi Kekuasaan/ Kewenangan (Sharing of Power)	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi Luas • Otonomi Terbatas • Otonomi Khusus 	Ruang Lingkup Kewenangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Gambar 12. Perbedaan Prinsip Desentralisasi pada Negara Federal dan Kesatuan

Sumber: Hidayat (2010b)

Separation of power yang dimaksud di sini adalah, pemerintah pusat (federal) hanya memiliki sejumlah kewenangan pokok. Sementara seluruh kewenangan sektoral di luar kewenangan pokok pemerintah pusat tersebut dimiliki oleh negara bagian (pemerintah daerah). Dengan prinsip relasi kekuasaan pusat-daerah seperti ini, maka model otonomi daerah pada negara federal, umumnya lebih dalam bentuk otonomi penuh, yakni, daerah memiliki hak penuh, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan atas seluruh bidang di luar kewenangan pokok yang telah didefinisikan menjadi milik pemerintah pusat (Hidayat, 2010b)

Sedangkan prinsip *sharing of power* yang diterapkan pada negara kesatuan, lebih dalam arti, pemerintah pusat, selain memiliki kewenangan pokok, juga memiliki kewenangan-kewenangan sektoral yang dikelola secara bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, sejatinya, kewenangan yang dimiliki oleh daerah tidak lain adalah kewenangan sektoral pemerintah pusat yang dibagi kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi (Hidayat, 2010b)

Relasi kewenangan pusat-daerah dengan prinsip *sharing of power* tersebut, tentunya, tidak dapat menerapkan model otonomi penuh sebagaimana pada negara federal. Ini karena, model otonomi yang dimiliki oleh daerah, sangat tergantung pada lingkup kewenangan sektoral yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat. Bila kewenangan yang diserahkan kepada unit-unit pemerintahan daerah sangat luas—yakni sebahagian besar dari kewenangan-kewenangan sektoral di luar kewenangan pokok yang dimiliki oleh pemerintah pusat—maka otonomi yang dimiliki daerah adalah otonomi luas. Sebaliknya, jika kewenangan yang diserahkan kepada unit-unit pemerintahan daerah hanya sebahagian kecil saja dari kewenangan-kewenangan di luar kewenangan pokok dan sektoral pemerintah pusat, maka model otonomi yang dimiliki oleh daerah adalah otonomi terbatas. Sementara, bila daerah hanya diberi kewenangan luas dalam mengelola kewenangan sektoral tertentu, dan/atau dalam mengelola bagian dari kewenangan pokok pemerintah pusat yang sangat khusus sifatnya, maka model otonomi daerah yang dimiliki adalah otonomi khusus.

Dengan merujuk pada ulasan singkat di atas, cukup jelas tergambar bahwa secara konseptual, prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan adalah *sharing of power* (berbagi kekuasaan) antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, untuk mengakomodasi karakteristik dari masing-masing daerah, yang dapat dipastikan berbeda antara satu dengan lainnya (pluralitas lokal), maka ruang lingkup kewenangan yang didesentralisasikan pun tidak harus seragam. Model desentralisasi seperti ini kemudian dikenal dengan sebutan *Desentralisasi Asimetris*. Ironisnya, praktik desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejauh ini cenderung lebih bersifat *Desentralisasi Simetris* (seragam).

Bila dikaitkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, maka prinsip-prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah pada negara kesatuan tersebut secara eksplisit mengindikasikan bahwa, walaupun Pilkada langsung diselenggarakan, bukanlah sama sekali bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk memiliki otonomi penuh, apalagi melahirkan “raja kecil” di daerah. Esensi dari Pilkada langsung dalam perspektif desentralisasi politik, antara lain, untuk menghasilkan pemimpin berkualitas, yang pada giliran akan menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan kepentingan masyarakat (Smith, 1985; Oyugi, 2000; dan Arghiros, 2001).

Apa yang menarik untuk digaris bawahi dari ulasan di atas? Di antaranya adalah, penegasan bahwa secara konseptual, bentuk negara kesatuan bukanlah sebagai sumber utama bagi pengendalian sentralisasi kekuasaan dan pembunahan pluralisme. Tidak ada yang salah dengan konsep negara kesatuan itu sendiri, karena secara teoritis, ia juga memberi peluang bagi desentralisasi dan pluralisme untuk tumbuh dan saling mengisi satu dengan lain. Persoalannya akan berbeda, bila konsep negara kesatuan tersebut, kemudian, telah dimanipulasi oleh rezim dan pemerintah yang berkuasa untuk dijadikan sebagai alat legitimasi bagi sentralisasi kekuasaan dan pembunahan pluralisme. Inilah, sebenarnya, realitas yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak dari awal kemerdekaan.

Bila memang demikian, barangkali tidak berlebihan jika dikatakan bahwa konsep negara kesatuan bukan merupakan *determinant factor* bagi sentralisasi kekuasaan dan pembunahan pluralisme. Alagappa (1995: 26), misalnya, secara tegas mengatakan: *In the literature on legitimacy, state is usually cited as the referent object of legitimation. But it is too abstract and in practice is seldom the specific object of legitimation of power holder.* Preposisi yang dikemukakan oleh Alagappa (1995) tersebut secara implisit mengisyaratkan bahwa terjadinya sentralisasi kekuasaan dan pembunahan pluralisme lebih dipengaruhi oleh karakteristik dari rezim dan pemerintah yang berkuasa, serta kepentingan-kepentingan politik jangka pendek yang dimiliki, utamanya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan.

8.4 Penutup: Urgensi Aktualisasi Otonomi Daerah Berbasis Ke-Bhineka-an

Praktik desentralisasi dan otonomi daerah simetris (seragam) yang diterapkan di Indonesia selama ini, sulit dipungkiri, lebih dominan menekankan aktualisasi dari komitmen *Ke-Tunggal Ika-an*. Implikasinya, tidak mengherankan jika komitmen *Ke-Bhineka-an*, yang seharusnya mendapat posisi yang setara dalam konsep dan kebijakan desentralisasi (sebagai refleksi dari karakteristik hakiki dari masing-masing daerah), cenderung terabaikan, atau bahkan terekklusi.

Bila demikian, ini berarti, langkah fundamental yang harus diambil oleh Indonesia dalam upaya membenahi relasi kekuasaan antara Pusat dan Daerah di era “Indonesia Baru” ini adalah: melakukan “revitalisasi” konsep desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri, yang tidak saja bertumpu pada semangat *ke-Tunggal Ika-an*, tetapi juga harus mengakomodasi *ke-Bhineka-an*.

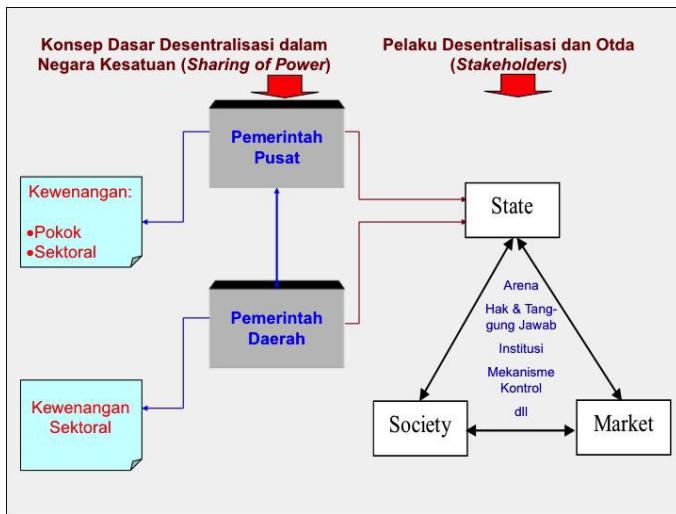
Upaya “reformulasi” konsep desentralisasi dan otonomi daerah tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena dengan konsep dasar seperti itu diharapkan keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah akan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, atau apa yang disebut oleh Vincent Ostrom (1991: 6) sebagai: *the features of a system of governance that would be appropriate to circumstance where people govern rather than presuming that government govern.*

Dengan merujuk pada prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan sebagaimana dikemukakan di atas, serta memetik pelajaran dari realitas silang sengkabut relasi pusat-daerah dalam penanganan pandemi COVID-19, maka dapat diajukan, sedikitnya ada dua rekomendasi untuk aktualisasi konsep dan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke depan.

Pertama, aktualisasi konsep desentralisasi dalam negara kesatuan. Sebagai konsekuensi dari prinsip *sharing of power* antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan, maka praktik desentralisasi seharusnya bersifat asimetris, disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sejalan dengan model desentralisasi asimetris tersebut, maka model otonomi daerah pun bersifat asimetris, yaitu:

Otonomi Luas, Terbatas, dan Otonomi Khusus. Realisasi model desentralisasi dan otonomi daerah asimetris tersebut, secara konstitusional, sesuai dengan amanah UUD 45 (hasil amandemen), utamanya pada Pasal 18 (5), yang menyebutkan: *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.* Selanjutnya, pada Pasal 18B (1) ditegaskan: *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Kedua, rekonstruksi praktik *decentralization within the state* menjadi *decentralization within the state and society*. Secara singkat skema rekonstruksi yang dimaksud, dapat ditunjukkan pada Gambar berikut.



Gambar 13. Skema Model *Decentralization within the State and Society*

Bila dicermati essensi konsep dan kebijakan desentralisasi di tanah air sejauh ini, terlihat dengan jelas bahwa lebih menekankan pada pengaturan relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (*decentralization within the state*) (Hidayat, 2001). Sementara pada tataran praksis (implementasi kebijakan desentralisasi), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di atas, pemangku kepentingan yang terlibat tidak hanya pemerintah pusat dan daerah (*state*), tetapi juga masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat ekonomi

(*economic society/market*). Absennya pengaturan relasi antara pemangku kepentingan yang disebut terakhir dalam implementasi kebijakan desentralisasi, telah berperan sebagai salah satu determinan faktor bagi terjadinya konflik sosial dan ekonomi yang berujung pada tindak kekerasan di sejumlah daerah.

Oleh karena itu, untuk menciptakan sinergi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi desentralisasi, maka harus dilakukan revitalisasi atas prinsip pengaturan relasi kewenangan itu sendiri. Lebih spesifiknya, pengaturan relasi kewenangan tidak hanya dititikberatkan pada konteks pemerintah pusat dan daerah saja (*within the state*), tetapi juga harus mencakup pengaturan relasi kewenangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (*within the society*). Termasuk di dalamnya, pengaturan secara konkret tentang hak dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan.

8.5 Daftar Pustaka

- Alagappa M. 1995. *Political Legitimacy in Southeast Asia*. California: Stanford University Press.
- Arghiros D. 2001. *Democracy, Development and Decentralisation in Provincial Thailand*, Surrey: Surzon
- Kurniawan A. 2020. Ketakpastian Penyelenggaraan PSBB dalam Penanganan COVID-19, Smeru News, 28 Juli 2020 .<http://smeru.or.id/id/content/ketakpastian-penyelenggaraan-psbb-dalam-penangananCOVID-19..>
- Cheema GS, Dennis AR. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications Chhotray, V and Stoker, G. 2009 *Governance Theory and Practice a Cross-Disciplinary Approach*, New York: Palgrave Macmillan
- Conyer D. 1984. *Decentralization and Development: a Review of the Literature. Public Administration and Development. 4.*
- Conyer D. 1986 *Decentralisation and Development: A Framework for Analysis. Community Development Journal. 21(2).*
- Grindle MS. 2011. Good enough governance revisited. *Development Policy Review. 29(1): 199–221.*

- Hidayat S, Antlov H. 2004. Decentralisation and Regional Autonomy in Indonesia, dalam: Oxborn, P., Tulchin, J.S., and Selee, A.D. Decentralisation, Democratic Governance, and Civil Society in Comparative Perspective: Africa, Asia, and Latin America, Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press
- Hidayat S, Klinken GV. 2009. Provincial Business and Politics, dalam: Klinken, G.V. and Joshua Barker, editor. *State Of Authority: The State in Society in Indonesia*, New York: Cornell Southeast Asia Program Publications
- Hidayat, S dan Hoessein, B. 2001. “Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Perbandingan”, dalam Haris, S., editor. *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik. P2P-LIPI.
- Hidayat S. 2001. Perspective on Decentralisation: A Conceptual Terrain and the Experience of Some Developing Countries. *Journal Ekonomi Pembangunan*. 9(1).
- Hidayat S .2006. Quo Vadis Desentralisasi untuk Pembangunan: Dialog Teoritis antara Kelompok Positivis dan Relativis. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi. P2E.-LIPI
- Hidayat S. 2007. *Too Much Too Soon: Local State-Elite's Perspective On And The Puzzle of ontemporary Indonesia's Regional Autonomy*. Jakarta: PT. Rajwali Press
- Hidayat S .2010a. Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Tinjauan Kritis tentang Konsep dan Implementasi Kebijakan. Dalam: Gismar, A., M. dan Hidayat, S., editor. *Reformasi Setengah Matang*. Jakarta: PT. Mizan Publika
- Hidayat S.2010b. Mengurai Peristiwa Meretas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. PRISMA. 29(23).
- Hikam, Muhammad AS, Hidayat S. 2000. Hubungan Pusat dan Daerah: Dari Ketergantungan Menuju Keseimbangan. Indonesia Menapak Abad-21: Kajian Ekonomi Politik, Jakarta: Pt. Mellenium Publisher
- Legge JD. 1963. *Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960*. Itaca, NY: Cornel University Press

- Maryanov GS. 1959. *The Establishment of Regional Government in The Republic of Indonesia*. Indiana University
- Mawhood Ped. .1987. *Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*, Chicheser: John Wiley & Sons.
- Oyugi WO. 2000. Decentralization for Good Governance and Development: Concepts and Issues. *Regional Development Dialogue*. 21(1): 3-22.
- Parson T. .Editor). 1985. *Theories of Sociology*. Glencoe: The Free Press; 1961, dan Smith, B.C. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, London: Asia Publishing House
- Smith BC. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, London: George Allen & Unwin
- Vincent O. 1991. *The Mining of American Federalism: Constituting SelfGoverning Society*. San Francisco: ICS Press.
- Peraturan Perundang-Undangan Keppres No. 9 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, 13 Maret 2020.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Tanggal 31 Maret 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 .COVID-19., Tanggal 31 Maret 2020
- Peraturan Meteri Kesehatan. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pengaturan Teknis Pelaksanaan Kebijakan PSBB, tanggal 3 April 2020,
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah

- CNN Indonesia, 28 Maret 2020, *Lockdown* Daerah, Simbol Carut-marut Penanganan Corona. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown-daerah-simbol-carut-marut-penanganan-corona> .
- CNN-Indonesia, 20 Jui 2020, Bawaslu Ungkap Politisasi Bansos Corona di 23 Daerah. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200720155659-20-526763/bawaslu-ungkap-politisasi-bansos-corona-di-23-daerah>.
- JPNN, 08 Mei 2020, Bansos Pandemi COVID-19 Disusupi Kepentingan Pilkada 2020?. <https://www.jpnn.com/news/bansos-pandemi-COVID-19-disusupi-kepentingan-pilkada-2020>.
- Kompas.com, 16 Maret 2020, Doni Monardo Minta Pemerintah Daerah Bentuk Gugus Tugas Masing-masing. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/18220371/doni-monardo-minta-pemerintah-daerah-bentuk-gugus-tugas-masing-masing>.
- Kompas: 31 Maret 2020, Jokowi: Kita Putuskan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15210701/jokowi-kita-putuskan-penerapan-pembatasan-sosial-berskala-besar>.
- Kompas.com: 31 Maret 2020, Atasi COVID-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan Sendiri. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15314231/atasi-COVID-19-jokowi-minta-kepala-daerah-tak-buat-kebijakan-sendiri>.
- Kompas.com: 2 April 2020, PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin .<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/04580071/pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-dibuat-agar-pemerintah-dan-gugus-tugas>.
- Kompas.com: 27 April 2020, Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/20414811/data-bansos-bermasalah-mensos-minta-pemda-lengkapi> .
- Kompas.com: 27April 2020, Menteri Desa Minta Kepala Daerah Tak Persulit Penyaluran BLT ke Warga. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/20322471/menteri-desa-minta-kepala-daerah-tak-persulit-penyaluran-blt-ke-warga>.

Kompas.com: 27 April 2020, Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data COVID-19. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/21355201/presiden-instruksikan-pusat-dan-daerah-transparan-soal-data-COVID-19>.

Kompas.com, 08 Mei 2020, Mensos Sebut Politisasi Bansos di Daerah Sangat Masif. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/13575611/mensos-sebut-politisasi-bansos-di-daerah-sangat-masif?page=all>.

Kompas Interaktif, 12 Juni 2020, Menelisik Karut-Marut Bansos COVID-19. <https://interaktif.kompas.id/baca/menelisik-karut-marut-bansos-COVID-19/>.

Kompas.cetak., 22 Agustus 2020: 3

Media Indonesia, 21 April 2020

Media Indonesia, 11 Mei 2020

OkeNews, 9 Mei 2020, Silang Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Corona yang Bikin Bingung. <https://nasional.okezone.com/read/2020/05/09/337/2211643/silang-kebijakan-pusat-dan-daerah-dalam-penanganan-corona-yang-bikin-bingung>.

Republika.co.id, 20 Mei 2020, Gubernur: Sejumlah Kebijakan Pusat Kacaukan Skenario Daerah. <https://republika.co.id/berita/qa8pc377/gubernur-sejumlah-kebijakan-pusat-kacaukan-skenario-daerah>.

Tribunnews.com, 3 Maret 2020, UPDATE Corona Selasa 3 Maret 2020: 75 Negara Terjangkit Termasuk Indonesia, 3.000 Orang Meninggal. <https://www.tribunnews.com/internasional/2020/03/03/update-corona-selasa-3-maret-2020-75-negara-terjangkit-termasuk-indonesia-3000-orang-meninggal>



9. EKONOMI POLITIK PERTANIAN– MITIGASI DAMPAK JANGKA PANJANG PANDEMI COVID-19

Harianto

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)–
IPB University
CTSS Fellow

Abstrak

Pandemi COVID-19 menyebabkan permasalahan di bidang kesehatan dan perekonomian. Karakteristik virus SARS CoV-2 yang menyebar melalui intensitas interaksi manusia berakibat negatif terhadap ekonomi pasar. Makalah ringkas ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh petani dan usahatani di Indonesia, terutama pertanian pangan, dan merumuskan strategi pembangunan pertanian dalam upaya mitigasi pengaruh negatif pandemi COVID-19 dalam jangka panjang. Pendekatan yang digunakan sepenuhnya deskriptif deduktif, dan didasarkan atas data dan informasi yang bersifat sekunder dari berbagai hasil penelitian dan berita media massa. Pada masa pandemi COVID-19 berlangsung, permasalahan yang dihadapi oleh pertanian pangan di Indonesia relatif sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh pertanian di negara lain, seperti di India, China, dan Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 menyebabkan merosotnya permintaan pangan dan terganggunya rantai pasok produk pertanian. Pada tingkat usaha tani, permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia relatif sama dengan permasalahan yang ada sebelum adanya pandemi. Kebijakan publik yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian pangan akan tetap diperlukan, tidak saja untuk memperkuat ketahanan pangan tetapi juga untuk menurunkan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai persyaratan perdagangan antarnegara yang diperkirakan akan semakin ketat.

9.1 Pendahuluan

Pada awal masuknya virus SARS-CoV-2 di Indonesia, fenomena penularannya terkonsentrasi di wilayah kota-kota besar, terutama di tempat di mana penduduk kelas menengah berinteraksi. Penduduk kelas menengah bawah di perkampungan kota seolah-olah terhindar dari virus. Dengan berjalannya waktu, tingginya intensitas interaksi manusia di kota-kota besar, meskipun telah ada kebijakan pembatasan aktivitas, virus penyebab COVID-19 ini menyebar ke segenap pelosok kota dan memunculkan kluster-kluster pandemi di kampung di tingkat keluarga, RT dan RW. Wilayah pedesaan yang relatif aman dari COVID-19, dapat saja mengalami kondisi yang sama dengan perkotaan, apabila pandemi tidak berhenti dan kemudian menyebar memasuki wilayah pedesaan.

Dampak sosial ekonomi COVID-19 di pedesaan tentunya ditentukan oleh kondisi infrastruktur kesehatan dan kesiapan masing-masing daerah dalam menghadapi pandemi (Huang *et al.*, 2021). Seberapa besar daerah pedesaan dan pertanian di Indonesia akan menderita dampak negatif Covid belum dapat dipastikan, karena sampai saat ini masih belum jelas kapan pandemi dianggap akan selesai. Namun sebagai mana daerah perkotaan, COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian di pedesaan. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif signifikan terhadap kesempatan kerja, kesejahteraan, kesehatan mental, dan harapan ekonomi mendatang penduduk pedesaan (Mueller *et al.* 2021).

Data tentang mereka yang terkena SARS-Cov-2 yang berasal dari daerah pedesaan di Indonesiarelatif jauh lebih sedikit. Penyebab mengapa masyarakat pedesaan relatif rendah terpapar virus penyebab COVID-19 ini terutama disebabkan oleh karakteristik virus SARS-CoV-2 dan karakteristik masyarakat di pedesaan. Virus SARS-CoV-2 mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui kedekatan kontak atau interaksi fisik antar individu. Pada awal pandemi COVID-19 diperkirakan bahwa virus SARS-CoV-2 ini menular melalui *droplet* dari mereka yang telah terpapar pada saat batuk, berbicara, ataupun bersin. Orang dapat tertular pada saat bernafas, atau masuk melalui mata, atau menyentuh permukaan benda yang terpapar virus dan tangan yang telah terpapar menyentuh wajah. Namun dalam perkembangannya,

berbagai penelitian memperkirakan bahwa penyebaran SARS-CoV-2 dapat terjadi juga dalam bentuk aerosol atau melalui udara yang tercemar virus (Asadi *et al.* 2020). Pada sisi yang lain masyarakat perkotaan memiliki aktivitas yang cenderung berkelompok atau hidup dalam jarak yang relatif berdekatan satu dengan lainnya, baik pada saat di kantor, di pusat perbelanjaan, di stasiun, di dalam angkutan umum, di terminal ataupun halte, di *café* dan rumah makan, maupun di pasar. Posisi dalam kerumunan dan dalam jarak yang berdekatan satu orang dengan lainnya, menyebabkan peluang untuk terpapar virus SARS-CoV-2 menjadi tinggi di masyarakat perkotaan dibandingkan dengan mereka yang berada di pedesaan.

Kebijakan pembatasan aktivitas untuk meredam COVID-19 berakibat pada merosotnya perekonomian, dan terutama sektor-sektor perekonomian di perkotaan. Banyak usaha mulai tutup ataupun bangkrut. Banyak tenaga kerja yang diberhentikan dan menganggur. Tenaga kerja yang berasal dari pedesaan semakin banyak yang mudik, dan terjadilah deurbanisasi. Pergerakan manusia kembali ke desa dan aktivitas mudik di hari-hari libur nasional menjadikan risiko penyebaran SARS-CoV-2 ke kota-kota kecil dan wilayah pedesaan meningkat. Jika selama ini ekonomi wilayah pedesaan merosot akibat imbas dari merosotnya ekonomi perkotaan, maka kemungkinan dapat terjadi perekonomian di pedesaan merosot karena terganggunya secara langsung proses produksi pertanian akibat COVID-19.

Berbagai sektor perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif selama pandemi berada pada tingkatan yang tinggi. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar secara signifikan telah menghentikan laju pertumbuhan sektor pariwisata dan sektor transportasi, dan juga menurunkan tingkat konsumsi masyarakat untuk kebutuhan yang bukan pokok. Namun di saat banyak sektor perekonomian tumbuh negatif, sektor pertanian tidak turut jatuh ke dalam resesi. Harga-harga pangan relatif stabil, dan kondisi ini dapat membantu meredam gejolak sosial ekonomi yang muncul. Pandemi menyebabkan semakin banyak pemutusan hubungan kerja, dan secara nyata menurunkan daya beli masyarakat. Harga pangan yang stabil relatif berhasil meringankan beban akibat turunnya kesejahteraan rakyat.

Perbedaan intensitas paparan pandemi COVID-19 di perkotaan dengan di pedesaan berakibat pada perbedaan perhatian kebijakan publik untuk mengatasi pandemi beserta dampak negatif ikutannya. Berbagai kebijakan kesehatan dan kebijakan non-kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 lebih dirancang untuk daerah perkotaan daripada untuk daerah pedesaan. Demikian juga, perhatian terbesar dari kebijakan publik diberikan untuk sektor ekonomi non-pertanian (yaitu, industri, manufaktur, pariwisata, transportasi orang). Perbedaan perlakuan ini tentunya hal yang wajar mengingat sektor perkotaan dan sektor non-pertanian menderita dampak negatif yang lebih nyata. Namun dalam jangka panjang, saat pandemi nantinya dinyatakan berlalu, membangkitkan perekonomian agar dapat pulih sebagaimana sebelum pandemi akan relatif berat apabila sektor terbesar dalam aspek sumberdaya manusia dan sumberdaya alam tidak memperoleh perhatian yang memadai. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam menopang angkatan kerja dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat menjadi basis yang kuat bagi pertumbuhan sektor non-pertanian yang berkelanjutan pasca pandemi COVID-19.

Tulisan ini akan dimulai dengan identifikasi karakteristik dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap ekonomi pertanian. Bagian berikutnya adalah memperkirakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap usahatani. Setiap uraian permasalahan akan diakhiri dengan perspektif strategi mitigasi dampak negatif COVID-19 yang berjangka panjang. Perhatian terbesar dalam tulisan diberikan terhadap pertanian tanaman pangan atas pertimbangan jumlah rumah tangga yang terlibat di dalamnya, serta posisi penting pangan dalam perekonomian Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah melalui pola pemikiran sistem agribisnis, yaitu melihat permasalahan pertanian dari hulu sampai hilir. Data yang digunakan sepenuhnya mengandalkan pada data sekunder dan informasi dari kajian-kajian yang telah dilakukan di berbagai negara, serta informasi dari media massa di dalam negeri. Informasi dari media massa yang bersifat kasus-kasus dapat digunakan sebagai indikasi dan belum tentu menggambarkan kondisi Indonesia secara umum. Namun dengan melihat sebaran dampak

pandemi COVID-19 yang luas dan bersifat dinamis, maka kasus-kasus yang diwartakan oleh media massa dapat menjadi data terbaik dalam memahami perubahan-perubahan yang terjadi.

9.2 Pembahasan

Selama pandemi COVID-19 pemerintah di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, senantiasa menganjurkan warganya untuk beraktivitas dengan memperhatikan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Virus SARS CoV-2 dapat menular kepada seseorang melalui berbagai cara, terutama melalui pernafasan dan melalui kontak pada barang yang tercemar virus (Liu *et al.* 2020; Chan *et al.* 2020; Huang *et al.* 2020). Anjuran mencuci tangan didasarkan atas berbagai temuan yang menunjukkan bahwa virus SARS CoV-2 dapat menular lewat benda-benda yang tersentuh tangan oleh penderita COVID-19. Pemerintah juga menganjurkan dan bahkan mewajibkan setiap orang untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumahnya. Berbagai penelitian menunjukkan virus SARS CoV-2 menular dengan cepat melalui udara, baik berupa droplet ataupun aerosol. Seseorang dapat tertular saat berbicara dan bertatap muka dengan penderita COVID-19. Penularan terjadi melalui saluran pernafasan dan mata, sehingga penggunaan masker diharapkan dapat memperkecil peluang seseorang tertular virus SARS CoV-2. Anjuran penggunaan masker ini pada dasarnya satu paket dengan anjuran untuk menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Jarak yang dekat meningkatkan peluang seseorang untuk tertular oleh penderita COVID-19. Demikian juga keberadaan seseorang dalam kerumunan juga akan memperbesar peluangnya tertular virus SARS CoV-2.

Karakteristik virus SARS CoV-19 dan cara penularannya telah menjadikan gangguan besar terhadap interaksi antar manusia, sehingga tidak mengherankan dampaknya langsung terasa terhadap perekonomian. Perekonomian mencerminkan kinerja pasar. Sedangkan pasar sendiri dapat didefinisikan sebagai media di mana penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) bertemu untuk melakukan pertukaran. Selama pertemuan tersebut bersifat kontak fisik, maka peluang seseorang untuk terpapar virus SARS CoV-2 tentunya akan lebih besar daripada kontak secara virtual.

Pandemi COVID-19 membawa permasalahan yang relatif sama terhadap pertanian di berbagai negara. Permasalahan tersebut disebabkan oleh karakteristik penyebaran SARS CoV-2 yang bertumpu pada interaksi antar manusia. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa dampak dari pengurangan interaksi antar manusia terhadap pertanian terutama adalah terganggunya rantai pasok produk dari tingkat petani sampai ke tingkat eceran. Rantai pasok mengalami gangguan karena adanya pembatasan pergerakan barang antar daerah di dalam negeri. Sarana transportasi yang berkurang menyebabkan produk pertanian dari sentra produksi mengalami hambatan untuk sampai pada tingkat konsumen. Produk-produk pertanian yang mudah rusak, seperti produk hortikultura dan sayuran, mengalami penurunan harga di tingkat petani dan kenaikan harga di tingkat eceran. Kondisi melebarinya margin pemasaran akibat pandemi COVID-19 dialami oleh produk pertanian di China (Zhou *et al.* 2020). Margin pemasaran produk pertanian yang melebar antara tingkat petani dan tingkat konsumen tersebut disebabkan oleh meningkatkan biaya pemasaran.

Tabel 2. Permasalahan yang dihadapi pertanian di masa pandemi COVID-19

India (Urumugam <i>et al.</i> 2020)	Amerika Serikat (Tanger, 2020)	China (Huang, 2020)	Indonesia*
<ul style="list-style-type: none"> • Interupsi pembelian biji-bijian oleh pemerintah. • Berkurangnya pembelian oleh pedagang pengumpul. • Berkurangnya tenaga kerja panen. • Berkurangnya ketersediaan transportasi. • Barikade angkutan produk pertanian antar daerah. • Penutupan berbagai pasar eceran produk pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya tenaga kerja di tingkat usahatani dan pengolahan. • Turunnya permintaan produk pertanian (domestik dan internasional). • Turunnya ketersediaan dan akses terhadap perkreditan. • Disrupsi pada rantai pasok. • Gangguan pada pasar di tingkat eceran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan transportasi antar daerah. • Perbedaan harga eceran dan harga di tingkat petani yang semakin melebar. • Kesulitan memperoleh tenaga kerja pertanian antar daerah, yang berakibat pada terganggunya pengolahan lahan dan tanam. • Terganggunya pasokan input pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman penghentian impor oleh negara tujuan karena produk perikanan yang tercemar SARS CoV-2. • Terganggunya rantai pasok pangan di sisi hilir. • Turunnya permintaan bahan pangan (restoran, hotel, dan industri pengolahan).

Catatan: *disarikan dari berbagai berita di media massa

Di India, di mana pemasaran produk pertanian sebagian besarnya dilakukan oleh pemerintah atau memperoleh dukungan besar melalui kebijakan pemerintah, mengalami permasalahan serius di masa pandemi COVID-19. Kemampuan fiskal yang semakin terbatas akibat alokasi anggaran yang besar untuk mengatasi pandemi, berakibat pada berkurangnya kemampuan negara untuk menyerap produk pertanian. Penurunan dan penundaan pembelian produk pertanian pangan oleh pemerintah menyebabkan petani kesulitan menjual hasil usahatannya.

Kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia, terutama pada komoditas pangan. Pada saat pandemi COVID-19 pemerintah berhasil melakukan stabilisasi harga pangan pokok, terutama beras. Harga-harga pangan relatif terkendali sehingga angka inflasi juga dapat ditekan. Berdasarkan data yang disiarkan dalam Berita Resmi Statistik - Badan Pusat Statistik, harga beras di semua tingkatan pada bulan Juli 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Harga beras kualitas medium di tingkat perusahaan penggilingan mengalami penurunan sebesar -1,39 persen. Sedangkan harga beras di tingkat grosir dan di tingkat eceran secara rata-rata turun tipis, yaitu masing-masing sebesar -0,09 persen dan -0,25 persen. Keberhasilan pemerintah Indonesia untuk stabilisasi harga beras di tengah pandemi COVID-19 ini dapat dilihat juga dari margin pemasaran beras yang relatif tidak mengalami perubahan dari kondisi sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19.

Tabel 3. Margin pemasaran beras di Indonesia di bulan April 2019 dan April 2020 (BPS 2019, 2020)

Deskripsi	April 2019	April 2020
Harga GKP di petani (Rp/Kg)	4357	4600
Harga GKP di penggilingan (Rp/Kg)	4446	4692
Harga beras premium di penggilingan (Rp/Kg)	9465	10081
Harga beras premium di grosir (Rp/Kg)	12019	12382
Margin pemasaran dari petani ke penggilingan (%)	2.04	2.00
Margin pemasaran dari penggilingan ke grosir (%)	26.98	22.82
Margin pemasaran dari petani ke grosir (%)	175.85	169.17

Data yang digunakan untuk menghitung margin pemasaran bersumber dari Berita Resmi Statistik yang disiarkan oleh Badan Pusat Statistik. Data diperoleh BPS melalui survei harga pangan yang dilakukan di 31 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil olahan yang disajikan pada Tabel 3 tampak bahwa margin pemasaran padi atau beras cenderung mengalami penurunan antara kondisi saat tidak ada pandemi dengan kondisi saat pandemi Covid sedang berlangsung. Penurunan margin pemasaran tersebut kemungkinan disebabkan oleh menurunnya margin keuntungan yang diambil oleh para pelaku di sepanjang rantai pemasaran sebagai respons terhadap melemahnya daya beli di tingkat konsumen. Pada masa pandemi, di saat pergerakan orang dibatasi, pergerakan barang kebutuhan pokok tidak mengalami pembatasan. Kendaraan-kendaraan yang mengangkut bahan pangan, seperti beras, tetap dapat bebas bergerak antar wilayah atau daerah. Kebijakan yang memberi pengecualiaan terhadap transportasi bahan pokok, tampaknya berhasil menekan gejolak harga pangan di berbagai tingkatan pemasaran. Keberhasilan pemerintah dalam stabilitas harga beras di masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor pendukung stabilisasi ekonomi di tingkat rumah tangga. Beras masih menjadi bahan pangan penting, terutama bagi masyarakat pendapatan rendah (Hafizah *et al.* 2020).

Apa yang terjadi pada harga beras bukan berarti bahwa semua komoditas pertanian tidak mengalami masalah di sepanjang rantai pasoknya. Gangguan pada rantai pasok terutama dialami oleh komoditas hortikultura yang mudah rusak. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berita di media massa, dapat diketahui bahwa petani sayuran mengalami tekanan harga di masa pandemi COVID-19. Pengamatan media massa *Pikiran Rakyat.com* pada bulan Mei 2020, petani sayuran di Lembang – Kabupaten Bandung Barat mengalami kesulitan untuk menjual produknya akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Akibat pembatasan jam operasional pasar, kios-kios hanya buka setengah hari. Petani sayur menjadi tidak leluasa menjual produknya. Harga jual cabe keriting yang biasanya dijual dengan harga Rp 30.000 turun menjadi Rp 7.000 per kilogram. Kondisi yang serupa juga diamati oleh kontributor media massa *Bisnis.com* di berbagai pasar tradisional di bulan Agustus di Kota Bandung. Para pedagang di pasar tradisional tersebut menceritakan bahwa berbagai

harga sayuran turun. Harga tomat yang biasanya terjual dengan harga Rp 10.000 turun menjadi Rp 5.000 per kilogram. Demikian juga harga cabe rawit turun menjadi Rp 24.000 per kilogram dari yang biasanya dihargai Rp 40.000 per kilogram. Wilayah Bandung dan sekitarnya merupakan salah satu sentra sayur-mayur yang penting di Jawa Barat. Kondisi pasar di wilayah ini diperkirakan juga menggambarkan keadaan pasar di sentra-sentra produksi sayur-mayur di provinsi lainnya saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Seperti misalnya berita yang dilansir *Antara* pada bulan September 2020 yang menceritakan turunnya harga kubis di tingkat petani di Plaosan, Kabupaten Magetan, dari sekitar Rp 4.000 menjadi sekitar Rp 1.500 per kilogram. Kondisi turunnya harga-harga produk pertanian ini tampaknya juga terjadi di pasar eceran produk pertanian di India dan Amerika Serikat (Tabel 2).

Perkembangan penggunaan teknologi informasi digital dalam pemasaran produk pertanian, terutama produk yang dihasilkan oleh rumah tangga tani, diharapkan dapat mengurangi permasalahan gangguan yang terjadi pada rantai pasok ataupun pasar eceran akibat pembatasan pergerakan atau aktivitas manusia antar tempat. Kontak fisik secara langsung antara pembeli dan penjual dapat dikurangi. *E-commerce* ataupun jual beli lewat daring juga dapat mencegah kerumunan, yang menjadi salah satu penyebab menyebarnya virus SARS CoV-2. Penjualan produk-produk pertanian selama masa pandemi COVID-19 menjadi lebih bersifat lokal dan mengarah pada *community home delivery*. Kunjungan fisik ke pasar ataupun ke *supermarket* untuk membeli kebutuhan pangan rumah tangga semakin berkurang.

Efektivitas teknologi digital dalam membantu kelancaran aliran produk pertanian hasil petani tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Petani tentu harus mampu menggunakan perangkat teknologi yang digunakan, dan yang penting juga adalah tersedianya jaringan telekomunikasi yang andal sampai di tingkat usahatani. Petani perlu dibekali dengan kemampuan untuk menyiapkan produk yang dihasilkannya agar produk dapat dikirim dengan mudah dan tidak rentan rusak saat dalam pengantaran. Petani juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan (*financial literacy*) di pertanian dan pedesaan tentunya perlu

ditingkatkan intensitasnya. Penerapan ekonomi digital di tingkat petani atau usahatani akan relatif mudah apabila petani bergabung dalam wadah koperasi dan koperasi tersebut berfungsi dengan baik. Penguatan pemberdayaan petani melalui koperasi dapat menjadi bagian dari kebijakan pertanian dalam menghadapi perekonomian pasca pandemi COVID-19 dan berkembangnya ekonomi yang berbasis pada teknologi digital.

Dampak COVID-19 tidak saja mengganggu rantai pasok produk pertanian domestik, tetapi juga berpengaruh buruk pada perdagangan internasional produk-produk pertanian. Pada Tabel 2 pertanian di negara Amerika Serikat mengalami dampak negatif dari turunnya permintaan produk di pasar internasional. Keadaan ini berbeda dengan Indonesia yang mengalami peningkatan ekspor produk pertanian. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, ekspor pertanian Indonesia dari bulan Januari sampai September 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,70 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Produk pertanian yang mengalami lonjakan ekspor adalah produk hortikultura, kelapa, dan tanaman rempah seperti cengkeh dan kayu manis.

Pandemi COVID-19 tampaknya berpengaruh terhadap struktur ekspor produk pertanian Indonesia, akibat dari adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di negara pendapatan tinggi yang menjadi negara tujuan ekspor. Negara-negara maju tampaknya meningkatkan permintaan terhadap komoditas yang dianggap lebih menyehatkan dan yang memiliki pengaruh baik bagi pertahanan tubuh menghadapi virus SARS CoV-2. Penelitian Min *et al.* (2020) di China menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan yang mereka konsumsi, dan peningkatan pengetahuan ini kemudian meningkatkan perilaku konsumsi pangan yang lebih aman. Ekspor produk komoditas pertanian Indonesia yang relatif tidak dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 kemungkinan disebabkan oleh karakteristik komoditas yang diekspor. Produk pertanian yang diekspor Indonesia pada umumnya merupakan produk primer, yang juga menjadi bahan baku bagi industri di negara importir. Risiko dan biaya pencegahan sebaran virus SARS CoV-2 melalui bahan baku lebih rendah daripada bahan makanan jadi yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen di negara importir.

Dalam jangka panjang pandemi COVID-19 mendatangkan ancaman baru terhadap ekspor produk pertanian. Negara-negara maju sebagai importir produk pertanian akan semakin meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan keamanan pangan yang masuk ke negaranya. Kasus temuan jejak virus SARS CoV-2 pada produk dan kemasan produk perikanan oleh otoritas Bea dan Cukai China (*GACC*) pada tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana diberitakan harian *Kompas*, perlu memperoleh perhatian yang serius. Apabila kasus-kasus seperti ini berulang, maka dapat berakibat buruk bagi ekspor produk pertanian Indonesia secara keseluruhan, dan tidak hanya ekspor produk perikanan. Pada sisi yang lain, negara-negara penghasil pangan utama diperkirakan juga akan semakin mengutamakan dan meningkatkan ketersediaan (stok) pangan domestiknya sebelum menjual kelebihan produksinya ke pasar internasional. Pasar pangan internasional diperkirakan akan semakin tipis dan meningkatkan risiko gejolak harga di pasar. Implikasi dari semakin berkurangnya produk pangan yang diperjualbelikan di pasar internasional tentunya adalah semakin meningkatnya risiko yang dihadapi negara-negara yang mengandalkan ketahanan pangannya dari impor. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian pangan domestik menjadi syarat keharusan untuk memperoleh ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kesadaran akan pentingnya keamanan pangan dan kandungan gizi dari pangan yang dikonsumsi tampaknya juga terjadi di Indonesia, terutama di daerah perkotaan dan pada masyarakat kelas menengah dan atas. Pandemi COVID-19 memunculkan kreativitas rumah tangga di daerah urban dan sub-urban untuk menghasilkan sendiri sayur-mayur ataupun bumbu-bumbuan yang dibutuhkan rumah tangga atau dikenal sebagai *urban farming*. Berbagai berita di media massa menunjukkan banyak selebritas atau pesohor memanfaatkan lahan kebun atau pekarangannya untuk bercocok tanam menggunakan metode seperti hidroponik, aeroponik, vertikultur, akuaponik, ataupun vertiminaponik. Sampai saat ini tampaknya kecenderungan masyarakat urban untuk bercocok tanam diperkirakan masih pada taraf hobi baru dan belum menjadi sumber penghasilan utama.

Kesadaran akan pentingnya keamanan pangan yang semakin meningkat dalam masyarakat ini tentunya memiliki dampak jangka panjang terhadap pertanian dan agribisnis di Indonesia. Petani dan para pelaku agribisnis dari hulu sampai hilir perlu mempersiapkan diri untuk meningkatkan tidak saja kualitas produk yang dihasilkannya tetapi juga keamanannya. Preferensi konsumen yang semakin meningkat terhadap produk yang dianggap aman dan menyehatkan perlu dimasukkan dalam pengambilan keputusan di tingkat usahatani dan di sepanjang rantai pasok produk pertanian.

Pandemi COVID-19 dapat secara langsung memengaruhi produktivitas dan kinerja pertanian melalui terganggunya pasokan faktor-faktor produksi pertanian. Pada Tabel 2 ditunjukkan, pertanian di India mengalami permasalahan untuk memperoleh tenaga kerja panen, dan di China terutama kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja penyiapan lahan dan tanam yang mencukupi. Sedangkan di Amerika Serikat, kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang mencukupi tidak saja terjadi di tingkat usahatani tetapi juga di tingkat pengolahan hasil. Pembatasan aktivitas atau pergerakan manusia antar daerah di negara-negara tersebut menjadi penyebab utama munculnya masalah ketenaga kerjaan di tingkat usahatani, di samping karena adanya bantuan tunai yang cukup besar bagi mereka yang tidak bekerja karena terdampak pandemi. Berdasarkan hasil survei yang diterbitkan Bank Sentral Eropa dalam *ECB Economic Bulletin, Issue 4/2020*, pandemi COVID-19 tidak saja memunculkan masalah tenaga kerja, tetapi juga menimbulkan pengaruh negatif terhadap akses perkreditan bagi usaha skala kecil di beberapa negara Eropa.

Permasalahan ketenagakerjaan di sektor pertanian Indonesia di masa pandemi COVID-19 tampaknya tidak separah di negara India, Amerika Serikat, ataupun China. Data BPS menunjukkan bahwa pangsa tenaga kerja di pertanian adalah 29,04 persen dari total tenaga kerja dalam perekonomian pada bulan Februari 2020, dan kemudian meningkat menjadi 29,76 persen pada bulan Agustus 2020. Pangsa tenaga kerja di pertanian adalah tetap yang tertinggi di antara sektor perekonomian lainnya. Namun angka ketenagakerjaan yang bersifat agregat ini tidak menggambarkan permasalahan ketenagakerjaan di tingkat usahatani dalam sekali musim tanam. Dari penelusuran terhadap berbagai

berita media massa belum ditemukan adanya permasalahan ketersediaan tenaga kerja saat tanam sampai panen yang menonjol. Sektor pertanian bahkan dijuluki sebagai penampung tenaga kerja dari sektor-sektor lain pada saat perekonomian memburuk. Mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah perkotaan akibat pandemi COVID-19 diberitakan memilih untuk pulang ke desa, dan hal ini tentunya menambah jumlah angkatan kerja di pedesaan. Demikian juga mereka yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, karena pemutusan hubungan kerja dan akibat pandemi COVID-19 melanda negara di mana mereka berkerja, juga kembali ke desa dan menambah penawaran tenaga kerja di pedesaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh pertanian di tingkat usahatani di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 tampaknya sama dengan permasalahan yang dihadapi di masa-masa sebelum pandemi. Petani menghadapi permasalahan untuk dapat akses terhadap input pertanian, seperti pupuk, benih unggul, obat-obatan, dan kredit modal kerja. Berdasarkan pendapat petani pada survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017 yang dilakukan oleh BPS, dapat diketahui bahwa jenis bantuan faktor produksi yang diharapkan petani dari pemerintah adalah berupa pupuk (55,7 persen dari total responden), benih (11,1 persen), dan pestisida (6,4 persen). Petani juga mengharapkan adanya jaminan terhadap harga produk gabah yang dihasilkan petani (9,3 persen) dan bantuan kredit tanpa agunan (8,3 persen). Akses terhadap faktor produksi pupuk, benih, dan obat-obatan yang terganggu tentunya dapat meningkatkan risiko produksi yang dihadapi oleh petani. Bagi petani yang mengalami kesulitan untuk memperoleh modal kerja yang cukup, kondisi ini akan semakin meningkatkan risiko produksinya.

Pada sisi yang lain, petani juga ingin mengurangi risiko harga yang dihadapi. Elastisitas harga terhadap permintaan produk pertanian, terutama beras, yang relatif inelastis (Hafizah *et al.* 2020) mengakibatkan harga menjadi rentan untuk mengalami lonjakan pada saat adanya gangguan pada sisi permintaan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya daya beli konsumen, dan terbatasnya jam operasional pasar, mengakibatkan permintaan turun dan berakibat pada anjlognya harga berbagai komoditas pertanian. Oleh sebab itu, upaya-upaya pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga di tingkat

konsumen tentunya perlu juga disertai dengan kebijakan stabilisasi harga di tingkat petani yang efektif, sebagaimana yang diinginkan oleh petani dari hasil survei BPS tersebut. Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat risiko yang dihadapi petani dalam menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 adalah memperkuat kelembagaan asuransi pertanian (Gu dan Wang, 2020). Di Indonesia asuransi pertanian telah mulai berjalan tetapi perkembangannya relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan asuransi non-pertanian. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka asuransi pertanian merupakan kelembagaan pertanian yang wajib untuk dikembangkan. Asuransi pertanian tentunya tidak hanya memperkecil risiko dalam menghadapi pandemi COVID-19, tetapi juga dapat melindungi petani dari akibat buruk gagal panen oleh karena adanya bencana alam, perubahan iklim, ataupun serangan hama penyakit.

9.3 Penutup

Pertanian di Indonesia relatif belum mengalami guncangan sebagaimana dialami oleh perekonomian di sektor non-pertanian. Namun dengan semakin terintegrasinya ekonomi pertanian dengan perekonomian secara luas, dampak negatif COVID-19 akan dialami juga oleh sektor pertanian. Dampak negatif akibat daya beli konsumen yang melemah dan terganggunya rantai pasok produk-produk pertanian akan secara langsung ditransmisikan sampai ke tingkat petani dan usahatani. Demikian juga disrupsi yang ditimbulkan COVID-19 terhadap perekonomian global juga diperkirakan akan memengaruhi pola perdagangan antar negara. Masing-masing negara dituntut untuk lebih resilien dalam memperkuat ketahanan pangannya.

Pola distribusi vaksin COVID-19 di tingkat internasional dapat menjadi pembelajaran bagi pola perdagangan pangan di masa pandemi atau krisis, yaitu masing-masing negara pada dasarnya mementingkan kepentingan dirinya sendiri (Hendrix, 2020). Oleh sebab itu, menyandarkan ketahanan pangan pada sumber pasokan dari impor membawa risiko besar. Saat terjadi guncangan di pasar komoditas pangan dunia, negara-negara sumber produksi pangan akan menjual pangannya ke pasar internasional setelah memastikan

kebutuhan domestiknya aman terlindungi. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan posisi pangan yang masih penting dalam *budget* rumah tangga, perlu terus meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertaniannya.

Daftar Pustaka

- Arumugam U, Kanagavalli G, Manida M. 2020. COVID-19: Impact of agriculture in India. *Aegaeum Journal*, 8(5): 480-488. <https://ssrn.com/abstract=3600813>
- Asadi S, Bouvier N, Wexler AS, Ristenpart WD. 2020. The coronavirus pandemic and aerosols: Does COVID-19 transmit via expiratory particles? *Aerosol Science and Technology*, 54(6):635-638. DOI: 10.1080/02786826.2020.1749229
- Chan, JF-W., Yuan, S., Kok, K-H., To, KK-W., Chu, H., Yang, J., et al. .2020.. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. *Lancet*, 395: 514-523. DOI: 10.1016/S0140-6736.20.30154-9
- Gu, H. Y., Wang, C. W. .2020.. Impacts of the COVID-19 pandemic on vegetable production and countermeasures from an agricultural insurance perspective. *Journal of Integrative Agriculture*, 19.12.: 2866–2876. <https://doi.org/10.1016/S2095-3119.20.63429-3>
- Hafizah, D., Hakim, D.B., Harianto, Nurmalina, R. 2020. The role of rice's price in the household consumption in Indonesia. *Agriekonomika*. 9(1): 38-47. DOI: <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v9i1.6962.g4634>
- Hendrix CS. 2020. Wrong tools, wrong time: Food export bans in the time of COVID-19. <https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/wrong-tools-wrong-time-foodexport-bans-time-COVID-19>
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. 2020. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*, 395:497-506. DOI: 10.1016/S0140-6736.20.30183-5
- Huang J. 2020. Impacts of COVID-19 on agriculture and rural poverty in China. *Journal of Integrative Agriculture*, 19(12): 2849–2853. <https://doi.org/10.1016/S2095-3119.20.63469-4>

- Huang Q, Jackson S, Derakhshan S, Lee L, Pham E, et al. 2021. Urban-rural differences in COVID-19 exposures and outcomes in the South: A preliminary analysis of South Carolina. *PLOS ONE* 16.2): e0246548. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246548>
- Liu J, Liao X, Qian S, Yuan J, Wang F, Liu Y, et al. 2020. Community transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. *Emerging Infectious Diseases*. 26 (6):1320-1323. DOI: 10.3201/eid2606.200239
- Min S, Xiang C, Zhang XH. 2020. Impacts of the COVID-19 pandemic on consumers' food safety knowledge and behavior in China. *Journal of Integrative Agriculture*, 19(12): 2926–2936. <https://doi.org/10.1016/S2095-3119.20.63388-3>
- Mueller JT, McConnell K, Burow PB, Pofahl K, Merdjanoff AA, Farrell J. 2021. Impacts of the COVID-19 pandemic on rural America. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 118 (1) 2019378118. DOI: 10.1073/pnas.2019378118
- Tanger S. 2020. Economic Impacts of COVID-19 on Food and Agricultural Markets. Technical Report. DOI: 10.13140/RG.2.2.17630.66881.
- Zhou JH, Han F, Li K, Wang Y. 2020. Vegetable production under COVID-19 pandemic in China: An analysis based on the data of 526 households. *Journal of Integrative Agriculture*. 19(12): 2854–2865. DOI: 10.1016/S2095-3119.20.63366-4

10. PANDEMI COVID-19 DAN PARADOKS SISTEM PANGAN INDONESIA

Laksmi A. Savitri

Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia,
CTSS Fellow

Abstrak

Krisis ekologi diyakini oleh banyak ahli merupakan sebab dari kemunculan pandemi COVID-19. Sistem pangan global yang mengandalkan produksi massal, skala besar dan monokulturisasi adalah penyumbang dari sepertiga kerusakan ekologis yang kini berujung pada pandemi. Setelah berjalan selama satu tahun, kondisi pandemi pun telah memunculkan krisis berlapis dan saling-kait, termasuk krisis dari sistem pangan itu sendiri. Bagi lingkaran setan, kebijakan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis, justru menghasilkan potensi krisis baru. Kekuatan paksa pasar yang mendominasi sistem pangan global dan menjadi akar sebab pandemi, direproduksi oleh kebijakan pangan Indonesia. Kebijakan *Food Estate*, yang disandera oleh logika bisnis korporat, pada akhirnya, menjadi instrumen bagi konsolidasi modal industri pangan. Paradoks dari sistem pangan Indonesia adalah menjawab masalah dengan masalah, yakni: menjawab krisis yang (salah satunya) disebabkan rezim pangan korporat dengan memperkuat rezim itu sendiri.

Kata kunci: sistem pangan, rezim pangan internasional, kuasa pasar

10.1 Pendahuluan

Barangkali tidak banyak yang menyadari bahwa kelaparan kronis¹ (Godecke *et al.* 2018) dan kelaparan tersembunyi² (Kimura, 2013) sudah menjadi wabah di Indonesia jauh sebelum datangnya pandemi *Corona virus disease 2019* (COVID-19). Pada 2011, Indonesia pernah menempati posisi ke-5 di dunia untuk negara-negara yang memiliki masalah warga kekurangan gizi, terutama tengkes (*stunting*). Sampai tahun 2019 Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan masalah kelaparan serius menurut Global Hunger Index 2019, dengan angka indeks 21,9. Kemudian menurun pada 2020 menjadi kategori sedang dengan angka indeks di bawah 20, tapi masih berada di bawah Malaysia dan Singapura. Selain itu, menurut Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, masih ada kurang lebih 27,67% anak-anak dan bayi mengalami gagal pertumbuhan (*stunting*) di Indonesia, sedikit menurun dari 30% di tahun sebelumnya³. Beban kelaparan kronis dan kelaparan tersembunyi menjadi semakin berat ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Banyak ahli yang meyakini bahwa pandemi COVID-19 muncul sebagai akibat dari krisis ekologi (Wallace 2016, Shiva 2020, Beraf 2020⁴) atau disebut Quammen (2012) sebagai *spillover*, yakni: efek limpahan dari virus yang kehilangan inang alamiahnya akibat deforestasi, polusi dan berbagai kerusakan ekologis lainnya, sehingga masuk ke tubuh manusia. Bagai efek domino, limpahan dari kondisi kerusakan lingkungan dan degradasi ekologis mengakibatkan krisis kesehatan yang bergulir menjadi krisis ekonomi dan krisis pangan secara global. Tindakan *lockdown* atau pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran wabah menyebabkan konsumen panik dan memborong

¹ Ketakcukupan asupan atau kekurangan pemanfaatan biologis dari nutrisi makro atau asupan energi (kalori) untuk memenuhi syarat kecukupan makanan (disebut juga kurang gizi, defisiensi nutrisi makro)

² Defisiensi nutrisi mikro, yaitu vitamin dan mineral, yang berperan vital pada fungsi organ, contoh: vitamin A, besi (mengakibatkan anemia) dan yodium.

³ Dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada Maret 2019

⁴ Beraf, C. 2020. "COVID-19 is another proof of ecological devastation". <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/COVID-19-another-proof-ecological-devastation.html>, diunduh 1 Oktober 2020

persediaan makanan (*panic buying*)⁵. Krisis pangan, baik karena hambatan rantai pasok pangan, maupun karena terhentinya kegiatan ekonomi secara keseluruhan menjadi ancaman nyata.

Ketika Indonesia masih dihantui oleh masalah-masalah kekurangan gizi, peristiwa *panic buying* menunjukkan bahwa kemungkinan besar hanya golongan kelas menengah ke atas yang masih memiliki daya tahan terhadap krisis, tapi golongan miskin belum tentu. Pemberitaan atas lima kejadian kelaparan di awal pandemi yang membuat seorang ibu buruh serabutan meninggal demi mendahulukan anak dan suaminya⁶ menjadi pembelajaran bahwa perempuan dan kemiskinan adalah kerentanan ganda yang mematikan di masa pandemi.

Ketimpangan menjadi tantangan utama bagi pemerataan akses terhadap pangan yang layak dan pandemi memperparahnya (FAOb, 2020). Beberapa kajian mendiagnosis bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia telah sampai pada taraf yang berbahaya (Gibson 2017, World Bank 2016). Menduduki peringkat ke enam negara tertimpang di dunia, ada empat orang terkaya di Indonesia menguasai aset setara dengan 100 juta orang miskin di negara ini (Gibson 2017). Di tengah kondisi ketimpangan tersebut, pandemi COVID-19 yang berlangsung selama satu tahun terakhir ini diperkirakan akan mengakibatkan 1,9 juta sampai dengan 8,5 juta orang jatuh miskin dan angka kemiskinan meningkat sampai dengan 3% menjadi 12,74% (Suryahadi *et al.* 2020).

Kompleksitas dari masalah ketimpangan, kemiskinan dan kelaparan di masa pandemi tak terlepas dari persoalan pangan sebagai sebuah sistem. Sistem pangan adalah sebuah sistem yang dibentuk dan membentuk arena ekonomi politik, yang diisi oleh banyak aktor, peran, relasi dan proses dalam produksi, distribusi dan konsumsi pangan, mulai dari lahan pertanian dan perairan sampai ke piring makan (Leach 2020). Masalah sistem pangan menjadi masalah yang pelik, sulit didefinisikan, berlapis-lapis persoalannya dan tak bisa dipecahkan secara definitif (Hospes & Brons 2016), terutama karena relasi kuasa dan kesalingkaitan (*interconnectedness*) yang rumit di berbagai

⁵ <http://www.fao.org/news/story/en/item/1334280/icode/>

⁶ <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5052980/lemas-hingga-tewas-begini-5-kisah-kelaparan-di-tengah-COVID-19/3>

aras (Kennedy *et al.* 2016, Leach 2010). Dalam kesalingkaitan tersebut, aspek kepengaturan pangan (*governance*) menjadi titik krusial (Kennedy *et al.* 2016). Berangkat dari kerangka kerja sistem pangan dan perspektif ekonomi politik, tulisan ini menyoal kekuasaan pasar dan negara dalam kepengaturan sistem pangan serta konsekuensi yang menyertai. Pembahasan terpumpu pada sejauhmana pandemi COVID-19 dapat mengungkap persoalan-persoalan dalam kepengaturan sistem pangan di Indonesia.

Ada tiga kontribusi pemikiran kritis yang menjadi sumber refleksi bagi tulisan ini. *Pertama*, analisis Van der Ploeg secara menarik telah menunjukkan bahwa kejadian pandemi telah membongkar kelemahan sistem kapitalisme yang membangun pola produksi, distribusi dan konsumsi pangan hegemonik, karena terbukti macet (Ploeg, 2020). Dengan macetnya rantai pasokan pangan global, van der Ploeg berargumentasi bahwa kapitalisme terbukti bukan menghidupkan, melainkan melemahkan atau ‘mendeaktivasi’ rantai pangan global.

Kedua, cara analisis seperti yang dilakukan oleh van der Ploeg tidak menaruh persoalan sistem pangan dan korporatisasi rantai pasok global semata sebagai masalah nasional, tapi justru dengan cara pandang historis dan metode perbandingan yang digabungkan (*incorporated comparison*). Phillip McMichael dapat menggambarkan bagaimana saling ketergantungan yang diciptakan oleh aturan-aturan dan institusi peletak sistem pasar bebas, termasuk korporasi, telah membentuk sebuah rezim pangan yang mengikat dan berubah dari waktu ke waktu (Friedmann & McMichael, 1989; Friedmann, 2016; McMichael, 2020). Tawaran analisis sebagaimana disajikan oleh van der Ploeg dan McMichael, yaitu melihat sistem pangan dalam perspektif kapitalisme global dan bagaimana pandemi menjadi konteks yang menunjukkan kemacetan sistem pangan kapitalistik di tingkat nasional, maupun lokal, menjadi titik berangkat untuk memahami pandemi dan kelaparan di Indonesia sebagai konsekuensi ekonomi politik global.

Ketiga, analisis kuasa sangat sentral dalam memahami bagaimana rezim pangan bekerja. Leach *et al.* (2020) memberikan inspirasi yang sangat berguna dengan menunjukkan bagaimana analisis institusional bisa membantu untuk menunjukkan kekuasaan bekerja dalam pelebagaan pangan. Dalam hal ini,

aspek kepengaturan pangan, yakni: kebijakan-kebijakan pangan dan politik pangan semasa pandemi menjadi fokus pembahasan. Selanjutnya, kombinasi ketiga pendekatan diupayakan untuk dapat membaca aras makro dan meso dari kapitalisme pangan di Indonesia pada masa pandemi.

10.2 Indonesia dalam Rezim Pangan Internasional

Beberapa pandangan meyakini bahwa tatanan ekonomi politik pangan global pada hari ini telah menjadi salah satu kontributor dari penyebab ketimpangan global, deforestasi dan perubahan iklim. Sebagai akibatnya, kita memiliki sistem pangan yang sesungguhnya rusak (Steffan 2017, de Schutter 2017, Leach 2020). Sistem pangan modern yang mengandalkan perlakuan kimia pada tanaman dan ternak, produksi skala besar yang terkonsentrasi, serta transportasi boros energi, telah menjadi penyumbang dari 30% emisi karbon global karena deforestasi dan industrialisasi (Steffan *et al.* 2017, de Schutter 2017, Siva 2020, Leach 2020).

Sistem pangan yang terdampak oleh pandemi bukan sebuah ‘anomali’ dari sistem normal yang terganggu. Namun juga, sistem pangan global tidak dapat dikatakan ‘normal’, karena menurut Olivier de Schutter, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan (2008–2014), sesungguhnya sistem pangan kita ini menuju kolaps. Penyebabnya adalah globalisasi sistem pangan yang secara hegemonik membangun kepengaturan pangan berlandaskan cara-cara berikut (De Schutter, 2017):

1. Produksionisme, yaitu: keyakinan bahwa industrialisasi pangan adalah mutlak demi menghasilkan produksi masal berkalori murah
2. Spesialisasi wilayah yang diatur oleh mekanisme pasar, sehingga terdapat pembagian kerja wilayah-wilayah dunia, baik sebagai penghasil bahan mentah yang mengandalkan sistem monokultur, daerah yang menjadi pabrik pengolah makanan dengan mengandalkan buruh migran laki-laki, dan meninggalkan pertanian skala kecil untuk diurus oleh perempuan.
3. Liberalisasi perdagangan, yaitu: dengan memberlakukan pasar bebas bagi produk pertanian oleh WTO pada 1 Januari 1995, berdasarkan Kesepakatan Pertanian (*Agreement of Agriculture* atau AoA).

4. Integrasi vertikal, yakni penyatuan rerantai pasok pangan dari hulu ke hilir melalui penguasaan supermarket global dan rantai restoran cepat saji. Rantai supermarket global mendikte apa yang ditanam oleh petani dan diproses oleh pabrik-pabrik pengolah makanan.
5. Konsentrasi laba secara vertikal, yaitu penggabungan modal korporasi-korporasi yang bergerak di hulu (industri pupuk, benih, pestisida) sampai ke hilir menjadi satu *holding* (korporasi induk), termasuk pengambilalihan investasi publik di bidang penelitian dan pengembangan, infrastruktur, data digital dan pemasaran.

Kelima elemen yang membentuk sistem pangan global ini menyebabkan proses produksi pangan terpisah-pisah dan tersebar di berbagai penjuru dunia, namun kepemilikan modalnya terkonsentrasi di tangan beberapa korporasi transnasional yang menguasai rantai pasok dan supermarket global (McMichael 2009; Clapp 2011, 2014, 2016). Hasil dari tatanan ini adalah *food from nowhere* atau pangan yang tak jelas asal-usulnya.

Seperti juga jutaan konsumen global lainnya, kebanyakan dari kita tidak terlalu tahu asal bahan makanan yang kita makan. Apakah betul tempe goreng yang kita santap di Jawa pernah berasal dari kedelai kuning hasil panen di tanah Jawa atau seluruhnya adalah selalu hasil impor dari produsen Amerika? Yang jelas, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor kedelai Indonesia sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 7,24 triliun (kurs Rp 14.200). Sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari Amerika Serikat (AS). Ketika terjadi protes dan pemogokan perajin tahu tempe di awal tahun 2021 karena kenaikan harga kedelai impor, tercuatlah akutnya ketergantungan Indonesia pada impor kedelai dan berbagai bahan pangan strategis lainnya, seperti bawang putih, gula bahkan garam⁷.

Tanpa peristiwa pandemi yang mengharuskan pembatasan mobilitas orang dan barang, bisa jadi impor-ekspor bahan pangan adalah kejadian harian yang terlalu biasa untuk dipersoalkan. Namun kesadaran publik akan kerentanan

⁷ Dwi Hadya Jayani, "Krisis Pangan Akibat COVID-19", <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5eb374f85a649/krisis-pangan-akibat-COVID-19>, tayang pada 7 Mei 2020, diunduh pada 20 November 2020

akibat ketergantungan impor di masa pandemi memicu pertanyaan paling mendasar, yaitu: mengapa pemerintah Indonesia melakukan impor pangan, padahal hampir semua bahan pangan yang diimpor bisa dibudidayakan di negeri ini?⁸ Untuk menjawab ini, sangat penting ditelisik kembali tatanan historis seperti apa yang menempatkan Indonesia di dalam relasi komoditas global saat ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Friedmann (1987), Friedmann & McMichael (1989), serta McMichael (2009), analisis rezim pangan dapat membantu untuk memahami peran pangan dan pertanian dalam proses akumulasi kapital yang merentang dalam waktu dan ragam tempat secara global. Rezim pangan adalah sistem relasi, aturan, dan praktik yang membentuk struktur pembagian kerja internasional dan perdagangan pertanian dalam kapitalisme dunia sejak 1870-an, yaitu ketika pertama kali dalam sejarah sistem pangan, sebuah produksi pangan pokok dilakukan secara masif dan ditransportasikan dalam jarak yang jauh dari petani-petani pemukim baru di Amerika Utara ke Inggris (Friedmann & McMichael 1989). Karena inilah, revolusi industri bisa memasuki fase kejayaan kedua dan menjadikan negara-negara Eropa Barat dan Amerika sangat hegemonik dalam peredaran kapital industri dan perdagangan di dunia. Seterusnya adalah proses panjang memasuki rezim pangan kedua yang dikendalikan oleh hegemoni Amerika Serikat, sebagai lumbung pangan dunia, yang residunya masih cukup pekat hingga hari ini. Bagaimana nasib negeri-negeri nusantara pada masa-masa itu? Di manakah ia tersangkut di jejaring relasi produksi dan konsumsi pangan global?

Dalam pembagian kerja internasional di sektor pertanian, beberapa kata kunci dalam cerita tentang nusantara sampai dengan Indonesia bisa kita temukan kaitannya dalam analisis rezim pangan, misalnya: a) pada Rezim Pangan Pertama (1870–1914) adalah: Agrarisch Wet 1870, pertanian monokultur skala luas dan perkebunan, produksi komoditas ekspor untuk industri, kuli kontrak dan buruh migran; b) pada Rezim Pangan Kedua (1945–1973): pelimpahan pangan (*food dumping*) oleh Amerika Serikat, revolusi hijau,

⁸ Iim Fathimah Timorria, “Pengamat Sebut Indonesia Tak Perlu Impor Beras, Apa Dasarnya?”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201027/12/1310582/pengamat-sebut-indonesia-tak-perlu-impor-beras-apa-dasarnya>, tayang pada 27 Oktober 2020, diunduh pada 20

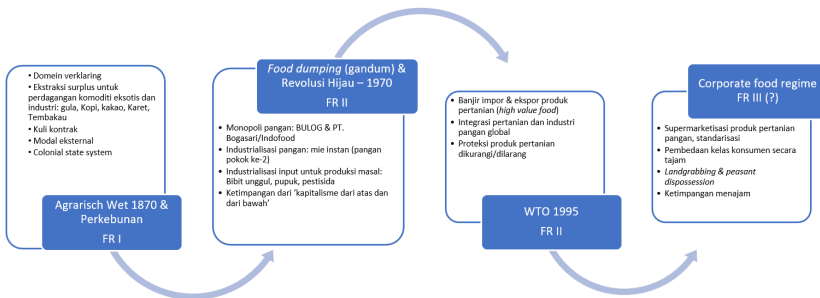
diferensiasi kelas dan petani gurem, politik swasembada pangan; c) pada Rezim Pangan terkini: WTO, impor pangan, penggusuran dan perampasan tanah, ekspansi perkebunan sawit, dan *food estate*.

Tak cukup ruang di sini tentunya untuk mengoperasikan analisis rezim pangan sepenuhnya dalam rangka mendedah proses pembentukan kekuatan paksa dari pasar (*market imperative*) terhadap sistem pangan Indonesia. Tapi setidaknya pada rezim pangan pertama, tahun 1870 adalah momentum kemunculan kebijakan agraria kolonial yang memberi kekuatan paksa untuk penguasaan tanah dan tenaga kerja untuk produksi komoditas dan akumulasi. Melalui pemberian hak *erfpacht* selama 75 tahun kepada pekebun dan perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh pemodal-pemodal luar negeri, tanah-tanah pertanian di Jawa dan Sumatera menjadi mesin ekspor yang menangkap kapital menganggur dari pengusaha-pengusaha Eropa. M.Tauchid (2009:10) mencatat pada 1928 nilai ekspor terbesar dari tanah perkebunan kolonial adalah gula (23,8%) dan karet (22,6%) pada 1938.

Dalam rezim pangan internasional, gula, kopi, teh, menempati posisi pangan eksotis yang diproduksi buruh di wilayah koloni Eropa dan dikonsumsi kelas atas Eropa yang proporsinya semakin besar karena kemakmuran dari industri (Mintz 1985, Friedman & McMichael 1989). Pengerahan tanah dan tenaga kerja di Jawa untuk perkebunan tebu yang dikuasai pemerintah kolonial dan pengusaha swasta setelah liberalisasi pada 1870, meningkatkan volume ekspor gula ke Belanda untuk dijual ke pasar dunia dari sana (Dick *et al.* 2002). Penggunaan sawah-sawah di Jawa untuk perkebunan tebu telah menyebabkan ketergantungan pada impor beras yang terus meningkat sejak 1880 dari Birma, Thailand dan Vietnam Selatan (Dick *et al.* 2002, van der Eng 2014). Sementara itu, dari Belanda diimpor katun murah yang harganya di bawah kain tenun di Jawa, sehingga sebagian besar pendapatan petani Jawa dari usaha tebu diserap balik ke Belanda melalui pembelian kain katun produksi Belanda (Heuben dalam Dick *et al.* 2002).

Pemosisian negara-negara bekas jajahan sebagai pemasok bahan untuk industri Eropa dan Amerika Serikat, sekaligus sebagai konsumen, tidak berubah karena selesainya Perang Dunia II dan deklarasi kemerdekaan. Ekonomi pasca kolonial berkembang menjadi bentuk kolonialisme baru,

yaitu penjajahan ekonomi tanpa pendudukan teritori. Dengan dalih bantuan pembangunan untuk negara-negara yang baru merdeka (*Marshall Plan*), Amerika Serikat menjual kelebihan produksi gandum domestik. Indonesia yang baru merdeka menolak bantuan Amerika. Setelah menjadi negara penerima bantuan utama dari *World Food Program* (WFP) pada 1963, negara-negara donor yang tergabung dalam IGGI mengirimkan bantuan pangan, selain beras juga tepung gandum. BULOG didirikan menjadi lembaga negara yang monopoli impor pangan di Indonesia pasca 1966. Bersama dengan PT Bogasari, BULOG mengembangkan industri tepung gandum. Selanjutnya, Bogasari menguasai monopoli industri ini sejak 1972 sampai dengan 1998 dan perusahaan milik Liem Sioe Liong ini mengintegrasikan seluruh rantai pasok gandum dalam konglomerasi usaha di bawah PT Indofood Sukses Makmur (van der Eng 2014).



Gambar 14. Indonesia dalam Rezim Pangan Internasional

Setelah Indonesia menjadi anggota WTO pada 1995, *Agreement on Agriculture* (AoA) mengatur bahwa komoditas pangan dan pertanian harus diperdagangkan dalam mekanisme pasar bebas, yaitu dengan mengurangi proteksi domestik (subsidi ekspor dan subsidi lainnya), penurunan tarif impor dan hambatan non-tarif. Akibatnya, integrasi pertanian dan pangan Indonesia dalam rantai pasok global semakin kokoh. Impor kedelai merupakan contoh nyata bagaimana AoA ini bekerja terhadap penghancuran produksi domestik. Pada 1985-1990, pasokan kedelai hasil produksi domestik masih mencapai sekitar 70% dan impor 30%. Pada 2002–2003, angka tersebut terbalik, 70% pasokan kedelai dari impor, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Peningkatan impor kedelai terjadi sejak penerapan tarif 0% sebagai akibat

dari pemberlakuan AoA. Dengan tarif impor 0% harga kedelai impor menjadi lebih murah dan menghancurkan produksi nasional karena petani tidak lagi mau menanam karena merugi. Protes perajin tahu tempe di awal 2021 bukan yang pertama, kejadian yang sama pernah terjadi pada 2012 (Amaliyah 2013).

Kuasa korporasi yang semakin besar di rantai pasok pangan, mulai dari industri benih, pupuk, pestisida sampai dengan logistik dan distribusi, dan didukung oleh aturan-aturan keuangan internasional dan multilateral, serta protokol WTO, adalah struktur dari apa yang disebut oleh McMichael (2014) sebagai Rezim Pangan Korporat. Setidaknya ada sepuluh korporasi transnasional yang menguasai pengolahan pangan dan minuman. Ada sepuluh korporasi retail transnasional yang menguasai rantai supermarket global pada 2015, seperti Walmart dan Carrefour (Clapp 2016), dan enam korporasi global menguasai industri agrikimia (pupuk, pestisida, benih rekayasa genetik) pada 2019⁹.

Salah satu contoh terbaik integrasi vertikal rantai pasok pangan global mulai dari benih sampai dengan produk akhir makanan adalah PT Cargill yang berpusat di Amerika Serikat. Korporasi raksasa yang bermula sebagai bisnis keluarga pada 1865 dengan perdagangan gandum dan biji-bijian, saat ini sudah beroperasi di 70 negara dan menguasai rantai pasok beragam komoditas dengan jangkauan pengiriman kepada konsumen di 125 negara¹⁰. Di Indonesia, Cargill memulai bisnisnya dengan mendirikan pabrik pakan ayam pada 1975, sampai pada 2008 ia menguasai sedikitnya 28% impor kedelai¹¹. Di awal berdirinya, Cargill juga melakukan produksi ternak ayam dan penjualan ayam broiler sendiri. Selain itu, Cargill juga mengakuisisi pabrik pengolahan kopra di Amurang, Sulawesi Utara, dan memproduksi minyak kelapa yang diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa, serta bungkil kelapa untuk pakan ternak yang diekspor ke Vietnam, India, dan negara Asia lainnya¹². Belum lagi lini minyak kelapa sawit Cargill yang terhitung sebagai pelopor di era 90-an. Untuk menjalankan bisnisnya yang menggurita, Cargill mengintegrasikan sektor pangan dari hulu ke hilir melalui lebih dari 60 anak perusahaan, termasuk jasa keuangan¹³.

⁹ <https://theagrinenews.com/6-perusahaan-pestisida-terbesar-2019/>

¹⁰ Annual report 2020

¹¹ <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/140183/empat-naga-penguasa-kedelai>

¹² <https://www.cargill.co.id/id/pertanian>

¹³ <https://www.cargill.com/agriculture>

Rezim pangan korporat bekerja efektif karena kelancaran perdagangan dunia dipastikan melalui beragam perjanjian perdagangan di WTO, termasuk kelengkapan penanganan sengketa perdagangan. Sejak AoA diberlakukan, Indonesia telah berkali-kali digugat dalam sengketa perdagangan dan hampir selalu kalah. Kekalahan ini disebabkan oleh inkonsistensi aturan dan kurangnya pengaturan impor di Indonesia dibanding negara lainnya, seperti: AS lebih dari 5000 peraturan, Uni Eropa memiliki 1176 aturan, China 2554 dan Brasil 2300 aturan. Akibatnya, pada saat ini Indonesia sedang mengevaluasi 977 aturan pembatasan impor¹⁴. Tatanan pangan global yang menstrukturasi sistem pangan Indonesia, pada akhirnya membuat integrasi dalam rantai nilai pangan secara global sebagai keharusan. Keharusan pasar (*market imperative*) seperti ini mendudukkan neraca perdagangan sebagai prioritas ekonomi nasional yang jauh lebih penting daripada mendorong produksi (produksi-konsumsi) domestik dan diversifikasi pangan. Apakah kondisi pandemi mampu menunjukkan kelemahan dari tatanan yang dibentuk oleh kuasa pasar ini?

10.3 Pandemi dan Kebijakan *Food Estate* Indonesia

Perubahan pola makan, perdagangan global, dan perubahan teknologi dalam industri pangan telah mendorong pertumbuhan ekspor-impor komoditas yang disebut sebagai komoditas pangan bernilai tinggi (*high-value food* atau HVF). Buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga potong adalah jenis komoditas yang dikatakan bernilai tinggi itu. Nilainya menjadi tinggi karena komoditas ini harus berada dalam kondisi segar dan memerlukan standarisasi perlakuan komoditas untuk menjamin konsistensi kualitas dalam pengiriman jarak jauh dan berhari-hari. Pemenuhan prosedur dan standar ini memerlukan biaya tinggi, sehingga harga komoditas segar menjadi mahal (Goodman *et al.* 1997).

Indonesia masuk ke pasar HVF baru satu dekade terakhir ini, ditunjukkan dengan angka ekspor buah-buahan yang makin meningkat sejak 2012 (BPS 2019). Kajian FIAN Indonesia (Savitri *et al.* 2020) mengenai rantai pasok pangan ekspor di masa pandemi, khususnya komoditas nanas dan jagung di Kediri, menunjukkan bahwa petani kecil dan pedagang perantara kecil-

¹⁴ <https://insight.kontan.co.id/news/sering-digugat-dan-kalah-di-wto-977-aturan-pembatasan-impor-dievaluasi?page=2>

kecilan di Jawa Timur mendapat kerugian terbesar ketika masuk ke dalam rantai pasok ekspor yang dikuasai oleh korporasi dibandingkan dengan mengandalkan akses ke pasar lokal yang beragam. Petani mengaku kesulitan menjual karena pembeli perantara yang memasok ke perusahaan eksportir banyak yang bangkrut, tapi masih diselamatkan oleh pasar lokal dan nasional, meskipun permintaan tetap menurun 30%. Bahkan, banyak petani sayur dan buah yang terpaksa membuang panen atau membagikan gratis hasil panennya karena tidak ada pembeli dan harga jual yang sangat rendah¹⁵.

Peringatan FAO bahwa persoalan utama krisis pangan di masa pandemi terletak pada permasalahan distribusi atau aliran pasokan dan permintaan (FAO 2020) terbukti pada pengalaman petani produsen pangan skala kecil. Namun situasi tataniaga yang bermasalah dan diungkap secara nyata oleh hambatan distribusi di masa pandemi, ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan penambahan produksi. Dalam menanggapi situasi pandemi, disahkanlah UU No. 2/2020 pada Mei 2020 yang mendasari perubahan anggaran dan belanja negara untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19 dan penentuan 89 proyek strategis negara (PSN). Urutan ke-89 dari PSN adalah program peningkatan penyediaan pangan yang diturunkan menjadi program pengembangan *Food Estate* (FE) di Kalimantan Tengah¹⁶.

Proyek *Food Estate* adalah sebuah proyek '*Great Transformation*' (Polanyi 1944) dari pertanian pangan di Indonesia, yaitu: upaya mengubah corak produksi pertanian petani ke corak produksi agribisnis pertanian. Seturut gagasan Polanyi (1944) proses transformasi ini harus melibatkan komoditas, tenaga kerja dan uang. Oleh sebab itu, tak heran jika kemunculan proyek ini sejak satu dekade terakhir hampir selalu didorong oleh isu peluang pasar dari krisis pangan, sebagai berikut:

¹⁵ <https://money.kompas.com/read/2020/10/13/163052826/petani-holtikultura-terpaksa-buang-hasil-panen-karena-tak-ada-yang-membeli>

¹⁶ Pada perkembangannya, Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional dan Pembangunan Kawasan Industri di Jakarta 29 Juli 2020, menginstruksikan lokasi FE adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Papua. Kemudian ditambah dengan Sumatera Utara, pada Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang MPR 2020.

1. Proyek *Food estate* di Merauke (*Merauke Integrated Food and Energy Estate* atau MIFEE) Jilid I dan lainnya di Kalimantan Timur dan Barat pada 2008-2010: dipicu oleh krisis pangan dan energi global, sehingga harga pangan naik dan dipandang negara sebagai peluang pasar. Titik balik pertanian pangan terjadi pada momentum ini, yaitu dengan menyerahkan produksi pangan kepada korporasi agribisnis, baik swasta maupun BUMN.
2. Proyek *Food Estate* Merauke Jilid II pada 2014-sekarang: dipicu kembali oleh wacana swasembada pangan dengan mengandalkan militer dalam pencetakan sawah dan kontrol terhadap masyarakat pedesaan, serta operasi korporat.
3. Proyek *Food Estate* Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumba Tengah, Papua pada 2020: dipicu oleh wacana krisis pangan karena pandemi COVID-19. Di Kalimantan Tengah berlokasi di bekas Proyek Gambut Sejuta Hektare pada 1997. Semua kawasan *food estate* direncanakan menerapkan skema ‘korporasi petani’ (Kementerian Pertanian 2020) yang akan mengelola usaha di luar lahan (*off farm*), baik di hulu (usaha produksi dan penjualan benih, penyediaan permodalan, penyediaan pupuk dan obat-obatan, dan pelayanan alsintan), maupun hilir (pengolahan dan pemasaran hasil pertanian). Usaha budidaya di lahan tetap dijalankan oleh petani secara individual.

Dalam *Grand Design* Korporatisasi Petani (Kementerian Pertanian 2019) dan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan *Food Estate* berbasis Korporasi Petani di Rawa Kalimantan Tengah (Kementerian Pertanian 2020) korporasi petani digambarkan sebagai sebuah badan usaha yang menggabungkan aktivitas produksi petani di hulu dan pengolahan di hilir yang menghasilkan komoditas olahan sekunder untuk dipasarkan, baik melalui *platform* digital, pasar domestik ataupun ekspor. Skema ini mengandaikan kunci keberhasilan dari *food estate* adalah transformasi masyarakat agraris ke masyarakat bisnis melalui introduksi model korporat agribisnis.

Proses transformasi masyarakat, tentu saja bukan sekadar implantasi model bisnis baru ke tubuh masyarakat. Yang dibutuhkan adalah perubahan sosial budaya yang hampir mustahil memberikan hasil sesuai target proyek negara,

karena sulit untuk menteknokrasi masyarakat berdasarkan siklus anggaran. Oleh sebab itu, simplifikasi atau penyederhaan sering kali dianggap sebagai solusi terbaik (Scott 2001). Tepat pada pola negara untuk menyederhanakan kompleksitas, terbuka peluang bagi penguasaan oleh korporasi (*corporate capture*), karena korporasi menawarkan pengambilalihan (sebagian dari) tanggung jawab negara untuk berhadapan dengan kompleksitas.

Salah satu bentuk dari *corporate capture* terhadap ‘korporatisasi petani’ muncul dalam sebuah perhelatan industri pangan yang diselenggarakan oleh KADIN bernama *Jakarta Food Security Summit* pada 18-19 November 2020. KADIN menyodorkan sebuah model bisnis pangan yang disebut ‘inklusif *closed loop*’. Model ini diakui oleh Arif Rahman, pengurus KADIN, adalah model yang ‘mirip dengan inti plasma, dan sawit adalah contoh terbaik’. Korporasi berperan sebagai penampung akhir (*off taker*) dari komoditas petani yang dikelola oleh sebuah badan hukum koperasi. Koperasi bisa mengajukan pendanaan perbankan dan mendapatkan bimbingan teknis dari korporasi untuk menggunakan benih terbaik dan praktik budidaya menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dengan standar korporasi¹⁷.

Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sudah dimulai sebuah proyek *food estate* dengan skema korporasi petani. PT Indofood menyerahkan bibit kentang kepada 16 petani di desa Ria Ria untuk ditanam di lahan seluas 10 hektare. PT Tani Karya Sejahtera memasok pupuk dan pestisida. Seluruh produksi kentang petani akan ditampung oleh PT Indofood dan benih dibayar oleh petani kepada PT Indofood ketika panen¹⁸. Praktik ini disebut oleh Dirjen Hortikultura sebagai “Skema Korporasi Kemitraan antara petani dan investor”. Petani sebagai sumber daya manusia merupakan pemilik lahan, sekaligus sebagai tenaga kerja produktif. Selanjutnya, investor dibutuhkan sebagai *off taker* penyerapan hasil produksi petani dan mampu menyediakan benih, pupuk dan saprodi lainnya agar petani layak di mata bank untuk mendapatkan kredit¹⁹. Dengan demikian, pelaksanaan skema korporasi petani dikontrol oleh korporasi menjadi ‘inklusif *close loop*’ yang persisnya adalah:

¹⁷ Presentasi Arif Rahman, KADIN, dalam JFSS 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=mnwxcxAcaF4>

¹⁸ <https://www.mongabay.co.id/2021/01/24/food-estate-di-humbang-hasundutan-mulai-jalan-bagaimana-keterlibatan-petani/>

¹⁹ <https://www.alinea.id/bisnis/performa-sektor-pertanian-sangat-luar-biasa-b2cyc91dl>

pertanian kontrak, tidak kurang dan tidak lebih. Pada akhirnya, pengaturan negara dalam mengendalikan ‘krisis pangan’ melalui kebijakan *food estate* berbentuk konsolidasi modal di sektor industri pangan.

10.4 Kesimpulan: Pandemi dan Paradoks Rezim Pangan Korporat

Situasi pandemi di Indonesia telah berdampak pada kesulitan tataniaga di tingkat petani karena kendala rantai pasok yang panjang, dan nilai transaksi yang menurun. Akan tetapi, persoalan ini disambut oleh kebijakan peningkatan produksi, bukan kebijakan tataniaga yang memudahkan produsen kecil, kelompok rentan dan golongan miskin. Skema korporasi petani dipraktikkan sebagai kontrol produksi komoditas oleh korporasi melalui kontrak (*contract farming*) atau disebut di masa Reformasi sebagai ‘kemitraan’ dan di masa Orde Baru disebut pola ‘bapak angkat’. Jadi, alih-alih memperbaiki tataniaga untuk mempermudah pangan segar bergizi, sehingga produsen dan konsumen mampu menjangkau pangan layak secara merata, mampu meningkatkan imun untuk melawan wabah, ternyata kebijakan pangan Indonesia disandera oleh hegemoni korporasi (*corporate capture*) untuk memproduksi pangan masal, murah, kalori tinggi, rendah gizi yang akan menggempukkan rantai nilai global. Hal ini terjadi karena Indonesia terikat dalam rezim pangan internasional melalui ragam perjanjian dagang multilateral dan bilateral yang mengharuskan komoditas pangan diperdagangkan secara bebas. Dengan kata lain, kebebasan pasar sesungguhnya semu, karena bentuknya justru sebuah keharusan untuk masuk ke dalam rantai nilai global dengan mengangkut petani kecil ke dalamnya demi menanggung risiko dari finansialisasi kapital pangan.

Keharusan pasar (*market imperative*) pada akhirnya, adalah panglima dari kepengaturan sistem pangan di Indonesia. Sebabnya, kepengaturan negara terhadap sistem pangan Indonesia di masa pandemi sekadar memperluas model penguasaan rantai pasok hulu-hilir oleh korporasi agribisnis pangan nasional dan transnasional, tanpa memeriksa dengan kritis sejauhmana model ini bisa merentankan kelompok rentan. Paradoks dari kondisi tersebut adalah pandemi di Indonesia telah dijadikan legitimasi bagi reproduksi

model globalisasi pangan yang sebetulnya menjadi akar soal dari kemunculan pandemi itu sendiri. Dengan kata lain, sistem pangan Indonesia mengidap kontradiksi internal, menyelesaikan krisis dengan menghasilkan potensi krisis. Belum ada data yang bisa diacu untuk melihat kecenderungan angka kelaparan dan malnutrisi semasa pandemi, tapi tanpa memutus rantai masalah pada sistem pangan, maka persoalan kekurangan gizi dan kelaparan akan terus hadir seturut kemiskinan dan ketimpangan yang direproduksi oleh globalisasi pangan.

Daftar Pustaka

- Lodhi AH. 2013. *Hungry for Change, Farmers, Food Justice and the Agrarian Question*. Halifax, CA: Fernwood Publishing.
- Amaliyah R. 2013. Mengimpor Kedelai: Perlukah Terus Dilanjutkan?. Pengaruh Liberalisasi Perdagangan terhadap Perkedelaaian Indonesia. *Global & Policy*. 1(1).
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Hortikultura 2019. Jakarta: BPS
- Clapp J. 2014. Financialization, distance and global food politics. *The Journal of Peasant Studies*. DOI: 10.1080/03066150.2013.875536
- Clapp J. 2016. *Food*. Cambridge. UK: Polity Press
- Clapp J, Moseley WG. 2020. This food crisis is different: Covid-19 and the fragility of the neoliberal food security order. *The Journal of Peasant Studies*. DOI: 10.1080/03066150.2020.1823838.
- Dick H, Houben VJH, Lindblad JT, Wie TK. 2002. The emergence of a National economy, An economic history of Indonesia, 1800–2000. NSW Australia, Hawaii US: Allen&Uwwin, University of Hawaii Press.
- De Schutter O, Cordes KY. 2011. Accounting for Hunger: The Right to Food in the Era of Globalisation. Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing
- De Schutter O. 2017. The political economy of food systems reform. *European Review of Agricultural Economics*. pp. 1–27.

- FAO. 2020a. Addressing the impacts of Covid-19 in food crises April–December 2020: FAO’s component of the Global Covid-19 Humanitarian Response Plan. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca8497en>
- FAO. 2020b. Addressing inequality in times of Covid-19. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca8843en>
- Friedmann H. 1987. The family farm and the international food regimes. In *Peasants and peasantsocieties*, 2nd ed. T. Shanin, 247–58. Oxford: Basil Blackwell
- Friedmann H. 2016. Commentary: Food regime analysis and agrarian questions: widening the conversation. *The Journal of Peasant Studies*. 43(3): 671–692.
- Friedmann, H. & McMichael, P. 1989. Agriculture and the state system: The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present. *Sociologia Ruralis* 29(2): p. 93–117.
- Gibson L. 2017. Towards A More Equal Indonesia. OXFAM Briefing Paper- February 2017. <https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-indonesia>
- Godecke T, Stein AJ, Qaim M. 2018. The global burden of chronic and hidden hunger: Trends and determinants. *Global Food Security*. 17:21-29. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.03.004>
- Goodman D, Watts M. 1997. *Globalising Food Agrarian Questions and Global Restructuring*. Routledge: London New York
- Gregorio GB, Ancog RC. 2020. Assessing the Impact of the Covid-19 Pandemic on Agricultural Production in Southeast Asia: Toward Transformative Change in Agricultural Food Systems. *Asian Journal of Agriculture and Development*. 17(1). <https://doi.org/10.37801/ajad2020.17.1.1>
- Hospes O, Brons A. 2016. Food Systems Governance: a systematic literature review, dalam Kennedy, A & J. Liljeblad. 2016. *Food Systems Governance: Challenges for justice, equality and human rights*. London & New York: Routledge

- Isakson SR. 2014. Food and finance: the financial transformation of agro-food supply chains. *Journal of Peasant Studies*. 41(5): 749-775. DOI:1.1080/03066150.2013.874340
- Kementrian Pertanian RI. 2019. Grand Design Pengembangan Korporasi Petani. Jakarta: Sekjen Kementan RI.
- Kementrian Pertanian RI. 2020. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah. Jakarta: Sekjen Kementan RI.
- Kennedy A, Liljeblad J. 2016. *Food Systems Governance: Challenges for justice, equality and human rights*. London & New York: Routledge.
- Kimura AH. 2013. *Hidden Hunger: Gender and Politics of Smarter Food*. Ithaca: Cornell University Press.
- Leach M, Nisbett N, Cabral L, Harris J, Hossain N, Thompson L. 2020. Food politics and development. *World Development*. 134: 105024. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105024>
- Mintz S. 1985. *Sweetness and Power the Place of Sugar in Modern History*. New York: Penguin Books
- McMichael P. 2020. *Rezim Pangan dan Masalah Agraria*. Yogyakarta: Insist Press.
- Polanyi K. 1944. *The Great Transformation The Political and Economic Origins of Our Time*. NY: Farrar & Reinhart
- Ploeg JD. 2020. From biomedical to politico-economic crisis: the food system in times of Covid-19. *Journal of Peasant Studies*. 47(5): 944–972.
- Quammen D. 2012. *Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic*. New York: W. W. Norton & Company
- Savitri LA, Nurdin I, Pribadi DP. 2020. Merentankan Yang Rentan, Kajian Awal Tentang Kondisi Petani Kediri Dalam Jeratan Rantai Distribusi Pangan Global Semasa Pandemi. Jakarta: FIAN Indonesia, JKPP, Oxfam
- Scott J. 1998. *Seeing Like A State, How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven London: Yale University Press.

- Sen A. 1997. *Hunger in Contemporary World*. Discussion Paper DEDPS/8. November 1997. The Suntory Centre for Economics and Related Disciplines. London School of Economics and Political Science.
- Shiva V. 2020. *Ecological Reflections on the Coronavirus*. PostGrowth Institute, 23 Maret 2020. <https://medium.com/post-growth-institute/ecological-reflections-on-the-coronavirus-93d50bbfe9db>
- Steffen W, Richardson K, Rockström J, Cornell SE, Fetzer I, Bennett EM, Biggs R, Carpenter SR, *et al.* 2017. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *sciencemag.org*, 13 February 2015 Vol 347 Issue 6223.
- Suryahadi A, Izzati R, Suryadarma. 2020. *The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. SMERU Working Paper, April 2020.
- Raeardon T, Bellamare MF, Zilberman D. 2020. *How Covid-19 may disrupt food supply chains in developing countries*, dalam Covid-19 and global food security, IFPRI.
- Tauchid M. 2010. *Masalah Agraria*. Yogyakarta:STPN Press
- Eng P. 2014. *International Food Aid to Indonesia, 1950s-70s*. Working Paper No. 2014/19, September 2014. Arndt-Corden Department of Economics, Crawford School of Public Policy, ANU College of Asia and the Pacific.
- Wallace R. 2016. *Big Farms Make Big Flu*. New York:Monthly Review Press
- World Food Program. 2020. *Global Hunger Report 2020*. WFP, New York.
- World Bank. 2016. *Indonesia's Rising Divide*. World Bank, Jakarta. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24765>



11. KOMUNIKASI KRISIS: MEMBANGUN GERAKAN SOSIAL UNTUK MEMERANGI INFODEMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Djuara P. Lubis

Abstrak

Awal 2020, ruang publik dipenuhi narasi perih Virus Corona yang menyebar secepat penyebaran virus corona, dan menjadi infodemi yang akhirnya mengganggu penanganan virus ini. Infodemi menyangkut sumber dan cara penanganan virus menyebar melalui berbagai media, terutama media sosial. Faktor yang memperparah infodemi di Indonesia antara lain: rendahnya literasi digital, dampak keterbelahan masyarakat sebagai residu Pemilihan Umum 2019, dan gejala “matinya kepakaran” yang diakibatkan oleh media sosial. Di masa depan, menghadapi berbagai disrupsi yang pasti akan terjadi, diperlukan tiga hal penting yaitu kepercayaan kepada sains dan pakar, kepercayaan kepada pemerintah, dan kepercayaan kepada media. Sistem informasi krisis harus dibangun dengan memperkuat kapasitas komunikasi pemerintah, sistem media yang andal, dan masyarakat yang cerdas media. Dengan demikian, setiap disrupsi dapat diatasi dengan kerja sama pemerintah dan gerakan sosial.

11.1 Pendahuluan

Tahun 2018 dan 2019, ruang publik dipenuhi dengan narasi yang berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Revolusi yang dipicu teknologi digital mendisrupsi seluruh aspek kehidupan, dan dikatakan situasi baru ini penuh VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*). Tak terhitung jumlah pertemuan dan tulisan ilmiah serta perbincangan yang bersinggungan dengan tema ini. Memang, hampir tidak ada aspek kehidupan

yang tidak terdisrupsi oleh teknologi digital (Tapscott, 2013). Hampir semua kelembagaan masyarakat beradaptasi dengan situasi ini; bisnis, pendidikan, politik, organisasi, sampai keluarga. Entitas yang tak mampu beradaptasi banyak yang kolaps, di tengah-tengah munculnya optimisme yang hebat di tengah revolusi ini. Schwab (2019) mendaftarkan banyaknya dampak positif dan negatif dari revolusi ini. Bahkan, dia membuat prakiraan kapan kedigdayaan masing-masing komponen revolusi industri 4.0 ini akan terwujud.

Awal 2020, narasi berubah total dengan hadirnya virus corona yang melanda dunia. Virus 2019-*novel coronavirus* (disingkat 2019-nCoV dan kemudian disebut COVID-19), yang “lahir” di China di akhir tahun 2019, berhasil mengambil alih narasi di Indonesia bahkan di dunia. Ruang publik dijejali dengan informasi seputar COVID-19. Tak terhitung jumlah *gigabyte* informasi seputar virus corona menyebar, seolah berlomba dengan penyebaran virus itu sendiri. Tragisnya, banyak informasi itu yang tidak benar (khususnya dis-informasi dan mal-informasi), sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakannya sebagai *infodemic*. Beberapa negara menyatakan bekerja sama untuk memerangi infodemi ini, karena merugikan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19¹. Keprihatinan ini juga diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Pernyataan bersama beberapa negara ini antara lain menyatakan “*as COVID-19 spreads, a tsunami of misinformation, hate, scapegoating and scare-mongering has been unleashed*”². Beberapa lembaga internasional (WHO, UN, UNICEF, UNDP, UNESCO, UNAIDS, ITU, UN Global Pulse, dan IFRC) juga mengeluarkan pernyataan bernada serupa.³ Mereka menyatakan infodemi sebagai informasi salah yang melimpah, baik *online* maupun *offline*, yang disengaja disebarkan untuk melemahkan respons kesehatan masyarakat.

¹ Dalam dunia jurnalistik, dikenal ada tiga macam informasi yang salah, yaitu (a) mis-informasi yaitu salah informasi yang tidak disengaja: misalnya salah judul foto, salah mengutip angka, salah menerjemahkan, (b) dis-informasi, yaitu upaya sengaja memanipulasi konten audiovisual, bermaksud membuat teori konspirasi dan rumor, dan (c) mal-informasi yaitu Publikasi sengaja informasi salah untuk pribadi atau organisasi. Dengan sengaja mengubah konteks, waktu dari isi sebenarnya

² Cross-Regional Statement on “Infodemic” in the Context of COVID-19 https://onu.delegfrance.org/IMG/pdf/cross-regional_statement_on_infodemic_final_with_all_endorsements.pdf

³ <https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-COVID-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation>

Dis-informasi dan mal-informasi dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental orang; meningkatkan stigmatisasi; mengancam kesehatan; dan mengarah pada ketaatan yang buruk terhadap langkah-langkah kesehatan masyarakat, sehingga mengurangi keefektifannya dan membahayakan kemampuan negara untuk menghentikan pandemi. Sampai saat ini, infodemi menyebar secepat penyebaran virus corona.

Maraknya infodemi ini di seluruh dunia juga dilaporkan oleh Zhang *et al.* (2021). Penelitian mereka menunjukkan bahwa informasi yang benar membuat khalayak semakin mengerti tentang COVID-19 dan lebih arif menanggapi. Namun sebaliknya, informasi yang salah membuat khalayak tidak percaya akan krisis yang diakibatkan oleh COVID-19.

Sama seperti perkembangan teknologi digital, tak dapat dipungkiri, penyebaran virus corona mendisrupsi kemanusiaan di seluruh dunia. Konon, dunia pernah mengalami pandemi yang diakibatkan flu Spanyol tahun 1918 sampai tahun 1920. Virus ini menewaskan 40 juta atau 2.1 persen penduduk dunia itu (Barro, Ursua, dan Wang, 2020). Namun sayangnya, penduduk dunia saat ini tidak mempunyai ingatan kolektif tentang pandemi itu. Akibatnya, seluruh dunia saat ini “gugup” menghadapi virus corona tersebut; ada yang tidak percaya, dan banyak pula yang ketakutan, akibat ketidakpastian dan besarnya perubahan pola hidup yang diakibatkannya.

Kegugupan menghadapi pandemi ini diperparah oleh infodemi yang tak terbendung. Berbagai informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media baru sampai kepada masyarakat. Sayangnya, banyak informasi itu yang salah, bahkan menyesatkan. Alih-alih membantu masyarakat beradaptasi menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*) banyak informasi itu yang malah membuat penanganan pandemi memburuk. Dengan kata lain, sebenarnya dunia saat ini mengalami disrupsi dengan sumber berganda; satu diakibatkan oleh revolusi industri 4.0 dengan berbagai kehebatannya menyebarkan informasi dan satu lagi diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Infodemi merupakan “buah” dari kedua sumber disrupsi ini, teknologi komunikasi digital menghantar mal-informasi dan mis-informasi seputar pandemi virus corona. Hasilnya luar biasa mengguncang.

Bagian berikut tulisan ini memaparkan beberapa dis-informasi dan mal-informasi yang beredar di Indonesia seputar COVID-19. Selanjutnya dianalisis mengapa informasi tersebut mudah beredar dan dipercaya. Bagian terakhir, dibahas model komunikasi krisis dengan segala prasyarat yang menyertainya. Model ini diperlukan agar masyarakat mempunyai resiliensi yang tinggi dan lebih pintar beradaptasi dengan berbagai disrupsi yang terjadi di masa depan.

Tulisan ini dilakukan melalui penelusuran pustaka, bukan berdasarkan penelitian lapangan. Keterbatasan lain dari tulisan ini adalah banyak sumber informasi adalah media sosial dan surat kabar *mainstream*. Tidak semua sumber ini dapat disitasi pada tulisan ini, karena bersumber dari media sosial, baik teks maupun audio visual.

11.2 Berbagai Infodemi

Sejak ancaman virus corona merebak, ada berbagai mal-informasi dan dis-informasi tentang virus ini menyebar. Informasi ini menyebar liar melalui media *mainstream* maupun media sosial dan akhirnya menjadi perbincangan umum. Di bawah ini disebutkan beberapa di antaranya.

Sejak awal, banyak yang menyatakan virus ini tidak ada alias rekaman fiktif manusia saja. Pendapat ala teori konspirasi ini menyatakan bahwa corona adalah rekayasa negara asing untuk memaksa orang tinggal di rumah. Ada pula yang menyatakan, bahwa ini adalah konspirasi negara yang tidak menginginkan perilaku beragama berkembang, upaya menakut-nakuti dilakukan sehingga orang tidak beribadah ke rumah ibadah (tidak berkerumun), tidak bersalaman (karena harus berjarak fisik) dan tidak saling senyum (karena pakai masker). Di sudut lain, disebarkan pula informasi bahwa umat beragama tidak perlu takut terhadap COVID-19 karena Tuhan akan melindungi umat-Nya. Ada pula yang menyatakan bahwa virus ini adalah “Pasukan Allah” yang dikirimkan untuk menghukum orang yang tidak patuh pada Tuhan.

Infodemi menyangkut pengobatan juga tak kalah banyaknya. Di tengah-tengah upaya pengobatan secara ilmiah, banyak informasi pengobatan yang ditawarkan. Ada yang menawarkan minyak kayu putih, ada yang menawarkan menghirup uap air panas dan sebagainya. Belum ada kajian akademik yang memadai yang membuktikan keampuhan terapi ini. Informasi metode

pengecahan dengan banyak mengkonsumsi buah juga banyak beredar. Tentu upaya ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang menyesatkan adalah dianjurkan banyak mengkonsumsi buah alpukat, yang katanya pH-nya 14,7. Informasi ini dikabarkan ditulis oleh Dr. Ir. Sri Nurdianti (ketika itu menjabat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB). Beliau berkali-kali membantah bahwa itu tulisannya, tetapi informasi itu terus-menerus disebarakan melalui berbagai media sosial.

Informasi lain yang cukup banyak dipertentangkan adalah soal waktu berjemur. Diyakini, berjemur akan meningkatkan Vitamin D di dalam tubuh dan ini akan meningkatkan imunitas tubuh. Sebagian ahli berpendapat bahwa berjemur yang paling baik adalah sebelum jam 10 pagi. Namun, ahli lain berpendapat bahwa berjemur yang paling baik adalah setelah jam 10. Perbincangan banyak menyangkut manfaat dan akibat sinar ultraviolet yang dihasilkan sinar matahari. Akibat negatif dari waktu berjemur yang salah antara lain dapat mengakibatkan kulit gosong bahkan kanker kulit. Polemik ini berakhir setelah Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia melakukan kajian dan mengumumkan bahwa waktu berjemur yang baik harus memperhatikan: ketinggian permukaan dan garis lintang zona atau daerah Musim, waktu, dan cuaca atau kondisi awan Aerosol ozon, tipe kulit UV Index (UVI) (Adhi, 2020). Penjelasan ini pasti tidak mudah dimengerti oleh awam.

Berita salah tentang vaksinasi tak kalah banyaknya. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah berita yang menyatakan bahwa vaksin adalah salah satu cara untuk mengendalikan umat manusia. Berita itu menyatakan bahwa vaksin dititipi *chip*. Semua orang yang divaksin akan diketahui gerak-geriknya oleh pihak yang mengendalikan chip tersebut. Informasi ini dikemas sedemikian rupa dengan teknologi yang baik, bahkan mempergunakan dalil agama, yang biasanya berefek besar pada masyarakat. Akhir Mei 2021 muncul informasi salah tentang vaksin yang seolah mengandung *micro chip*. Katanya, di lokasi bekas suntikan mengandung magnet, dan koin logam bisa menempel di sana. Berita ini semula beredar di AFP, namun ada pula video versi Indonesia.⁴

⁴ Dreaan.co.id. Santer hoaks magnet menempel di bekas suntikan vaksid COVID-19. Diunduh 28 Mei 2021

Ada pula dis-informasi dan mal-informasi tentang vaksin asal China, yang adalah vaksin yang pertama dipakai di Indonesia. Katanya, Arab Saudi tidak mengakui keterandalan vaksin ini, dan mereka tidak mengizinkan orang masuk ke Arab Saudi kalau hanya menerima vaksin ini sehingga calon jemaah haji asal Indonesia tidak akan diterima tahun 2021 ini. Katanya, ini merupakan kegiatan terencana untuk menghalangi orang Indonesia beribadah haji.

Pakar Pulmonologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ika Trisnawati mengatakan, selama pandemi COVID-19 banyak beredar hoaks di media sosial. Ia mendaftar ada 23 berita hoaks yang ada di media sosial dan menjawab semua berita hoaks ini⁵.

11.3 Infodemi seputar Pandemi: Ada Apa di Indonesia?

Mengapa infodemi menjalar demikian cepat? Seperti diakui berbagai lembaga di dunia, fenomena ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin meluasnya infodemi ini di Indonesia. Pada bagian ini, fenomena pandemi dibahas dengan memperhatikan analisis perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

⁵ Dua puluh tiga informasi hoax yang beredar di masyarakat adalah (1) Virus tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan (2) Berendam air panas uap panas dari pengering tangan dapat membunuh virus COVID-19 (3) Mengkonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19 (4) Daerah yang panas atau daerah bersalju dapat membunuh virus COVID-19 (5) Menggunakan sarung tangan karet mengurangi risiko penularan (6) Minum antibiotik dapat membunuh virus (7) Virus COVID-19 dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk (8) Hanya orang dewasa yang berisiko terinfeksi COVID-19 (9) Corona merupakan virus yang paling berbahaya yang pernah ada (10) Menyemprotkan alkohol/klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus COVID-19 (11) Virus COVID-19 dapat menular melalui barang produksi impor (12) Hewan peliharaan dapat menyebarkan virus COVID-19 (13) Pasien yang pernah terjangkit COVID-19 selamanya akan memiliki virus (14) Hanya hazmat dan masker N95 yang dapat melindungi Virus Corona (15) Pengering tangan atau sinar UV membunuh Virus Corona (16) Termometer dapat mendiagnosis COVID-19 (17) Pasien COVID-19 tidak dapat tertular/terinfeksi kembali karena sudah memiliki kekebalan (18) Minum alkohol dapat menyembuhkan infeksi Virus Corona (19) Berkumur dengan air garam dapat mengobati COVID-19 (20) Minum kayu putih baik diminum langsung atau dicampur air hangat dapat meredakan gejala COVID-19 (21) Minum *mecobalamin* untuk mengatasi anosmia sebagai gejala COVID-19 (22) Lianhua Qingwen (obat herbal) dapat membantu mengurangi perburukan kondisi pasien COVID-19 dan (23) Mutasi virus COVID-19 sangat mematikan

Pertama: masalah rendahnya literasi digital. Cukup menggembirakan, pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 202,6 juta orang atau sekitar 73,7 persen dari total penduduk, meningkat 27 juta dibanding tahun 2020⁶. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar teknologi digital ini dipergunakan untuk hiburan dan media sosial. *Platform* yang paling banyak dipakai adalah *youtube*, *facebook*, *twitter* dan media sosial lainnya. Masih sangat sedikit warga Indonesia yang memanfaatkan media sosial untuk keperluan produksi.

Di balik angka kuantitatif yang menggembirakan ini, ternyata literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah. Pada tahun 2017, dari 176 negara yang diukur, ICT Index Indonesia berada pada posisi 111. Iceland, Korea, dan Swiss menempati posisi terbaik. Posisi Indonesia ini berada di bawah Singapura (29), Brunei (53), Philippines (108), Vietnam (101).

Salah satu “bahaya” dari orang yang rendah literasinya adalah mudahnya orang tersebut membagi informasi walaupun dia tidak memahami kebenaran informasi tersebut.⁷ Dari 20 konsep kunci media baru, salah satunya adalah *hype* (Flew, 2009). Orang ingin melihat sesuatu yang sensasional atau heboh di media sosial, dan sejalan dengan itu, orang ingin menjadi yang pertama menyebarkan yang sensasional dan heboh melalui media sosial yang dimilikinya. Kemampuan digital yang dimilikinya baru pada tahap mengakses informasi, dan tanpa melakukan proses seleksi, paham, analisis, verifikasi, dan evaluasi, ia langsung mendistribusikan informasi tersebut. Inilah yang menyebabkan *hoax* sangat mudah beredar pada masyarakat dengan tingkat aksesibilitas digital tinggi tetapi literasi digital rendah. Selain literasi digital, literasi umum orang Indonesia juga tergolong rendah, terutama dalam membaca. Akibatnya, berita *hoax* mudah beredar dan dipercaya.

Situasi ini diperparah dengan rendahnya keadaban warga internet (biasa disebut *netizen*) Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Microsoft menunjukkan bahwa *digital civility index* Indonesia tergolong rendah, bahkan terburuk di

⁶ Kompas <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>. Diunduh 19 Mei 2021.

⁷ Urutan literasi digital dalam informasi adalah: mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan akhirnya berkolaborasi

Asia Tenggara. Survei ini menyangkut perilaku berselancar di internet dengan aplikasi media sosial. Perilaku ini menyangkut penyebarluasan berita bohong, ujaran kebencian, diskriminasi, *cyberbullying*, *trolling* atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, *micro-aggression* atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal hingga ke penipuan, *doxing* atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi.⁸

Kedua, situasi masyarakat Indonesia yang “terbelah” pasca pemilihan umum 2019. Tak dapat dipungkiri, Pemilu 2019 masih menyisakan “keterbelahan” pada masyarakat Indonesia. Dalam situasi terbelah (karena persaingan politik) sering muncul *filter bubbles*, di mana orang menyaring informasi bukan karena analisis objektif, tetapi karena sumber informasi adalah kawan sealirannya. Muncullah gejala *echo chambers*, di mana orang hanya mau mendengar suara yang sesuai dengan suaranya. Dalam suasana terbelah ini masyarakat terbelah menjadi “kita” dan “mereka”. Pada masyarakat seperti ini, sering sekali informasi tidak dinilai secara rasional dan kritis. Informasi dinilai dari siapa yang mengemukakannya dan ada di pihak mana yang berpendapat tersebut. Inilah yang dikenal dengan gejala *post truth*, sebuah kata yang menjadi sangat populer sejak tahun 2016 di Amerika Serikat (saat pemilihan presiden) dan di Inggris (saat rakyat Inggris harus memilih tetap di atau keluar dari Uni Eropa).

Di Indonesia, corona muncul tak lama setelah Pemilu 2019 selesai, dan keterbelahan parah ini belum diperbaiki. Banyak dis-informasi dan mal-informasi dibangun dalam rangka saling serang antar golongan tadi. Ketika pemerintah mengeluarkan informasi (kebijaksanaan, berita, dan sebagainya) sering ada “perlawanan” dari pihak yang tak sejalan dengan pemerintah. Pemerintah sendiri mengeluarkan pernyataan yang “*blunder*”. Perang informasi ini menjadi semakin memburuk, karena pemerintah juga tidak mempunyai strategi komunikasi krisis yang baik, bahkan mengeluarkan informasi yang keliru. Penelitian LP3ES menunjukkan ada 37 pernyataan pejabat pemerintah yang “*blunder*” tentang COVID-19 (Mawardi, 2020)

⁸ Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara (voaindonesia.com)

Ketiga, matinya kepakaran (*death of expertises*) suatu istilah yang diperkenalkan oleh Nichols (2018). Media sosial memungkinkan setiap orang menjadi “pakar”. Karena mengalami sesuatu, seseorang dapat bercerita di media sosial yang dimilikinya dan informasi ada kemungkinan “pengalaman” tersebut menjadi viral dan pembacanya percaya akan kebenaran pengalaman itu. Padahal, mungkin saja, pengalamannya tersebut merupakan peristiwa unik yang belum teruji kebenarannya. Pada hakikatnya, kepakaran merupakan kombinasi dari tiga unsur yaitu pendidikan, pengalaman dan saling asah di antara *peer group* (Nichols, 2018). Namun, media sosial membuat seseorang yang mempunyai pengalaman (yang belum teruji generalisasinya) menjadi pakar karena kepiawaiannya bertutur dan menulis.

Matinya “kepakaran” ini diperkuat pula berbagai media massa (konvensional maupun digital) yang tidak menerapkan prinsip jurnalisme dengan benar. Demi *hype*, ada saja media massa yang mewawancarai seseorang pakar di bidang tertentu untuk suatu isu yang bukan menjadi bidangnya. Demi informasi yang *hype* tak jarang media massa memuat informasi yang bukan berasal dari sumber yang kompeten di bidangnya.⁹ Jurnalis memburu seorang ahli berpendapat bukan pendapat seorang ahli (Arifianto, 2020). Langkahkah penyebaran dis-informasi dan mal-informasi itu.

11.4 Mengajak Masyarakat Beradaptasi Menghadapi Masalah Kompleks

Dari analisis di atas, dapat diketahui ada tiga hal yang berkelindan seputar infodemi dalam pandemi di Indonesia, yaitu kompleksitas masalah virus corona dan penanganannya, masyarakat Indonesia yang “terbelah” sehingga *trust* menjadi rendah, serta, yang membuat masalah lebih kompleks, arus informasi yang tak terkendali yang menyertai kompleksitas tersebut.

⁹ Contoh dalam hal ini adalah opini seorang ahli ekonomi tentang “*thermo gun*” yang dipakai mengukur suhu orang yang masuk ke fasilitas umum. Katanya, ia tak mau diukur suhunya dengan alat ini, karena sinar laser yang dikeluarkan alat ini dapat merusak otak. Juli 2021 khalayak dikejutkan oleh seorang dokter yang menyatakan COVID-19 tidak ada. Kata dia, yang dinyatakan sebagai kena infeksi COVID-19 hanyalah orang yang stress dan kematian adalah disebabkan kecerobohan paramedis yang menanganinya.

Meminjam istilah VUCA, pelajaran pertama dari Pandemi COVID-19 ini adalah kompleksitas (*complexity*) masalah dan ketidakpastian (*uncertainty*). Kompleksitas masalah (dari mulai penyebab sampai cara mengendalikan), membawa banyak konsekuensi. Antara lain, pertama, banyak orang berspekulasi tentang sebab-musabab penyakit ini, termasuk mempergunakan teori konspirasi. Akibatnya, kebijaksanaan pemerintah dalam menangani masalah ini sering berubah-ubah.¹⁰

Perubahan berciri cepat, tak terduga, dan berisiko besar akan terus terjadi sebagai konsekuensi perubahan pesat teknologi (Schwab, 2020). Bahkan tanggal 6 Juli 2021, Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa penyakit zoonosis seperti COVID-19 ini akan sering muncul di masa yang akan datang (Arif, 2021). Karena itu, setiap entitas harus terlatih beradaptasi dengan perubahan itu agar tidak kalah. Tak perlu diragukan, kemampuan adaptasi merupakan kekuatan seleksi alam dari zaman ke zaman. Entitas yang tidak mampu beradaptasi akan lenyap.

Belajar dari sejarah peradaban, Harari (2020) menyatakan ada dua pilihan strategi menghadapi penyebaran dan pengobatan covid, yaitu melakukan pengendalian dan *monitoring* terhadap semua warga atau memberdayakan warga untuk mengendalikan dirinya sendiri. *Monitoring* terpusat data biometrik dan aktivitas warga negara secara digital dapat dilakukan dengan rekayasa teknologi menyeluruh. Pendekatan ini (barangkali) lebih banyak bersifat *social engineering* (Everett, 2006). Artinya, negara mengerahkan kekuatannya untuk merekayasa masyarakat agar menuruti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Strategi ini membutuhkan biaya yang besar dan beberapa pertanyaan etis. Penolakan (bahkan bentrok) atas “aturan” pemerintah tentang cara menghindari penyebaran COVID-19 menunjukkan sulitnya melakukan rekayasa sosial. Pelaksanaan vaksinasi berpola *social engineering* yang terpusat, membuat calon penerima vaksin berkerumun dan harus menunggu beberapa jam sebelum mendapat vaksinasi.

¹⁰ Pada dasarnya perubahan kebijaksanaan ini tidak masalah, mengingat perubahan ancaman penyakit ini dan perubahan pengetahuan tentang virus. Namun perubahan ini menjadi amunisi bagi yang tidak menyukai pemerintah untuk menyerang kebijaksanaan ini, sebagai akibat keterbelahan masyarakat Indonesia pada akibat Pemilu 2019.

Strategi yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat yang dalam terminologi Everett (2006) disebut sebagai gerakan sosial. Pada awal pandemi COVID-19 di Indonesia, gerakan sosial mengatasi penyebaran virus ini cukup hebat. Berbagai komunitas melakukan *lock-down* di wilayahnya, ada yang membuat “ruang disinfektan” bagi orang dan mobil yang masuk ke wilayahnya, dan membagi masker bagi pelintas. Banyak pula komunitas dan pribadi yang sukarela mengumpulkan dan membagi *sembako* bagi anggota masyarakat yang kesulitan. Di saat angka serangan COVID-19 meningkat di bulan Juli 2021, beberapa komunitas membuka dapur umum melayani warga yang isolasi mandiri, karena tak semua penderita dapat ditampung di pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Ada pula warga yang berinisiatif membuat peti mati dan menyumbangkannya ke rumah sakit yang sudah kewalahan. Menarik, gerakan ini banyak terjadi pada komunitas lintas ikatan primordial. Berita dan foto tentang gerakan ini banyak beredar di media sosial. Gerakan sosial ini tidak banyak diinisiasi oleh pemerintah tetapi berjalan di akar rumput. Dan memang, pemerintah tidak perlu “mengatur” gerakan ini, hanya perlu mempersambungkan simpul-simpul gerakan sosial ini. Penyambungan ini sangat penting agar gerakan sosial semakin membesar dan dapat dimanfaatkan komunitas yang lebih luas.

Untuk mewujudkan strategi pemberdayaan masyarakat, Harari (2020) menyatakan diperlukan tiga komponen penting, yaitu kepercayaan (*trust*) kepada sains, kepercayaan kepada pemerintah, dan kepercayaan kepada media. Untuk situasi Indonesia diperlukan strategi khusus, karena ketiga kepercayaan ini sulit diwujudkan saat ini.

***Trust* kepada sains dan menghidupkan kepakaran**

Salah satu masalah dalam penanganan Covid di Indonesia adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sains. “Matinya kepakaran” yang disebabkan oleh salahnya pakar (Nichols, 2019) dapat dihindarkan dengan kerja sama erat antar pakar. Tak dapat dipungkiri, sering kepercayaan awam terhadap sains dan pakar menjadi pudar karena

pakar saling menegasikan¹¹. Dalam masyarakat ilmiah, proses ini harus berlangsung demi kemajuan ilmu, namun awam akan menjadi bingung dengan keterangan yang simpang siur.

Kerja sama antar pakar juga berarti pendekatan transdisiplin dalam menelaah kompleksitas. COVID-19 (dan masalah penyakit menular di kemudian hari) merupakan fenomena kompleks, dan semakin kompleks. Mengikuti nasihat Nichols (2019), para pakar dengan pendekatan transdisiplin ini harus bersuara mengimbangi narasi mal-informasi dan disinformasi yang beredar.

Percaya kepada media dan perlunya literasi digital

Informasi membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan. Bagaimana informasi yang bersifat *negentropy* sampai ke masyarakat? Dalam kasus COVID-19, media aliran utama sebenarnya cukup gencar mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Arifianto (2020) menyatakan media aliran utama banyak membuat konten bersama untuk disiarkan melalui berbagai *platform* yang mereka miliki (audio, visual, maupun audio-visual). Konten ini tentu kebenarannya sudah diuji dengan kaidah jurnalistik. Namun, saat ini peranan media arus utama sudah diambil alih oleh media sosial, yang isinya belum tentu benar. Alhasil, masyarakat lebih banyak menerima berita yang kebenarannya diragukan. Dua program yang harus dilakukan adalah literasi digital dan pemberdayaan *internet opinion leader*. Literasi digital Indonesia tergolong sangat rendah.

Percaya kepada Pemerintah dan Gerakan Sosial

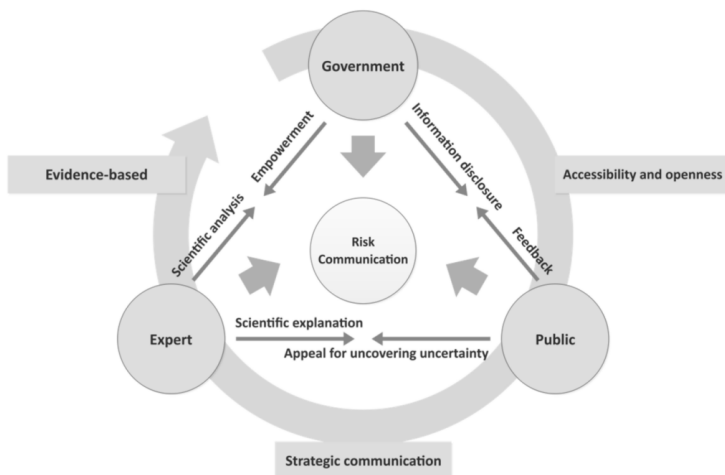
Kepercayaan kepada pemerintah perlu dibangun dari tingkat bawah. Sejarah Indonesia menunjukkan banyak program yang berbentuk gerakan sosial cukup berhasil. Pelayanan sosial berbasis komunitas, seperti Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga,

¹¹ Polemik antar pakar seputar Covid di Indonesia sangat mencengangkan. Selain saling bantah antar pakar, antar lembaga pemerintah pun mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan. Contoh yang paling populer adalah perihal vaksin dan penggunaan *ivermectin* sebagai obat Covid. Pertentangan ini membuat komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah berkurang efektivitasnya.

Rukun Warga dan sebagainya cukup efektif menjadi motor penggerak. Saling percaya (*trust*) masih sangat kuat pada lembaga kemasyarakatan berbasis akar rumput ini. Dalam penanganan COVID-19, banyak kasus menunjukkan efektivitas gerakan sosial berskala RT/RW; wargalah yang mengedukasi, melakukan kontrol sosial, dan bahkan membantu anggota komunitas sehubungan dengan COVID-19. Pendekatan partisipatif ini juga dibuktikan oleh Wild (2021).

Membangun Sistem Komunikasi Krisis

Berdasarkan pengalaman menghadapi krisis COVID-19 di Wuhan, Zhang (2020) menawarkan sistem komunikasi krisis dengan tiga entitas pelaku, seperti terlihat pada gambar, yaitu pemerintah, ahli, dan publik. Apakah model ini dapat diterapkan di Indonesia? Dengan beberapa penekanan seperti yang telah dikemukakan di atas, model ini dapat diterapkan.



Gambar 15. Sistem Komunikasi untuk Komunikasi Risiko (Zhang, 2020)

Pemberdayaan Ilmuwan

Seperti telah dikemukakan di atas, COVID-19 (dan penyakit lainnya yang mungkin muncul di kemudian hari) adalah persoalan sains bukan persoalan ekonomi dan politik. Karena itu, dasar penyelesaiannya adalah pertimbangan sains, bukan ekonomi atau politik. Untuk

itu, ada beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat lembaga penelitian agar ilmuwan dapat menghasilkan solusi bagi berbagai macam krisis multidimensi yang akan makin sering terjadi di masa depan. Semua pihak perlu mendukung pengembangan lembaga penelitian dari berbagai sisi. Kedua, meningkatkan kerja sama antar ilmuwan. Ilmuwan memperdebatkan berbagai hal di dalam lembaganya. Tak dapat dipungkiri, perbedaan paradigma ilmu yang diyakini ilmuwan akan menghasilkan perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat ini tidak boleh menambah kekalutan dalam krisis. Ketiga, menguatkan sistem komunikasi antara ilmuwan dengan pemerintah (untuk memberi rekomendasi berbasis bukti) dan antara ilmuwan dengan masyarakat (untuk memberi penjelasan yang mengurangi ketidakpastian). Dikaitkan dengan strategi komunikasi yang ditawarkan oleh Bennet (2021)¹², ilmuwan menjadi pihak yang memproduksi ide, tentu ide yang sudah diuji kebenarannya.

Keterbukaan Pemerintah

Teori konspirasi akan selalu muncul pada masa krisis, apalagi pada saat masyarakat terbelah secara politis. Ada pelbagai faktor yang menyebabkan orang percaya pada teori konspirasi, namun teori konspirasi dapat diatasi dengan keterbukaan dan bukti yang terpertanggungjawabkan.

Jaringan Informasi

Memenangkan perang informasi haruslah dengan membangun jaringan informasi. Jaringan sebagai kekuatan menghadapi berbagai persoalan sudah dikemukakan oleh Castle (1998). Pentingnya membangun jaringan komunikasi juga dikemukakan oleh Bennet (2021). Jaringan yang baik akan menyebarkan informasi dengan cepat dan mengimbangi informasi lain yang tidak tepat. Pelibatan *pentahelix* (birokrasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi bisnis, akademisi dan praktisi, serta media) diperlukan akan informasi yang diproduksi.

¹² Bennet (2021) menyatakan ada 4 komponen yang penting untuk mengomunikasikan masalah yang kompleks, yaitu *idea production*, *idea packaging*, *networking ideas*, dan *political up takes*

Pentabelix ini juga diperlukan dalam mengelola ide (*packaging ideas*), agar ide yang dihasilkan tadi diproduksi dan disajikan dengan menarik melalui berbagai *platform* media komunikasi.

Semoga kita mempunyai sistem informasi risiko yang baik. Komponennya adalah lembaga ilmiah trans disiplin yang kuat, pemerintah yang terbuka, dan masyarakat yang berliterasi digital baik. Dengan sistem ini, akan terbentuk gerakan sosial berbasis komunitas yang meningkatkan resiliensi komunitas menghadapi berbagai disrupsi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Adhi IS. 2020. Sudahi Perdebatan, Ini Waktu Berjemur yang Tepat Hasil Kajian Perdoski. <https://health.kompas.com/read/2020/05/05/120400368/sudah-perdebatan-ini-waktu-berjemur-yang-tepat-hasil-kajian-perdoski?page=all>.
- Arif A. 2021. Wabah Baru Mengintai. Kompas.
- Arifianto S. 2020. *Covid-19 dalam bingkai media digital*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Barro RJ, Ursúa JF, Dan Weng J. 2020. The Coronavirus and The Great Influenza Pandemic: Lessons From The “Spanish Flu” For The Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity. National Bureau Of Economic Research Cambridge. doi:10.3386/W26866
- Bennet WL. 2021. *Communicating the Future: Solutions for Environment, Economic, and Democracy*. Polity Press. Medford.
- Castells M. 1996. *The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I*. Cambridge, Massachusetts; Oxford, UK: Blackwell.
- Everett MA. 2006. From Social Engineering to Social Movement. (Disertasi). Erasmus University of Rotterdam. Rotterdam.
- Flew T. 2009. *New Media; An Introduction*. Oxford University Press. Australia.
- Harari YN. 2020. *The world after corona virus*. Financial Times.

- Mawardi I. 2020. Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona Versi LP3ES?, <https://news.detik.com/berita/d-4967416/ini-daftar-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-corona-versi-lp3es> diakses 16 Mei 2021.
- Nichols T. 2019. *Matinya Kepakaran*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Prastiwi M. 2020. 23 Berita Hoax Seputar Covid-19 dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM Kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-Covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all>. Diakses 17 Mei 2021.
- Schwab K. 2020. *Revolusi Industri Keempat*. Gramedia. Jakarta
- Tapscott D. 2013. *Grown up digital: Yang muda yang mengubah dunia*. Gramedia. Jakarta
- Xiaoqi Zhang, Zi-Ke Zhang, Wenbo Wang, Donglin Hou, Jiajing Xu, Xinyue Ye & Shengwen Li .2021): Multiplex network reconstruction for the coupled spatial diffusion of infodemic and pandemic of Covid-19. *International Journal of Digital Earth*, DOI: 10.1080/17538947.2021.1888326
- Wild A, Kunstler B, Goodwin D, Onyala S, Li Zhang, Kufi M, Salim W, Musse M, Mohideen M, Asthana M, Al-Khafaji M, Geronimo MA, Coase D, Chew E, Micallef E, Skouteris H. 2021. Communicating Covid-19 health information to culturally and linguistically diverse communities: insights from a participatory research collaboration. *Journal of Sax Institute*. doi.org/10.17061/phrp3112105
- Zhang L, Huijie L, Chen K. 2020. Effective Risk Communication for Public Health Emergency: Reflection on the Covid-19 .2019-nCoV) *Outbreak in Wuhan, China. Healthcare*. 8.1. DOI:10.3390/healthcare8010064

12. EKONOMI TEKS BOOK MENINGGALKAN AKAL, HATI DAN RASA SERTA LAHIRNYA PROBLEM STRUKTURAL & KULTURAL

Teuku Fajar Shadiq

CTSS Fellow

Abstrak

Gerak sejarah peradaban modern diawali dengan terjadinya Revolusi Industri yang terjadi antara abad 18 yang mengintervensi tatanan sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi serta budaya di belahan dunia yang kemudian berlanjut episodenya dengan terjadinya peristiwa besar di Eropa yang memberi dampak signifikan dan eksponensial pada perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dikenang sebagai masa *enlightment* yang kemudian menjadikan kunci sejarah serta merupakan momentum perubahan peradaban di Eropa kemudian menyebar ke seluruh dunia, berdampak pada perubahan paradigma berpikir, sejalan dengan yang di sampaikan oleh Thomas Kuhn seorang sosiolog dari Ohio, US dalam bukunya “*The Structure of Scientific Revolution*”, bahwa aliran ilmu lahir dan berkembang sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan atau teori ditumbangkan oleh pandangan yang baru. Perkembangan paradigma tersebut melahirkan sistem ekonomi dengan *nature* bisnisnya adalah upaya memaksimalkan keuntungan dan memperluas jaringan usaha sehingga kemudian terbentuk hubungan antara penguasa dan pengusaha menjadi satu rantai dan tidak terputus (*depend on*). Ragam kejadian dunia diinterpretasi dengan corak pemikiran beragam pandangan berbasis pandangan keilmuan termasuk kejadian terkini pandemi COVID-19 yang sebagian kalangan ini merupakan praktik bisnis yang menguntungkan satu pihak dalam praktik bisnisnya. Kejadian

ini kemudian yang menambah *list* peristiwa luar biasa yang mengancam kehidupan dan melahirkan hipotesis bahwa pemikiran ekonomi diartikulasi dengan implementasi yang radikal dan sporadis meninggalkan sisi agama serta *science* yang mestinya berpedoman pada *wisdom*.

12.1 Gerak Alam dan Peradaban Modern

Gerak sejarah peradaban modern diawali dengan terjadinya Revolusi Industri yang terjadi antara abad 18 yang menginversi tatanan sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia yang kemudian episodenya berlanjut dengan peristiwa besar di Eropa yang memberi dampak signifikan dan eksponensial pada perkembangan ilmu pengetahuan, dengan diwarnai perubahan yang mendasar pola manusia dalam pengolahan sumber daya untuk pemenuhan penciptaan barang dan jasa (*goods & services*), bila sebelumnya tenaga manusia dan hewan berganti menjadi mekanisasi adalah *evidence* terjadinya revolusi besar-besaran pada perkembangan teknologi di mana mesin-mesin tersebut berdampak pada penggunaan bahan baku yang berasal dari alam baik di muka maupun pada perut bumi.

Masa *enlightment* tersebut yang kemudian menjadikan kunci sejarah serta merupakan momentum perubahan peradaban terjadi dari Eropa menyebar ke seluruh dunia, perubahan paradigma berpikir, sejalan dengan yang di sampaikan oleh Thomas Kuhn seorang sosiolog dari Ohio, US dalam bukunya:

“The Structure of Scientific Revolution”, bahwa aliran ilmu lahir dan berkembang sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan atau teori ditumbangkan oleh pandangan yang baru. Manusia mulai terdampak gerak gravitasi dalam hal pemikiran, manusia ingin bebas tentang masalah kehidupannya dan terus menggali wawasan tentang hakikat eksistensi di dunia secara empirik dan skeptis yang mempercepat perkembangan pemikiran empiris dan skeptisme modern. Perubahan pada sosio kultur masyarakat berdampak pada pola ekonomi masyarakat dan eksistensi satu negara dengan negara lainnya untuk melakukan eksistensi dan aktivitas perdagangan dengan kebijakan proteksionisme (*Protectionism policy*). Hal ini yang membawa babak baru perdagangan bebas (*free-trade*) dan embrio terjadinya *globalization*

dengan terbukanya pasar bebas (*free-market*). Farhad Rassekh (2017) dari Hartford University Amerika yang mengatakan “*free follow the capital to cross countries, but going exclusively focus on free flow a goods & services*” dan ini terus mendorong lahirnya beragam model ekonomi (*economic models*).

Setiap negara berlomba menjadi antroposen untuk dapat memiliki pengaruh global terhadap ekosistem dunia. Pada awal abad 20, Inggris mulai melakukan ekspor barang manufaktur besar-besaran ke beberapa negara di Eropa sebagai tetangganya dan hanya sebagian kecil kepada negara lain di luar Eropa dan kapasitas ekspornya terus bergerak dari awalnya sebesar 60% hingga pada media 1990 mencapai 90% berupa produk manufaktur dan sisanya barang non-manufaktur. Hal itu yang memberi *alert* bahwa *international trade* mulai bergerak. Krugman (1979), seorang *Nobel Prize* dalam tulisannya *Inreasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade* yang menjelaskan bahwa suatu negara membangun permodelan perdagangan berdasarkan skala ekonomis (*economic scale*) yang kemudian ia kembangkan ke dalam *economic geography* yang mempertimbangkan geografi sebagai faktor pemusatan ekonomi. *Political economy* melalui kebijakan perdagangan yang esensinya adalah mewujudkan kesejahteraan melalui produktivitas, distribusi pendapatan dan menekan pengangguran.

Proses simbiotik antar negara di dunia terus berlangsung, dengan model kebijakan ekonomi yang disesuaikan pada *political economy* masing-masing pemerintahannya dengan dasar mazhab ekonomi yang beranekaragam dialektika ekonomi yang melahirkan satu pernyataan bahwa “*Economy is a science be able to a lot answer through the interactive processes, economy is a dialectical, which means it relating to the logical discussion of ideas and opinions*”. Tentu teori-teori yang menjadi rujukan tidak akan pernah sejalan mengingat masing-masing negara memiliki kebijakan serta strategi ekonominya masing-masing yang diproduksi dari rujukan teori baik itu klasik maupun modern. Sejumlah *economist* melalui teorinya seperti: Henry Martyn, Hume, Adam Smith, Ricardo hingga era modern seperti Paul Krugman serta beberapa lainnya dimanfaatkan banyak negara besar, namun begitu bukankah para ahli ekonomi tersebut tanpa pertentangan ideologis pemikiran? Beberapa *economist* lainnya berupaya mematahkan teori tersebut, seperti Michael Hudson seorang ekonom dari Missouri University yang pernah mengatakan

Nobel Prize is a public relation prize and public relations feel free enterprise, quick frankly public relations for mainly join economics, that's why "Chicago boys" their owned the noble prize committee keep giving it at the prize to each others, it for people a chair the body unrealistic assumptions that if you take it will leads economics "Suicide", hal ini menyindir seorang ekonom peraih *nobel prize* yang terkenal dengan teori perdagangan bebasnya yang kemudian "ditengarai" bahwa yang dimaksud Hudson adalah Paul Krugman, ia mengatakan bahwa ketidakakuratan dalam memberikan asumsi yang tidak realistis sama dengan membawa malapetaka ekonomi yang ia katakan sebagai "bunuh diri".

Cermin dunia hari ini dapat dicermati dengan lahirnya strata ekonomi dunia, melalui pembagian kasta negara kaya (*rich country*), negara berkembang (*developing country*) dan negara miskin (*poor country*), yang diyakini adalah buah hasil akulturasi model ekonomi melalui proses *globalization* yang pada akhirnya melahirkan ketimpangan (*inequality*), melahirkan *class trader* dan *land lord* yang menjadi gurita karena diinkubasi kebijakan ekonomi pemerintah negara yang bersangkutan dan akhirnya meremajakan "Oligarki Ekonomi".

12.2 *Water Hammer*

Ekonomi dan politik menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah suatu negara, kebijakan ekonomi lahir melalui konsensus politik, ruang akademisi hanya pada level penyusunan naskah akademik sedangkan kebijakan politik berdampak pada struktur kekuasaan pada sudut lancip piramid adalah pemangku kebijakan, di tengah piramid digambarkan sebagai kerangka regulasi dan alas bawah yang merupakan struktur sosial yaitu masyarakat yang marginal, sehingga dapat diartikulasikan bahwa terdapat hubungan antara negara yang diwakili oleh pemerintah dengan masyarakat sebagai struktur sosial yang diikat oleh regulasi yang mengatur tentang perekonomian atau aktivitas bisnis dan pada akhirnya berbicara tentang kekuasaan maka sulit dilepaskan dengan relasi kekuasaan seperti yang dikatakan oleh Hadiz dan Richard Robison (2013), "*The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia*" kritik yang mengadress hubungan antara negara dan masyarakat. Hal yang hampir serupa juga dapat ditemui pada sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat misalnya

dengan dominasi ekonomi oleh beberapa pihak (*hidden society*) yang mampu mengatur pergerakan regulasi dan kebijakan pemerintah pada hal-hal strategis dan berdampak pada struktur sosial dan ekonomi. Kekuasaan menjadi *tools* untuk mengamankan kepentingan bisnis sehingga tidak mengherankan pihak-pihak yang berkuasa terlibat dalam bisnis tersebut dan keterlibatannya melalui tangan-tangan kepercayaannya.

Mengingat *nature* bisnis adalah upaya memaksimalkan keuntungan dan memperluas jaringan usaha, maka antara penguasa dan pengusaha menjadi satu rantai, tidak terputus (*depend on*), saling bergantung dan bergelantungan pada tujuan mulia yaitu manifestasi mencari keuntungan. Sejarah Indonesia mencatat terjadinya perubahan politik yang kemudian berimplikasi pada kondisi ekonomi adalah pada masa orde baru, dengan episode sebelumnya pada awal tahun 1900-an lahir Syarikat Dagang Islam (SDI) dengan pendirinya H. Samanhudi yang bertekad ingin membawa serta memajukan ekonomi para pedagang Muslim yang kala itu melihat keberhasilan para pedagang Tionghoa. Di bawah kepemimpinan H. Samanhudi SDI berkembang dengan pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh sebelum kemudian terjadi perubahan kendali kepada HOS Cokroaminto yang kemudian mengganti nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI) yang identik dengan gerakan Nasionalis, Demokratis, Religius dan Ekonomis, sesungguhnya SI bukanlah partai politik, namun membuka peran serta seluruh rakyat Indonesia, tujuannya adalah memperjuangkan keadilan akibat penindasan pemerintah Belanda.

Turning point organisasi Syarikat Islam terjadi pada masa pemerintahan orde baru yang mulai berkuasa, eksistensi SI dianggap memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik dan hal ini menjadi ketidaknyamanan pemerintah, sehingga mulailah terjadi marginalisasi terhadap SI yang dicurigai berpotensi menjadi kekuatan politik yang dahsyat dan berupaya melakukan kebiru hingga pada akhirnya organisasi ini mati, mungkin pemerintah berkuasa saat itu *phobia* dan ingin mempertahankan kekuasaan dalam rentang waktu yang lama. Periode tersebut yang kemudian menjadi momentum pemerintah orde baru untuk menjalankan pola pemerintahannya tanpa keraguan dihantui lagi adanya gerakan politik Islam dan mulai pemerintah bergerak dalam bisnis dengan memberdayakan beberapa pengusaha etnis. Para pengusaha minoritas tersebut diberi peran, peluang dan kesempatan dalam melaksanakan ekspansi

usahanya dan pada akhirnya struktur ekonomi dikuasai serta memberi ruang pada militer untuk masuk ke dunia bisnis secara formal. Begitu besar ruang gerak dan peluang pada pengusaha minoritas kala itu serta sejalan dengan membaiknya ekonomi negara akibat meningkatnya harga minyak dunia pada periode 1973-1974 berdampak pada pemasukan negara yang meningkat (*winfall revenue*) dan kemudian negara masuk dan mensponsori bisnis dan beberapa strategi dan kebijakannya adalah kredit, subsidi dan monopoli yang tujuannya agar tumbuh perusahaan-perusahaan domestik. *Privilege* yang diberikan tersebut mendorong pengembangan dengan didirikannya pusat-pusat industri yang dikelola oleh kelompok pengusaha tersebut dan sejarah mencatat kemudian harga minyak dunia terjun bebas dan APBN kemudian mesti menanggung beban yang cukup tinggi, di mana periode tersebut yang disebut de-birokratisasi dan de-regulasi yang kemudian dikenal dengan "*economic liberalization*", yang mengajak kita merenung bahwa bukan tidak mungkin peristiwa demi peristiwa tersebut yang membawa ekonomi bangsa ini seperti yang kita rasakan saat ini?

Outbreak COVID-19 bagi para pemilik keimanan dikontemplasi serta diinterpretasi sebagai bentuk *Qadarullah* Sang Pencipta, yakin pada semua kejadian akan berbuah hikmah dan makna *Qadarullah* adalah takdir dan Allah tidak pernah menetapkan takdir kecuali kebaikan. Terjemahan dalam satu surat pada QS 2:164 "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu IA hidupakan bumi sesudah mati dan IA sebarkan di bumi dengan segala jenis hewan, sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*" Makna yang tersirat adalah Ia telah menciptakan alam semesta (galaksi, tata surya) dan seisinya sebagai sebuah satu kesatuan *system*, tidak ada yang diciptakan-Nya tidak memiliki manfaat bagi yang lainnya, sekalipun serangga yang kerap dianggap sebagai vektor pengganggu manusia, namun faktanya jentik-jentik nyamuk yang ada di air kolam, rawa merupakan makanan makhluk hidup lainnya seperti ikan, katak, kelelawar dan sebagainya.

12.3 *Belief is a Plasma*

Menjelang dua tahun sejak pertama kali pemerintah mengumumkan secara resmi pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020 yang lalu atau dua kali hari raya Idul Fitri, Idul Adha dilewati dalam suasana kebathinan yang mendalam, seakan-akan langit biru yang cerah tidak mampu memberi keceriaannya bahkan selimut kedukaan disubsidi dengan ribuan nyawa masyarakat telah pergi akibat virus ini, terjadi banyak sekali perubahan pada perilaku sosial, demikian halnya mendorong pada persoalan ekonomi serta situasi politik yang semakin menambah gaduh serta persoalan yang mesti diselesaikan pemerintah.

A. Delusi COVID-19

Ratusan para pakar dari dalam dan luar negeri dari berbagai sektor keilmuan berbicara tentang *outbreak* COVID-19 (C19) dengan berbagai analisis berupa proyeksi, data, dugaan, hipotesis namun tidak ada seorang pun yang bersuara lantang untuk memastikan kapan titik pemberhentiannya? Hanya bagi para pemilik keyakinan tetap merasakan gelombang resonansi optimisme bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan pada umatnya di luar batas kemampuannya. Terjadi dialektika antara jiwa, akal dan pikiran (*heart, mind & soul*) mencari perenungan mengapa hal ini terjadi, apakah kejadian ini *man-made* atau hasil rekayasa biologis sebuah laboratorium di China tempat pertama kalinya virus ini diketemukan? Kemudian pertanyaan berlanjut apakah ini akibat kelelawar dari hipotesis beberapa ilmuwan maupun pengamat di awal terjadinya pandemi SARS-CoV2? Walau kemudian dibantah pengamat lainnya, atau yang paling ekstrem menyatakan bahwa peristiwa ini adalah upaya melakukan “*reset economy*” dari kepentingan *globalist* yang kemudian dikenal dengan istilah “*hidden society*” atau kelompok sosial yang memiliki pengaruh dan diyakini telah mengendalikan dunia melalui kekayaan yang mereka miliki untuk sebuah program ekonomi melalui pengembangan teknologi yang pada akhirnya adalah dominasi bisnis. Area komunikasi publik memang menjadi menarik dan para *reader* yang menerima warta tentang dialektika pandemi C19 menjadi semakin linglung, apa yang sebenarnya terjadi? Moral ceriteranya *manmade designed for disaster* maupun

pendapat ahli yang keilmuannya yang *related* dengan pandemi C19 ini tetap tidak ada yang berani menyatakan dengan eksak, saling berpandang (*cross section*), walau tegas menyatakan bahwa keilmuan merupakan ruang yang mesti diisi dengan keyakinan dalam wujud keimanan (*belief*).

Sulit rasanya berpikir untuk melakukan analisis mencari pembuktian terhadap berbagai analisis yang kita cermati dan kita dengar belakangan ini. Mungkin yang tepat dilakukan adalah melakukan kontemplasi dan *tadabbur* pada kitab suci, karena itu yang menjadi tuntunan setiap makhluk yang menyadari dirinya adalah ciptaan-Nya, sehingga IA berhak atas apapun yang IA ciptakan dan sebagai umatnya kita mesti bersih dalam mengamalkan isi dari kitab suci tersebut, karena sesungguhnya kitab suci hanya berhak bagi yang tidak memiliki kepentingan nafsu (*syahwat*) atau kepentingan, untuk itu letakkanlah sedikit rasa dalam akalmu supaya akal kita lembut, begitu pun sebaliknya, letakkan sedikit akal dalam rasamu agar tidak menjadikan kita arogan. Agama memerintahkan Manusia untuk bersahabat dengan alam semesta, sehingga tidak ada niat dari dalam diri kita untuk memporak porandakan, karena adalah tempat berteduh dan merupakan ruang abadi manusia untuk lahirnya sebuah peradaban yang megah (*splendid*) dibandingkan terjadinya “Delusi” pada diri kita.

12.4 Archipelago Indonesia

Ruang hampa yang berada dalam dimensi perenungan memproduksi tanya bagaimana bila pandemi ini bereskalasi secara meluas pada wilayah-wilayah archipelago? Konsep archipelago sendiri dinyatakan jika laut adalah penghubung antar daratan di Indonesia, sehingga wilayah negara Indonesia menjadi satu kesatuan utuh sebagai tanah air dan disebut sebagai negara kepulauan.

Menurut Baiquni (2014), Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) pada wilayah tropis yang memiliki keragaman ekosistem alam dan budaya terbesar di dunia. Kedua, kepulauan ini memiliki sejarah panjang, lebih seribu tahun silam pernah memiliki peradaban maritim yang terkenal seperti Sriwijaya dan peradaban agraris yang unggul di sekitar Borobudur dan Prambanan. Ketiga, Indonesia memiliki posisi geo-strategi

penting di antara silang Benua Asia dan Australia serta silang Samudera Hindia dan Pasifik. Ilustrasi sederhana, Indonesia memiliki lebih dari lima laut di dalam wilayah (Arafuru, Banda, Jawa, Flores, Halmahera dan sebagainya) di dalam wilayah, tidak ada negara di dunia yang memiliki laut di dalam wilayah negara dan memiliki selat utama yang disebut (*major straight*) di mana selat tersebut dilalui kapal-kapal besar (*mother vessel*), di dunia ini ada enam selat dan empat di antaranya ada di wilayah Indonesia yaitu Selat Malaka, Sunda, Makassar dan Lombok. Melihat hal demikian dapat tergambarkan bagaimana luasnya negeri ini.

Bila dilakukan kalkulasi dan pendekatan terjadinya pandemi COVID-19 pada wilayah kepulauan tersebut, akan memantik beberapa argumentasi, menurut seorang epidemiolog Dicky Budiman¹ dari Griffith University Australia mengatakan wilayah kepulauan justru menguntungkan bila memiliki strategi yang tepat dalam menghindari eksesi meluasnya pandemi, penyebaran akan lebih mudah tertangani bila ada kebijakan untuk menutup wilayah (*lockdown*) dengan cepat, pergerakan masyarakat bisa lebih mudah untuk diatur sehingga tidak menjangkau pulau lain yang masih belum terinfeksi, atau dengan *test trace isolate* (karantina wilayah), hal ini dapat dilihat pada beberapa negara kepulauan seperti: Korea Utara, Kepulauan Solomon, Turkmenistan, Vanuatu, di mana wilayah tersebut bersih dari COVID-19.

Sebaliknya menjadi anti-tesis bila yang kemudian terjadi adalah pandemi menjalar pada wilayah kepulauan yang secara ekonomi tertinggal. Hal ini dapat dilihat pada indikator makro yang dengan diakses untuk wilayah seperti di timur Indonesia (*eastern Indonesia*) yang diakibatkan penanganan yang lamban, tidak integratif dan komprehensif? Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan, Pemerintah mesti waspada dan berhati-hati dalam melakukan perhitungan melalui asumsi-asumsi yang ada, kebijakan yang tidak strategis dan kesalahan perhitungan akan berdampak pada *loss money* dan *economics declined*, rakyat kehilangan pendapatan, serta nyawa masyarakat yang menjadi hierarki tertinggi dalam konteks konstitusi. Tanggung jawab besar pemerintah untuk memastikan dan mengantisipasi serta memitigasi

¹ Dicky Budiman, Griffith University Australia, kompas.com 27 April 2020.

risiko untuk tidak terjadi, walau kita ketahui beraneka kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan waktu berjalan belum menunjukkan tanda-tanda COVID-19 lenyap dari bumi pertiwi.

Wilayah-wilayah tersebut merupakan *reserve agriculture dan maritime*, kekayaan tumpah darah Indonesia dengan segala isi baik di atas maupun di bawah permukaan air dan tanah, bagaimana bila pandemi terjadi dan tidak tertanggulangi? Sulit dibayangkan dengan akses infrastruktur yang menjangkau wilayah-wilayah terluar, sarana kesehatan yang minim, para medis yang sulit didapat? Menjadi pertanyaan besar, belum lagi persoalan rantai pasok (*supply chain*) yang terganggu akibat masyarakat desa terpapar?

12.5 *Village & Friendly Spatial*

Desa yang digambarkan sebagai alam yang rimbun, dikelilingi oleh laut, merupakan ruang teduh bagi satwa, hijau dan keramahan desa serta keaslian alamnya yang bersahaja menciptakan *syahwat* bagi para pendatang, namun sejak kejadian ini menjadi tempat pelarian (*escape*) bagi kaum marginal yang mencoba mencari peruntungan di kawasan perkotaan (*urban sector*) dan rela meninggalkan desanya hanya karena sebuah janji manis kota.

Faktanya dampak pandemi ini industri *collapse*, gulung tikar (*bankrupt*), tidak mampu lagi melakukan aktivitas produksi karena terjadi rantai putus. Industri kehilangan pasokan bahan baku, denyut nadi pasar yang lemah, sehingga benar-benar menghentikan aktivitasnya akibat tidak lagi mampu menutupi biaya, hampir semua lini (sektor), belum lagi pemberlakukan jam aktivitas terbatas, tidak terjadi kerumunan, hal ini makin berkontribusi menjadi *problem* yang dihadapi pengusaha dan karyawan. Namun sebaliknya tidak demikian halnya dengan sektor pertanian dan maritim (perikanan) yang menjadi sektor usaha masyarakat desa dan penyangga bagi daerah, melakukan survival untuk memastikan keterjaminan kebutuhan pokok (*basic needs*).

Paradox untuk dibayangkan bila rantai pasok kebutuhan pokok manusia di perkotaan tidak terpenuhi akibat persoalan distribusi yang diakibatkan karena persoalan produksi petani dan nelayan dampak dari C19 ini? Penduduk perkotaan terancam gagal pemenuhan kebutuhan kalori dan akan menciptakan terjadinya mal-nutrisi.

12.6 *Smart Factory*

Fakta secara visual dapat terlihat pada wilayah pedesaan, relatif tidak terdampak langsung pandemi, ekonomi pedesaan relatif bertumbuh karena didorong sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan lainnya berbanding terbalik dengan kondisi sebaliknya yang terjadi di wilayah perkotaan seperti ancaman de-industrialisasi yang berdampak pada peningkatan jumlah *un-employment*, salah satu sebab faktor pertumbuhan ekonomi di perkotaan ditopang konsumsi masyarakat yang berasal dari *rural sector*. Melambatnya perekonomian ini oleh pemerintah diatasi dengan memberikan berbagai stimulus seperti jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk tunai maupun kartu pada masyarakat dengan harapan dapat bertahan dan bekal untuk melakukan aktivitas bisnis, namun bagaimana selanjutnya bila kenyataannya berbeda? Banyak data menyatakan bahwa usaha mikro kecil menengah, faktanya rubuh di awal pandemi, sehingga dikhawatirkan upaya pemerintah menjadi *problem* lain akibat tidak tepat sasaran (*out of target*).

Model analisis Friedman (1966), yang menekankan analisisnya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*core*) dan desa (*periphery*), di mana teori ini merupakan gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh kondisi pada wilayah pedesaan dan corak pembangunan daerah pedesaan sangat ditentukan oleh arah pembangunan daerah perkotaan. Aspek interaksi antar daerah (*spatial interaction*).

Pemikiran filsuf Islam Baqr As-Sadr mengatakan bahwa dalam mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek *philosophy of economics* atau *normative economics* dan *aspek positive economics*. Contoh dari aspek *positive economics*, yaitu mempelajari teori konsumsi dan permintaan yang merupakan suatu fenomena umum dan dapat diterima oleh siapa pun tanpa dipengaruhi oleh ideologi. Dalam teori konsumsi dirumuskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi suatu barang adalah tingkat pendapatan, tingkat harga, selera, dan faktor-faktor non-ekonomi lainnya. Berdasarkan hukum permintaan (*law of demand*) bahwa ada korelasi yang negatif antara besarnya tingkat harga barang dengan jumlah barang yang diminta asumsi *ceteris paribus*. Jika harga barang naik jumlah barang yang diminta akan

turun dan sebaliknya. Fakta ini terjadi pada konteks ekonomi di manapun dan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, agama, politik, dan sebagainya.

12.7 *Green Economic Growth Strategy* sebagai Epilog

Kemudian konsepsi ekonomi hijau (*green economic*) merupakan fenomena dari sebuah kenyataan bahwa magnitudo dari implementasi *political* ekonomi yang telah jauh meninggalkan *wisdom* dengan menempatkan agregat sebagai simbol capaian yang merupakan buah hasil dari menginterpretasi pemikiran dan teori ekonomi namun diterjemahkan ke dalam perilaku ekonomi yang mengesampingkan tiga koefisien fundamental: ekonomi, sosial dan lingkungan melahirkan *Shrink Economy*.

Kultur ekonomi dunia menempatkan kasta-kasta akibat ingkar pada komitmen dan filosofi bahwa sejatinya pembangunan (*development*) adalah kesempatan peroleh kesamaan derajat (*equality*) menuju savana hijau berupa *welfare dan prosperity*. Hulu dari persoalan adalah pada saat tiga *soft organ* berupa: jiwa, akal dan rasa sudah tidak *inter-connected*, serta pengetahuan (*science*) tidak tumbuh seimbang, tidak terdistribusi secara merata (*not evenly*) antar negara dan masyarakat antar bangsa membentuk lembah ketidakmerataan (*inequality*) dan keterputusan (*de coupling*).

Hari ini konsensus negara-negara dunia dalam memerangi dan mengantisipasi ancaman ragam persoalan *climate change* (perubahan iklim), efek rumah kaca, kerawanan pangan, ancaman ketersediaan akses sumber air yang merupakan ancaman lingkungan serta kehidupan bagi kemanusiaan yang kini menjadi problem tematik dunia, sehingga saatnya untuk *shifting ground* untuk memahami esensi yang mendalam, eksplorasi keilmuan dengan sandaran religiusitas karena *nature* agama adalah mencari hal yang paling otentik (*looking back*) sedangkan *science* selalu menatap ke depan (*looks forward*) menjalani keduanya mesti harmoni dan sejalan sehingga selamat sampai tujuan. *The last but not least* adalah penting upaya pembaharuan dalam proses transformasi untuk menata kehidupan sosial yang berkelanjutan dan berkembang melalui perubahan paradigma ekonomi, sosial, lingkungan melalui kebijakan publik yang dapat menggerakkan masyarakat sipil untuk melahirkan satu desain baru kehidupan sosial.

Daftar Pustaka

- Kuhn ST. 1962. *The Structure of Scientific Revolution*. University of Chicago Press.
- Rassekh F. 2017. *Debate with Michael Hudson in intellectual forum*. US: John Templeton Foundation.
- Maddaremmeng AP. 2010. Paul Krugman: His Contributions and Controversies. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 10(2): 117-128.
- Baiquni MA. 2014. Paradigma Archipelago: Pembangunan Wilayah Kepulauan Dengan Karakter Bhinneka Tunggal Ika. Pidato penguikuan guru besar.
- Friedman M. 2014. The Methodology of Positive Economics. In *Essays In Positive Economics*, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1966.



13. KERAPUHAN: REFLEKSI FILOSOFIS PANDEMI COVID-19

Ruth Indiah Rahayu

Pegiat di Masyarakat Filsafat Indonesia (MFI)

Abstrak

Dalam sejarah pemikiran filsafat Barat konsep tubuh telah menjadi lokus yang memicu perdebatan di kalangan para filsuf. Kiranya tubuh tidak hanya dimaknai secara alami sebagai organisme biologis melainkan sebagai pengada (*Being*) insan manusia di dunia. Sebelum pandemi COVID-19 orang-orang modern telah memaknai tubuh sesuai dengan ide proyek tubuh yang cantik dan muda. Lalu ketika virus itu mengancam dan menyerang tubuh manusia tampaklah betapa rapuh tubuh manusia di hadapan jasad renik tersebut. Kenyataan ini membawa kita untuk melakukan refleksi filosofis tentang tubuh kita yang selama ini hanya menjadi objek bagi proyek tubuh yang indah dan awet muda. Proyek tubuh dipertanyakan ketika manusia menghadapi absurditas masa depan sehingga memperlihatkan empat bentuk eksistensi manusia selama menghadapi pandemic COVID-19

Kata Kunci: tubuh; kerapuhan; kecantikan; kemudaan

13.1 Pengantar

Sejak pandemi COVID-19 masuk ke telatah negeri kita pada Maret 2020 sampai saat ini, sesungguhnya telah mengubah kehidupan kita pada banyak hal. Perubahan itu bukan hanya berupa bekerja dan belajar dari rumah, mobilitas dibatasi, wajah dibalut masker, harus menjaga jarak fisik dan sosial, melainkan telah menjangkarkan manusia ke dalam perenungan ke dalam dirinya. Jika sebelumnya manusia Indonesia, apalagi yang tinggal di kota besar, sangat sibuk dengan dunia eksternalnya, kini tiba-tiba terlempar ke dalam dunia dirinya yang justru harus dikenali kembali.

Salah satu hal yang telah menjadi bahan perenungan –dan hal itu dapat kita baca pada tulisan-tulisan di media sosial—adalah tentang kerapuhan. Terlebih belakangan ini, sejak Juni 2021, penularan berjangkit sangat cepat di dalam klaster keluarga, rumah sakit penuh dan tiap hari kita mendengar orang-orang yang kita kenal meninggal, maka rasa kerapuhan itu pun makin terasakan. Kerapuhan itu terekspresi dalam ketidakberdayaan, yang sakit tidak berdaya, pun yang sehat tanpa daya untuk bertindak menolong. Kita bingung, galau, cemas, takut, dan seperti tanpa masa depan.

Saya kutipnya tulisan Willy Paramudya, ahli bahasa dan jurnalisme pada laman *Facebooknya* tertanggal 5 Juli 2021

Nak, sepertinya kita tetap harus berendah hati mengakui deret kematian tak tepermanai dan angkuh akibat pandemi ini sebagai kemestian. Terimalah keniscayaan ini, betapa pun beratnya. Tapi jika wabah ini menampilkan berbagai gejala yang absurd, pandangalah dalam-dalam bahwa di balik absurditas itu ada kebatilan yang harus kau lawan.

Tulisan Willy Pramudya itu pendek tetapi menyiratkan suatu kerapuhan – yang dilambiri ketidakberdayaan—bahwa pandemi ini menelan banyak korban adalah keniscayaan. Kita tak dapat menyangkal, melainkan harus menerimanya, mungkin semacam memperdamai kewanusiaan kita dengan kenyataan yang sedang berlangsung di dalam dunia yang kita mukimi.

Bagi pembaca sastra keadaan pandemi seperti yang kita alami itu serupa dengan wabah sambar yang ditulis oleh sastrawan dan filsuf eksistensial dari Aljazair, Albert Camus, berjudul *Sampar* (1947)¹. Dalam novelnya itu, Camus menggambarkan tipe reaksi dalam menanggapi pandemi melalui tiga tokoh. Ketiga tokoh itu menghadapi absurditas (irasional dan sulit dipahami) berupa penderitaan, keterasingan, kegagalan, dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit. Selain itu juga keterpisahan dengan kerabat dan sahabat dan keterpenjaraan dalam kota Oran yang

¹ Albert Camus, *Sampar*, terjemahan dari Prancis ke dalam Bahasa oleh NH Dini, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015)

mengalami ‘*lockdown*’. Jika kita membaca *Sampar*, gambaran situasi kota, kerapuhan akibat kecemasan, ketakutan dan keterasingan, serupa dengan yang kita alami saat ini di Indonesia.

Tampaknya kerapuhan sebagai manusia (*human fragile*) semakin terasa setiap mendengar satu keluarga dari kerabat ataupun teman terpapar dan terinfeksi COVID-19. Kerapuhan itu membuat seluruh sendiri tubuh terasa lunglai. Pun setiap hari kematian seperti deret ukur yang semakin membesar, pun semakin merapuhkan tubuh yang bagai diayun ketidakpastian hidup. Kerapuhan ini sekaligus membuat kita bertanya: bagaimana mungkin jasad renik itu dapat membunuh sang manusia yang mulia, yang memiliki rasionalitas, yang menguasai bumi?

Lalu di manakah letak kerapuhan manusia itu? Pada tubuh atau jiwanya atau keduanya? Apa makna kerapuhan bagi manusia? Lalu bagaimana manusia-manusia di Indonesia menyikapi kerapuhannya?

Cukup banyak analisis mengenai kerapuhan dari ekonomi-politik, sosiologis dan lainnya, sebagai dampak pandemi, tetapi tulisan ini akan masuk ke ranah refleksi “antropologi filosofis”². Sebab, dalam situasi pandemi ini kita merindukan ruang kecil untuk melihat ke dalam diri, guna menimbang-nimbang kerapuhan kemanusiaan kita.

13.2 Tubuh sebagai Titik Tolak Mengada

Berdasarkan laporan yang dilansir *virusncov.com* per 30 Juni 2021, Indonesia telah menempati peringkat kelima sebagai negara dengan angka kematian akibat COVID-19 tinggi. Selama tujuh hari angka kematian karena covid di Indonesia rata-rata mencapai 414 orang perhari. Bahkan menurut laporan per 1 Juli 2021 angka orang terpapar COVID-19 dan sakit menembus rekor mencapai 24.836 orang begitu juga angka kematian mencapai 504 orang. Dua kabupaten di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Jawa Timur, tercatat sebagai daerah pandemi dengan angka keterpaparan dan kematian tinggi. Cerita dari desa zona merah di sana mengatakan bahwa tiap hari setidaknya ada enam orang di desanya meninggal dunia.

² Antropologi filosofis (*anthropological philosophy*) adalah sebuah disiplin di dalam filsafat yang mencari pemahaman metafisika dan fenomenologi tentang manusia. Pertanyaana tentang apa dan siapa manusia mendominasi sejarah perkembangan pemikiran

Pada mulanya kita berkenalan dengan pandemi ini berupa angka. Setiap sore kita mendapat laporan perkembangan dari Satgas Covid Nasional kasus aktif (terpapar), sembuh dan mati. Mungkin sejak pandemi ini berlangsung, kita lantas memperhatikan yang namanya “angka-angka” sebagai informasi yang kita tunggu setiap hari. Jika angka melonjak kita tercekam, jika melandai dan apalagi menurun kita lega disertai harapan wabah akan berlalu. Kebanyakan orang tidak mempedulikan angka-angka ini, tetapi sebagian orang kini menyadari angka-angka itu merupakan kuantifikasi dari tubuh manusia, yaitu tubuh manusia yang mengalami penderitaan sakit dan dalam kemungkinan mati atau sembuh.

Marilah kita simak tabel angka perkembangan kasus harian COVID-19 di Indonesia sejak dinyatakan terjadi “tsunami COVID-19” atau lonjakan gelombang kedua sejak *pandemi* itu hadir di negara kita.



Gambar 16. Update perkembangan kasus harian COVID-19 Per 1 Juli 2021 (Sumber: Satgas Covid Nasional)

Menurut perkembangan kasus harian tersebut, ada kenaikan keterpaparan COVID-19 yang terkonfirmasi sebanyak 24.836 orang per 1 Juli 2021. Kenaikan ini memecahkan rekor angka keterpaparan harian sejak Maret 2020. Bahkan angka kematian mencapai 504 orang perhari itu pun memecahkan rekor dari angka-angka sebelumnya. Artinya, 2,70% tubuh yang terpapar COVID-19 tidak mampu melawan jasad renik ini hingga mati. Sementara tubuh yang mampu melawan (sembuh) sebanyak 87,48%.

Apa yang dapat kita baca pada deret angka-angka itu? Dalam pendekatan antropologi filosofis, angka-angka itu berjangkar pada subjek manusia. Lalu apakah manusia? Para filsuf pun berdebat sepanjang masa mengenai hal ini.

Dalam tradisi filsafat klasik, seperti pandangan Aristoteles, diri manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran, otonomi, kebebasan dan tanggung jawab. Descartes menganggap subjek itu berpusat pada rasio dan karena itu lebih tinggi daripada entitas yang lain yang disebut tubuh. Sementara tradisi filsafat kontemporer, khususnya Foucault menganggap subjek sebagai hasil dari diskursus.³ Penulis tidak akan membahas kerumitan perdebatan di dalam sejarah filsafat barat tersebut, melainkan tertarik untuk menggunakan perspektif (sudut pandang) Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) dalam menempatkan tubuh sebagai subjek.

Pemikiran Merleau-Ponty yang terpenting dalam *Phenomenology of Perception* (1962) dipengaruhi oleh fenomenologi dan eksistensialisme. Ia memusatkan pembahasan tentang subjek pada tubuh manusia –yang dikesampingkan oleh Descartes-- sebagai pengada di dunia (*being in the world*) yang mengonstitusi pengalaman-pengalaman melalui sensasi (penerapan pancaindera) dan bahasa. Tubuh menurutnya bukan objek, melainkan jangkar manusia di dunia. Melalui tubuh manusia berhubungan dengan dunia. Jadi, tubuh bukan seperti pandangan naturalis terdiri dari tulang, daging dan darah saja, melainkan tubuh yang hidup (*lived body*) yang mengandung intelegensia dan kemampuan reflektif melalui pencerapan pengalaman.⁴

Menurut Marleau-Ponty:

(...) Tubuh adalah kendaraan mengada di dunia yang kita miliki adanya sebagai adanya makhluk untuk hidup, untuk terlibat dalam lingkungan tertentu, untuk mengidentifikasi diri dengan rancangan tertentu untuk melanjutnya komitmen hidup (Marleau-Ponty, 1962, 94)

³ Michel Foucault, *History of Sexuality*, terjemahan dari Prancis ke dalam Inggris oleh Robert Hurley, (New York: Pantheon Books, 1978), 18

⁴ Maurice Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*, terjemahan dari Prancis ke dalam Inggris oleh Colin Smith, (London & New York: Routledge, 1962), 94

Ia menyontohkan dirinya ketika berjalan mengelilingi apartemen tempat tinggalnya, pelbagai aspek hadir menunjukkan diri kepadanya. Tanpa tubuhnya bergerak, berkeliling, tak akan mungkin pelbagai aspek itu akan menampakkannya dirinya. Lebih tepatnya, ia tidak akan menyadari kehadiran pelbagai aspek itu jika kakinya tidak berjalan merasakan lantai yang tidak rata, tangannya menyentuh barang tertentu, matanya memandangi sebuah noktah di dinding, penciumannya membaui lembap tembok kamar mandi, pendengarannya menangkap tetes air kran wastafel. Adapun posisi di mana tubuh berpijak menjadi pusat pijakan (*standpoint*) dalam memandangi dunia yang disebut arena penglihatan (*field of vision*). Dengan berjalan mengelilingi ruang apartemen itu, tubuh memiliki pengalaman (*bodily experience*) berhubungan dengan “dunia” dalam apartemen. Lalu ketika saya memandangi ke bawah dari jendela apartemen, tubuh saya “melihat dunia dari atas” yang kiranya berbeda arena penglihatannya dengan ketika saya berada di bawah apartemen.⁵

Penjelasan Merleau-Ponty menegaskan bahwa keberadaan dunia beserta objek-objek di hadapan manusia itu bukan merupakan hasil rekonstruksi pikiran atau ide, melainkan sebagai hasil pencerapan kesatuan tubuh kita. Dengan demikian, menurut Merleau-Ponty “dunia adalah apa yang kita persepsikan dan “apa yang saya alami””.⁶ Oleh sebab itu tubuh adalah subjek atau pusat dalam kita berhubungan dengan dunia.

Apabila tubuh itu sakit, mengalami cacat, maka arena penglihatan tentang dunia itu pun seturut kesakitan atau kecacatan tubuh yang mengalaminya. Seperti orang buta melihat dunia berwarna hitam gulita, atau orang berkaki pincang merasakan dunia tidak datar. Begitu pun orang yang sedang menderita sakit COVID-19 yang kehilangan indera pembauan dan pencicipan merasakan dunia tawar. Orang yang demam merasakan dunia begitu dingin atau panas.

Dengan mendasarkan pada pemikiran Merleau-Ponty ini, maka kerapuhan kemanusiaan berjangkar pada kondisi tubuh yang hidup (*lived body*)⁷ itu sedang berpijak pada arena penglihatan (*field of vision*) yang absurd. Absurditas

⁵ Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*, 77-78

⁶ Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*, xviii

⁷ Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*, 94

itu persisnya adalah ketidakpastian, baik terhadap tubuh yang hidup itu sendiri maupun terhadap dunia yang dilihatnya sebagai ancaman, yaitu jasad renik COVID-19 yang tidak teramati oleh pancaindera telanjang. Jadi, tubuh berjangkar pada dunia jasad renik yang tak teramati tetapi berkemampuan membunuh. Manusia tak dapat melihat objek musuhnya berada, dan seperti orang buta hanya bisa meraba-raba objek musuh dalam gelapnya dunia. Kerapuhan terjadi ketika tubuh kita mengalami sebagai orang buta mengada di dunia.

13.3 Merefleksikan Eksistensi Manusia Indonesia Menghadapi Pandemi

Ibarat arena Indonesia ini seperti kota Oran di Aljazair yang terlanda wabah sampar, kita dapat menelisik karakter manusia ketika dalam kerapuhan menghadapi jasad renik COVID-19. Setidaknya –secara menonjol—penulis mengamati ada empat karakter manusia Indonesia yang eksistensinya saya tipologikan dengan nama “eksistensi Rebecca”, “eksistensi Yulianti”, “eksistensi Benjiko”, dan “eksistensi Natali”.

Pertama, eksistensi Rebecca mencakup dokter dan tenaga kesehatan yang secara langsung berhubungan penderita COVID-19 di rumah sakit. Kesadaran yang ada pada mereka adalah menyembuhkan tubuh yang sakit agar tetap hidup. Tanggung jawab yang mereka pikul adalah menyelamatkan pasien. Panggilan kemanusiaan mereka tumbuh dari sini, sementara rasio dokter dan tenaga medis di Indonesia masih 0,52 di bawah standar WHO yang menetapkan 1,2. Sebagai ilustrasi dari BBC News Indonesia tertanggal 1 Maret 2021, menceritakan:

Suatu malam, dokter Limdawati merasakan kesedihan yang sangat dalam. Lima pasien COVID-19 yang sedang ditangani timnya meninggal dalam satu malam. Kelima pasien itu memang dalam kondisi buruk, tetapi tetap saja kejadian tersebut membuat dokter spesialis penyakit dalam ini berduka. Dokter Limdawati bertugas di RS Immadunel, Bandung

Dokter Limdawati dirundung kesedihan karena tidak dapat menyelamatkan tubuh-tubuh yang tergolek sakit yang menjadi tanggung jawab kemanusiaannya untuk menyelamatkan. Ketika tak dapat menyelamatkan tubuh-tubuh yang sakit itu, ia merasa terbebani seperti katanya:

Pernah juga satu keluarga kena [COVID-19]. Ibunya kena, anaknya kena, dua-duanya [kondisinya] jelek. Si anak berhasil selamat, tapi si ibu meninggal. Jadi beban rasanya kalau nggak bisa menyelamatkan dua-duanya. Tapi apa boleh buat, kadang Tuhan punya rencana sendiri (dr Limdawati, 1 Maret 2021)⁸

Pernyataan itu sekaligus menandakan keterbatasan kemanusiaannya, sebagai cara berdamai menghadapi kerapuhan dan ketidakpastian atas hasil kerja kemanusiaannya.

Ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Mei 2020 dilonggarkan pemerintah, muncul tagar bertuliskan *#IndonesiaTerserah*. Protes yang sebagian dinyatakan oleh dokter dan tenaga medis itu seperti mengadung dua penafsiran. Penafsiran protes atas kebijakan pemerintah yang didorong oleh tanggungjawab penyelamatan tubuh-tubuh yang sakit. Penafsiran lainnya adalah ketidakberdayaan menghadapi himpitan dua keadaan: politik dan filosofis (eksistensi keberubuhan) yang bertegangan terus-menerus.

Dengan rasio tenaga medis yang masih jauh di bawah standar WHO itu, sementara kecenderungan masyarakat Indonesia sebagai terhadap protokol kesehatan, dapat dibayangkan apa yang terjadi jika terjadi lonjakan kasus keterpaparan dan terinfeksi covid. Masalahnya, para tenaga medis ini yang akan menjadi garda depan dalam pengobatan dan penyembuhan orang sakit. Sementara tubuh mereka sendiri terancam pembunuhan oleh jasad renik tersebut. Per 28 Juni 2021, terdapat 1.031 tenaga kesehatan (nakes) yang telah meninggal dunia akibat COVID-19. Perinciannya, dokter 405 orang, dokter gigi 43 orang, perawat 328 orang, bidan 160 orang, dan tenaga kesehatan lain 95 orang. Data tersebut dihimpun dari Perhimpunan Rumah Sakit

⁸ "Covid-18: Beban Berlipat Ibu Berprofesi Tenaga kesehatan Selama Pandemi", BBC News, 1 Maret 2021, diunduh dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56167385>

se-Indonesia (Persi), Asosiasi Puskesmas se-Indonesia (Apkesmi), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Di bawah ini merupakan cuplikan surat terbuka Jaringan Tenaga Kesehatan (Jarnakes) tertanggal 3 Juli 2021 yang ditujukan kepada pemerintah:

Dalam beberapa hari terakhir, Jarnakes menerima laporan kematian setiap harinya baik dari tenaga kesehatan maupun pasien. Sementara, bagi para tenaga kesehatan yang bekerja saat ini, mengalami tunggakan insentif yang berlapis-lapis sejak September 2020-Juni 2021. Negara terus menyisakan tunggakan insentif para nakes dari pusat hingga daerah. Jarnakes merangkum Data sebuah RS pemerintah yang menangani COVID-19, laporan nakes yang terinfeksi berjumlah 4-5 orang dalam 1 rumah sakit. Rasio perawat pasien 2:70. Di sisi lain, rasio tenaga dokter dengan pasien 1:300

Surat terbuka Jarnakes yang ditujukan kepada pemerintah seperti di atas menandakan bahwa mereka yang berusaha untuk menolong tubuh yang sakit agar tetap hidup dalam kerapuhan kesejahteraan. Koordiantor Jarnakes, Fen Budiman, yang mengordinasi tenaga kesehatan untuk membuat surat terbuka itu kemudian dipecah dari RSDC Wisma Atlet di Jakarta. Ia menulis pada laman *Facebook*-nya seperti ini:

Setahun lalu, saya bertekad menjadi relawan, saat RSDC pertama kali diresmikan sebagai RS Darurat Penanganan C19. Di tengah masih banyak ketakutan, saya penuh percaya dan tekad bahwa saya harus melibatkan diri karena rasa empati saya, sumpah dan janji profesi saya, dan karena ada banyak nyawa yang harus diselamatkan (Fen Budiman, FB, 26 Maret 2021)

Eksistensi mereka yang terpanggil untuk menyelamatkan tubuh-tubuh agar tetap hidup, mengutip pendapat Foucault adalah tubuh yang diinvestasikan untuk menangani “korban-korban COVID-19”. “Eksistensi Rebecca” ini ada dalam genggam kuasa yang mendisiplinkan mereka agar taat dan bermanfaat.

Dari sinilah tegangan kesadaran kebertubuhan sebagai subjek yang berperan sesuai visinya berbenturan dengan ukuran-ukuran kekuasaan yang menjadikan eksistensi Rebecca tak ubahnya objek-objek (alat) belaka. Sementara eksistensi Rebecca membutuhkan sarana-sarana untuk memelihara tubuh mereka agar berdaya dalam pertarungan melawan jasad renik corona.

Kedua, eksistensi Yulianti adalah nama untuk menunjuk karakter yang tidak memercayai bahwa COVID-19 itu ada sebagai makhluk alami yang dapat menyerang tubuh manusia. Cukup menarik bahwa eksistensi Yulianti berkembang dari sekian banyak manusia Indonesia. Mereka meyakini bahwa COVID-19 hanyalah isu politik yang dibesar-besarkan oleh pengampu kuasa politik di negeri ini.

Penulis cuplikkan dari sebuah rekaman video yang belakangan ini viral di media sosial. Rekaman video itu dibuat dan diunggah oleh Ibu Yulianti yang berdomisili di tanah Abang, Jakarta saat sedang makan di Bebek sawah di Padang.

Padang kota bebas. Bisa makan apa aja bisa. Nggak ada yang di-*lockdown*. Nggak ada pembatasan dan sekat-sekat. Lihat tu rame pada makan. Nggak ada jaga jarak. Padang aman. Nggak takut korona. Takutnya ama kolor celana (disambut gelak tawa teman-temannya). Lihatlah... Lihat... Saya sedang makan di Bebek Sawah. Rame. Nggak ada jaga jarak kayak di Jakarta. Bebas. Kenapa kita di Jakarta pada panik semua?! Ngak usah takut. Terus aja lawan, pemerintah zalim! (disadur dari rekaman video Ibu Yulianti yang dia unggah dilaman *Instagram @hidayahsmartphone* di 4 Juli 2021)

Ibu Yulianti itu tidak sendiri. Ada banyak warga di Indonesia ini yang berpandangan serupa dengannya. Menurut survei BPS yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 pada 2 Oktober 2020 dan dilansir oleh *helloSEHAT*, ada 44,9 juta orang atau 17% orang Indonesia yang merasa tak mungkin terpapar atau tubuhnya kebal terhadap COVID-19. Rasa tidak percaya ini mempunyai dasar alasan. Bagi yang mengabaikan protokol kesehatan karena menganggap penyakit ini sebagai sesuatu yang tidak serius atau flu biasa. Sebagian yang lain merasa kebal dan tidak mungkin tertular

COVID-19. Sebagian lain meragukan pencatatan angka penularan terlalu dibesar-besarkan atau data kasus yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 itu tidak benar dan simpang siur.

Namun menarik untuk disimak. Ketidakpercayaan orang Bangkalan, Madura, terhadap COVID-19 disebabkan oleh pengetahuan mereka terhadap penyakit *ceklek* (radang paru-paru) yang pernah mewabah di Madura. Gejala *ceklek* ini memiliki kesamaan dengan COVID-19 yaitu sesak dan batuk-batuk. Untuk menghindari penularan *ceklek*, mereka hanya dilarang untuk mengonsumsi makanan yang disajikan oleh keluarga yang sedang terjangkit. Tidak perlu memakai masker, tidak perlu repot-repot memakai sanitasi tangan dan disinfektan, tidak perlu tes usap atau antigen, pun tidak perlu pembatasan fisik dan sosial.⁹

Ketidakpercayaan tersebut membuat sebagian besar masyarakat Madura mempercayai *ceklek* sama dengan COVID-19. Lantas muncul candaan “orang Madura sakti-sakti”, sebagai tanggapan atas nihilnya kasus terkonfirmasi COVID-19. Itu sebabnya mereka melawan saat orang Madura yang berada di Surabaya dilarang mudik dan dilakukan penyekatan Hari Raya Idul Fitri pada 6-18 Mei 2021 di Jembatan Suramadu. Namun, dua minggu setelah Idul Fitri jasad renik itu mengamuk di beberapa desa di Bangkalan dan mengakibatkan 5-6 orang mati dalam sehari untuk satu desa.¹⁰

Penyangkalan adanya COVID-19 dari eksistensi Yulianti ini kiranya berpusat pada penolakan kebebasan tubuhnya dibatasi untuk bermobilitas dan bergaul secara sosial. Mereka merasa eksis ketika *standing point* tubuh mereka berada pada kesosialan (relasi-relasi sosial), karena dari situlah —meminjam Marleau-Ponty—arena penglihatan (*field of vision*) dalam memandang atau berhubungan dengan realitas dunia. Terlebih bagi orang Madura, meminjam Marleau-Ponty, tubuh mereka telah menyimpan memori terhadap wabah *ceklek* yang serupa dengan COVID-19 dan mereka telah memiliki pengalaman untuk mengatasinya. Memori itu merupakan pra-pengetahuan lokal yang sayangnya tidak dijadikan titik tolak edukasi kepada mereka.

⁹ Siti Sumriyah, “Anekdote Orang Madura dan Kesaktian Kiai Kampung”, dimuat dalam rubrik *Kampung Gusdurian*, 30 Juni 2021, paragraf 4, diunduh dari <https://gusdurian.net/COVID-19-anekdot-orang-madura-dan-kesaktian-kiai-kampung/>

¹⁰ Sumriyah, “Anekdote Orang Madura”, paragraph 5

Berbeda dengan penolakan masyarakat Madura, penyangkalan Ibu Yulianti yang tampak sebagai kelas menengah karena menghadapi absurditas yang sulit dia pahami. Pada akhirnya ia atau eksistensi ini terjatuh untuk mencari kambing hitam pada penguasa politik. Hal itu justru menandakan kerapuhannya dengan cara menyangkal realitas COVID-19 dan mencari pelarian dari Jakarta ke Padang untuk membebaskan diri dari pembatasan gerak tubuhnya.

Ketiga, eksistensi Benjiko bukan orang buta pengetahuan dan buta sains mengenai mekanisme generatif pervirusan. Mereka belajar untuk mencari tahu dan penjelasan mengenai COVID-19 dan cara-cara untuk mengatasinya. Justru karena itu mereka mencurigai adanya penyebar teror ketakutan yang dihembuskan melalui media sehingga melumpuhkan kekuatan tubuh manusia Indonesia. Mereka mencurigai para dokter yang begitu gegabah memberikan obat-obatan ke dalam tubuh mereka yang terinfeksi hingga banyak nyawa tak terselamatkan. Mereka ikut dalam kekisruhan perdebatan antara virolog, epidemiolog dan dokter dalam menyikapi pandemi ini. Perang mereka adalah terhadap penyebar teror horor COVID-19, sementara yang mereka serukan adalah kewaspadaan.

Penulis ambil contoh tulisan eksistensi Benjiko dari laman *Facebook* tertanggal 20 Juni 2021:

Pandeminya jelas ada dan pasti begitu pula dengan virusnya jelas ada, tapi yang ditentang adalah narasi keberbahayaannya yang sedemikian rupa sehingga semua orang dipaksa menjalani respons seolah besok mau kiamat. Pandemi hanya bicara soal luas sebaran paparan/infeksi dan sama sekali bukan soal tingkat *fatality rate*-nya. Lagian liat aja laporan harian statistiknya di mana katanya sekarang ada 1,9 juta orang positif tapi yang meninggal 53 ribu orang (itu pun *mostly* punya komorbid berat seperti kanker dan diabetes). Artinya terdapat 1,8 juta orang yang tidak mati karenanya, tapi kenapa responsnya dibalik seolah yang mati 1,8 juta orang dan yang hidup cuma 53 ribu orang sih? Kenapa tidak dipertanyakan dan diteliti mengapa kematian hanya terjadi pada yang 53 ribu orang tapi

tidak pada 1,8 juta orang yang lainnya yang katanya sama sama positif? Dan jangan lupa di luar angka tersebut di atas masih ada 270 juta orang di Indonesia yg masih hidup (Bengar Gurming, FB, 19 Juni 2021).

Cukup banyak eksistensi Benjiko ini perang di media sosial melawan apa yang mereka sebut kampanye teror tentang COVID-19. Mereka menggunakan rasionalitas dalam membaca angka-angka dan sangat melek statistik. Mereka memandang angka-angka kematian dengan rasa dingin dan tidak menjangkarkan pada tubuh manusia yang terbinasakan oleh jasad renik itu. Hal ini tampak seperti warisan perdebatan di dalam sejarah pemikiran filsafat antara pemeluk yang mengunggulkan rasio ketimbang tubuh (pengaruh Descartes) dan pemeluk yang memperjuangkan tubuh sebagai subjek dalam berhubungan dengan realitas dunia (Marleau-Ponty).

Eksistensi Benjiko menyerukan kewaspadaan menghadapi pandemi dengan menularkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah agar dipelajari seperti contoh di bawah ini:

Masih banyak yang belum tahu masalah *jejas vaskuler* (kehilangan darah yang berlebihan-penulis) ini, padahal salah satu faktor *fatality rate* padae kasus infeksi covid ini adalah *jejas vaskuler*. Udeh tau lagi infeksi dan harusnya *bed rest* malah masih pada aktivitas fisik berat seperti sepedaan, lari, jogging, ngepel, dan lain-lain. Harusnya hal seperti inilah yang diliterasikan kepada publik dan bukannya melarang larang publik yang aneh-aneh dan mengecapnya abai kalau tidak mau ikut keinginan mereka (Bengar Gurming, FB, 19 Juni 2021).

Persisnya eksistensi Benjiko menyerukan agar publik dididik agar melek pengetahuan tentang pencegahan (mitigasi) ketimbang memberitakan tentang angka yang terpapar COVID-19 yang mati dan yang sembuh. Sebab, menurut mereka, publik di Indonesia ini buta pengetahuan dan irasional.

Keempat, eksistensi Natali menyikapi pandemi dan absurditas itu dengan optimis, reflektif dan mewujudkan solidaritas warga terhadap yang mengalami sakit. Dalam kerapuhan mereka menerima bahwa jasad renik itu pembunuh

yang mengancam di mana-mana. Namun, mereka tidak mencari kambing hitam pada penguasa politik, melainkan mengajak manusia untuk merefleksikan kekeliruannya, kebatilannya, keserakahannya, dalam mengeksploitasi alam dan hubungan sesama manusia. Mereka mencoba menebarkan cuaca positif untuk hidup dalam *new normal* maupun kedaruratan dengan mematuhi protocol kesehatan dan memperbaiki cara hidup yang lebih sehat. Mereka mengatasi keadaan pandemi ini dengan saling berbagi dan berbela rasa.

Tulisan dari Erma Retang di laman *Facebook* ini mengekspresikan eksistensi Natali:

Gotong royong yang terorganisasi terbukti mampu mengalahkan serbuan virus corona di lingkungan kami. Kami beruntung, keluarga isoman yang ada di kampung kami bersedia legawa, barang-barang yang mereka butuhkan kami cantolkan pada pagar rumahnya, mereka merasa dikucilkan malah merasa ditemani dan ditolong meskipun tidak boleh *gabrusan* (ngobrol-ngobrol dengan tetangga-penulis) Satgas *thak-thek* (cekatan-penulis) ngerjakan tugas masing-masing, siap mondar-mandir ke toko - rumah keluarga isoman di tengah serbuan virus dan selalu berkomunikasi dengan keluarga isoman (Erma Retang, FB, 7 Juli 2021).

Eksistensi Natali menghormati tubuh-tubuh yang menderita dan karena itu mereka berusaha membantu memenuhi kebutuhan tubuh yang sakit dengan menyediakan asupan-asupan yang dibutuhkan. Sikap ini tumbuh dalam kampung-kampung dan kompleks perumahan, bahkan *tower-tower* apartemen. Peranan ketua RT memang signifikan dalam menggerakkan belarasa warga terhadap tubuh-tubuh tetangganya yang menderita.

Mereka merefleksikan pandemi ini sebagai akibat penghancuran lingkungan oleh manusia seperti tulisan ini:

Di hari lingkungan hidup kali ini, planet bumi diterpa tragedi, berupa pandemi COVID-19. Hal itu menunjukkan bahwa alam telah mengambil haknya dengan caranya sendiri. Sejalan dengan tema peringatan hari lingkungan hidup kali ini, keberadaan pandemi COVID-19, menjadi pembelajaran agar manusia lebih bersahabat dengan alam. *Connect with nature* (Kasman Jaya Saad, 4 Juni 2020, dosen KLH Unisa, Palu).

Pendeknya, eksistensi Natali senantiasa berpikir positif dan memberikan solusi praktis maupun reflektif dalam menghadapi pandemi ini. Mereka menempatkan pandemi ini sebagai sarana untuk memperbaiki hidup di masa depan dengan mengubah cara berelasi dengan alam dan sesama manusia.

Refleksi di bawah ini telah menguliti perilaku bersama sebagai manusia Indonesia yang saya kutip dari laman *Facebook*:

Nak, peta pandemi yang merah menyala dan terus berkirim berita kematian ini adalah buah paduan kenaifan dan kekebalan yang kita wujudkan dalam penolakan terhadap pengetahuan, laku rendah hati dan tulus dan juga penghormatan kepada kehidupan (Willy Pramudya, FB, 4 Juli 2021).

13.4 Merefleksikan Tubuh Manusia Indonesia sebelum Pandemi

Marleau-Ponty sesungguhnya mengajak kita untuk mengenali tubuh kepada asalnya, yaitu sebagai subjek dalam berhubungan dengan dunia. Munculnya kerapuhan yang kita alami saat pandemi ini pada hemat saya merefleksikan adanya kesadaran untuk mengenali tubuh pada asalnya sebagai subjek. Sebab, selama ini tubuh kita mungkin tidak diperlakukan sebagai subjek, melainkan menjadi objek, yang disebut Bourdieu¹¹ “proyek tubuh” yang dipekerjakan sebagai pembawa nilai simbolik. Tubuh memberi status pada pemiliknya,

¹¹ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, terjemahan dari Prancis ke Inggris oleh Richard Nice, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984, 16

kekuasaan untuk memperoleh keuntungan tertentu, hingga tubuh dimaknai sebagai kapital. Maka, bertunasnya kesadaran akan kerapuhan kebertubuhan kita dalam pandemi ini merupakan antithesis dari tesis-tesis proyek tubuh tersebut.

Bourdieu telah membuat penelitian pada masyarakat modern yang berorientasi konsumsi mengenai citarasa (*taste*). Kemampuan menentukan citarasa adalah suatu kekuasaan yang dimiliki kelas dominan dan digunakan untuk melanggengkan dominasi tersebut. Ada jenis tubuh yang dianggap lebih bernilai daripada tubuh yang lain.¹² Contoh tubuh yang berkulit putih mendominasi tubuh kulit hitam atau sawo matang hingga menentukan citarasa tentang kecantikan kulit. Akibatnya, mereka yang berkulit hitam/sawo matang merasa rendah diri dan berusaha untuk mengubah kulitnya menjadi putih agar setara dengan ras dominan tersebut. Gejala di Indonesia saat ini berusaha mengubah kebertubuhannya sebagaimana model “K-Pop” (*Korean-Pop*). Meski K-Pop adalah genre musik dari Korea tetapi para figurinya telah menghadirkan “tubuh Asia” yang tinggi, tampan (cenderung cantik), bahu lebar, pinggang ramping, dan kemudian menjadi *trendsetter* model tubuh bagi pemujanya.

Pengobjekan tubuh itu erat kaitannya dengan institusionalisasi masyarakat konsumsi. Lefebvre berpendapat bahwa kita hidup sebagai masyarakat yang secara sistematis dibentuk menjadi masyarakat “birokratis” yang dikontrol oleh konsumsi. Lefebvre menunjukkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari manusia modern diinstitusionalikan oleh ide tentang cantik (*beauty*) dan awet muda (*youthfulness*).¹³ Masing-masing komoditas menciptakan birokrasi untuk mengatur kita sebagai pembeli yang taat, mulai dari mempersiapkan iklan, sarana pengiklanan, sales, sistem belanja *offline* dan *online* dengan pembayaran langsung maupun menggunakan *e-money*, dan sebagainya.

Dengan demikian manusia modern telah terjatuh ke dalam konstruksi ketubuhan untuk mengikuti standar cantik (*beauty*) dan awet muda (*youthfulness*). Keduanya menjadi kata kunci bagi manusia modern untuk berpengharapan hidup yang panjang (*life expectation*). Untuk itu, manusia

¹² Bourdieu, *Distinction*, 13

¹³ Henri Lefebvre, *Everyday Life in the Modern World*, terjemahan dari Prancis ke dalam Inggris oleh Sacha Rabinovitch, (New York, San Fransisco, London: Harper Torchbooks, 1968), 96

modern melakukan pelbagai cara dan mengeluarkan biaya untuk mewujudkan cita-cita menjadi cantik dan awet muda. Ide dan citarasa ini didominasi oleh kelas dominan dan kemudian menjadi rujukan bagi kelas di bawahnya.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Hadi Kusuma dan Tri Krianto (2018)¹⁴ terhadap remaja perempuan di Indonesia mengungkapkan bahwa mereka mengejar “tubuh kurus itu indah”. Untuk itu mereka mendisiplin tubuh mereka dengan membatasi makan. Sebanyak 54,5% remaja mengonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal kecukupan konsumsi antara 69,5%–84,3%. Sedangkan rata-rata kecukupan konsumsi protein remaja yang seharusnya berkisar antara 88,3%-129,6%, dan remaja yang mendisiplinkan tubuhnya agar langsing mengonsumsi hanya sekitar 35,6%. Prevalensi kurus pada remaja sebesar 9,4% (1,9% sangat kurus dan 7,5% kurus). Prevalensi gemuk pada remaja sebanyak 7,3% yang terdiri dari 5,7% gemuk dan 1,6% obesitas.

Dalam penelitian tersebut, remaja perempuan yang memiliki tubuh tidak sesuai dengan citarasa cantik cenderung memiliki perilaku makan yang tidak baik sehingga berakibat pada pelbagai masalah kekurangan gizi. Masalah kurang gizi tersebut dapat berupa kekurangan energi dan protein, kurus, obesitas, maupun tinggi badan yang tidak sesuai dengan perkembangan usianya.

Penggunaan model-model iklan dengan menonjolkan penampilan tubuh dalam citarasa tertentu (citarasa K-Pop atau klasik Eropa) mendominasi model tubuh lainnya hingga tubuh lainnya menjadi tidak bernilai cantik (*beauty*). Sementara banyak tubuh-tubuh tidak cantik seperti model iklan hingga pemiliknya berupaya mengubah tubuhnya agar secantik model. Bahkan bagi yang mempunyai uang tak segan mengeluarkan biaya mahal untuk memugar (mengoperasi) tubuhnya seturut komodifikasi kecantikan. Dalam sebuah survei internasional mengenai relasi antara kepuasan hidup dan keadaan tubuh yang cantik, hanya 3% perempuan dari Singapura, Thailand, Jepang,

¹⁴ Muhammad Ridwan Hadi Kusuma dan Tri Krianto, “Pengaruh Citra Tubuh, Perilaku Makan, dan Aktivitas Fisik Terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT) pada Remaja: Studi Kasus pada SMA Negeri 12 DKI Jakarta”, *Perilaku dan Promosi Kesehatan*. Vol. 1, No. 1, April 2018: 23-31

Korea, menyatakan dirinya cantik, sementara di Eropa dan AS hanya 2%. Hasil survei ini menandakan bahwa 97%-98% perempuan di dunia merasa tidak puas dengan tubuhnya.

Ketidakpuasan terhadap tubuh itu mendorong para perempuan, dan juga belakangan ini terjadi di kalangan laki-laki, rela mengeluarkan biaya besar guna mendapatkan tubuh sesuai yang dikonstruksi oleh kuasa komoditas (kuasa pasar). Maka berdirilah pusat-pusat perawatan kecantikan di Indonesia seperti *Natasha Skin Care*, *London Beauty Centre* (LBC), Erha, dan lainnya, termasuk klinik bedah kecantikan. Tubuh kemudian dirinci menjadi bagian-bagian seperti kulit, hidung, mata, kuku, buah dada, kaki, wajah, rambut, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian Dian Tirta Prahmadhani (2007)¹⁵ pada pusat perawatan LBC terhadap narasumber usia dewasa, terungkap bagaimana para konsumen perempuan mengkonstruksi rincian tubuh mereka yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Konstruksi Tubuh Cantik

Konstruksi Tubuh Yang Diminati	Persentase
Alis mata yang melengkung	98,33%
Warna bibir kemerahan	95%
Bulu mata yang panjang dan lentik	93,33%
Hidung mancung	81,66%
Rambut warna hitam	71,66%
Bentuk amta bulat	68,33%
Rambut lurus	58,33%
Bentuk bibir sedang	56,66%
Pupil mata coklat	53,33%
Wajah lonjong	36,66%

Sumber: Dian Tirta Prahmadhani (2007)

¹⁵ Dian Tirta Prahmadhani, *Persepsi Wanita Dewasa Pengguna Produk Skin Care Tentang Kecantikan*, skripsi yang diajukan untuk memenuhi gelar sarjana psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007

Tidak hanya konstruksi bagian tubuh yang cantik, rupanya kulit yang cantik telah menjadi dambaan utama dalam mengonstruksi pengertian *beauty* dan *youthfulness*. Tabel di bawah ini secara mengejutkan memperlihatkan bahwa semua perempuan mendamba kulit tubuh yang halus mulus dan wajah yang merona (*glowing*).

Tabel 5. Konstruksi Kulit Cantik

Konstruksi Kulit Cantik	Persentase
Kulit wajah halus mulus	100%
Kulit kaki halus	100%
Rona kulit wajah bercahaya (<i>glowing</i>)	100%
Kulit bibir lembut kenyal	100%
Kulit normal	98,33%
Permukaan kulit tubuh tak berbulu	96,66%
Permukaan kulit tubuh agak berbulu	63,33%
Warna kulit langsung	56,66%
Memiliki pori-pori kulit rapat	53,33%
Wajah tak berjerawat	41,66%

Sumber: Dian Tirta Prahmadhani (2007)

Untuk mengonstruksi tubuh itu, *Zap Beauty Index* telah melakukan survei pasar seperti yang diberitakan oleh *Tirto.id* pada 18 September 2018. Setidaknya perempuan Indonesia mengeluarkan paling sedikit 20% dari total uang belanja bulanan untuk membeli produk *fashion* dan kecantikan. Bahkan mereka yang berusia antara 18 hingga 23 tahun alias Generasi Z bisa merogoh kocek antara Rp 200 ribu – Rp 400 ribu per bulan, atau sampai 40% uang bulanan untuk membeli produk produk *skincare*, kosmetika dan *fashion*.

Dalam survei yang sama, yang diambil dari 17.899 responden itu, perempuan Milenial Indonesia (lahir antara 1977-1995) menghabiskan antara Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta di klinik kecantikan. Sedangkan perempuan Generasi X, atau usia antara 42 hingga 53 tahun, tak segan mengeluarkan Rp 1 juta hingga Rp 3 juta per bulan untuk belanja *fashion*, produk kecantikan, dan perawatan di klinik kecantikan. Salah seorang wartawan bisnis golongan Generasi Milenial mengaku mengeluarkan biaya untuk perawatan kulit

(*skin care*) dan kosmetika mencapai 25% dari pendapatan per bulannya. Pengeluaran yang besar ini dipahami sebagai cara memelihara tubuh agar memenuhi kriteria *beauty* dan awet muda.

Belakangan ini konsep cantik dan awet muda di kalangan kelas menengah kota besar tidak sekadar pada perawatan kulit, kosmetika dan tubuh langsing, melainkan juga sehat dan bugar. Untuk hidup sehat dan bugar dilakukan dengan cara merawat diri dalam olah raga mulai dari *gym*, *fitness*, senam, yoga, *jogging*, naik sepeda, dan lainnya, yang harus dibayar dengan uang. Selain itu juga memperhatikan diet makanan sehat seperti model *food combining*, vegan dan vegetarian dan lainnya yang tidak terbilang murah.

Demikianlah kesadaran ketubuhan manusia sebelum pandemi diorientasikan sebagai objek cantik dan awet muda ketimbang esensinya sebagai subjek mengada di dunia. Tubuh ini mengada untuk menghidupi dan dihidupi alam.

13.5 Penutup

Kesadaran akan kerapuhan kebertubuhan kita telah menjadi antithesis atas tubuh yang sebelum masa pandemi dikonstruksi menjadi *beauty* dan *youthfulness*. Kini, ide-ide *beauty* dan *youthfulness* sebagai simbol kekuatan manusia dalam membangun kebertubuhannya runtuh dan terkapar di hadapan pandemi. Dalam tegangan itu, manusia Indonesia mengalami apa yang disebut Camus dengan istilah absurditas.

Dalam karya novelnya yang berjudul *The Myth of Sisyphus* (1942)¹⁶ Camus menggambarkan tentang absurditas yang dapat ditafsirkan sebagai ketidakpastian masa depan kehidupan. Absurditas berada di antara jalinan kontradiksi yang akan menampak ketika nalar tidak dapat menyatukan atau menyusun unsur-unsur yang bertegangan menjadi satu pemahaman logis atau terstruktur. Munculnya empat eksistensi manusia Indonesia dalam menghadapi pandemi itu menunjukkan bagaimana masing-masing menyikapi absurditas seturut visi hidup yang mereka miliki.

¹⁶ Albert Camus, *The Myth of Sisyphus and Other Essays*, terjemahan dari Prancis ke dalam Inggris oleh Justin O'Brien, (Dominican House of Studies, 1955)

Dihadapkan pada absurditas ini, kita telah diingatkan Marleau-Ponty untuk mengembalikan tubuh kita sebagai subjek agar dapat melihat dunia tanpa penghalang pemroyekan tubuh (kepentingan untuk cantik dan awet muda maupun kepentingan ekonomi-politik lainnya). Kita kembalikan tubuh yang telah teralienasi menjadi tubuh milik sendiri yang mengingini hidup sebagaimana adanya. Maka tolonglah tubuh itu agar tidak direnggut jasad renik begitu saja!

Daftar Pustaka

- Bourdieu P. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, terjemahan dari Prancis ke Inggris oleh Richard Nice. Cambridge: Harvard University Press.
- Camus, Albert, Sampar. 1955. *The Myth of Sisyphus and Other Essays*. terjemahan N.H Dini. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tirta D. 2007. Persepsi Wanita Dewasa Pengguna Produk Skin Care Tentang Kecantikan. [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Foucault M. 1978. *History of Sexuality, terjemahan dari Prancis ke dalam Inggris oleh Robert Hurley*. New York: Pantheon Books.
- Kusuma H, Ridwan M, Krianto T. 2018. Pengaruh Citra Tubuh, Perilaku Makan, dan Aktivitas Fisik Terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT) pada Remaja: Studi Kasus pada SMA Negeri 12 DKI Jakarta. *Perilaku dan Promosi Kesehatan*. 1(1): 23-31.
- Lefebvre H. 1968. *Everyday Life in the Modern World*, terjemahan dari Prancis ke dalam Inggris oleh Sacha Rabinovitch. New York, San Fransisco, London: Harper Torchbooks.
- Merleau-Ponty M. 1962. *Phenomenology of Perception*, terjemahan dari Prancis ke dalam Inggris oleh Colin Smith. London & New York: Routledge.
- Sumriyah S. 2021. Amekdot Orang Madura dan Kesaktian Kiai Kampung. Rubrik Kampung Gusdurian, 30 Juni 2021, program 4, diunduh dari <https://gusdurian.net/COVID-19-anekdor-orangmadura-dan-kesaktian-kiai-kampung/>.



14. DINAMIKA DI KEPULAUAN SUNDA KECIL, KAWASAN WALLACEA: Sebuah Catatan Perjalanan Kala Pandemi COVID-19

Akbar A Digdo

CTSS Fellow

Abstrak

Pandemi COVID-19 memberikan dampak global yang juga teresonansi hingga ke tingkat lokal. Sebagaimana berbagai negara lain, Indonesia juga mengalami dampak pandemik yang timbul karena berbagai hal, salah satunya pembatasan kegiatan publik yang berdampak pada transportasi dan distribusi barang dan jasa. Namun demikian, rentetan peristiwa ini memberikan kedalaman dan dampak yang beragam di wilayah kepulauan yang berbeda. Dengan menggunakan *framework* Sosial-Ekologi, tulisan ini mencoba untuk secara cepat menangkap fenomena dampak pandemik di Labuan Bajo dan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi wisata alam. Labuan Bajo yang memiliki investasi wisata yang lebih maju, mengandalkan wisata massal dan memangku investasi pembangunan yang besar, ternyata menerima dampak yang terlihat lebih nyata. Sementara itu, Rote Ndao yang menjadi destinasi wisata yang tersegmen khusus, dengan investasi lebih rendah dan mampu menyatu dengan karakteristik lokal terlihat lebih mampu beradaptasi. Kemampuan untuk menyatu dengan karakteristik lokal, keragaman penghidupan dan kemampuan untuk mandiri, terlepas atau meminimalkan faktor eksternalitas mejadi kunci agar sebuah daerah kepulauan mampu melenting setelah terjadinya tekanan, seperti pandemi COVID-19 ini.

14.1 Latar Belakang

Saat COVID-19 menerpa di awal 2020, mendadak semua orang harus menghentikan atau merubah kegiatan-kegiatannya pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diawali dengan *lockdown* kota Wuhan, Tiongkok. Sayangnya upaya ini tidak berhasil untuk mencegah penularan ke kota atau negara lain. Kini, berbagai upaya serupa *lockdown* menjadi kebutuhan global untuk mengendalikan penularan dan fatalitas. Namun, di samping pengendalian pandemi, dampak ekonomi terasa sekali ketika kegiatan publik dibatasi dan perjalanan pun hanya untuk yang sangat esensial. Sektor retail, misalnya toko tradisional dan modern pun dibatasi aktivitasnya saat masa *lockdown* berlaku. Demikian pula dengan bisnis transportasi yang terhenti. Semuanya ini menimbulkan dampak domino yang berskala global, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era industrialisasi dicituskan. Faktor ketidakpastian semakin tinggi dengan datangnya Gelombang Kedua, Ketiga dan seterusnya akibat timbulnya *strain-strain* baru. Setidaknya itulah yang terlihat pada media-media *above the line*. Namun demikian, pada masa pandemi global ini ada beberapa aspek yang mungkin belum terungkap sepenuhnya misalnya apakah dampaknya merata di Nusantara? Atau bagaimana masyarakat mengatasinya? Tulisan ini akan mencoba menyampaikan sintesis singkat yang didasari atas perjalanan di masa pandemi di Indonesia dari Juli 2020 hingga Januari 2021, sebuah rentang masa yang penuh ketidakpastian, saat vaksin masih jauh dari kenyataan. Ulasan ini akan menyampaikan rangkaian observasi saat perjalanan di wilayah kepulauan di Sunda Kecil, Kawasan Wallacea, khususnya Nusa Tenggara Barat (Sape, Sumbawa), Nusa Tenggara Timur (Labuan Bajo -Flores, dan pulau Rote Ndao).

Pandemi COVID-19 terjadi pada era Anthropocene, di mana manusia dan peradabannya telah lekat menjadi bagian dari biosfer, dan telah menimbulkan perubahan mendasar pada alam yang telah menopang peradapan manusia (Zalasiewicz *et al.* 2010; Zalasiewicz *et al.* 2011). Kelekatan ini terjadi dalam tatanan kompleks dan saling terkait satu dan lainnya. Interaksi sosial-ekologi ini saling membentuk pada berbagai skala, dari sangat lokal hingga global. Untuk itu, dalam tulisan ini kita akan melihat dampak COVID-19 dengan menggunakan sudut pandang sistem sosial-ekologi. Dalam konsep

ini, sistem sosial merujuk kepada dimensi manusia pada berbagai bentuk dan atribut politik, ekonomi, budaya dan teknologinya; sedangkan sistem ekologi merujuk kepada biosfer, di mana kehidupan berlangsung di planet Bumi. Kedua sistem ini –manusia dan biosfer beserta makhluk hidup yang ada padanya– membentuk kesatuan yang kohesif. Kesatuan elemen manusia dan alam ini kemudian akan secara dinamis akan berusaha mencapai kondisi lenting/*resilient*, dalam rentang kapasitas adaptasi tertentu untuk merespons tekanan/ancaman (Biggs *et al.* 2021; Folke *et al.* 2011; Folke *et al.* 2016).

Kelentingan sosial-ekologi, atau *social-ecological resilience*, adalah kapasitas untuk beradaptasi atau bertransformasi ketika sistem sosial-ekologi mengalami perubahan akibat adanya tekanan/ancaman yang tidak diperkirakan, sehingga tetap dapat menyokong kehidupan yang manusia yang sejahtera. Kemampuan untuk beradaptasi ini bisa dicapai dengan perubahan pola pembangunan dan bahkan suatu pola pembangunan yang baru/unik. Kapasitas untuk beradaptasi terbangun dengan adanya pengalaman dan pengetahuan untuk merubah ancaman menjadi kesempatan (Cleveland *et al.* 1996, Gunderson dan Holling, 2002). Dalam hal ini, sistem sosial-ekologi adalah sistem yang kompleks dan adaptif, dengan komponen dan sub-komponen yang saling terhubung, dan bersifat non-linear, sehingga sulit untuk menentukan sebab akibat dalam satu urutan variabel sederhana. Sistem ini memiliki jalur-jalur umpan balik yang berulang (*redundant*) dan beragam sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan.

14.2 Metode

Pengamatan langsung dan pencatatan dilakukan sebagai bagian dari observasi di lokasi-lokasi yang disebutkan. Asumsi dasar yang dibangun pada masa perjalanan ini adalah terjadinya fragmentasi akses akibat pembatasan perjalanan publik yang kemudian menimbulkan efek turunan ke sektor-sektor yang lain, misalnya sektor pangan dan wisata. Perjalanan antar daerah pada masa pandemi sangat dibatasi, untuk mencegah terjadinya lonjakan infeksi/penularan. Selain observasi, wawancara juga dilakukan metode KII (*Key Informant Interview*) yang meliputi nelayan, nelayan rumput laut,

pengusaha wisata, pemandu wisata dan masyarakat secara umum. Foto-foto juga diambil untuk mendukung poin-poin yang dibahas, disertai dengan catatan-catatan observasi dan diskusi.

Daerah yang dipilih dalam diskusi ini adalah Labuan Bajo – Sape dan Pulau Rote (Gambar 17). Kedua daerah ini dipilih karena keduanya memiliki karakteristik yang mirip, dengan bentang alam-laut pesisir dan kepulauan. Sape terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keduanya digabungkan dalam KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Labuan Bajo. Pulau Rote terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua daerah ini juga disebutkan dalam RPJMN 2020–2024 dengan arahan investasi pembangunan yang relatif jelas (Gambar 18). Kedua tempat ini memiliki perbedaan pada tingkat investasi yang sudah ada. Labuan Bajo – Sape mewakili daerah dengan investasi wisata bahari dan infrastruktur yang relatif tinggi serta mendapatkan perhatian politik yang semakin besar. Sebaliknya, walaupun wisata di Rote sudah cukup lama berlangsung, wisata bahari di sana lebih terlihat sederhana, bervolume rendah dan “*genuine*”. Rote juga belum menerima perhatian politik yang besar dari pemerintah pusat. Labuan Bajo – Sape dan Pulau Rote, keduanya akan memberikan respons terhadap kondisi pandemi COVID-19, sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada di dua tempat tersebut.



Gambar 17. Box menunjukkan lokasi-lokasi tujuan perjalanan dalam artikel ini. Kiri: Labuan Bajo – Sape; Kanan: Pulau Rote



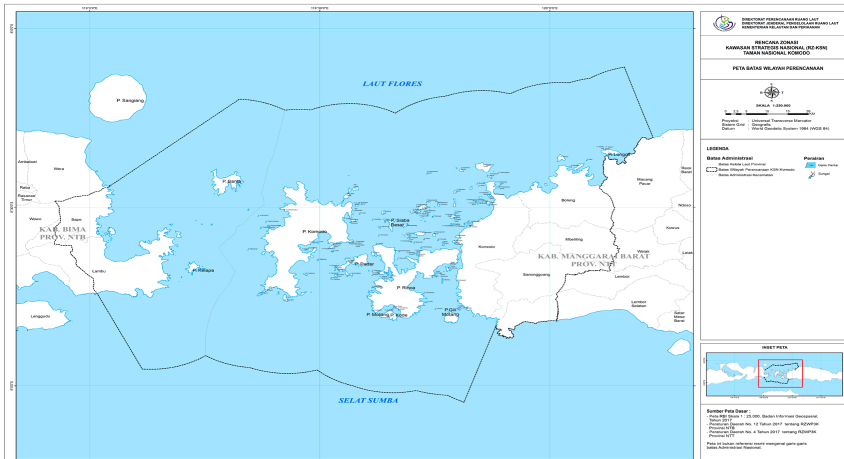
Gambar 18. Skenario konektivitas dan prioritas pembangunan. Labuan Bajo sebagai KSPN-Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Rote sebagai SKPT-Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Sumber: Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

14.3 Observasi

A. Labuan Bajo

Labuan Bajo adalah episentrum wisata yang fokus kepada Komodo dan keindahan alam Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat dan sekitarnya. Di Labuan Bajo terdapat Pelabuhan niaga, Pelabuhan perikanan dan bandar udara internasional. Sebagai salah satu pusat perekonomian yang dimotori sektor wisata, Labuan Bajo disokong oleh daerah-daerah sekitarnya, terutama Kabupaten Bima, khususnya kota Pelabuhan Sape. Labuan Bajo-Sape juga adalah kawasan yang signifikan dari aspek kebijakan pembangunan. Labuan Bajo ditunjuk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 (Bappenas, 2020). Keduanya digabung dalam satu Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Komodo, menjembatani Provinsi NTB dan NTT dalam perencanaan pembangunan terintegrasi yang berpusat pada Taman Nasional Komodo dan wisata alam pesisir, kepulauan dan budaya (KKP, 2018). Semua ini terkait dengan status komodo (*Varanus komodoensis*) sebagai hewan endemik dilindungi, rentan terhadap kepunahan

(WCMC, 1996). Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 kawasan Labuan Bajo-Komodo-Sape ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), menjadi bagian dari pemusatan pembangunan wisata di 10 destinasi pariwisata yang dikenal sebagai “10 Bali baru” (Kompas, 2018). UNESCO juga menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai *World Heritage Site/Situs Warisan Dunia* (UNESCO, 2005). Lokasi-lokasi ini juga memiliki latar belakang sejarah yang menarik. Pada masa kerajaan Bima, Labuan Bajo masuk ke dalam wilayah kerajaan. Pada masa itu seorang Naib ditunjuk oleh Sultan Bima sebagai wakil raja yang berkedudukan di Reo, untuk mengelola wilayah Manggarai, termasuk Labuan Bajo (Haris *et. al.*, 1997).



Gambar 19. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Komodo yang mencakup Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (Suraji *et al.* 2020).

Sape adalah kecamatan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki pelabuhan penyeberangan dan perikanan. Walaupun belum pada tahap pembangunan yang sama seperti Labuan Bajo, Sape ini memiliki peran vital dalam konteks pembangunan Kawasan. Selain Bima, Sape adalah Pelabuhan terdekat yang memungkinkan aliran suplai komoditas dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kebutuhan bahan pangan yang tidak terpenuhi dari Manggarai Barat, biasanya akan disuplai dari Sape dan jalur kapal niaga. Selain itu konektivitas jalur *ferry* dan darat memungkinkan kendaraan niaga

dari Jawa dan Bali untuk melintas ke Labuan Bajo. Di sekitar Sape dan kabupaten Bima juga terdapat potensi-potensi wisata alam dan budaya yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya terdampak sangat besar oleh pandemi COVID-19, terlihat dengan adanya penurunan tamu yang dipicu oleh kebijakan nasional dan internasional untuk memperketat perjalanan. Selain pengurangan jadwal atau penutupan akses, para pengguna transportasi darat, laut dan udara harus mengikuti rapid test, swab antigen atau *swab* PCR (*polymerase chain reaction*) untuk mendeteksi potensi penyebaran virus COVID-19. Hal ini kemudian menimbulkan terjadinya efek-efek turunan ke bisnis penunjang misalnya akomodasi, transportasi dan penyedia jasa boga. Penyedia jasa minat khusus, seperti *dive operator* dan persewaan alat selam, jasa LOB (*Live on Board*) kapal Phinisi mengalami dampak lebih dalam karena keduanya fokus pada segmen pasar tertentu dan relung yang sempit. Wawancara dengan beberapa *tour operator* dan asosiasi operator wisata alam dan bahari (GAHAWISRI - Gabungan Usaha Wisata Bahari & Tirta Indonesia) menyatakan bahwa kurangnya kunjungan dalam jangka panjang akan berdampak serius pada usaha mereka. Beberapa orang, saat wawancara dilakukan, menyatakan bahwa mereka sudah mulai menggunakan dana cadangan yang mereka miliki. Mereka juga menyebutkan kemungkinan untuk menjual aset mereka (alat-alat selam, kapal, properti) untuk menyelamatkan usaha mereka jika pandemi berkepanjangan.

Pihak Balai Besar Taman Nasional Komodo (BBTNK) juga menutup kegiatan wisata di wilayahnya untuk merespons kondisi pandemi ini. Penutupan kunjungan wisata dimanfaatkan oleh BBTNK untuk memperbaiki sistem pengelolaan kunjungan, dengan menerapkan sistem reservasi digital dan pembatasan kunjungan. Kegiatan pengelolaan diteruskan secara rutin dan terlihat peningkatan koordinasi dengan BOPLF (Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores) sebagai pengelola wisata Labuan Bajo. Pada masa pandemi ini, frekuensi penyeberangan juga dikurangi dan kegiatan maritim diawasi oleh pengelola Pelabuhan untuk mengurangi risiko penularan. Di lain sisi, kegiatan perikanan tetap berjalan walaupun untuk kapal dengan kapasitas menengah-besar (di atas 5 GT-gross ton) saat itu terlihat mengurangi kegiatan

penangkapan ikan. Kegiatan perikanan skala kecil (di bawah 5 GT) dan budidaya rumput laut terlihat lebih aktif dan terus menyuplai hasil tangkapan dan memicu berjalannya ekonomi lokal (Gambar 20, Gambar 23).

Selain kapal nelayan dan kapal penyeberangan, banyak dijumpai kapal-kapal phinisi yang kini membuang sauh di Sape. Kondisi kapal-kapal ini bervariasi; dari yang terawat baik hingga yang tak terurus. Narasumber dari Dinas Pariwisata Bima memberikan konfirmasi bahwa kapal-kapal tersebut adalah milik *tour operator* yang bermukim di Bima, yang pada kondisi normal menjalankan paket wisata LoB di Labuan Bajo (Gambar 21). Para operator ini memilih untuk menarik kapal dan kru mereka ke sisi kabupaten Bima dan berlabuh di Sape untuk mengurangi biaya operasional (Gambar 22). Selain itu, merespons kurangnya tetamu internasional, para *tour operator* beralih ke pangsa pasar NTB dan sekitarnya. Harga paket ditekan dan disesuaikan dengan kemampuan pasar lokal. Hal ini dicapai dengan memperpendek waktu menjadi 2 hari 1 malam, dan mencari destinasi-destinasi baru di sekitar Sape, misalnya Pantai Lariti, Tanjung Meriam, Pantai Pink-Lambu, dan Pulau Kelapa.



Gambar 20. Ikan laying (*Decapterus* spp.) hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Sape dibeli oleh pedagang untuk kemudian dibawa ke pasar lokal.



Gambar 21. Deretan kapal berbagai jenis (termasuk phinisi LoB) dan ukuran di Labuan Bajo. Kapal-kapal ini dalam kondisi tidak beroperasi, menunggu kegiatan wisata dibuka kembali.



Gambar 22. Kapal-kapal phinisi LoB (*Live on Board*) dari Labuan Bajo yang kini berlabuh di Sape untuk menekan biaya-biaya operasional.



Gambar 23. Pengeringan rumput laut oleh masyarakat di Kampung Bajau Pulo, Sape

B. Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencakup seluruh pulau Rote dan beberapa pulau satelit di sekitarnya. Pulau Rote relatif mudah dijangkau dari Kupang menggunakan beberapa pilihan transportasi, misalnya kapal *ferry*, kapal cepat dan pesawat udara. Konektivitas antar wilayah di Rote cukup baik, dengan jaringan jalan raya beraspal dan jaringan jalan perdesaan yang tidak beraspal. Rote cukup populer untuk wisatawan, khususnya para penggemar *surfing* nasional atau internasional. Kegiatan ini terpusat di sekitar Nemberala di ujung selatan pulau Rote, terlihat dengan tersedianya infrastruktur penunjang wisata seperti penginapan, toko, rumah makan dan *café*. Rote juga terkenal dengan produksi rumput laut yang sangat baik kualitasnya. Budidaya rumput laut *Eucheuma cottoni* dilakukan di daerah pasang surut, yang biasanya ditumbuhi lamun. Daerah *reef flat*, atau *intertidal flat* ini disebut sebagai *meting* oleh masyarakat setempat. Rumput laut dari Rote dan NTT umumnya telah menjadi komoditas ekspor sejak 2019 lalu. Penduduk pesisir di Rote, sebagaimana tempat lain di sekitar Laut Sawu, memanfaatkan lokasi ini untuk mencari sumber protein, misalnya ikan karang, kerang, teripang dan banyak lagi lainnya. Kegiatan ini secara

sosial dan budaya dianggap penting dan memiliki nama tersendiri, yaitu *makan meting* (Gambar 26), secara harafiah berarti mencari bahan makanan di dataran pasang surut, atau *meting*. Tahun 2009, pesisir Rote terdampak oleh tumpahan minyak dari peneboran minyak di Montara Oil Field milik PTTEP Australasia yang lokasinya berdekatan dengan Ashmore Reef (Wardrop Consulting, 2009). Insiden ini menyebabkan hancurnya budidaya rumput laut dan perikanan di pesisir Rote. Sejak itu, budidaya rumput laut dan perikanan perlahan pulih.

Dalam kondisi pandemi, perjalanan dari dan menuju Pulau Rote juga dibatasi. Moda transportasi umum menggunakan pesawat dan kapal dikurangi frekuensinya dan para penggunanya harus melalui tes kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah, misalnya rapid test, swab antigen atau *swab* PCR (*polymerase chain reaction*) untuk deteksi dini COVID-19. Selain itu, penumpang dan awak diharuskan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan seperti menjaga jarak dan penggunaan masker. Logistik bahan-bahan pokok tetap dapat terdistribusikan dengan baik walaupun ada pembatasan transportasi. Di seputar Nemberala, kegiatan wisata terlihat turun. Ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang nyaris tidak ada. Hotel dan penginapan terlihat kosong atau tutup karena tidak ada pengunjung. Beberapa orang asing terlihat tetap bertahan dan tidak pulang ke negara asal, dengan berbagai alasan. Demikian juga *café* yang biasanya melayani wisatawan terlihat tidak berniaga. Namun demikian, masyarakat pesisir, laki-laki dan perempuan, terlihat tetap aktif mengurus rumput laut dan secara berkala memanennya untuk kemudian dikeringkan. Para-para untuk pengeringan rumput laut terlihat berjajar penuh terisi rumput laut pada berbagai tahap pengeringan, menandakan bahwa tingkat aktivitas itu rutin berjalan (Gambar 25). Rumput laut yang sudah kering ini kemudian dijual kepada pedagang perantara dan dibawa ke Kabupaten Kupang untuk disortir dan disimpan sebelum proses *export*. Proses ini tetap berjalan di bawah arahan pemerintah sebagai kegiatan prioritas yang berorientasi *export*.

Bahan makanan lokal bisa didapatkan langsung dari alam dan menunjang kebutuhan bahan makanan. Kualitas ekosistem yang baik mampu menunjang kebutuhan harian melalui kegiatan matapencaharian seperti perkebunan lahan kering, perikanan skala kecil, dan *makan meting*. Budidaya rumput laut

yang terus berjalan memberikan kesempatan pada masyarakat pembudidaya untuk terus mendapatkan pemasukan (Gambar 24). Jadi walaupun kegiatan wisata terhenti dan transportasi dibatasi, roda ekonomi tetap berjalan pada level tertentu karena proses produksi dan distribusi di tingkat lokal yang terus berjalan. Selain itu, beberapa jenis pangan lokal, seperti ikan kering (Gambar 27) dan *lawar* yang bahan dasarnya rumput laut (Gambar 28), memberikan pilihan sumber pangan bagi masyarakat di Rote. Pengrajin kain tenun tradisional tetap berkegiatan dan mempertunjukkan karya mereka di tepi jalan, di kios-kios sederhana berharap ada tetamu yang datang dan membeli.



Gambar 24. Tali dengan botol sebagai pelampung sebagai media budidaya rumput laut. Budidaya ini dilakukan di dataran pasang surut yang tertutup oleh lamun.



Gambar 25. Rumput laut yang dipanen sedang dikeringkan di para-para, di bawah sinar matahari langsung



Gambar 26. Makan meting, dilakukan di dataran pasang surut. Permukaan air yang rendah saat surut memudahkan mereka untuk memungut hewan-hewan laut dan ikan sebagai sumber makanan



Gambar 27. Kepala Dusun Nusa Manuk, Rote menunjukkan kakap putih hasil tangkapan warganya. Ikan ini digarami kemudian dijemur untuk memudahkan penyimpanan.



Gambar 28. Lawar, makanan sehari-hari di Rote yang dibuat dari berbagai jenis rumput laut.

14.4 Diskusi

Masyarakat memanfaatkan jasa lingkungan dalam bentuk kegiatan wisata, sumber pangan dan budidaya. Secara simultan, kegiatan manusia ini pun memberikan pengaruh kepada ekosistem. Interaksi ini belangsung pada berbagai skala ruang dan waktu, dari tingkat unit sumberdaya yang terkecil hingga skala global. Dalam era *Anthropocene* ini, seluruh biosfer di Bumi telah menerima dampak akibat kegiatan manusia. Kemampuan alam dalam menghasilkan jasa lingkungan pun berubah-ubah sering dengan dinamika pemanfaatan sumberdaya alam oleh peradaban manusia. Manusia dan alam membentuk interaksi yang kompleks dan terus berubah di mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Namun demikian, tidak hanya interaksi sosial-ekologi yang menentukan dinamika ini, faktor-faktor eksternal dapat menimbulkan ancaman/*shock* terhadap keberlanjutan sistem sosial-ekologi ini. Dengan demikian adaptasi terhadap perubahan ini tidak statis, melainkan dinamis dan terus berkelanjutan. Sehingga kondisi yang dicapai pasca sebuah *shock* mungkin tidak akan sama dengan keadaan sebelum sebuah ancaman/*shock* terjadi. Dalam konteks sistem sosial-ekologi, kemampuan untuk pulih dan menyesuaikan komponen sosial dan ekologi untuk beradaptasi ini sangat menentukan kepentingan sebuah sistem sosial-ekologi-*social-ecological resilience* (Folke *et al.* 2016).

Dalam konteks resiliensi sebuah sistem, maka pandemi COVID-19 adalah *shock* yang terjadi pada berbagai skala; pada skala global, regional dan hingga skala lokal. Dampak akan dirasakan beruntun, pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial hingga mungkin ke ekologi. Perlambatan ekonomi, dipicu oleh gangguan produksi, distribusi, dan menurunnya perdagangan akan semakin memberikan tekanan secara beruntun. Sektor-sektor jasa, terutama wisata dan hiburan akan lebih terdampak. Pengurangan jam kerja, kemungkinan pengurangan tenaga kerja dan pengurangan belanja rumah tangga akan memberikan tekanan pada jejaring pengaman sosial (UNCTAD, 2020). Dampak-dampak ini, walaupun tersebar luas secara global, memiliki ragam intensitas yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik lokal. Ragam intensitas tekanan ini pun, kemudian menghasilkan respons yang berbeda-beda.

Dari dua tempat yang didiskusikan kita dapat melihat keragaman intensitas tekanan dan respons. Labuan Bajo dan Rote mengalami perbedaan tekanan dan memberikan respons yang berbeda terhadap pandemi COVID-19 karena adanya konteks lokal yang berbeda. Tabel 5 memperlihatkan respons-respons yang terjadi dan diasumsikan terjadi pada masa pandemi.

Tabel 6. Perubahan karakteristik sektor wisata, perikanan dan budidaya pesisir serta konektivitas yang terjadi karena COVID-19 di Labuan Bajo-Sape dan Rote. Beberapa respons yang ditampilkan adalah asumsi yang dibangun berdasarkan pengetahuan yang ada mengenai lokasi (*). Skala kualitatif yang dicantumkan bersifat relatif.

	Labuan Bajo		Rote	
	Karakteristik normal	Respons COVID-19	Karakteristik normal	Respons COVID-19
Wisata sebagai kegiatan fokus				
Investasi wisata	Sangat tinggi	Pencairan aset wisata; Relokasi asset; Pengurangan waktu operasional, pengurangan pegawai	Rendah	Pengurangan waktu operasi, pengurangan pegawai, pergantian profesi sementara
Jumlah wisatawan	Sangat tinggi	Rendah	Sedang-rendah	Sangat rendah
Asal wisatawan	Internasional, nasional, lokal	Nasional, Lokal	Internasional	Lokal
Pilihan kegiatan wisata	Sangat Beragam	Berkurang, orientasi utama wisata lokal	Spesifik (surfing, pantai)	Berkurang (hanya pantai), orientasi wisata lokal

Tabel 6. Perubahan karakteristik sektor wisata, perikanan dan budidaya pesisir serta konektivitas yang terjadi karena COVID-19 di Labuan Bajo-Sape dan Rote. Beberapa respons yang ditampilkan adalah asumsi yang dibangun berdasarkan pengetahuan yang ada mengenai lokasi (*). Skala kualitatif yang dicantumkan bersifat relatif. (lanjutan)

	Labuan Bajo		Rote	
	Karakteristik normal	Respons COVID-19	Karakteristik normal	Respons COVID-19
Sumberdaya manusia	Sebagian besar profesional/ spesialis terkonsentrasi pada fasilitas wisata tingkat atas; didukung tenaga paruh waktu yang berlatar belakang nelayan atau pertanian	Tenaga profesional terpaksa pergi atau berubah profesi; Tenaga paruh waktu Kembali ke profesi awal sebagai nelayan atau pekebun	Sebagian besar paruh waktu didukung oleh sebagian kecil profesional/ spesialis pada fungsi-fungsi kunci, seperti instruktur dan pengelola	Tenaga paruh waktu kembali ke nelayan dan pekebun; tenaga profesional mencoba bertahan pada kesempatan yang ada di lokal atau pergi
Budidaya dan perikanan pesisir sebagai pendukung				
Kebutuhan pasokan ikan dan makanan laut	Sangat tinggi, membutuhkan pasokan dari luar	Rendah-sangat rendah, pasokan luar terhenti	Rendah	Rendah-sangat rendah
Jumlah nelayan skala kecil	Sedang	Tinggi - sangat tinggi *	Rendah	Sedang *
Budidaya pesisir	Rendah	Rendah*	Tinggi (rumput laut)	Tinggi (rumput laut)
Konektivitas pada sistem lain				
Opsi moda transportasi	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah
Opsi jadwal transportasi	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah

Pandemi COVID-19 menyebabkan efek kejut kepada berbagai aspek sosial di Labuan Bajo dan Rote. Kebijakan pembatasan transportasi dan perjalanan mengakibatkan terhentinya suplai wisatawan. Seiring dengan itu, beberapa pasokan komoditas juga terganggu, terutama komoditas, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kegiatan wisata. Terhentinya kegiatan wisata secara beruntun menghentikan kegiatan ekonomi turunannya. Kegiatan pemenuhan barang dan jasa untuk kegiatan wisata juga turut melambat dan akhirnya terhenti, akibat terganggunya distribusi dan rantai pasok. Rentetan kejadian yang dipicu oleh pandemi ini menuntut respons agar dampak lebih lanjut tidak terjadi. Pergantian profesi, relokasi dan perubahan aset wisata akan membawa konsekuensi baru. Ekosistem pesisir akan semakin banyak dimanfaatkan, terutama oleh orang-orang yang berubah mata pencahariannya dari pariwisata kembali ke perikanan skala kecil, berharap kebutuhan pangan mereka terpenuhi dan berpenghasilan. Dampak dari pengangguran, aset wisata dan usaha yang tidak produktif, *problem* finansial juga akan menimbulkan dampak yang berbeda, semuanya tergantung pada skala dari permasalahan dan respons yang diberikan oleh para pemangku kepentingan. Tentu saja, konektivitas dan interaksi dengan sistem lain (misalnya, provinsi tetangga, kota/daerah lain) dapat mempengaruhi keseluruhan adaptasi/transformasi yang terjadi.

Dalam perspektif sistem kompleks-adaptif, Labuan Bajo memiliki banyak komponen-komponen yang saling terhubung dalam pola yang tidak linear dan secara konstan berubah-ubah. Perubahan pada elemen dan skala yang beragam, dari individu, rumah tangga hingga ke tingkat bentang alam dan masyarakat. Ketika terjadi *shock*/ancaman maka riak dampaknya akan disebarkan melalui konektivitas antar elemen-elemannya. Karena konektivitas yang erat antar komponen, dan sifatnya yang non-linear maka pengaruh ini dapat menyebar dengan cepat dan tidak bisa diprediksi secara tepat. Ini bisa dilihat dari reaksi tanggap yang beragam dan rentetan dampak yang bisa menyebar ke berbagai arah.

Namun demikian, ketergantungan pada wisata yang sedemikian besar, membuat Labuan Bajo kehilangan sifat/karakteristik *redundancy* dan *modularity*, karakteristik yang dibutuhkan agar sebuah sistem yang kompleks dapat adaptif dan lenting/*resilient* (Preiser *et al.* 2018). Dalam konteks

Labuan Bajo, kegiatan ekonomi dan sosial didominasi oleh kegiatan wisata berikut kegiatan dan infrastruktur penopangnya. Sehingga, karena dominasi kapital yang ditanamkan dalam kegiatan wisata di Labuan Bajo sangat besar, maka pengelolaannya juga memerlukan sumberdaya yang besar, misalnya sumberdaya manusia khusus seperti spesialis wisata. Dominasi oleh sektor wisata ini dalam runtutan yang berbeda-beda pada akhirnya menghilangkan keragaman mata pencaharian; dalam hal ini *redundancy* telah berkurang. Kita juga bisa lihat bahwa Labuan Bajo memerlukan input sumberdaya yang besar dari luar untuk mempertahankan tingkat kualitas dan kuantitas yang tepat untuk menopang wisata dengan cakupan yang diharapkan, dari kelas premium hingga wisatawan reguler. Kebijakan nasional yang menetapkannya sebagai KSPN dan tuan rumah KTT G-20 pada 2023 menjadikan daerah ini semakin tergantung pada dinamika politik nasional dan regional. Dalam hal ini, maka aspek modulariti menjadi hilang karena ketergantungan yang tinggi terhadap input dari luar, misalnya dalam bentuk pengunjung, pendanaan, bisnis dan kebijakan nasional untuk melaksanakan agenda politik dan kebijakan turunannya.

Di lain sisi, Rote Ndao memiliki fenomena kepulauan yang seakan-akan menjadi “*antithesis*” Kawasan Labuan Bajo. Sama-sama memiliki ciri-ciri pesisir dan pulau kecil, Rote Ndao juga menopang kegiatan wisata dan kegiatan pengusahaan pesisir, yang didominasi oleh perikanan skala kecil dan rumput laut. Namun demikian, ada perbedaan karakteristik wisata dan perikanan skala kecil yang berlangsung di Rote Ndao. Wisata yang berjalan di Rote Ndao bukanlah wisata yang bercirikan investasi tinggi. Tidak dipungkiri bahwa investasi wisata juga terdapat di Rote, terutama terpusat di Nemberala yang terkenal akan keindahan pantai dan ombaknya yang menantang untuk peselancar/surfer. Beberapa kompleks *homestay*, *resort* dan infrastruktur penunjang wisata seperti *café* dan restoran adalah investasi dari luar. Namun demikian, investasi ini relatif menyatu dengan cukup baik dengan karakteristik lokal. Volume wisatawan yang relatif rendah, dengan segmen khusus turut membentuk kegiatan wisatanya yang relatif tidak banyak merubah tatanan sosial dan ekologi yang ada di sana. Ini kebalikan dari yang terjadi di labuan Bajo, di mana pola-pola dari luar sedemikian kuat menekan pola-pola lokal dengan mendatangkan sumber daya luar daerah.

Para pelaku wisata, yang mengalami kolaps pada masa pandemi ini dapat menyesuaikan dengan kondisi relatif lebih mudah dibandingkan dengan kolega-kolega mereka di Labuan Bajo. Sejumlah infrastruktur wisata yang ada dapat dikelola dengan biaya yang jauh lebih rendah karena tidak bersifat padat investasi. Para pelaku wisata, misalnya para pemandu dan pekerja *homestay* dapat kembali menekuni kegiatan pengelolaan pesisir dan perikanan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menggambarkan kesatuan sistem sosial ekologis yang relatif lebih adaptif terhadap pandemi, setidaknya hingga saat tulisan ini dibuat. Kegiatan mata pencaharian di Rote Ndao yang cukup beragam, tidak didominasi oleh sektor yang terdampak signifikan oleh pandemi.

Walaupun pada saat ini kita bisa melihat terjadinya adaptasi yang terjadi karena pandemi, gambaran lebih jauh belum bisa didapatkan, terutama jika pandemi berkepanjangan dan pada akhirnya akan melebihi kapasitas adaptif yang dimiliki oleh masyarakat dan ekosistem. Keterbatasan untuk melakukan adaptasi menjadi faktor pembatas agar kelentingan atau *resilience* dapat dicapai. Tekanan yang terjadi berkepanjangan akan menuntut adaptasi terus-menerus dan pada akhirnya mendorong transformasi di tingkat sistem sosial dan ekologisnya. Karakteristik sosial dan ekologi akan berubah seiring dengan perubahan pada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Keterpurukan wisata berkepanjangan akan memaksa perubahan profesi dan sumber penghidupan dalam skala yang lebih luas. Banyak dari mereka, terutama pelaku wisata lokal akan kembali mengandalkan sumberdaya pesisir untuk pemenuhan pangan. Sumberdaya pesisir yang dianggap melimpah dan *open access* akan melonjak penggunaannya. Tanpa upaya untuk koordinasi dan pengelolaan, hal ini akan memicu habisnya sumberdaya pesisir, sebuah fenomena yang dikenal luas di kalangan ilmiah sebagai fenomena *tragedy of the commons* (Hardin, 1968). Dalam rentetan peristiwa yang rumit dan sulit untuk diprediksi, kolapsnya sistem ekologi akan memicu terjadinya perubahan sosial, dan bertransformasi menjadi sistem sosial-ekologi yang baru yang bisa saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan apa yang kita saksikan sekarang.

14.5 Catatan Penutup

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas pada peradaban manusia di berbagai tempat yang berbeda di Bumi ini, termasuk di pulau-pulau kecil di Indonesia. Daerah Labuan Bajo, dan Rote Ndao sebagai masyarakat pesisir dan destinasi wisata alam bahari juga menerima dampak. Variasi dampak akibat pandemi pada kedua tempat ini bisa kita saksikan. Perbedaan ini timbul tergantung pada karakteristik-karakteristik lokal tempat yang kita telah amati. Walaupun respons secara nasional-bahkan global telah ditentukan untuk menangani pandemi dan dampak pandemi ini, perbedaan karakteristik lokal menuntut pendekatan yang adaptif dan fleksibel sehingga masyarakat kepulauan dapat melalui kondisi ini. Saat ini, masyarakat kepulauan diuntungkan oleh adanya sumberdaya alam pesisir yang menopang kehidupan mereka semasa krisis. Namun demikian, krisis yang berkepanjangan bisa memicu eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali yang memiliki efek domino lanjutan.

Dalam lensa sistem sosial-ekologi, dampak yang disebabkan oleh COVID-19 dialami oleh masyarakat dan juga oleh alam, khususnya ekosistem pesisir di mana masyarakat kepulauan menjalani kehidupannya. Walaupun saat ini kita bisa melihat pola umum dampak pandemi kepada masyarakat pesisir dan kepulauan, sangat sulit untuk bisa memetakan, atau melakukan prediksi secara pasti rentetan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Interaksi dalam sistem manusia dan alam dalam konteks pesisir adalah kompleks-adaptif. Keterkaitan antara elemen-elemen sistem, eksternalitas, beragamnya pola interaksi dan umpan balik yang bersifat lintas skala menuntut tindakan mitigasi dan adaptasi yang lentur. Kondisi ini memerlukan koordinasi terus-menerus antar sektor untuk merespons perilaku sistem sosial-ekologi yang terus berubah.

Untuk menutup tulisan ini kita akan mengutip Heraclitus, seorang filsuf Yunani (535-475 SM) yang mencerminkan bahwa alam di mana manusia hidup ini adalah fenomena yang kompleks dan selalu berubah. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Kita harus menyadarinya, menyambutnya dan melakukan antisipasi - bukan menolaknya - agar pembangunan peradaban manusia dapat terus berlanjut dan lestari.

“Nothing endures but change. There is nothing permanent except change. All is flux, nothing stays still.” - Heraclitus.

Daftar Pustaka

- Biggs R, Vos AD, Preiser R, Clements H, Maciejewski K, Schlüter M (Eds.). 2021. *The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Ecological Systems (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003021339>
- Cleveland C, Constanza C, Eggertsson T, Fortmann L, Low B, McKean M, Ostrom E, Wilson J, Young O. 1996. A Framework for Modeling the Linkages between Ecosystems and Human Systems. *Beijer Discussion Paper Series*. 76: 17–25.
- Carmichael T, Hadzikadic M. 2019. The Fundamentals of Complex Adaptive Systems. *Complex Adaptive Systems*. pp.1-16. DOI: 10.1007/978-3-030-20309-2_1
- Folke C, Å Jansson, *et al.* 2011. Reconnecting to the biosphere. *Ambio*. 40:719-738. <http://dx.doi.org/10.1007/s13280-011-0184-y>
- Folke C, Biggs R, Norström AV, Reyers B, Rockström J. 2016. Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*. 21(3): 41. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-08748-210341> .
- Gunderson LH, Holling CS. (Ed). 2002. *Panarchy: understanding transformations in human and natural systems*. Island, Washington, D.C., USA.
- Haris T, Zuhdi S, Wulandari T. 1997. *Kerajaan Tradisional Di Indonesia: Bima. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. CV Putra Sejati Raya.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. *Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo*. Jakarta: Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Jakarta.
- KOMPAS. 2018. <https://inforial.tempo.co/info/1000761/membangun-konektivitas-10-kawasan-strategis-pariwisata-nasional>. Diakses pada 28 Juli 2021.

- Preiser R, Biggs R, Vos AD, Folke C. 2018. Social-ecological systems as complex adaptive systems: organizing principles for advancing research methods and approaches. *Ecology and Society*. 23(4): 46. <https://doi.org/10.5751/ES-10558-230446>
- [UNCTAD] United Nations Conference on Trade and Development. 2020. The coronavirus shock: a story of another global crisis foretold and what policymakers should be doing about it. Trade and development report update. UNCTAD/GDS/INF/20020/1.
- Wardrop Consulting. 2009. Monitoring Plan for the Montara Well Release Timor Sea. 28 Station Street, Drysdale, Victoria. Australia, 3222
- [WCMC] World Conservation Monitoring Centre. 1996. *Varanus komodoensis*. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T22884A9396736. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T22884A9396736.en>
- [UNESCO] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2005. World Heritage Information Kit. UNESCO World Heritage Centre.
- Zalasiewicz J, Williams M, Steffen W, Crutzen P. 2010. The New World of the Anthropocene. *Environmental Science & Technology*. 40(7). doi:10.1021/es903118j
- Zalasiewicz J, Williams M, Haywood A, Ellis M. 2011. The Anthropocene: a new epoch of geological time?. *Philosophical Transaction of Royal Society*. 369: 835–841. doi:10.1098/rsta.2010.0339



15. PANDEMI COVID-19: DARI ABNORMAL KE NEW NORMAL

Rilus A. Kinseng

Dept. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM),
Fakultas Ekologi Manusia, IPB University
Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences

Abstrak

Semenjak awal tahun 2020 yang lalu dunia, termasuk Indonesia, mengalami disrupsi yang amat dahsyat, akibat dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat luas dan mendasar. Tulisan singkat ini menguraikan apa saja bentuk-bentuk praktik sosial yang abnormal yang terjadi di masa pandemi COVID-19, mulai dari interaksi sosial sehari-hari hingga pola perubahan maupun kegiatan usaha. Dengan merujuk pada teori Struktural-fungsionalisme Parsons, dalam bagian refleksi teoritis, diuraikan bahwa pada saatnya nanti akan terbentuk kondisi normal yang baru atau *new normal*, di mana beberapa praktik sosial yang dianggap abnormal di masa pandemi ini akan mengalami proses institusionalisasi, sehingga tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang abnormal. Tulisan ini diakhiri dengan sebuah refleksi untuk kehidupan, yang antara lain menegaskan bahwa sistem ekonomi negeri ini perlu di-redesain, dengan menempatkan manusia sebagai pusat, bukan *profit*.

15.1 Pendahuluan

Ada yang berpandangan bahwa masa sekarang merupakan era disrupsi, karena masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat yang menyebabkan terjadinya disrupsi di berbagai aspek kehidupan. Sumber disrupsi tersebut utamanya adalah teknologi. Dikatakan kita telah memasuki

revolusi industri yang keempat atau industri 4.0 (Schwab, 2016). Semenjak awal tahun 2020 yang lalu dunia, termasuk Indonesia, mengalami disrupsi yang amat dahsyat, namun bukan karena perubahan teknologi, melainkan akibat dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat luas dan mendasar. Mengomentari dampak pandemi COVID-19 ini, seorang sosiolog, Hanafi (2020), mengatakan bahwa “*The current disruption will change, at an unprecedented rate, how we eat, work, shop, exercise, manage our health, socialize, and spend our free time*”. Pandemi COVID-19 telah “mengguncang dunia” atau “*shake the world*” (Zizek, 2020); pandemi COVID-19 ini menyebabkan dunia gonjang ganjing atau porak poranda. Itu sebabnya saya pernah mengatakan bahwa disrupsi akibat pandemi COVID-19 ini mungkin merupakan “*the greatest disruption in the 21st century*” (Kinseng, 2020).

Tulisan singkat ini merupakan sebuah refleksi sosiologis atas fenomena pandemi COVID-19. Di dalamnya diulas kondisi sosial atau praktik-praktik sosial yang “abnormal” di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya dilakukan refleksi teoritis dan prediksi praktik-praktik apa yang kemungkinan akan melembaga menjadi bagian kehidupan pada era *new normal* ketika pandemi COVID-19 berakhir nantinya.

15.2 Praktik Sosial Abnormal

Seperti diketahui, penularan virus yang dikenal sebagai COVID-19, terjadi melalui butiran air atau embun (*droplets*) yang dikeluarkan seseorang ketika batuk, bersin dan sebagainya (Heymann and Shindo, 2020 dan Shereen *et al.* 2020)). Itu sebabnya, penularan terjadi ketika orang berinteraksi secara langsung dalam jarak yang dekat, atau karena tersentuh butiran air/embun tersebut yang menempel di suatu objek tertentu seperti kursi, meja, pintu, ATM, uang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengurangi peluang penularan, maka diaturlah jarak orang dalam berinteraksi (*physical distancing*), yaitu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Selain mengatur jarak interaksi sosial, upaya memutus rantai penularan COVID-19 juga dilakukan dengan mengatur frekuensi interaksi sosial secara langsung, termasuk praktik bekerja di rumah atau WFH (*work from home*). Kedua aturan mengenai interaksi

sosial inilah sesungguhnya yang menjadi awal mula dari gonjang-ganjingnya masyarakat di hampir seluruh dunia selama pandemi COVID-19. Sementara itu, upaya lain untuk mengurangi peluang penularan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan segera mandi setiba di rumah, tidak mempunyai dampak mendasar seperti pengaturan interaksi sosial tersebut.

Masa pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi kehidupan yang “abnormal”, dalam arti tidak seperti kondisi kehidupan rutin dan ajeg sebelumnya. Abnormal di sini kira-kira serupa dengan yang Kuhn (1970) sebut sebagai anomali bahkan krisis dalam proses perubahan paradigma (*paradigm shift*) ilmu pengetahuan. Seperti apa praktik-praktik sosial yang abnormal di masa pandemi COVID-19 itu? Karena keterbatasan ruang, berikut dideskripsikan hanya beberapa praktik sosial abnormal tersebut¹.

A. Interaksi sosial sehari-hari

Bukan hanya jarak dan frekuensi interaksi sosial yang berubah, tapi cara berinteraksi pun mengalami perubahan. Jika semula orang biasa bersalaman bahkan cium pipi ketika bertemu atau berpisah, maka di era pandemi COVID-19 ini kebiasaan tersebut terpaksa dihentikan. Sebagai ganti, ada yang menempelkan tangan di dada sambil menunduk sedikit, ada yang saling menyentuh siku tangan. Ini bukan kebiasaan orang Indonesia tentunya.

B. Interaksi dengan orang lansia

Pandemi-COVID-19 membawa relasi yang abnormal antara keluarga dan sahabat dengan orang lanjut usia (lansia). Pada keadaan normal, umumnya relasi antara anak dengan orang tua (ayah, ibu, kakek, nenek) bersifat sangat akrab atau intim, termasuk secara fisik. Jika orang tua dan anak tidak tinggal satu rumah, maka kunjungan anak pada orang tua merupakan wujud penghormatan dan cinta kasih kepada orang tua. Namun, pandemi COVID-19 telah menjungkirbalikkan kebiasaan ini. Anak-anak justru dilarang berinteraksi dekat dengan orang tua, untuk menghindari penularan virus.

¹ Uraian perubahan sosial di Indonesia akibat COVID-19 yang lebih rinci dapat dibaca di Kinseng, 2021.

C. Interaksi dengan pasien COVID-19

Serupa dengan itu, dalam keadaan normal orang yang sakit (pasien) justru mendapat perhatian yang khusus dari keluarga dan sanak saudara. Tidak demikian dengan pasien COVID-19; yang terjadi sebaliknya. Pasien COVID-19 justru harus diisolasi dan tidak boleh dikunjungi oleh keluarga sekalipun.

Dalam kasus COVID-19 ini, pasien mendapat stigma negatif dari masyarakat. Stigma ini membuat mereka mengalami eksklusi sosial seperti penolakan dari warga setempat, baik di tingkat kompleks perumahan maupun desa. Di suatu daerah satu keluarga yang dalam status pengawasan (ODP) terpaksa mengungsi ke pinggir hutan karena ditolak oleh masyarakat dua desa ketika mereka kembali dari perantauan di kota. Mereka terpaksa tinggal di pondok yang amat sederhana yang terletak di pinggir sawah dan hutan, yang cukup jauh dari desa.

D. Interaksi dengan tenaga medis

Hampir sama dengan kasus pasien COVID-19, para tenaga medis seperti perawat dan dokter juga sempat mendapat stigma negatif. Mereka juga mengalami eksklusi sosial. Ada perawat yang ditolak bahkan diusir dari tempat kostnya. Lebih jauh, bahkan ada warga yang menolak mayat tenaga medis untuk dimakamkan di wilayah warga tersebut. Di suatu daerah, tenaga medis yang masuk ke kampung warga juga ditolak, bahkan ada yang mengusir mereka dengan menggunakan golok.

E. Interaksi seputar kematian

Praktik sosial yang abnormal terjadi juga di seputar peristiwa kematian. Biasanya, ketika ada anggota keluarga yang meninggal, maka semua keluarga bahkan kerabat dan teman almarhum dan keluarganya akan datang melayat untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun di saat pandemi COVID-19 ini, semua kebiasaan ini berubah. Jika yang meninggal itu terinfeksi COVID-19, maka mayatnya harus segera dimakamkan dan tidak diperbolehkan banyak orang ikut ke pemakaman. Padahal, dalam keadaan normal, bagi yang non-Muslim

terkadang mayat disemayamkan di rumah duka bisa hingga dua atau tiga hari sebelum dimakamkan. Selama itu, kerabat dan kenalan banyak yang datang melayat. Pemakaman juga dihadiri cukup banyak orang.

Fenomena lain adalah perebutan mayat antara pihak keluarga dengan pihak rumah sakit yang terjadi di beberapa rumah sakit, misalnya di Bekasi, Surabaya, dan di Makassar. Hal ini terjadi karena pihak keluarga menolak mayat itu dimakamkan dengan mengikuti protokol korban COVID-19, sehingga mereka mengambil mayat itu dengan paksa untuk dimakamkan sendiri. Penolakan ini disebabkan pihak keluarga berpendapat bahwa almarhum meninggal bukan karena COVID-19 seperti yang dikatakan pihak rumah sakit. Ada pula warga (di Mataram) yang memaksa mengambil pasien dalam pengawasan (PDP) dari rumah sakit.

Sebaliknya, ada juga peristiwa penolakan pemakaman korban COVID-19 oleh warga setempat, misalnya di Jawa Tengah dan di Kota Pare-pare. Sementara itu, di Minahasa Utara ada mayat pasien COVID-19 yang terpaksa dimakamkan oleh polisi karena ditelantarkan. Tampaknya fenomena ini terjadi karena warga khawatir akan terjadi penularan COVID-19 kepada warga setempat.

F. Interaksi belajar-mengajar

Salah satu dimensi kehidupan yang mengalami kondisi abnormal luar biasa adalah kegiatan belajar-mengajar, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Jika semula kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara tatap muka di ruang-ruang kelas, maka di era pandemi ini hampir semua kegiatan dilakukan secara *online*. Tidak terbayangkan sebelumnya kegiatan di perguruan tinggi seperti kuliah, seminar, kolokium, dan ujian dilakukan secara *online*. Ini benar-benar menyebabkan kehidupan akademis di kampus menjadi abnormal.

G. Kegiatan peribadahan

Peribadahan mengalami situasi yang sangat abnormal di masa pandemi ini. Ibadah yang rutin seperti Jumatatan bagi orang Muslim dan ibadah hari Minggu bagi orang Kristen dan Katolik berhenti semua. Ibadah hari Minggu terpaksa

dilakukan secara daring, seperti video maupun *live streaming*. Sholat Idul Fitri berjamaah bagi orang Muslim dan perayaan Paskah bagi orang Kristen dan Katolik terpaksa ditiadakan. Mudik di saat lebaran yang sudah jadi ritual setiap tahun juga dilarang.

H. Pekerjaan dan usaha

Pandemi COVID-19 membuat dunia kerja menjadi abnormal. Jika semula orang bekerja di kantor, maka saat pandemi COVID-19 ini banyak yang harus bekerja di rumah (WFH). Bukan hanya itu, banyak pula orang yang “dirumahkan” (artinya tidak bekerja namun tidak diberhentikan) bahkan tidak sedikit yang diberhentikan sama sekali (PHK). Akibatnya, ada yang terpaksa melakukan suatu pekerjaan yang baru, namun ada juga yang terpaksa menganggur. Dari segi perusahaan, karena pembelian atas produk atau jasa yang dihasilkan turun tajam, kegiatan perusahaan pun mengalami penurunan tajam bahkan tidak sedikit yang tutup sama sekali. Itulah sebabnya tidak sedikit perusahaan yang harus merumahkan hingga memberhentikan pekerjanya.

I. Pola hidup sehat

Pandemi COVID-19 memaksa orang untuk mengubah pola hidup terkait kesehatan. Yang paling menyolok tentunya adalah keharusan menggunakan masker jika bepergian ke luar rumah, apalagi ke tempat yang banyak orang, seperti pasar, kantor, kereta api, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang ditambah dengan penggunaan *face shield*. Selain itu adalah mencuci/membersihkan tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* ketika masuk atau keluar tempat tertentu seperti supermarket, mal, rumah sakit, kantor, maupun ketika pulang ke rumah. Juga anjuran untuk segera mengganti pakaian dan mandi ketika pulang ke rumah.

15.3 *The New Normal*: Tinjauan Teoritis

Berbagai praktik abnormal masa pandemi COVID-19 di atas pada dasarnya merupakan fenomena perubahan sosial budaya. Oleh sebab itu, dalam bagian ini saya hendak mengulas fenomena abnormal dan *new normal* ini dengan perspektif teori perubahan sosial. Dalam teori perubahan sosial

dikenal dua perspektif yang cukup dominan, yaitu perspektif materialistik dan idealistik (Lauer, 2001; Harper, 1989). Perspektif materialistik biasanya diasosiasikan dengan Karl Marx, sedangkan idealistik dengan Max Weber. Marx berpendapat bahwa sumber perubahan sosial itu adalah material dalam aspek ekonomi atau produksi, yaitu moda produksi (*mode of production*), khususnya teknologi (*material force of production*). Pernyataan Marx yang terkenal adalah: “*The mode of production of material life conditions the general character of the social, political and spiritual processes of life... With the change of the economic foundation the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed*” (Singer, 1980 hal 35). Selain itu, Marx juga mengatakan: “*The hand-mill gives you society with the feudal lord; the steam-mill, society with the industrial capitalist*” (Wallace and Wolf, 2006 hal 81). Sementara itu, Max Weber mengulas pentingnya peranan sistem nilai atau ide sebagai sumber perubahan sosial. Dalam karyanya “*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*” misalnya, Weber (1930/1992) menunjukkan bahwa etos kerja yang bersumber dari ajaran agama (Kalvinisme) merupakan sumber perubahan sosial yaitu lahirnya kapitalisme modern di Barat.

Dalam kasus pandemi COVID-19 ini, nampaknya kedua perspektif tersebut kurang mampu menjelaskan proses perubahan sosial yang terjadi. Sumber perubahan sosial di sini bukan moda produksi maupun konflik kelas seperti yang dikemukakan Marx, dan bukan juga dari ide-ide seperti yang dikemukakan oleh Weber. Sumber perubahan sosial budaya di sini adalah sebuah fenomena alam yaitu penyebaran virus (COVID-19). Penyebaran “makhluk” kecil² yang mematikan inilah yang menjadi akar perubahan sosial budaya yang sangat dahsyat, yang kita kenal sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Perubahan sosial budaya ini diawali dengan perubahan institusi sosial atau kelembagaan yang mengatur mengenai interaksi sosial. Seperti disinggung sebelumnya, untuk mencegah penularan COVID-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan (*rules*) mengenai interaksi sosial yang mencakup: larangan berinteraksi dalam jarak fisik yang dekat, larangan berkerumun, larangan berpergian dari satu kota/wilayah ke kota/wilayah lain termasuk mudik dan berwisata (berakibat larangan penerbangan dan

² Menurut ahlinya, virus ini tidak bisa sepenuhnya dikatakan makhluk hidup, karena dia hanya akan menjadi hidup ketika berada pada inang yang tepat.

angkutan umum lainnya antar kota/wilayah), larangan masuk ke tempat kerja (kantor, pabrik, dll), hingga larangan membuka mal, supermarket maupun toko, warung dll.

Surprisingly, teori perubahan sosial dari Talcott Parsons justru lebih cocok nampaknya untuk menjelaskan fenomena perubahan sosial sebagai akibat pandemi COVID-19 ini. Parsons membagi sumber perubahan sosial itu atas endogenous dan exogenous. Exogenous ini di antaranya adalah “*physical environment (including other organisms and societies)*” (Parsons, 1973). Kita melihat di sini bahwa Parsons bahkan menyebutkan secara eksplisit “*other organisms*” sebagai sumber perubahan sosial yang berasal “dari luar” sebuah sistem sosial. Tentu saja COVID-19 merupakan “*other organism*” yang berasal dari luar sistem sosial yang telah menyebabkan perubahan sosial di seluruh dunia saat ini.

Selanjutnya, seperti kita ketahui, fungsionalisme memandang masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Perubahan pada satu bagian akan menyebabkan ketidak seimbangan sistem tersebut (*disequilibrium*), yang pada akhirnya membawa perubahan pada bagian-bagian yang lain sehingga akan terjadi reorganisasi sistem tersebut secara keseluruhan yang menghasilkan suatu keseimbangan (*equilibrium*) yang baru. Nah, fenomena pandemi COVID-19 ini menunjukkan potret masyarakat seperti yang dikemukakan oleh teori fungsionalisme tersebut. Seperti disinggung di atas, akibat “organisme dari luar” (COVID-19), maka terjadilah perubahan berbagai bagian dari masyarakat sebagai sebuah sistem: bagian kesehatan, pekerjaan, usaha kecil, usaha besar, pendidikan, keluarga, transportasi, pariwisata, perhotelan, agama, politik, pernikahan, kematian, dan sebagainya.

Dengan merujuk pada teori fungsionalisme Parsonian, maka dapat diprediksi bahwa pada waktunya nanti akan terjadi keseimbangan atau *equilibrium* baru atau “*new normal*”. Pertanyaan yang menarik adalah, seperti apa kondisi *new normal* itu nanti? Apakah semua praktik sosial “abnormal” semasa pandemi COVID-19 seperti yang diuraikan di atas akan melembaga menjadi *new normal*? Perlu saya tegaskan bahwa yang saya maksud dengan *new normal* nanti adalah ketika COVID-19 sudah berhasil “dijinakkan” sehingga tidak

lagi mengancam kehidupan manusia secara masif seperti di era pandemi sekarang ini. Mungkin hal itu terjadi pada saat sebagian besar penduduk sudah divaksin dan juga ditemukannya obat anti virus COVID-19.

Saya memprediksi tidak semua praktik sosial abnormal ini akan menjadi praktik yang melembaga di era *new normal* nanti. Yang hampir pasti tidak akan bertahan menjadi praktik sosial yang mapan nantinya adalah menjaga jarak dalam berinteraksi sehari-hari. Dugaan saya, dalam berinteraksi sehari-hari seperti di pasar, di mal, di kampus, di kantor, di pabrik, di tempat ibadah, di jalan, di tempat wisata, dan sebagainya, orang akan berinteraksi secara “normal” seperti di era sebelum COVID-19, dengan jarak fisik yang dekat. Kebiasaan bersalaman bahkan cium pipi juga akan kembali, ketika kondisi dianggap benar-benar sudah aman dari COVID-19. Dengan begitu, maka ritual-ritual ibadah, kematian, perkawinan, dan sebagainya akan kembali normal seperti di era sebelum COVID-19. Kegiatan belajar mengajar juga akan didominasi oleh bentuk tatap muka kembali, walau secara daring juga akan masih dilakukan. Begitu juga dengan rapat-rapat dan seminar, mungkin 50%:50% antara tatap muka dan *online*. Sistem jual beli melalui *online* akan tetap marak, mungkin sekitar 65%:35% perbandingan antara yang *offline* dengan *online* (untuk seluruh penduduk Indonesia). Penggunaan masker ketika berada di luar rumah juga tidak akan masif lagi (sedangkan di masa pandemi COVID-19 saja banyak yang tidak menggunakan masker). Mungkin sering cuci tangan akan bertahan menjadi kebiasaan baru di era *new normal* nanti.

15.4 Refleksi: Perlu Redesain Sistem Ekonomi³

Thomas Kuhn mengatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan, munculnya krisis paradigma lama mengindikasikan perlunya perubahan paradigma. Dia bahkan mengatakan “*Let us then assume that crises are necessary precondition for the emergence of the novel theories...*” (Kuhn, 1970: 77). Sejalan dengan Kuhn, hemat saya krisis akibat pandemi COVID-19 juga menunjukkan perlunya

³ Sebagian dari uraian tentang perlunya redesign dimensi ekonomi ini telah dimuat di artikel penulis yang berjudul “COVID-19 dan Ambruknya Neoliberalisme” yang dimuat di Kompas Online, Rabu 15 Desember 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/13/COVID-19-dan-ambruknya-neoliberalisme>

perubahan paradigma kehidupan umat manusia di muka bumi ini, tak terkecuali di Indonesia. Banyak dimensi kehidupan umat manusia ini yang perlu di-redesain atau diformat ulang.

Salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting untuk di-redesain adalah sistem ekonomi. Menurut Chang, sejak tahun 1980an, dunia dikuasai oleh “*free-market ideology*” atau “*free-market capitalism*” (Chang, 2010). Ideologi pasar bebas ini kita kenal pula sebagai Neoliberalism atau Neolib. Pada intinya ideology ini mengajarkan bahwa pasar bebas itu merupakan sistem paling efisien dan adil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Sebaliknya, intervensi Pemerintah dianggap akan mengganggu mekanisme pasar dan menyebabkan kerugian. Menurut aliran ini “*Government intervention is often design to limit the very scope of wealth creation for misguided egalitarian reasons*” (Chang, 2010: xiv). Oleh sebab itu, para penganut aliran ini umumnya anti intervensi Pemerintah.

Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa banyak hal penting yang amat mendasar bagi kehidupan ini yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar. Soal vaksinasi misalnya, jika diserahkan kepada mekanisme pasar pasti akan menyebabkan gejala sosial yang luar biasa. Bisa dibayangkan jika vaksinasi diserahkan pada mekanisme pasar, biaya mungkin akan melambung, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan (*supply* dan *demand*) sehingga hanya kelas ataslah yang akan mampu mendapat vaksinasi. Demikian juga dengan akses pada fasilitas kesehatan, baik tempat (rumah sakit, hotel, dsb) maupun obat-obatan dan tenaga medis. Dalam konteks ini, Zizek bahkan mengatakan bahwa “*If state simply isolate, wars will explode*” (Zizek, 2020:104). Untungnya selama pandemi COVID-19 ini Pemerintah melakukan berbagai intervensi seperti menyediakan vaksin dengan gratis, menyediakan tempat isolasi dan perawatan dengan gratis (seperti Wisma Atlet, Apartemen, dsb), juga makanan dan obat-obatan gratis, bantuan sosial-ekonomi bagi banyak pihak yang terdampak COVID-19. Kalau tidak, memang bisa terjadi kerusuhan atau “ledakan sosial” seperti yang dikatakan oleh Zizek tadi. Bayangkan juga jika tidak ada intervensi Pemerintah berupa aturan-aturan seperti harus pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, pembatasan jam buka mal dan pasar, *lockdown*, dan seterusnya, apa yang akan

terjadi? Tentu lebih banyak lagi korban jiwa yang meninggal akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi, pandemi COVID-19 ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa aliran “*free-market capitalism*” atau Neo-liberalisme yang menghendaki peranan Pemerintah seminimal mungkin, jelas tidak dapat dipertahankan.

Beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19, yang menunjukkan “*the dark side of the human beings*” semakin memperkuat argumen ini. Sebagai contoh, di awal-awal pandemi COVID-19 dulu kita ingat ada “oknum-oknum” pedagang yang sengaja menimbun barang-barang yang sedang sangat diperlukan seperti masker dan lain lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang tinggi. Belakangan kita juga sempat dihebohkan oleh perilaku “oknum” pengurus lahan pemakaman yang memasang tarif tinggi bagi orang-orang tertentu. Ada lagi informasi terjadinya semacam “pemerasan” oleh “oknum” tertentu di bandara bagi mereka yang baru datang dari luar negeri. Dengan alasan hasil testnya positif, mereka diarahkan untuk isolasi mandiri di hotel tertentu dengan tarif yang sudah ditetapkan, dan cukup mahal. Mereka tidak bisa melakukan verifikasi apakah hasil test tersebut memang betul positif, walau mereka meragukannya, mengingat saat berangkat dari luar negeri mereka dinyatakan negatif. Setelah satu dua hari kemudian mereka ditest lagi, hasilnya pun negatif. Namun demikian, biaya yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.

Kita melihat bahwa Negara memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan juga dampaknya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di Negara-negara kampiun kapitalisme seperti Amerika misalnya. Melihat kegagalan pasar (kapitalisme) mengatasi pandemi COVID-19 ini, Zizek terang-terangan menawarkan komunisme sebagai alternatif terbaik. Jika tidak, yang terjadi adalah barbarisme baru (Zizek, 2020). Dan menurut Zizek, praktik komunisme ini sudah mulai berlangsung di Amerika pada saat pandemi COVID-19 ini. “*This is not a utopian Communist vision, it is a Communism imposed by the necessities of bare survival*”, kata Zizek (2020:92). Walau tak sepatutnya dengan tawaran Zizek, namun sistem ekonomi “*free-market capitalism*” atau sistem neoliberalism jelas perlu diakhiri.

Namun demikian, tentu saja pasar tetap mendapat tempat. Tidak semua hal pula dapat diselesaikan oleh Pemerintah. Pasar dan mekanismenya memegang peran yang sangat penting juga bagi kehidupan manusia masa kini. Pada kenyataannya, beragam kebutuhan dasar manusia di masa pandemi COVID-19 ini tetaplah dipenuhi oleh pasar. Tetapi di sini pun kadangkala tetap diperlukan intervensi dari Pemerintah. Pasar tidak bisa dibiarkan bekerja bebas sebebaskan-bebasnya tanpa ada kontrol atau kendali dari Pemerintah. Tanpa ada kontrol dari Pemerintah, yang terjadi adalah *survival of the fittest*. Tanpa ada kontrol dari Pemerintah, “*the dark side of the human beings*” tadi akan mendapat “tanah” yang subur untuk dipraktikkan serta bertumbuh dan berkembang biak.

Sebenarnya di sinilah letak persoalan mendasar dari kapitalisme pasar bebas itu. Sebagai sebuah struktur sosial, kapitalisme bukan hanya *enabling* tetapi bahkan mendorong (*push*) setiap individu manusia untuk merealisasikan sifat-sifat dasar tertentu manusia, seperti kebebasan individual yang tanpa batas, pementingan diri sendiri (*selfish*), serakah, keinginan untuk dikagumi dan dipuja oleh sesama, keinginan untuk dihormati oleh sesama, keinginan untuk menjadi orang yang paling top dalam beragam aspek kehidupan (ketampanan, kecantikan, seni, olah raga, ekonomi/kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan/sains, dan seterusnya), keinginan untuk menikmati kenyamanan hidup secara material yang tak kenal batas. Jika sifat-sifat dasar manusia seperti ini kita sebut sifat-sifat “kanan”, maka kapitalisme pasar bebas merupakan sebuah struktur sosial yang mendorong setiap individu manusia merealisasikan sifat-sifat kanan ini hingga ujung yang paling kanan; bahkan lebih dari itu, ia mendorong manusia untuk terus menggeser ujung kanan tersebut semakin jauh dan semakin jauh lagi ke kanan. Tentu saja perilaku manusia dalam rangka mewujudkan sifat-sifat hedonistik, materialistik, serta utilitarian itu menelan korban yang tak sedikit, baik secara ekologis maupun secara kemanusiaan.

Sebaliknya yang terjadi di Negara-negara yang kita kenal secara historis sebagai Negara Komunis seperti Uni Soviet (dulu), Jerman Timur (dulu), Rusia, China, Korea Utara, Kuba, dan beberapa Negara Eropa Timur. Di Negara-negara komunis ini, Pemerintahlah yang dominan mengatur segala-galanya.

Pasar tidak bebas, tetapi tunduk pada Pemerintah. Dalam sistem komunisme ini, yang diutamakan adalah sifat-sifat solidaritas sosial, mengutamakan kepentingan bersama, kerelaan untuk berkorban, tidak menonjolkan diri. Dan jika sifat-sifat ini kita sebut “kiri”, maka dalam sistem komunisme sifat-sifat kiri setiap individu didorong ke ujung yang paling kiri oleh Pemerintah. Bagi rakyat, kepemilikan dan kebebasan pribadi amat sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan “tidak ada”. Itu sebabnya ketika Jerman Timur masih ada dulu (sebelum unifikasi dengan Jerman Barat), sering kali warganya berupaya melarikan diri ke Jerman Barat walau harus menghadapi risiko kematian. Demikian juga dengan warga Korea Utara. Mereka melarikan diri karena tidak tahan atas kuatnya kekangan dan tekanan Pemerintah terhadap setiap individu warganya. Mereka ingin menikmati hidup yang lebih bebas.

Haruskah kita memilih di antara dua kutub ekstrim kiri atau ekstrim kanan? Tentu saja tidak! Bukankah sifat-sifat “kiri” dan “kanan” itu ada pada setiap individu manusia? Dari segi waktu, perilaku setiap individu manusia juga sering kali tidak linear, melainkan zigzag: terkadang sifat-sifat “kiri” nya lebih menonjol, tapi terkadang sifat-sifat “kanan” nya yang menonjol. Itu sebabnya kita melihat ada orang yang tadinya dikenal sebagai penjahat, namun kemudian berubah menjadi pewarta agama. Atau sebaliknya, ada pula tokoh masyarakat yang dikenal sebagai “orang baik”, namun kemudian melakukan kejahatan sehingga harus meringkuk dalam penjara. Jika demikian, mengapa tidak diciptakan sebuah sistem atau struktur sosial yang mengkombinasi kedua sifat ini secara seimbang? Secara praktis, itu berarti memberi ruang bagi kebebasan individu dan pasar, tetapi juga sekaligus memberi ruang bagi Pemerintah untuk mengatur kebebasan individu dan pasar. Hemat saya, pada dasarnya UUD 1945 dan Pancasila merupakan suatu ideologi yang menganut aliran “jalan tengah” ini. Seperti kita ketahui bersama, pasal 33 ayat 3 UUD 45 mengatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya, sila ke dua dari Pancasila adalah “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jadi, UUD 45 dan Pancasila ini jelas sekali menekankan pentingnya peranan Pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk pasar. Seperti dikemukakan sebelumnya, pasar

yang bebas mengatur dirinya sendiri atau “*free-market capitalism*” sudah barang tentu akan menghasilkan ketidakadilan sosial ekonomi: yang kuat akan menang, yang lemah jadi korban. Pandemi COVID-19 menyodorkan bukti empiris tentang pentingnya peranan pasar dan Negara ini untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik (*a better life*).

Pandemi COVID-19 juga menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tak perlu dibicarakan karena sudah merupakan keniscayaan, yakni betapa pentingnya peranan masyarakat itu sendiri. Namun, walaupun ini sesungguhnya merupakan suatu keniscayaan, di sini tetap perlu dibahas karena dalam realitas keseharian banyak pihak, utamanya penguasa dan pengusaha, sering kali lupa akan pentingnya masyarakat ini. Selama pandemi COVID-19 ini kita menyaksikan begitu banyak inisiatif yang muncul dari masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Ada yang berinisiatif melakukan pengawasan yang ketat di komunitas, seperti di komplek perumahan, RT, atau desa, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Di Bali, komunitas Desa Adat menggunakan kearifan lokal yang disebut “*pararem*” untuk mencegah penyebaran COVID-19, sementara di Jawa Tengah komunitas melaksanakan sistem “*jogo tonggo*” atau saling mengawasi antar tetangga, baik untuk mencegah penyebaran COVID-19 maupun untuk mengatasi dampaknya. Aksi-aksi solidaritas untuk membantu warga yang terpapar COVID-19 seperti menyediakan kebutuhan makanan dan obat-obatan serta vitamin terjadi di mana-mana, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Demikian juga dengan aksi-aksi menggalang bantuan penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan. Artis kondang almarhum Didi Kempot sempat mengadakan konser amal dan berhasil mengumpulkan miliaran rupiah yang kemudian disalurkan sebagai bantuan untuk penanganan COVID-19. Pendek kata, pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia (masih) memiliki stok sosial kapital yang sangat besar, dan berperan sangat penting pula dalam kegiatan penanggulangan COVID-19. Memperhatikan pentingnya peranan Negara, pasar, dan masyarakat bagi keberlanjutan kehidupan umat manusia dan ekologi, dan dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh makhluk di dunia ini, maka sistem sosial-ekonomi yang sehat haruslah menempatkan ketiganya pada posisi yang setara.

Dalam konteks peranan masyarakat ini, pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa penting dan sentralnya posisi dan peran manusia dan interaksi sosial tatap muka langsung dalam sistem ekonomi dunia hingga saat ini. Anjloknya perekonomian di hampir semua Negara di dunia, termasuk Indonesia, di masa pandemi COVID-19 ini bukan karena terjadi resesi ekonomi atau krisis moneter seperti tahun 1998, bukan juga karena peperangan maupun masalah teknologi. Juga bukan karena kurang kapital finansial. Seperti telah saya kemukakan pada tulisan yang lain (Kinseng 2021), rontoknya ekonomi dunia di masa pandemi COVID-19 ini disebabkan terjadinya dekonstruksi relasi sosial tatap muka langsung. Kebijakan “jaga jarak” atau *physical distancing*, larangan berkerumun, larangan mobilitas penduduk, singkat kata persoalan interaksi sosial, inilah yang menyebabkan ambruknya ekonomi dunia. Jadi, nampaknya perhitungan pendapatan dan keuntungan sebuah usaha/bisnis mesti memasukkan unsur “stabilitas sosial” sebagai salah satu faktor penentu. Tentu saja disrupsi sosial yang juga dapat merontokkan ekonomi bukan hanya bersumber dari pandemi seperti COVID-19 ini, tapi juga dari konflik sosial (khususnya yang masif dan berkepanjangan), bencana alam, dan sebagainya.

Sentralitas posisi dan peran manusia dalam sistem ekonomi ini perlu mendapat perhatian yang serius, karena dalam sistem ekonomi kapitalis-neoliberal atau era yang disebut Patel dan Moore sebagai *Capitalocene* ini (Patel and More, 2017), peran manusia acapkali diabaikan. Kapital finansial (dan teknologi)-lah yang ditempatkan pada posisi dan peran yang sentral utamanya oleh para kapitalis. Manusia sering diabaikan karena lebih mengutamakan profit di atas segalanya. Itu sebabnya kita masih sering mendengar adanya praktik-praktik eksploitasi dan dehumanisasi para tenaga kerja (manusia!) di berbagai aktivitas ekonomi. Pada tahun 2015 yang lalu bahkan kita mendengar adanya praktik “perbudakan” para pekerja (ABK) di perusahaan perikanan tangkap di Benjina, Maluku.

Pandemi COVID-19 ini merupakan “*a wake-up call*” untuk menempatkan manusia sebagai pusat dalam sistem ekonomi dan sosial. Sebab itu, sistem ekonomi negeri ini perlu di-redesain. Dalam sistem ekonomi yang baru itu, harus dipastikan kesenjangan ekonomi yang sekecil mungkin. Kita mestinya

membangun sistem ekonomi yang sungguh-sungguh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sistem ekonomi kapitalis pasar bebas atau neoliberal. Ingatlah: tanpa keadilan ekonomi, tidak ada keadilan sosial; tanpa keadilan sosial, tidak ada kedamaian yang sejati; dan tanpa kedamaian yang sejati, masyarakat itu rapuh. Masyarakat rapuh di sini khususnya dalam arti rentan terhadap kerusakan dan konflik sosial (*social unrest*) yang dapat menyebabkan disintegrasi hingga kehancuran bangsa. Jangan sampai hal itu terjadi di negeri tercinta ini.

Daftar Pustaka

- Chang, Ha-Joon. 2010. *23 Things they don't tell you about capitalism*. London: Penguin Books.
- Hanafi S. 2020. Post-COVID-19 Sociology. ISA Digital Platform, April 2020.
- Harper CI. 1989. *Exploring Social Change*. New Jersey, USA: Prentice Hall.
- Heymann DL, Shindo N. 2020. COVID-19: what is next for public health? www.thelancet.com Vol 395 February 22, 2020.
- Kinseng RA. 2020. Pasca pandemi COVID-19: The Old and the New Normal. Bahan presentasi pada diskusi Ekbudbang, Departemen SKPM Fema, IPB University, Senin 11 Mei 2020.
- Kinseng RA. 2021. COVID-19 and Social Change in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. 5(2).
- Kuhn TS. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition*. Chicago, USA: The University of Chicago Press.
- Lauer RH. 2001. *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (terjemahan, cetakan ketiga). Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Patel R, Moore JW. 2017. *A history of the world in seven cheap things*. California, USA: University of California Press.
- Parsons T. 1973. A Functional Theory of Change. In Etzioni, A and Etzioni-Halevy, E. (eds), 1973. *Social Change. Sources, Patterns, and Consequences*. Second Edition. New York, USA: Basic Book Inc. Publishers.

- Schwab K. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
- Shereen MA, Khan S, Kazmi A, Bashir N, Siddique R. 2020. COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. *Journal of Advance Research*. 24: 91-98.
- Singer P. 1989. *MARX*. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Wallace RA, Wolf A. 2006. *Contemporary Sociological Theory. Expanding the Classical Tradition. Sixth Edition*. New Jersey, USA: Pearson, Prentice Hall.
- Weber M. 1930/1992. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge, London and New York.
- Zizek S. 2020. *Pandemi! Covid-19 sakes the world*. London: OR Books



PROFIL PENULIS DAN DEWAN PENYUNTING

Yulia Sugandi, PhD



Yulia Sugandi memiliki gelar PhD di bidang Antropologi dan Sosiologi dari Institut Etnologi, Universitas Muenster Jerman serta MSc di bidang Sosiologi & Konseling Antarbudaya dari University of Eastern Finland. Sebagai praktisi Transdisipliner yang percaya pada kekuatan empati, Yulia merangkul integrasi pengetahuan di luar batas disiplin, sektoral, & sosial. Dia telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung perubahan sosial organik & transformasi sistem. Saat ini, Yulia berprofesi sebagai Head of Solutions Mapping di UNDP Accelerator Labs yang merupakan bagian dari jaringan global dari 91 UNDP Accelerator Labs melayani 115 negara dalam merefleksikan pembangunan berkelanjutan serta menguji cara kerja baru untuk mengatasi tantangan sosial & lingkungan di abad ke-21.

Prof Dr Ir Suria Tarigan, MSc



Suria Tarigan memiliki gelar PhD di bidang pertanian dari Bonn University, Jerman. Beliau adalah guru besar di Departemen Ilmu Tanah dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan, IPB University. Beliau memiliki 15 tahun pengalaman penelitian di bidang jasa ekosistem lanskap, 10 tahun penelitian terkait aspek lingkungan kelapa sawit, 3 tahun sebagai Deputy Direktur Manajemen Pengetahuan Hijau di pertanian berkelanjutan, pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan & lahan gambut. Beliau sudah mempublikasikan ratusan publikasi ilmiah dengan Scopus Index 7.

Prof Dr Damayanti Buchori, MSc



Prof Damayanti Buchori merupakan pakar entomologi di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB University. Saat ini ia juga menjabat sebagai Kepala Center for Transdisciplinary and Sustainability Science (CTSS) IPB University. Damayanti saat ini juga menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Ia juga aktif melakukan penelitian yang berkaitan dengan ekologi dan lanskap.

Ir Eka Satya Putra



Saat ini Eka merupakan sosok yang aktif sebagai Fellows CTSS IPB University. Sebelumnya, Eka pernah menggeluti dunia industri manufaktur dan elektronik selama lebih dari 15 tahun. Meski pernah menggeluti dunia otomotif dan metalurgi, Eka juga berusaha menggeluti ilmu transdisiplin. Melalui pendekatan transdisiplin ini, ia berusaha memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat berdasarkan pendekatan transdisiplin.

David Ardhan



David Ardhan adalah peneliti, aktivis dan konsultan yang memiliki pengalaman lapangan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Latar belakang pendidikan adalah S1 Teknologi Pangan dan S2 Sosiologi Perdesaan IPB, keduanya diperoleh dari IPB University. Ia memulai karir sebagai fasilitator sekolah lapang petani di Yayasan Nastari, lalu menjadi aktivis untuk advokasi kebijakan pangan di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Dalam bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan, ia memiliki pengalaman sebagai konsultan untuk beberapa lembaga seperti ICSD, Yayasan Kehati, TNC, WWF, Penabulu, terakhir bekerja sebagai *Deputy*

Project Director KELOLA Sendang, proyek lanskap berkelanjutan dari ZSL Indonesia. Selain fellow CTSS IPB University, saat ini ia juga merupakan Dewan Pakar KRKP dan sedang menempuh program S-3 Sosiologi Pedesaan di IPB University.

Prof Dr Ir Keppi Sukesi



Keppi Sukesi merupakan dosen dari Universitas Brawijaya. Ia memiliki bidang keahlian pada Sosiologi Pedesaan. Ia memiliki ketertarikan terhadap isu-isu sosial pedesaan sekaligus isu perempuan dan migran. Penelitian dan proyek yang ia lakukan banyak yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan desa dan perempuan.

Dr Tyas Retno Wulan, MSi



Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si dilahirkan di Solo Jawa Tengah pada tanggal 3 September 1971. Sejak tahun 1995 menjadi Dosen Jurusan Sosiologi FISIP UNSOED. Menjadi Ketua Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) LPPM Unsoed pada tahun 2010–2017 dan sejak tahun 2018-sekarang menjadi Ketua Jurusan Sosiologi Fisip Unsoed.

Buku terbaru yang dihasilkan antara lain: *Stay Behind Children in Myanmar, The Philipine and Indonesia* (HRWG, 2020); *Pengetahuan dan Kekuasaan: Penguatan Remiten Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan* (Rajawali Press 2019). Pernah meraih penghargaan sebagai Dosen Berprestasi I Unsoed 2014, Finalis Dosen Berprestasi Nasional 2014 ; Unsoed Award bidang Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2018; Presenter terbaik hasil Penelitian Kemenristekdikti bidang Sosial Humaniora tahun 2019.

Prof Syarif Hidayat, PhD



Syarif Hidayat adalah peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Di samping menjadi peneliti, Syarif Hidayat juga aktif di beberapa lembaga penelitian dalam dan luar negeri, antara lain: *Senior Researcher on Decentralisation* pada Japan International Cooperation Agency (JICA) (2002–2004); *Visiting Research Fellow* pada Royal Institute of Linguistics and Anthropology (KITLV), Leiden (2004–2006); Anggota *Advisory Board* pada Lembaga Penelitian SMERU (2004 s/d sekarang); Anggota Tim Ahli Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada United Nations Development Programme (UNDP) (2007–2017); Fellow of Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS); dan sejak tahun 2021 sebagai Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Syarif Hidayat, juga aktif mengajar di beberapa universitas, antara lain, sebagai dosen pada Sekolah Pasca Sarja Universitas Nasional.

Dr Harianto



Harianto dilahirkan di Singaraja–Bali dan menyelesaikan pendidikan S3 di La Trobe University – Melbourne/ Australia di bidang Agricultural and Resource Economics. Harianto saat ini aktif menjadi staf pengajar di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen – IPB University. Harianto adalah juga Fellow CTSS, dan sebelumnya pernah menjadi Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) - IPB University.

Dr Djuara Lubis



Dr. Djuara Lubis lahir di Dolok Merawan, Sumatera Utara, pada tanggal 15 Maret 1960. Saat ini menjadi dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Memperoleh gelar Doktor dalam Komunikasi Pembangunan, University of the Philippines Los Banos pada tahun 2000. Pernah menjadi Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat (2003 – 2007) dan Program Studi Komunikasi Pembangunan (2007–2017) di Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Pernah pula memimpin GreenTV IPB (2008 – 2010).

Dr Laksmi Savitri, MSi



Laksmi adalah peneliti di Research Center of Democratic Economy, Universitas Gadjah Mada. Ia juga pernah menjadi pengajar di Departemen Anthropologi UGM. Sebelumnya, ia juga sempat menjadi pengajar kebijakan agraria di Sekolah Pascasarjana IPB University. Sebagai akademisi, Laksmi meraih gelar PhD di University of Kassel Germany pada tahun 2007. Ia juga telah mengikuti program Postdoctoral di University of Amsterdam tahun 2011–2015.

Dr Teuku Fajar Shadiq, MM



Dr. Teuku Fajar Shadiq adalah Dosen serta Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf dan Fellow CTSS (Centre Transdisciplinary and Sustainability Sciences)-IPB yang juga merupakan praktisi pada program pemberdayaan masyarakat yang di inisiasi Pemerintah Indonesia melalui lintas Kementerian/Lembaga pada sub-sektor pertanian dan maritim serta potensi wilayah lainnya meliputi lima provinsi dan dua puluh lima Kabupaten/Kota pada wilayah Timur Indonesia yang terklasifikasi sebagai wilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) pada kurun waktu tujuh tahun terakhir ini. Bekal pendidikan

program Doktoral dengan konsentrasi Islamic, Economic & Finance di Universitas Trisakti Jakarta mendorong untuk tergabung secara aktif sejak tahun 2016 dalam upaya pengembangan Ekonomi Islam di organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) melalui kompartemen pengembangan Agribisnis, Kemaritiman, dan Pedesaan.

Ruth Indah Rahayu



Ruth Indah Rahayu. Kandidat doktor program studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Pegiat di Masyarakat Filsafat Indonesia (MFI), Ketua Bidang Pendidikan di IndoProgress Institute for Social Research and Education (IISRE) dan peneliti lepas utk riset sosial dan feminisme.

Akbar A Digdo



Akbar A Digdo, memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang Sosio-Ekologi, khususnya ekosistem lamun, pesisir dan pulau kecil. Akbar mendalami pengelolaan sumberdaya alam dengan ketertarikan khusus di kepulauan di wilayah Wallacea. Anggota Komisi di IUCN (International Union on Conservation of Nature) pada Species Specialist Group Sirenia yang menangani dugong *Dugong dugon*; Akbar juga berperan dalam dunia sains keberlanjutan sebagai Spesialis di Pusat Ilmu Transdisiplin dan Berkelanjutan (CTSS) - IPB University, Indonesia dan sebagai anggota tim internasional dalam kajian keberlanjutan di Maastricht School of Management, Belanda. Dalam jaringan masyarakat sipil Akbar juga aktif dalam pergerakan CSO sebagai Ketua-CEO YAPEKA. Ia juga penyelam SCUBA bersertifikat SSI dengan lebih dari 500 penyelaman yang tercatat; yang juga menggeluti fotografi alam bebas dan bawah air.

Prof Dr Rilus A Kinseng



Rilus A. Kinseng adalah guru besar Sosiologi Pedesaan di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Selain itu, dia adalah Ketua Divisi Knowledge Production di CTSS, LPPM, IPB. Rilus Kinseng menyelesaikan studi S-1 di bidang Penyuluhan Pertanian, Sosek Fakultas Pertanian IPB, S-2 Sosiologi di University of Guelph, Kanada, dan S-3 Sosiologi di Universitas Indonesia. Dia mengasuh mata kuliah antara lain Perubahan Sosial (S-1) dan Teori-teori Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat (S-2 dan S-3). Minat penelitiannya mencakup antara lain masalah konflik sosial di pedesaan, khususnya komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, perubahan sosial, pariwisata, sawit, dan kemiskinan.

Dr Ir Soeryo Adiwibowo



Soeryo merupakan Associate Professor of Political Ecology di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Penelitiannya banyak yang berkaitan dengan human ecology, political ecology dan environmental management. Selama menjadi dosen di IPB University, sederet prestasi dan penghargaan pun ia raih diantaranya mengembangkan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB hingga mendirikan dan mengembangkan Bagian Kependudukan, Agraria dan Ekologi Politik.

